



LAPORAN TAHUNAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

| **2015**





KATA PENGANTAR



Pada kesempatan pertama kita haturkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Tahunan Kementerian Perhubungan Tahun 2015.

Laporan tahunan ini mencerminkan kegiatan Kementerian Perhubungan selama tahun 2015 yang dilaporkan dari kegiatan utama subsektor Perhubungan Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian, dan kegiatan penunjang dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP), dan Badan Penelitian dan Pengembangan.

Laporan ini disusun sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban dan sekaligus sebagai salah satu alat evaluasi dan refleksi dalam penyempurnaan rencana capaian kinerja pada tahun yang akan datang, serta dapat digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan tugas Kementerian Perhubungan selama periode bulan Januari sampai dengan Desember 2015.

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah terhadap masyarakat, informasi – informasi yang diberikan dalam laporan tahunan ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai lingkup kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan, sehingga dapat bermanfaat bagi publik dan khalayak yang berkepentingan di bidang transportasi.

Saya, selaku Menteri Perhubungan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan tahunan ini. Semoga dengan diterbitkannya buku laporan tahunan ini, dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya bagi para penyedia dan pengguna jasa transportasi. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua dalam menjalankan tugas untuk kemajuan transportasi dan kejayaan bangsa dan negara Indonesia.

MENTERI PERHUBUNGAN

IGNASIUS JONAN

PROFIL PIMPINAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



Ignasius Jonan

Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Kabinet Kerja Joko Widodo
Periode Oktober 2014 – Sekarang
Lahir di Singapura, 21 Juni 1963

1. Pengalaman

- a. Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero)(Februari 2009 – Oktober 2014) (5 tahun 9 bulan);
- b. Direktur Utama Investasi Perbankan Citigroup (tahun 2006 – 2008) (2 tahun)
- c. Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)(2001 - 2006) (5 tahun);
- d. Direktur *Private Equity Citibank/ Citigroup* (1999 - 2001) (2 tahun).

2. Gelar Kehormatan dan Penghargaan

- a. *Chevalier du Legion d'Honneur* dari Presiden Perancis, 2016;
- b. *The Most Prominent Minister* versi *i-News*, 2015;
- c. Anggota Kehormatan Resimen Artileri Korps Marinir, 2015;
- d. *Marketer of the Year* dari Asosiasi Pemasaran Indonesia, 2014;
- e. Anggota Kehormatan dari Unit Kapal Selam Angkatan Laut Indonesia, 2014;
- f. Delapan *CEO BUMN Terbaik* versi SindoTV, 2014;
- g. *CEO Dengan Kinerja Terbaik* oleh Asosiasi Pengusaha Asia Pasifik, 2014;
- h. *CEO Terbaik* versi Koran Harian Bisnis Indonesia, 2014;
- i. Tokoh Paling Fenomenal versi RCTI, 2014;
- j. *CEO Terbaik BUMN*, 2013;
- k. *Accountant of the Year* dari Asosiasi Akuntan Indonesia, 2013;
- l. Anggota Kehormatan Resimen Kavaleri Korps Marinir Indonesia, 2013;
- m. *The Golden Action Award* versi Rakyat Merdeka Post, 2013 (dipilih dari 330 tokoh yang dianggap memberikan kontribusi positif di masyarakat);
- n. *CEO Paling Inovatif* versi Majalah Gatra, 2013.
- o. *CEO Pilihan* versi Majalah Swa, 2013.
- p. Salah satu *CEO BUMN Terbaik* di Indonesia, 2011 dan 2012;
- q. Merupakan salah satu dari 6 (enam) *CEO Terbaik* versi Majalah Tempo, 2012;
- r. Alumnus Universitas Airlangga yang paling menonjol di tahun 2012;

- s. *Marketer of the Year* di bidang transportasi versi Asosiasi Marketing Indonesia, 2012 dan 2013;
- t. *CEO BUMN Terbaik* versi Kementerian BUMN, 2011 dan 2012
- u. Merupakan salah satu dari enam *CEO Paling Favorit* versi Majalah Tempo, 2012;
- v. PT Kereta Api Indonesia mendapatkan penghargaan sebagai salah satu BUMN Terbaik di bidang transportasi versi Majalah Infobank, 2013;
- w. PT Kereta Api Indonesia mendapatkan penghargaan sebagai BUMN Paling Inovatif dalam Pelayanan Publik, 2011 dan 2012;
- x. PT Kereta Api Indonesia dipilih sebagai salah satu dari 5 (lima) perusahaan Paling Favorit versi *Indonesian Printed Press Association*, 2012;
- y. PT Kereta Api Indonesia dianugerahi sebagai salah satu *The Most Favorable Patrons* oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, 2011.

3. Proyek

- a. Kilas Balik Pelayanan Perkeretaapian di Indonesia (mulai bulan Februari 2009)
 - 1) Meningkatkan keselamatan, keamanan, ketepatan waktu, dan kenyamanan seluruh pelayanan dan perluasan kapasitas hingga tiga kali lipat hingga tahun 2020.
 - 2) Anggota tim : Ignasius Jonan
- b. Kilas Balik Pelayanan Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Februari 2001 – Agustus 2006)
 - 1) Untuk membuat perusahaan bertahan setelah krisis keuangan tahun 1998.
 - 2) Anggota tim : Ignasius Jonan

4. Sertifikasi

- a. Akuntan Publik Bersertifikat – Ikatan Akuntan Indonesia (1999 – saat ini)
- b. Manajer Investasi - Badan Pengawas Pasar Modal Indonesia (1995 – saat ini)

5. Organisasi

- a. Anggota *International Management Advisory Group of Fletcher School*, 2007.
- b. Anggota *Asian Advisory Group of Fletcher School*, 2006.
- c. Ketua Dewan Pengawas di Yayasan Pendidikan Universitas Presiden, 2008.
- d. Penasihat di Ikatan Akuntan Publik Indonesia.

6. Pendidikan

- a. *Master of Arts (MA)*, Hubungan Internasional, Sekolah Hukum dan Diplomasi Fletcher School, Tufts University, USA, 2004 – 2005;
- b. Manajer Senior dalam Program Pemerintah, *Harvard Kennedy School of Government*, 2000 – 2000;
- c. Sekolah Bisnis Columbia, Program Eksekutif Senior, Universitas Columbia, 1999 – 1999;
- d. *Doktorandus* di bidang Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, 1982 – 1986.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

PROFIL PIMPINAN ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GRAFIK xi

Bab I : Pendahuluan I-1

1. Ikhtisar Utama 2015 I-1
2. Profil Kementerian Perhubungan I-8
 - a. Tugas dan Fungsi I-8
 - b. Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan I-8
 - c. Sumber Daya Manusia I-9
 - d. Tinjauan Rencana dan Strategi 2015 I-13
3. Anggaran Kementerian Perhubungan I-28
4. Peristiwa Penting 2015 I-34

Bab II : Peningkatan Keselamatan dan Keamanan II-I

1. Perhubungan Darat II-I
2. Perhubungan Laut II-4
3. Perhubungan Udara II-12
4. Perkeretaapian II-22
5. Subsektor Penunjang II-26

Bab III : Peningkatan Pelayanan III-I

1. Layanan Sarana dan Prasarana Transportasi III-I
2. SDM Transportasi III-32
3. Penelitian dan Pengembangan III-42
4. *Good Governance* III-46
5. Kebijakan Transportasi III-79
6. Transportasi Ramah Lingkungan III-106
7. *Clean Governance* III-113

Bab IV : Peningkatan Kapasitas Transportasi IV-I

1. Kapasitas Transportasi IV-I
2. Angkutan umum Massal Perkotaan Transportasi Perkeretaapian IV-19

Bab V : Penutup V-I

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1** Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan berdasarkan KM 60 Tahun 2010 **I-8**
- Gambar 2.1** Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Tahun 2015 **II-3**
- Gambar 2.2** Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Tahun 2015 **II-3**
- Gambar 2.3** Sosialisasi Penetapan Batas Kecepatan PM 111 Tahun 2015 **II-3**
- Gambar 2.4** Sosialisasi Penetapan Batas Kecepatan PM 111 Tahun 2015 **II-3**
- Gambar 2.5** GMDSS SROP Pangkalan Susu Disnav Kelas 1 Belawan **II-6**
- Gambar 2.6** GMDSS di Stasiun Radio Pantai (SROP) Kelas IV Air Bangis **II-6**
- Gambar 2.7** Distrik Navigasi Kelas I Surabaya Stasiun Radio Pantai (SROP) Kelas I Surabaya **II-7**
- Gambar 2.8** Peletakan Lunas *Keel Laying* **II-7**
- Gambar 2.9** Kapal Patroli Kelas V Alumunium **II-8**
- Gambar 2.10** Menteri Perhubungan mengunjungi Balai Kesehatan Penerbangan **II-17**
- Gambar 2.11** Bagan Standar Keselamatan Perkeretaapian **II-25**
- Gambar 2.12** Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal Tenggelamnya KM. Pertama-1 di KSOP Gresik, Jawa Timur, 2015 **II-31**
- Gambar 2.13** Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal Tenggelamnya KM. Asia Dua di Kantor Mahkamah Pelayaran, Jakarta, 2015 **II-33**
- Gambar 2.14** KRL 1156 menumbur KRL 1154 di St. Juanda Km 4+300, Daop I Jakarta, tanggal 23 September 2015 **II-35**
- Gambar 2.15** Kecelakaan Pelayaran Tahun 2015 **II-36**
- Gambar 2.16** Kecelakaan Penerbangan Tahun 2015 **II-38**
- Gambar 2.17** Kecelakaan Bermotor Tahun 2015 **II-39**
- Gambar 2.18** *In House Training* Teknik Investigasi kecelakaan Jalan, Bandung 14 Desember 2015 **II-42**
- Gambar 2.19** Sosialisasi Preventif Kecelakaan Pelayaran, Cilegon 5 November 2015 **II-42**
- Gambar 2.20** Penyerahan Penghargaan TSA oleh Menteri Perhubungan **II-44**
- Gambar 2.21** Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Gelap Narkotika (P4GN) di Surabaya **II-45**
- Gambar 3.1** Peresmian KMP Sebuku oleh Bapak Presiden RI pada 13 Juni 2015 untuk Lintas Merak - Bakauheni **III-2**
- Gambar 3.2** Salah satu bentuk pelayanan pada Terminal Penumpang Tipe A Tirtonadi, Solo **III-4**
- Gambar 3.3** Terminal Penumpang Bandar Udara Wamena **III-10**
- Gambar 3.4** Terminal Penumpang Bandar Udara Utarom **III-10**
- Gambar 3.5** Terminal Penumpang Bandar Udara Labuan Bajo **III-11**
- Gambar 3.6** Terminal, *Runway*, Ruang *Check In*, dan Ruang Tunggu Bandar Udara DEO-Sorong **III-11**
- Gambar 3.7** Bandar Udara Matahora-Wakatobi **III-12**
- Gambar 3.8** Bandar Udara Djalaluddin-Gorontalo **III-13**
- Gambar 3.9** Terminal baru dan ruang tunggu Bandar Udara Juwata Tarakan **III-13**
- Gambar 3.10** Menteri Perhubungan saat melalui *X-Ray* **III-14**

- Gambar 3.11** Pengadaan TMC lebar *spoor* 1.435 mm III-26
- Gambar 3.12** Pengadaan Lori Inspeksi III-26
- Gambar 3.13** Pengadaan Kereta Kedinasan III-27
- Gambar 3.14** Kereta Inspeksi III-28
- Gambar 3.15** Pengadaan Gerbong Datar (PPCW) III-29
- Gambar 3.16** Pengadaan Gerbong Terbuka (ZZOW) III-29
- Gambar 3.17** Pengarahan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenhub III-47
- Gambar 3.18** Pembukaan Pembekalan Bendaharawan Pengeluaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2015 III-60
- Gambar 3.19** Ruang Layanan Informasi Publik Gedung Cipta lantai 1 dan Gedung Karya lantai 7 III-65
- Gambar 3.20** Kegiatan Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2015 di Surabaya III-67
- Gambar 3.21** Sertifikat Penghargaan Menteri Perhubungan PPID UPT Navigasi Semarang III-68
- Gambar 3.22** Sertifikat Penghargaan Kementerian Perhubungan meraih peringkat IV Badan Publik Pemerintahan Terbaik dalam Anugerah Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik 2015 III-68
- Gambar 3.23** Monitoring Pelayanan Informasi pada PPID Pelaksana UPT di KSOP Muntok III-69
- Gambar 3.24** Monitoring Pelayanan Informasi pada PPID Pelaksana UPT di KSOP Marunda III-69
- Gambar 3.25** Monitoring Pelayanan Informasi pada PPID Pelaksana UPT di Kantor UPP Kelas III Labuhan Lombok III-69
- Gambar 3.26** Layanan *Contact Center* 151 Kementerian Perhubungan III-71
- Gambar 3.27** Peluncuran Layanan *Contact Center* 151 Kementerian Perhubungan III-72
- Gambar 3.28** Pengembangan Sistem Informasi Geografis Aset Perhubungan III-73
- Gambar 3.29** Diagram Rencana Infrastruktur Email Kementerian Perhubungan III-74
- Gambar 3.30** Diagram Interkoneksi *Storage Area Network Email* Kementerian Perhubungan III-75
- Gambar 3.31** Topologi Jaringan Kementerian Perhubungan III-76
- Gambar 3.32** *Design* Kemenhub AON III-77
- Gambar 3.33** Target IT Kementerian Perhubungan III-77
- Gambar 3.34** Penghargaan *National Procurement Award* 2015 III-79
- Gambar 3.35** Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Peraturan Perundang-undangan di Bidang Transportasi III-100
- Gambar 3.36** Penyelenggaraan Pertemuan Internasional di Jakarta III-104
- Gambar 3.37** Penyerahan SK Menteri Perhubungan kepada UPT dengan Kinerja Terbaik pada tanggal 17 September 2015 (HARHUBNAS) III-119
- Gambar 3.38** Sosialisasi Preventif Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) di Provinsi Sumatera Selatan III-119
- Gambar 3.39** Suasana Sosialisasi memperingati Hari Anti Korupsi Tahun 2015 III-121
- Gambar 3.40** Seminar Peran APIP dalam pengendalian kecurangan III-122
- Gambar 3.41** Sertifikasi ISO 9001 : 2008 Itjen Kementerian Perhubungan III-123
- Gambar 4.1** Alokasi Bus Besar – BRT Tahun Anggaran 2015 IV-4

- Gambar 4.2** *Bus Rapid Transit* **IV-5**
- Gambar 4.3** Trayek Tol Laut **IV-6**
- Gambar 4.4** Kapal perintis KM Sabuk Nusantara 55 dan 56 sebagai sarana untuk mendukung Program Tol Laut **IV-7**
- Gambar 4.5** Angkutan perintis yang menjadi andalan dalam penyediaan transportasi di daerah terpencil **IV-9**
- Gambar 4.6** Pembangunan Badan Jalan KA **IV-11**
- Gambar 4.7** Pelaksanaan konstruksi pemasangan Rel R.54 dan Wesel R.54 **IV-12**
- Gambar 4.8** Pemasangan Rel.R.54 pada Jembatan KA bentang 164,4 M (26,8x2+35.8x2 M) **IV-12**
- Gambar 4.9** Pembangunan Stasiun BIM Tahap I **IV-12**
- Gambar 4.10** Pembangunan Stasiun Duku **IV-13**
- Gambar 4.11** Rencana Pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi Tahap 1 Tahun 2015-2019 **IV-13**
- Gambar 4.12** Pembangunan jalur kereta api Tahap I antara Makassar-Pare-Pare dengan panjang track 16,1 Km'sp **IV-14**
- Gambar 4.13** Menteri Perhubungan RI dalam rangka peresmian Kereta Api Perintis Bathara Kresna relasi Purwosari-Wonogiri **IV-15**
- Gambar 4.14** Menteri Perhubungan RI mencoba Kereta Api Perintis Bathara Kresna setelah dilakukan peresmian **IV-15**
- Gambar 4.15** Menteri Perhubungan Republik Indonesia melakukan foto bersama dengan jajaran Pemkot Solo usai peresmian Kereta Api Perintis Bathara Kresna **IV-15**
- Gambar 4.16** Peninjauan lapangan dalam rangka verifikasi Kereta Api Perintis Bathara Kresna **IV-15**
- Gambar 4.17** Pemeriksaan sarana KA Perintis Jenggala dalam rangka verifikasi pelaksanaan program keperintisan **IV-16**
- Gambar 4.18** Monitoring Penyelenggaraan Kereta Api (KA) Perintis Kertalaya lintas (Kertapati - Inderalaya) **IV-16**
- Gambar 4.19** Monitoring Penyelenggaraan KA Perintis Kertalaya lintas (Mojokerto - Tarik-Tulangan - Sidoarjo) **IV-16**
- Gambar 4.20** Monitoring Penyelenggaraan Kereta Api (KA) Perintis Kertalaya lintas (Kertapati - Inderalaya) **IV-16**
- Gambar 4.21** Pembangunan Trase LRT Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (JBDB) **IV-19**
- Gambar 4.22** Trase Rencana LRT Provinsi Sumatera Selatan **IV- 20**
- Gambar 4.23** Foto udara perkembangan pembangunan LRT Palembang Zona 1 s.d Zona 5 **IV-22**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Kementerian Perhubungan Tahun 2015 Berdasarkan Unit Kerja	I-9
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan (Berdasarkan Golongan, Pendidikan, Agama, Jenis Kelamin, dan Status Keluarga) Posisi Desember 2015	I-10
Tabel 1.3	Perkembangan Alokasi Pagu Dana Tahun Anggaran 2015 Kemenhub	I-29
Tabel 1.4	Anggaran Belanja Kementerian Perhubungan Tahun 2015	I-30
Tabel 1.5	Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 Kementerian Perhubungan	I-31
Tabel 1.6	Perkembangan Alokasi Dana Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun Anggaran 2015 Kementerian Perhubungan	I-32
Tabel 1.7	Realisasi Anggaran Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun Anggaran 2015 Kementerian Perhubungan	I-33
Tabel 2.1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keselamatan Transportasi Darat	II-4
Tabel 2.2	Kejadian Kecelakaan Kapal	II-4
Tabel 2.3	Realisasi Pembangunan dan <i>Upgrade</i> GMDSS	II-5
Tabel 2.4	Pembangunan 10 (sepuluh) Kapal Patroli Kelas V Aluminium (selesai dibangun Tahun 2015)	II-8
Tabel 2.5	Rincian Rencana Pembangunan/Lanjutan/Penyelesaian Kapal Kenavigasian	II-11
Tabel 2.6	Gangguan Keamanan Dalam Penyelenggaraan Transportasi laut Tahun 2015	II-11
Tabel 2.7	Sertifikasi Pesawat Udara	II-12
Tabel 2.8	Penegakkan Hukum dan Sanksi Administratif	II-13
Tabel 2.9	Sertifikasi dan register bandar udara, <i>heliport</i> , dan <i>helideck</i>	II-14
Tabel 2.10	Pelaksanaan Operasi Penerbangan Balai Besar Fasilitas Kalibrasi Penerbangan	II-16
Tabel 2.11	Pengujian Narkoba	II-17
Tabel 2.12	Pengesahan Dokumen AEP	II-18
Tabel 2.13	Izin Angkutan <i>Dangerous Goods</i>	II-18
Tabel 2.14	Pengesahan <i>Dangerous Goods</i> HM	II-19
Tabel 2.15	Pemeriksaan keamanan pos dan kargo	II-19
Tabel 2.16	Sertifikat Lembaga Diklat Bidang Keamanan	II-20
Tabel 2.17	<i>Airport Security Programme</i>	II-20
Tabel 2.18	AOSP	II-21
Tabel 2.19	Penerbitan Lisensi PKP-PK dan <i>Salvage</i>	II-21
Tabel 2.20	Perpanjangan Lisensi PKP-PK	II-22
Tabel 2.21	Sertifikat Kompetensi SDM Perkeretaapian yang diterbitkan Ditjen Perkeretaapian 2011-2015	II-23
Tabel 2.22	Jumlah dan Jenis Kecelakaan Angkutan Kereta Api Tahun 2010-2015	II-24
Tabel 2.23	<i>Rate Of Accident</i>	II-25
Tabel 2.24	Studi Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Tahun 2015	II-26
Tabel 2.25	Berkas BAPP Kecelakaan Kapal yang diterima Mahkamah Pelayaran 2015	II-28
Tabel 2.26	Rekapitulasi berkas BAPP Mahkamah Pelayaran 2015	II-29
Tabel 2.27	Jumlah Putusan Mahkamah Pelayaran 2015	II-29
Tabel 2.28	Pelaksanaan Persidangan Lanjutan Kecelakaan Kapal di Daerah-Daerah pada Tahun 2015	II-30
Tabel 2.29	Investigasi dan Penelitian Kecelakaan Perkeretaapian Tahun 2015	II-34
Tabel 2.30	Jumlah Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian Tahun 2015	II-35
Tabel 2.31	Jumlah Investigasi Kecelakaan Pelayaran Tahun 2015	II-36

Tabel 2.32	Daftar Kecelakaan Pelayaran Yang Diinvestigasi Komite Nasional Kecelakaan Transportasi Tahun 2015	II-36
Tabel 2.33	Jumlah Investigasi Kecelakaan Penerbangan Komersial Berjadwal dan Tidak Berjadwal Tahun 2015	II-38
Tabel 2.34	Jumlah Investigasi Kecelakaan Tertentu Kendaraan Bermotor Umum Tahun 2015	II-38
Tabel 2.35	Daftar Kecelakaan Tertentu Kendaraan Bermotor Umum Yang Diinvestigasi Komite Nasional Kecelakaan Transportasi Tahun 2015	II-39
Tabel 2.36	<i>Timeline</i> Kegiatan <i>Transportation Safety Award</i>	II-43
Tabel 3.1	Jumlah Kapal SDP Yang Beroperasi Tahun 2011-2015	III-1
Tabel 3.2	Jumlah Kapal Penyeberangan Jenis Ro-Ro Berdasarkan Kepemilikan Tahun 2015	III-1
Tabel 3.3	Perkembangan Sarana ALBN di Indonesia	III-2
Tabel 3.4	Perkembangan <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT) di Indonesia	III-3
Tabel 3.5	Jumlah Terminal Penumpang Seluruh Indonesia Tahun 2011-2015	III-4
Tabel 3.6	Jumlah Pengujian Kendaraan Bermotor seluruh Indonesia Tahun 2011-2015	III-4
Tabel 3.7	Jumlah Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor seluruh Indonesia Tahun 2011 - 2015	III-5
Tabel 3.8	Perkembangan Pelabuhan Penyeberangan Tahun 2011-2015	III-5
Tabel 3.9	Perkembangan <i>Area Traffic Control System</i> (ATCS) di Indonesia Tahun 2011 – 2015	III-6
Tabel 3.10	Penyelenggaraan Keperintisan LLAJ Tahun 2011-2015	III-7
Tabel 3.11	Perkembangan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	III-7
Tabel 3.12	Produksi Angkutan Penyeberangan	III-8
Tabel 3.13	Armada Pesawat Udara	III-8
Tabel 3.14	Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal	III-9
Tabel 3.15	Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal	III-9
Tabel 3.16	Data Bandara DEO-Sorong	III-11
Tabel 3.17	Data Bandar Udara Matahora - Wakatobi	III-12
Tabel 3.18	Data Bandar Udara Djalaludin - Gorontalo	III-12
Tabel 3.19	Data Bandar Udara Juwata-Tarakan	III-13
Tabel 3.20	Pengelola <i>Slot Time</i> di Bandar Udara	III-15
Tabel 3.21	Pengawasan Terhadap Pelanggaran Tarif Angkutan Udara Berjadwal Dalam Negeri	III-16
Tabel 3.22	Surat Peringatan Kepada Badan Usaha	III-17
Tabel 3.23	Operator Pelaksana Angkutan Udara Perintis	III-18
Tabel 3.24	Operator Penerbangan yang mengajukan <i>Flight Approval</i>	III-20
Tabel 3.25	Penambahan Kapasitas Tempat Duduk Penerbangan Luar Negeri	III-21
Tabel 3.26	Lokasi Fasilitas CCTV di 27 Bandar Udara	III-21
Tabel 3.27	Embarkasi dan Debarkasi Haji	III-22
Tabel 3.28	Embarkasi Antara	III-22
Tabel 3.29	Rincian Penerbangan Operator Penerbangan Haji	III-23
Tabel 3.30	Alasan Keterlambatan pada <i>Phase I</i> (Pemberangkatan)	III-23
Tabel 3.31	Rincian Penerbangan <i>Phase II</i> Operator Penerbangan Haji	III-24
Tabel 3.32	Alasan Keterlambatan pada <i>Phase II</i> (Pemulangan)	III-24
Tabel 3.33	Target dan Realisasi Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Darat Tahun 2015	III-32
Tabel 3.34	Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan Teknis (<i>Short Course</i>) SDM Perhubungan Darat Tahun 2015	III-33
Tabel 3.35	Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan Lainnya SDM Perhubungan Darat Th 2015	III-33
Tabel 3.36	Target dan Realisasi Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Perhubungan Darat Tahun 2015	III-34

- Tabel 3.37** Target dan Realisasi Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Laut Tahun 2015 **III-34**
- Tabel 3.38** Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan Penjenjangan SDM Perhubungan Laut Tahun 2015 **III-35**
- Tabel 3.39** Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan Penyegaran SDM Perhubungan Laut Tahun 2015 **III-36**
- Tabel 3.40** Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan Pemutakhiran SDM Perhubungan Laut Tahun 2015 **III-36**
- Tabel 3.41** Program dan Realisasi Lulusan PKKPSDM Perhubungan Laut Tahun 2015 **III-37**
- Tabel 3.42** Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan Lainnya SDM Perhubungan Laut Tahun 2015 **III-37**
- Tabel 3.43** Program dan Realisasi Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Perhubungan Laut Tahun 2015 **III-38**
- Tabel 3.44** Program Pendidikan Pembentukan **III-38**
- Tabel 3.45** Target dan Realisasi Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Udara Tahun 2015 **III-39**
- Tabel 3.46** Target dan Realisasi Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan Udara Tahun 2015 **III-39**
- Tabel 3.47** Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan Teknis SDM Perhubungan Udara Tahun 2015 **III-40**
- Tabel 3.48** Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan Lainnya SDM Perhubungan Udara Tahun 2015 **III-40**
- Tabel 3.49** Target dan Realisasi Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Perhubungan Udara Tahun 2015 **III-40**
- Tabel 3.50** Rekapitulasi Target dan Realisasi Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur Perhubungan Tahun 2015 **III-41**
- Tabel 3.51** Jumlah Makalah Yang Dipublikasi Tahun 2015 **III-44**
- Tabel 3.52** Makalah Yang Dipublikasikan Pada Publikasi Internasional Tahun 2015 **III-45**
- Tabel 3.53** Perbandingan posisi neraca per unit kerja Eselon I **III-48**
- Tabel 3.54** Perbandingan Nilai BMN per akun pada Neraca *Unaudited* TA. 2015 **III-49**
- Tabel 3.55** Perbandingan Laporan Barang Milik Negara Intrakomptabel *Audited* dan *Unaudited* **III-50**
- Tabel 3.56** Perbandingan Nilai BMN per akun pada Laporan Intrakomptabel *Unaudited* TA. 2015 **III-51**
- Tabel 3.57** Laporan Realisasi Anggaran **III-53**
- Tabel 3.58** Neraca **III-54**
- Tabel 3.59** Laporan Operasional Kemenhub Tahun 2014 (*Audited*) dan Tahun 2015 (*Unaudited*) **III-55**
- Tabel 3.60** Laporan Perubahan Ekuitas Kemenhub Tahun 2014 (*Audited*) dan 2015 (*Unaudited*) **III-56**
- Tabel 3.61** Laporan Realisasi Anggaran **III-56**
- Tabel 3.62** Perbandingan Neraca Laporan Keuangan Kemenhub Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA. 999.07) Tahun 2014 (*Audited*) dan 2015 (*Unaudited*) **III-57**
- Tabel 3.63** Kegiatan Pembekalan Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2015 **III-60**
- Tabel 3.64** Rincian Komponen Penilaian **III-62**
- Tabel 3.65** Penurunan Emisi CO₂e Subsektor Transportasi Darat Tahun 2015 **III-106**

Tabel 3.66	Jumlah Prasarana Yang Telah Menerapkan Konsep Ramah Lingkungan Tahun 2015	III-107
Tabel 3.67	Uji Kebisingan pada Uji Pertama Lokomotif Tahun 2015	III-110
Tabel 3.68	Uji Kebisingan pada Uji Berkala Lokomotif Tahun 2015	III-110
Tabel 3.69	Data Penurunan Emisi Karbon CO2 Subsektor Transportasi Udara Tahun 2015	III-112
Tabel 3.70	Persentase Rekomendasi Hasil Audit Yang Ditindaklanjuti Tahun 2015	III-117
Tabel 4.1	Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat Tahun 2012 sd. 2015	IV-1
Tabel 4.2	Alokasi Bus Sedang - BRT Tahun Anggaran 2015	IV-3
Tabel 4.3	Alokasi Bus Besar - BRT Tahun Anggaran 2015	IV-3
Tabel 4.4	Realisasi Angkutan perintis di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil, khususnya wilayah timur Indonesia	IV-8
Tabel 4.5	Perpanjangan Landas Pacu	IV-9
Tabel 4.6	Peningkatan Daya Dukung	IV-9
Tabel 4.7	Pelapisan Sisi Udara	IV-10
Tabel 4.8	Perluasan Apron	IV-10
Tabel 4.9	Pekerjaan Strip	IV-11
Tabel 4.10	Realisasi penumpang angkutan kereta api keperintisan	IV-15
Tabel 4.11	Studi Peningkatan Kapasitas Transportasi Badan Litbang Perhubungan sepanjang tahun 2015	IV-16

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1.1** Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan Berdasarkan Pendidikan **I-11**
- Grafik 1.2** Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan Berdasarkan Golongan **I-11**
- Grafik 1.3** Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan Berdasarkan Agama **I-12**
- Grafik 1.4.** Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan Berdasarkan Jenis Kelamin **I-12**
- Grafik 1.5** Perkembangan Alokasi Pagu Dana Tahun Anggaran 2015 Kemenhub **I-29**
- Grafik 1.6** Alokasi Pagu Dana Tahun Anggaran 2015 Per Jenis Belanja Kementerian Perhubungan **I-30**
- Grafik 1.7** Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 Kementerian Perhubungan **I-32**
- Grafik 1.8** Perkembangan alokasi dana Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun Anggaran 2015 Kementerian Perhubungan **I-33**
- Grafik 1.9** Realisasi Anggaran Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun Anggaran 2015 Kementerian Perhubungan **I-34**
- Grafik 2.1** Status *Corrective Action Plan (CAP)* : 98,61% Fully Addressed **II-15**
- Grafik 2.2** *Detail CAPs Progress Made by State Based on Area* **II-16**
- Grafik 2.3** *Grafik Detail Cap Progress Made by State Based on Critical Element* **II-16**
- Grafik 2.4** Putusan Mahkamah Pelayaran Tahun 2015 **II-30**
- Grafik 2.5** Jumlah Kecelakaan Yang Diinvestigasi KNKT Tahun 2015 **II-34**
- Grafik 3.1** Jumlah Penumpang Domestik dan Internasional **III-17**
- Grafik 3.2** Jumlah Angkutan Kargo Domestik dan Internasional **III-18**
- Grafik 3.3** Jumlah Penumpang Penerbangan Perintis **III-19**
- Grafik 3.4** Jumlah Frekuensi Penerbangan Perintis **III-19**
- Grafik 3.5** *On Time Performance Phase I (Pemberangkatan)* Tahun 2011 sd 2015 **III-23**
- Grafik 3.6** *On Time Performance Phase II Pemulangan* Tahun 2011 sd 2015 **III-24**
- Grafik 3.7** Perkembangan Jumlah Penelitian Tahun 2011 - 2015 **III-42**
- Grafik 3.8** Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Laporan Keuangan Kemenhub Bagian Anggaran 022 Tahun 2014 (*Audited*) dan 2015 (*Unaudited*) **III-53**
- Grafik 3.9** Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Laporan Keuangan Kemenhub Bagian Anggaran 022 Tahun 2014 (*Audited*) dan 2015 (*Unaudited*) **III-54**
- Grafik 3.10** Perbandingan Neraca Laporan Keuangan Kemenhub Bagian Anggaran 022 Tahun 2014 (*Audited*) dan 2015 (*Unaudited*) **III-55**
- Grafik 3.11** Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Laporan Keuangan Kemenhub Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA. 999.07) Tahun 2014 (*Audited*) dan Tahun 2015 (*Unaudited*) **III-57**
- Grafik 3.12** Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Laporan Keuangan Kemenhub Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA. 999.07) Tahun 2014 (*Audited*) dan 2015 (*Unaudited*) **III-57**
- Grafik 3.13** Perbandingan Neraca Laporan Keuangan Kemenhub Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA. 999.07) Tahun 2014 (*Audited*) dan 2015 (*Unaudited*) **III-58**
- Grafik 3.14** Kegiatan Pembekalan Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2015 **III-60**
- Grafik 3.15** Rincian Realisasi Pelaksanaan Audit **III-113**
- Grafik 3.16** Data Tindak Lanjut Temuan Itjen **III-117**
- Grafik 3.17** Data Tindak Lanjut Temuan BPK **III-118**
- Grafik 3.18** Wawasan Gratifikasi **III-120**
- Grafik 4.1.** Alokasi Bus Besar – BRT Tahun Anggaran 2015 **IV-4**

BAB I PENDAHULUAN

1. Ikhtisar Utama 2015

Sepanjang Tahun 2015, Kementerian Perhubungan berhasil menunjukkan kinerja terbaik sesuai dengan target yang telah dicanangkan. Capaian Kinerja tersebut mencakup keberhasilan diberbagai sektor sebagai berikut :

a. Transportasi Darat

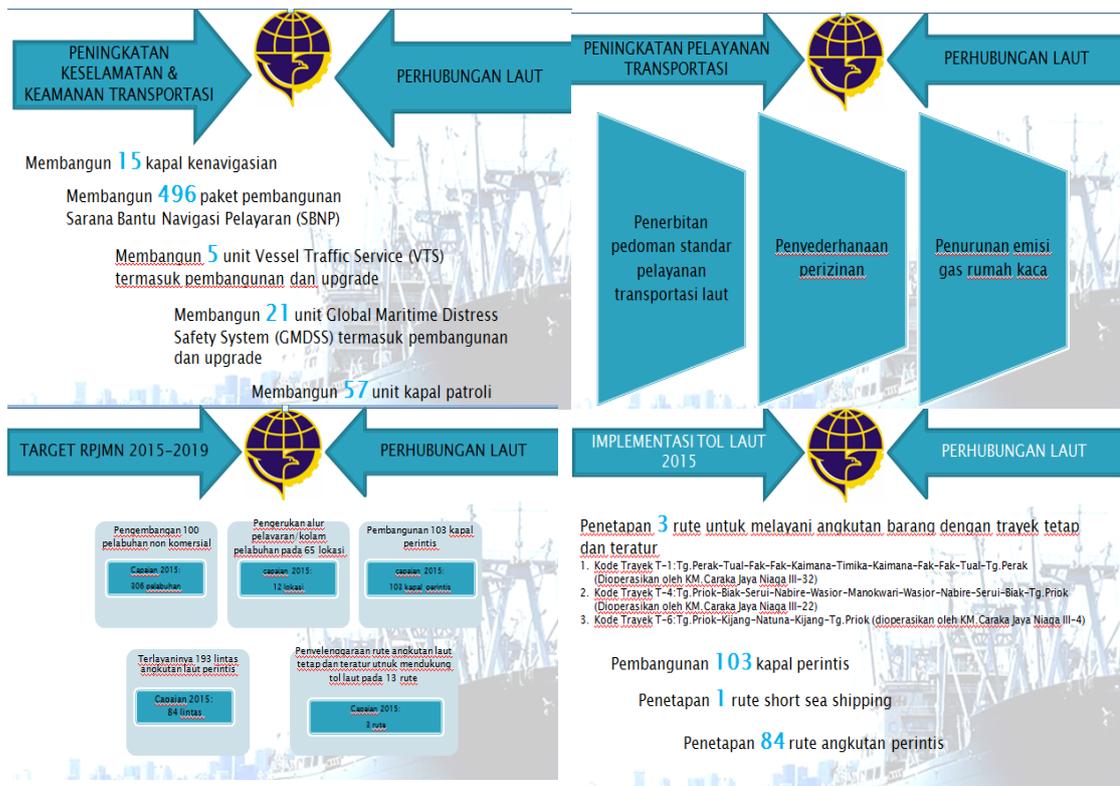
- 1) Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat Tahun 2015 dengan Penerapan Teknologi *Area Traffic Control System (ATCS)* di 12 kota di Indonesia 4 (empat) komponen utama, yaitu Alat Pemberi Isyarat Lalu-Lintas (APILL), Perangkat Pendeteksi Kendaraan (*Detector*), Jaringan Komunikasi dan Ruang Kendali Lalu-Lintas (*Control/ Center Room*).
- 2) Peningkatan Kapasitas Transportasi Darat
 - a) Pembangunan/ pengembangan terminal 11 lokasi
 - b) Pembangunan 9 Lokasi Dermaga Sungai penyeberangan.
 - c) Pengadaan 1.050 bus BRT.
 - d) Pengadaan Bus Perintis 75 unit.



b. Transportasi Laut

- 1) Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut
 - a) Pembangunan 15 kapal kenavigasian.
 - b) Pembangunan 496 paket Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).
 - c) Pembangunan dan *upgrading* 5 unit *Vessel Traffic Service (VTS)*.
 - d) Pembangunan dan *upgrading* 21 unit *Global Maritime Distress Safety System (GMDSS)*.
 - e) Penyelesaian/ Pembangunan 57 unit kapal patroli.
- 2) Peningkatan Pelayanan Transportasi Laut
 - a) Penerbitan pedoman standar pelayanan transportasi laut.

- b) Penyederhanaan perizinan.
- c) Penurunan emisi gas rumah kaca.
- 3) Peningkatan Kapasitas Transportasi Laut
 - a) Pengembangan 306 Pelabuhan nonkomersial.
 - b) Pengerukan alur pelayaran/ kolam pelabuhan pada 12 lokasi.
 - c) Pembangunan dan penyelesaian 103 kapal perintis.
 - d) Terlayannya 84 lintas angkutan laut perintis.
 - e) Penyelenggaraan rute angkutan laut tetap dan teratur untuk mendukung tol laut pada 3 rute.



c. Transportasi Udara

- 1) Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara
 - a) Peningkatan keselamatan penerbangan
 - (1) Sertifikasi pesawat udara 1.510 unit,
 - (2) Penegakan hukum dan sanksi administratif terhadap operator penerbangan meliputi pembekuan sementara *Air Maintenance Operator (AMO)* : 2 operator; pembekuan *Air Operator Certificate (AOC 121 dan AOC 135)* : 3 operator; pencabutan AOC 121 dan 135 : 11 operator; peringatan kesatu kepada 2 operator penerbangan, 2 sekolah penerbangan dan 2 sekolah tehnik penerbangan,
 - (3) Sertifikasi bandar udara : 31 dan register Bandar Udara Niaga Umum : 8 dan register bandar udara bukan niaga (khusus) : 4,

- (4) Rencana tindak atas hasil audit ICAO USOAP/ Uni Eropa telah disetujui sebesar 98,61% *Fully Address* dan FAA
 - (5) Kalibrasi fasilitas penerbangan 1660,58 jam terbang
 - (6) Uji kontingensi narkoba 3.610 orang
- b) Peningkatan keamanan penerbangan
- (1) Pengesahan dokumen *Airport Emergency Plan* (AEP) : 18 dokumen
 - (2) Perizinan di Bidang Keamanan Penerbangan, Pelayanan Darurat, dan Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya :
 - (a) Pengesahan *Dangerous Goods Handling Manual* pada 15 operator penerbangan;
 - (b) Sertifikat pemeriksaan keamanan pos dan kargo pada 7 perusahaan
 - (c) Sertifikat lembaga diklat pada 25 lembaga diklat PKP-PK & *Salvage, Aviation Security*;
 - (d) *Airport Security Programme* pada 20 bandar udara;
 - (e) *Aircraft Operator Security Programme* (AOSP) pada 12 operator penerbangan;
 - (f) Rekapitulasi penerbitan lisensi pelayanan PKP-PK dan *Salvage* sebanyak 640 lisensi;
 - (g) Perpanjangan lisensi pelayanan PKP-PK dan *Salvage* sebanyak 916 lisensi;
 - (h) Penambahan peralatan keamanan penerbangan di UPBU meliputi *walkthrough metal detector* (WTMD) 9, *explosive trace detector* 3, CCTV 9, dan pemagaran sekeliling bandar udara.



2) Peningkatan Pelayanan

a) Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Udara

(1) Sarana Transportasi Udara

- (a) Armada Pesawat Udara yang beroperasi sebanyak 1.142 unit,
- (b) Jumlah Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) Niaga yang beroperasi:
 - (i) Berjadwal sebanyak 17 perusahaan,
 - (ii) Tidak Berjadwal sebanyak 45 perusahaan.

(2) Prasarana Bandar Udara

- a) Peresmian Terminal Baru : 3 Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU)
- b) Terminal baru yang sudah selesai namun belum diresmikan : 4 Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU)
- c) Pembangunan Fasilitas Keamanan Penerbangan : 118 lokasi.

b) Kebijakan di bidang Angkutan Udara

1) Perizinan Angkutan Udara *Online*

- a) Izin rute: 2.036
- b) Izin usaha : belum ada pengajuan izin usaha baru
- c) *Flight approval* berjadwal:15.056 dan tidak berjadwal:10.577

2) Pengawasan terhadap pelanggaran tarif angkutan udara berjadwal dalam negeri kelas ekonomi : 11 Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU).

3) Produksi angkutan udara

- a) Jumlah Penumpang Domestik dan Internasional : 68.967.890 pnp
- b) Jumlah Kargo Domestik dan Internasional : 521.035 Ton

4) Angkutan Udara Perintis : 216 rute

5) Pelaksanaan Angkutan Lebaran di 35 bandar udara

6) Pelaksanaan Angkutan Udara Haji Tahun 1435 H/ 2015 M

- a) Phase I (pemberangkatan) tanggal 21 Agustus - 1 September 2015, sebanyak 156.336 calon haji dalam 376 kloter
- b) Phase II (pemulangan) tanggal 28 September - 26 Oktober 2015, sebanyak 155.465 jemaah haji dalam 376 kloter, dan sebanyak 872 jemaah haji tidak dipulangkan karena sakit dan meninggal (termasuk korban jatuhnya *crane* dalam pembangunan Masjidil Haram).

3) Peningkatan Kapasitas Transportasi Udara Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Ditjen Perhubungan Udara

- 1) Perpanjangan landas pacu di 19 lokasi,
- 2) Pelebaran landas pacu di 5 (lima) lokasi,
- 3) Peningkatan daya dukung di 32 lokasi,
- 4) Pelapisan sisi udara di 35 lokasi,
- 5) Perluasan apron di 20 lokasi,
- 6) Penambahan dan pelebaran *taxiway* di 6 (enam) lokasi,
- 7) Pekerjaan strip di 20 lokasi.





PENINGKATAN PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI UDARA

<p>1. Sarana Transportasi Udara</p> <p>a. Armada Pesawat Udara yang beroperasi sebanyak 1.142 unit</p> <p>b. Jumlah Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) Niaga yang beroperasi:</p> <p>c. Berjadwal sebanyak 17 perusahaan</p> <p>d. Tidak Berjadwal sebanyak 45 perusahaan</p> <p>2. Prasarana Bandar Udara</p> <p>a. Peresmian Terminal Baru 3 Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU)</p> <p>b. Terminal baru yang sudah selesai namun belum diresmikan 4 Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU)</p> <p>c. Pembangunan Fasilitas Keamanan Penerbangan 118 lokasi.</p>	<p>2. Kebijakan di Bidang Angkutan Udara</p> <p>a. Perizinan Angkutan Udara Online:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izin rute 2.036 - Izin usaha : belum ada pengajuan izin usaha baru - <i>Flight approval</i>/berjadwal 15.056 dan tidak berjadwal 10.577 <p>b. Pengawasan terhadap pelanggaran tarif angkutan udara berjadwal dalam negeri kelas ekonomi 11 Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU).</p> <p>C. Produksi angkutan udara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Penumpang Domestik dan Internasional 68.967.890 pnp - Jumlah Kargo Domestik dan Internasional 521.035 Ton <p>d. Angkutan Udara Perintis 216 rute</p> <p>e. Pelaksanaan Angkutan Lebaran di 35 bandar udara</p> <p>f. Pelaksanaan Angkutan Udara Haji Tahun 1435 H /2015M</p>
--	--

d. Perkeretaapian

- 1) Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Perkeretaapian
 - a) Pengesahan dan sertifikasi uji pertama pada 1.185 unit sarana perkeretaapian.
 - b) Pengesahan penetapan identitas sarana perkeretaapian 484 unit.
 - c) Pengesahan dan sertifikasi uji berkala sarana perkeretaapian sebanyak 1.179 unit.
 - d) Sertifikasi awak sarana kereta api dengan rincian :
 - (1) Sebanyak 1.710 SDM PT. KAI (Persero) bersertifikat kompetensi kecakapan/ keahlian.
 - (2) Sebanyak 12 SDM Ditjen Perkeretaapian bersertifikat kompetensi keahlian.
 - e) Pemasangan sistem keselamatan kereta api di 4 lintas yakni :
 - (1) Lintas Bekasi – Dawuan 54 Km.
 - (2) Lintas Cikampek – Brebes 199 Km.
 - (3) Lintas Tegal – Bojonegoro 325 Km.
 - (4) Lintas Kapasan – Surabaya Pasar Turi 98 Km.



Peningkatan Kapasitas Perkeretaapian

1. Pembangunan jaringan kereta api di Jawa, Trans Sumatera, dan Trans Sulawesi
2. Persiapan desain jalur kereta api di Kalimantan dan Papua
3. Pembangunan Trem di Surabaya
4. Reaktivasi jalur kereta api di Jawa dan Sumatera:
 - Besitang – Binjai **80** Km
 - Padang – Padang Panjang – Sawah Lunto **80** Km.
 - Kedung Jati – Tuntang – Jawa Tengah **31** Km
5. Pembangunan Kereta Api Bandara Sumatera dan Jakarta
6. Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa dan Jalur Ganda Sumatera Selatan
7. Pelayanan Kereta Api pada 2 lintasan berdasarkan Keputusan Menhub Nomor KP 264 Tahun 2015
8. Pemberian PSO kepada PT. KAI berdasarkan Keputusan Menhub Nomor KP 936 Tahun 2015

2) Peningkatan Kapasitas Perkeretaapian

- a) Pembangunan jaringan kereta api di Jawa, Trans Sumatera, dan Trans Sulawesi.
- b) Persiapan desain jalur kereta api di Kalimantan dan Papua.
- c) Pembangunan Trem di Surabaya.
- d) Reaktivasi jalur kereta api di Jawa dan Sumatera, dengan rincian :
 - (1) Besitang – Binjai 80 Km.
 - (2) Padang – Padang Panjang – Sawahlunto 80 Km.
 - (3) Kedung Jati – Tuntang – Jawa Tengah 31 Km.
- e) Pembangunan Kereta Api Bandara di Sumatera dan Jakarta.
- f) Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa dan Jalur Ganda Sumatera Selatan.
- g) Pelayanan Kereta Api pada 2 lintasan berdasarkan Keputusan Menhub Nomor KP 264 Tahun 2015.
- h) Pemberian PSO kepada PT. KAI berdasarkan Keputusan Menhub Nomor KP 936 Tahun 2015.

Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian

1. Pengesahan dan Sertifikasi Uji Pertama **1.185** Unit Sarana Perkeretaapian
2. Pengesahan penetapan identitas sarana perkeretaapian **484** unit sarana perkeretaapian
3. Pengesahan dan sertifikasi uji berkala **1.179** unit sarana perkeretaapian
4. Sertifikasi awak sarana kereta api:
 - Bersertifikat kompetensi kecakapan/ keahlian **1.710** SDM PT. KAI (Persero)
 - Bersertifikat kompetensi keahlian **12** SDM Ditjen Perkeretaapian
5. Pemasangan sistem keselamatan kereta api di 4 lintas:
 - Lintas Bekasi – Dawuan **54** Km
 - Lintas Cikampek – Brebes **199** Km
 - Lintas Tegal – Bojonegoro **325** Km
 - Lintas Kapasan – Surabaya Pasar Turi **98** Km



e. Penyederhanaan Perizinan

Peningkatan pelayanan transportasi dengan penyederhanaan 159 perizinan, terdiri dari :

- 1) 9 jenis perhubungan darat,
- 2) 43 jenis perhubungan laut,
- 3) 8 jenis perkeretaapian, dan
- 4) 99 jenis perhubungan udara.

f. Pendelegasian Perizinan

7 (tujuh) penyederhanaan perizinan yang didelegasikan ke PTSP Pusat di BKPM, yaitu :

- 1) Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dari 40 hari menjadi 14 hari.
- 2) Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) dari 40 hari menjadi 14 hari.
- 3) Penetapan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dari 60 hari menjadi 14 hari.
- 4) Surat Izin Usaha Perusahaan *Salvage* dan Pekerjaan Bawah Air dari 45 hari menjadi 14 hari.
- 5) Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (IUPPAK) dari 45 hari menjadi 14 hari.
- 6) Izin Pengusahaan Bandar Udara Komersil dari 90 hari menjadi 14 hari.
- 7) Izin Usaha Angkutan Udara dari 90 hari menjadi 14 hari.

g. Penghargaan

Penghargaan yang berhasil diraih Kementerian Perhubungan selama Tahun 2015, yaitu :

- 1) Pencapaian Reformasi Birokrasi dari 60,02 % menjadi 70,34 %.
- 2) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Tahun 2014.
- 3) Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 dari TUV NORD untuk Itjen Kemenhub.
- 4) Pencapaian Level III *Internal Audit Capability Model* (IACM) dari BPKP untuk Itjen Kemenhub
- 5) Peringkat Ketiga Keterbukaan Informasi Publik.
- 6) *National Procurement Award* Tahun 2015 Kategori Komitmen Pencapaian Inpres No. 7 Tahun 2015.

h. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Peningkatan pelayanan transportasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (*contact centre* 151, email info 151@dephub.go.id)

i. Capaian Kinerja Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2015

Kementerian Perhubungan mampu merealisasikan sebesar Rp. 4,21 Triliun dari target penerimaan sebesar Rp. 3,26 Triliun atau naik sebesar 129,14 % dari realisasi penerimaan PNBPT Tahun 2014 sebesar Rp. 1,99 Triliun.

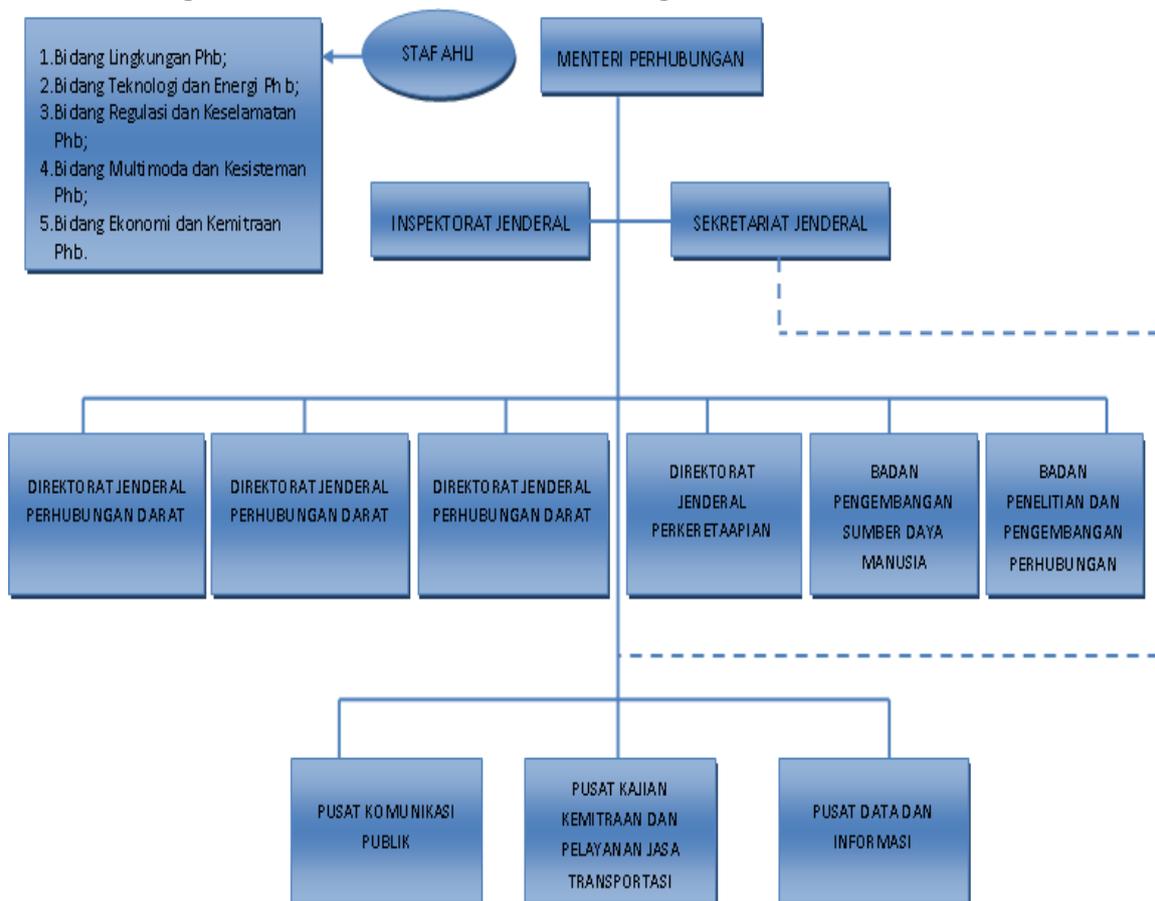
2. Profil Kementerian Perhubungan

a. Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, menyatakan bahwa Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- 2) Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan;
- 3) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 4) Pelaksanaan bimbingan teknik dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perhubungan di daerah; dan
- 5) Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

b. Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan

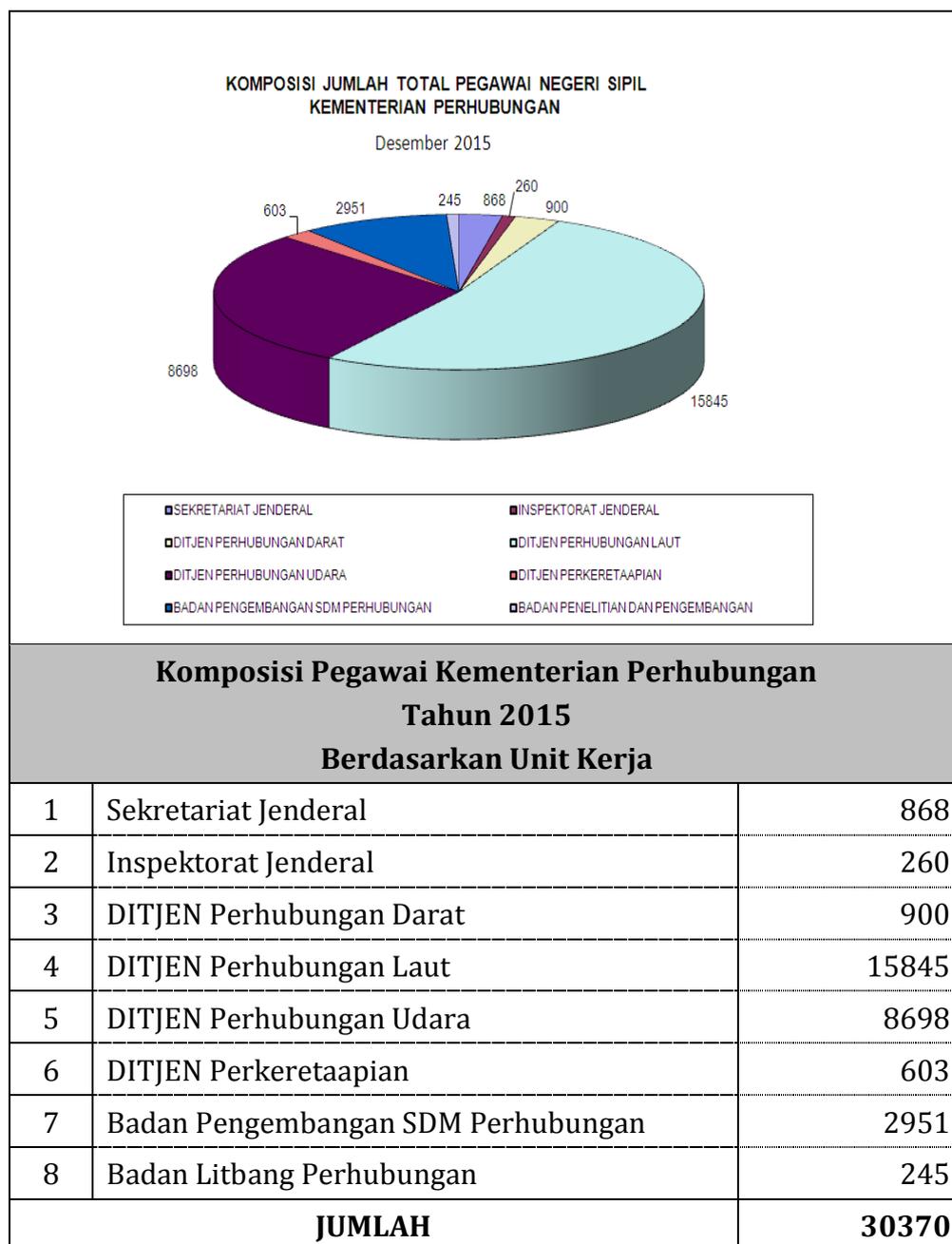


Gambar 1. Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan berdasarkan KM 60 Tahun 2010

c. Sumber Daya Manusia

Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Perhubungan Tahun 2015 menurut unit kerja, pendidikan, golongan, agama, dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Kementerian Perhubungan Tahun 2015 Berdasarkan Unit Kerja



Tabel 1.2

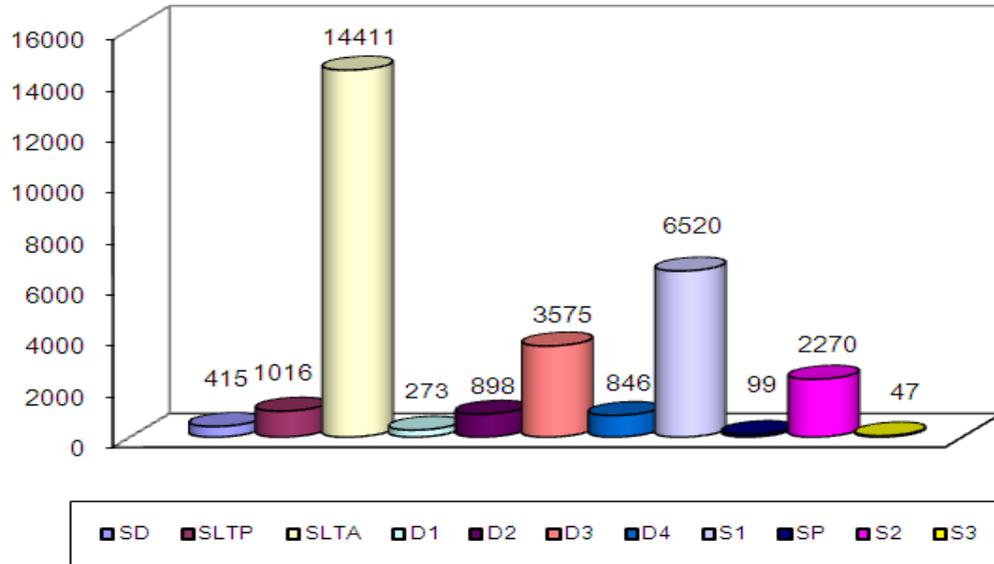
**KOMPOSISI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
(Berdasarkan Golongan, Pendidikan, Agama, Jenis Kelamin, dan Status Keluarga)
Posisi Desember 2015**

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	GOLONGAN				PENDIDIKAN											AGAMA					JENIS KELAMIN		STATUS KELUARGA	
			IV	III	II	I	S3	S2	SP	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	ISLAM	KRISTEN	PROTESTAN	HINDU	BUDDHA	L	P	K	TK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	SEKRETARIAT JENDERAL	868	115	567	183	3	6	137	1	329	7	79	3	2	282	9	13	771	72	24	1	0	560	308	596	272
2	INSPEKTORAT JENDERAL	260	65	165	29	1	0	64	1	132	7	23	0	0	30	2	1	226	19	15	0	0	189	71	214	46
3	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	900	74	559	266	1	3	180	4	282	63	182	28	3	147	4	4	750	100	29	21	0	639	261	623	277
4	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	15845	356	8100	7351	38	2	551	44	3140	170	1522	31	99	9151	818	317	12376	2670	421	378	0	13181	2664	12906	2939
5	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	8698	194	3643	4846	15	6	335	29	1459	286	1413	705	155	4115	134	61	6680	1436	488	94	0	6752	1946	6010	2688
6	DITJEN PERKERETAAPIAN	603	58	422	120	3	1	129	0	306	9	62	0	2	87	6	1	537	49	14	2	1	432	171	456	147
7	BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN	2951	358	1987	601	5	22	781	19	791	300	286	131	12	548	43	18	2556	260	84	51	0	2065	886	2524	427
8	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	245	61	156	28	0	7	93	1	81	4	8	0	0	51	0	0	189	45	9	2	0	124	121	192	53
JUMLAH		30370	1281	15599	13424	66	47	2270	99	6520	846	3575	898	273	14411	1016	415	24085	4651	1084	549	1	23942	6428	23521	6849

sumber :
Subbagian Data dan Formasi
Biro Kepegawaian dan Organisasi

**KOMPOSISI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BERDASARKAN PENDIDIKAN**

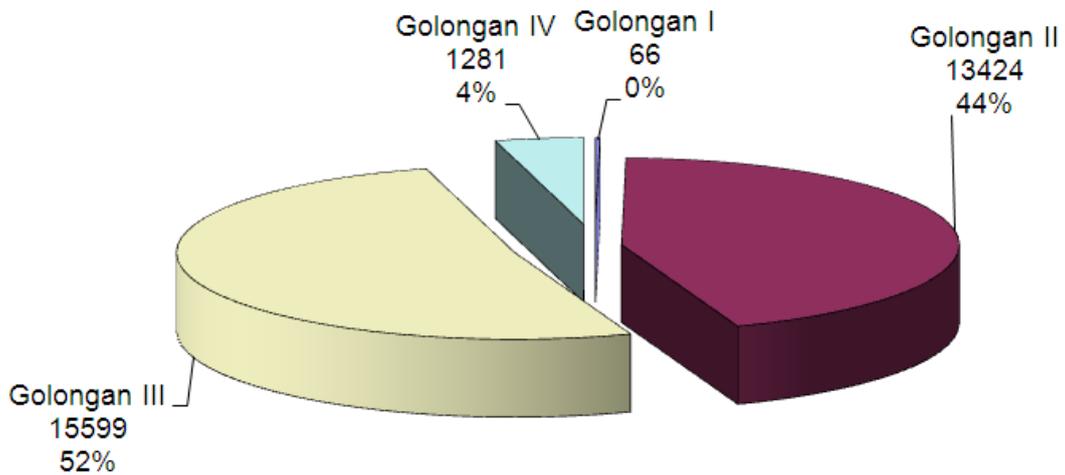
Desember 2015



Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan Berdasarkan Pendidikan

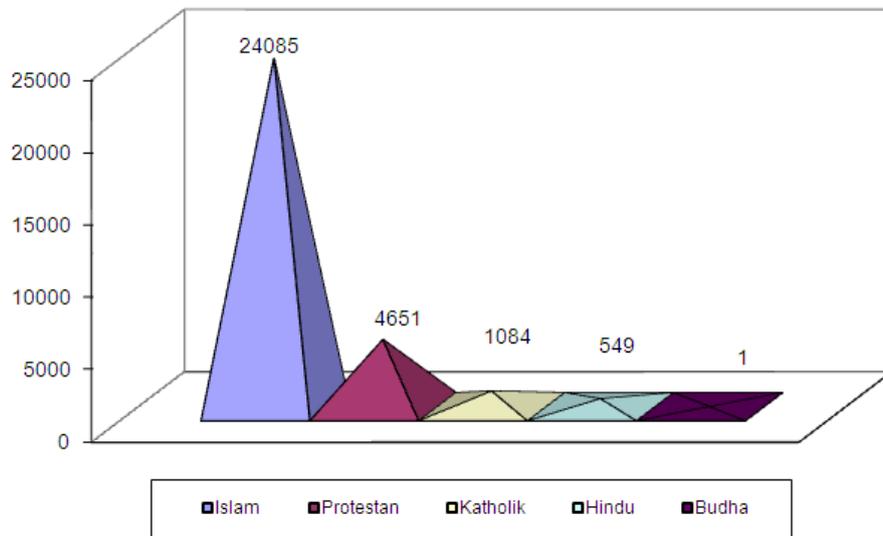
**KOMPOSISI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BERDASARKAN GOLONGAN**

Desember 2015



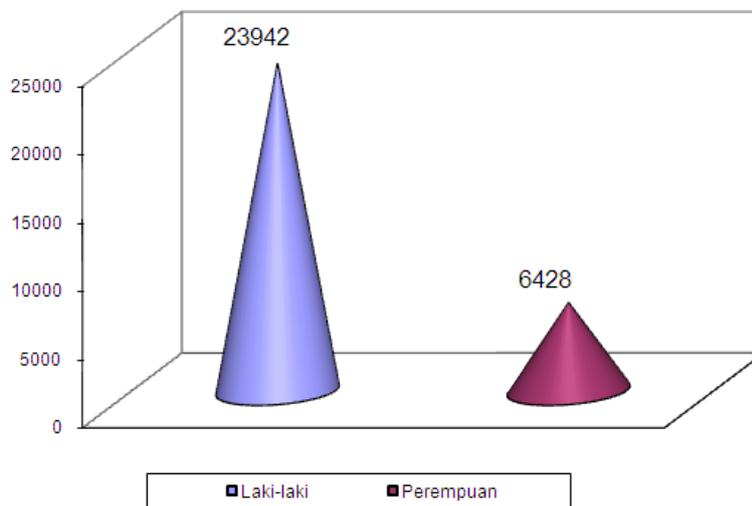
Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan Berdasarkan Golongan

**KOMPOSISI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BERDASARKAN AGAMA**
Desember 2015



Grafik 1.3. Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan Berdasarkan Agama

**KOMPOSISI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BERDASARKAN JENIS KELAMIN**
Desember 2015



Grafik 1.4. Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan Berdasarkan Jenis Kelamin

d. Tinjauan Rencana dan Strategi 2015

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015 dikelompokkan menjadi 3 (tiga) aspek, meliputi keselamatan dan keamanan, pelayanan, serta kapasitas transportasi.

1) Keselamatan dan Keamanan

Keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi ditujukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi transportasi jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan. Tingkat keselamatan dan keamanan transportasi diwujudkan melalui 2 (dua) sasaran yaitu :

a) Sasaran menurunnya angka kecelakaan transportasi dengan arah kebijakan meningkatkan keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi, melalui strategi :

(1) Penguatan kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi

Keselamatan transportasi merupakan tanggung jawab berbagai pihak, baik pemerintah sebagai regulator maupun pelaku usaha sebagai operator. Saat ini fungsi pengawasan dan pembinaan keselamatan transportasi telah dilakukan pemerintah melalui kegiatan dan program peningkatan keselamatan, diharapkan fungsi pengawas keselamatan juga dilakukan di dunia usaha melalui pembentukan unit khusus yang menangani fungsi pengawas keselamatan.

(2) Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha di bidang keselamatan transportasi

Keselamatan transportasi merupakan keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan transportasi yang lancar sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana beserta penunjangnya. Upaya peningkatan keselamatan transportasi telah dan akan terus dilakukan pemerintah melalui penyediaan sarana dan prasarana keselamatan serta sosialisasi keselamatan kepada masyarakat dan badan usaha. Peran serta masyarakat dan badan usaha dalam peningkatan keselamatan transportasi diwujudkan dalam peningkatan kepatuhan untuk mematuhi standar operasi dan prosedur penggunaan dan penyediaan sarana transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara.

(3) Pendidikan dan peningkatan kesadaran penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan sejak usia dini

Pendidikan keselamatan transportasi secara dini dengan menfokuskan pada penanaman pengetahuan tentang tata cara transportasi yang berkeselamatan (*transfer of knowledge*) dan

menanamkan nilai-nilai (*transform of values*) etika dan budaya tertib dan membangun perilaku pada generasi muda. Pribadi yang beretika mempunyai kecerdasan sosial yang tinggi dan kepekaan dalam bertransportasi, selain itu, juga akan mengerti pentingnya penggunaan peralatan dan prasarana keselamatan serta peraturan keselamatan.

- (4) Peningkatan/ pembaharuan regulasi terkini sesuai dengan standar keselamatan

Untuk memenuhi tuntutan perkembangan teknologi keselamatan transportasi diperlukan pembaharuan regulasi keselamatan yang mencakup norma, standar, prosedur, dan kriteria.

- (5) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan transportasi sesuai dengan perkembangan teknologi

Upaya peningkatan keselamatan transportasi selain pengurangan tingkat kecelakaan yang disebabkan kesalahan manusia (*human error*) dilakukan juga strategi melalui pemenuhan kuantitas dan tingkat kehandalan sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara.

- (6) Pemenuhan standar keselamatan transportasi berupa perlengkapan keselamatan transportasi jalan dan perkeretaapian maupun perlengkapan navigasi pelayaran dan penerbangan

Selain upaya pemenuhan kualitas dan kuantitas keselamatan transportasi, penurunan tingkat kecelakaan juga dilakukan melalui strategi ketentuan pemenuhan standar keselamatan pada sarana dan prasarana transportasi sesuai standar nasional dan internasional.

- (7) Peningkatan efektivitas pengendalian, pengaturan dan pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi

Dalam upaya pemenuhan standar keselamatan transportasi dilakukan melalui pemeriksaan atau audit secara berkala dan pelaksanaan *random check* yang meliputi standar keselamatan bidang prasarana, sarana, tata cara pengangkutan serta sumber daya manusia transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap peraturan standar keselamatan.

- (8) Peningkatan kehandalan/ kelaikan sarana dan prasarana transportasi melalui program pengujian dan sertifikasi sarana, prasarana termasuk fasilitas pendukung lainnya

Pengujian kehandalan/ kelaikan sarana prasarana transportasi dilakukan secara berkala untuk menjamin tingkat kehandalan dan kecukupan peralatan keselamatan yang diikuti melalui penerbitan sertifikasi sarana dan prasarana termasuk fasilitas pendukung lainnya.

- (9) Peningkatan koordinasi pelaksanaan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) serta Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan baik di tingkat nasional maupun daerah

RUNK adalah rencana keselamatan jalan jangka panjang yang diilhami oleh semangat *Decade of Action for Road Safety 2011-2020* Perserikatan Bangsa Bangsa yang dideklarasikan pada Maret 2010. Untuk itu maka 10 tahun pertama dari RUNK telah ditetapkan menjadi Dekade Aksi Keselamatan Jalan 2011-2020 dengan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2013 tertanggal 11 April 2013. Dalam Inpres tersebut, disebutkan 5 Pilar Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan yang meliputi:

- (a) Manajemen keselamatan jalan, dikoordinasikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas. Tanggung jawabnya adalah mendorong terselenggaranya koordinasi antar pemangku kepentingan dan terciptanya kemitraan sektoral.
- (b) Jalan yang berkeselamatan, dikoordinasikan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- (c) Kendaraan yang berkeselamatan, dikoordinasikan oleh Menteri Perhubungan.
- (d) Perilaku pengguna yang berkeselamatan, dikoordinasikan oleh Kepala Kepolisian RI.
- (e) Penanganan pra dan pasca kecelakaan, dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan.

Gerakan penurunan jumlah dan kualitas kecelakaan lalu-lintas di jalan melalui *Decade of Action* memiliki potensi mencapai sukses jika didorong oleh seluruh komponen masyarakat, industri, jalan dan transportasi secara terpadu.

- (10) Koordinasi peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan

Perlintasan sebidang merupakan faktor kritis dalam penyelenggaraan kereta api mengingat banyaknya kejadian kecelakaan yang terjadi di lokasi perlintasan. Berdasarkan pada amanat Undang-Undang 23 Tahun 2007, setiap perlintasan/perpotongan antara jalur kereta api dan jalan dibuat tidak sebidang. Pengecualian untuk pembangunan perlintasan tidak sebidang hanya dapat dilakukan dengan tetap menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalu-lintas jalan dengan mengikuti ketentuan yang diatur pada Permenhub No. 36 Tahun 2011, sehingga diperlukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah maupun operator perkeretaapian dalam penanganan perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan.

b) Sasaran menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi, melalui strategi antara lain :

(1) Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan transportasi

Dalam upaya pemenuhan standar keamanan transportasi dilakukan melalui pemeriksaan atau audit secara berkala dan pelaksanaan *random check* yang meliputi standar keamanan bidang prasarana, sarana, tata cara pengangkutan serta sumber daya manusia transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap peraturan standar keamanan, serta pemberian sanksi kepada aparat pemerintah atau operator sarana/prasarana transportasi yang lalai dalam melaksanakan tugas.

(2) Pemenuhan standar keamanan transportasi berupa perlengkapan keamanan transportasi

Keamanan transportasi adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan transportasi yang bebas dari gangguan dan/atau tindakan yang melawan hukum, langkah untuk mewujudkan keamanan transportasi melalui pemenuhan peralatan keamanan yang berupa alat pemindai barang-barang berbahaya dan alat pemindai jarak jauh dengan sistem terkoordinasi.

(3) Pencegahan terhadap penyusupan barang-barang yang mengancam keamanan penumpang

Pelaksanaan pencegahan terhadap penyusupan barang yang mengancam keamanan penumpang selain dilakukan melalui pemenuhan peralatan keamanan juga didukung dengan kualitas SDM yang tersertifikasi dan diaudit secara berkala oleh aparat pengawas keamanan transportasi.

(4) Peningkatan koordinasi dalam rangka mencegah terjadinya tindakan melawan hukum di sektor transportasi (pencurian, vandalisme, perompakan, pembajakan, teroris, dan lain-lain).

2) Pelayanan Transportasi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi ditetapkan 7 (tujuh) sasaran, yaitu : (1) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi; (2) Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan; (3) Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan; (4) Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance*; (5) Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan; (6) Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi; dan (7) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan *clean governance*.

Masing-masing sasaran tersebut ditempuh melalui upaya strategi sebagai berikut :

a) Sasaran meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, dengan arah kebijakan meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, melalui strategi antara lain :

(1) Peningkatan kehandalan sarana dan prasarana transportasi serta penataan jaringan/rute

Kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi dilakukan melalui rehabilitasi, pembangunan dan pengembangan prasarana perhubungan meliputi pembangunan terminal bus tipe A, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, bandar udara dan jaringan jalan kereta api; sedangkan kondisi sarana transportasi terus didorong untuk ditingkatkan kehandalannya antara lain peremajaan angkutan kota yang berbasis angkutan massal, peremajaan sarana kereta api, serta pembatasan usia kapal. Dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan juga dilakukan penataan rute pada angkutan laut untuk menjamin kepastian muatan dan kontinuitas angkutan laut antara wilayah barat Indonesia menuju wilayah timur Indonesia.

(2) Penyusunan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi

Standar pelayanan merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa yang dilengkapi dengan tolak ukur sebagai acuan penilaian kualitas yang merupakan kewajiban dan janji penyedia layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

(3) Implementasi standar pelayanan publik pada sarana dan prasarana transportasi, termasuk penyediaan fasilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus dan fasilitas yang responsif gender

Penyediaan layanan dan sarana transportasi yang berperspektif gender juga berarti mempertimbangkan dan mengakomodir permasalahan orang-orang atau kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus. Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan perlindungan dan layanan transportasi bagi lansia, penyandang cacat, perempuan khususnya perempuan hamil dan balita. Penyediaan layanan dan sarana tersebut mempertimbangkan beberapa aspek yaitu aspek aksesibilitas, kenyamanan, keselamatan, keamanan dan keterjangkauan. Aspek keamanan sering menjadi persoalan bagi perempuan, anak-anak, lansia bahkan penyandang cacat. Layanan dan sarana transportasi seyogyanya dapat diakses secara aman oleh mereka termasuk aman dari segala tindak kriminalitas dan kekerasan seksual.

- (4) Konsistensi penerapan *reward* dan *punishment* terhadap ketepatan pelayanan

Pelayanan jasa transportasi selain mengutamakan keamanan dan keselamatan layanan, juga dituntut untuk tepat waktu dalam layanan yang dijanjikan. Untuk meningkatkan layanan transportasi diupayakan melalui penerapan sanksi berupa kewajiban yang harus dipenuhi setiap waktu keterlambatan dan apresiasi masyarakat terhadap layanan yang memenuhi standar pelayanan.

- b) Sasaran terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan, dengan arah kebijakan memenuhi Sumber Daya Manusia (SDM) transportasi ditempuh melalui strategi antara lain:

- (1) Menyusun *Man Power Planning* SDM transportasi

Dalam rangka mencukupi SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dicapai melalui perencanaan tenaga kerja untuk mendapat tenaga kerja ahli yang kompeten di masa yang akan datang.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang jumlah dan kompetensi yang dimiliki oleh SDM perhubungan, baik SDM aparatur maupun non aparatur (masyarakat) yang akan digunakan sebagai data utama dalam penyelenggaraan berbagai program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan guna menyediakan dan mengembangkan SDM perhubungan sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Menyusun *Training Needs Analysis* (TNA) SDM transportasi

Dalam rangka mencukupi SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dicapai melalui *Training Needs Analysis* (TNA) SDM transportasi agar pelaksanaan pelatihan dapat tepat sasaran, bukan hanya pelatihan yang sifatnya hanya untuk menggugurkan kewajiban ataupun instruksi yang kurang mendasar.

Diklat transportasi yang selama ini dilaksanakan masih belum sepenuhnya terkoordinasi dengan subsektor khususnya dalam menggali kebutuhan SDM baik kompetensi maupun kuantitas yang dibutuhkan, sehingga penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan masih belum efektif, efisien dan tepat sasaran. Untuk kedepannya Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDMP) mengharapkan program diklat menjadi salah satu komponen utama dalam penentuan *man power planning* SDM Perhubungan, untuk itulah dibutuhkan penyusunan *Training Needs Analysis* (TNA).

- (3) Mengembangkan kapasitas diklat SDM transportasi

Dalam upaya pengembangan kapasitas diklat dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana diklat melalui perbaikan, pembangunan, modernisasi dan optimalisasi sarana dan prasarana diklat. Perbaikan dan/atau pembangunan

prasarana di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan dapat dilakukan secara sistematis, terencana, terukur dan berkelanjutan, dengan indikator terpenuhinya standar sarana prasarana sesuai konvensi nasional dan internasional.

Strategi pembangunan sarana dan prasarana diklat dilakukan berdasarkan pertimbangan akan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di wilayah NKRI untuk diklat transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian. Selain pembangunan kampus baru juga dilakukan pembangunan berupa pengembangan kampus di lingkungan UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan guna meningkatkan kapasitas dalam pencapaian target pemenuhan kebutuhan SDM Transportasi. Untuk menunjang terselenggaranya diklat tersebut, Badan Pengembangan SDM Perhubungan melakukan pengadaan, peningkatan dan rehabilitasi sarana diklat seperti alat praktek, simulator dan sarana penunjang lainnya yang berbasis IT, khususnya elektronika, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tenaga pengajar dan metode diklat merupakan faktor penting lainnya dalam rangka pengembangan kapasitas diklat SDM Transportasi. Tenaga pengajar di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang terdiri dari dosen, widyaiswara dan instruktur perlu dilakukan *upgrading skill* dan kompetensi secara berkala guna mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan isu-isu transportasi dunia sehingga kualitas lulusan yang dihasilkan sesuai dengan harapan dan perkembangan dunia transportasi.

Selain itu, update metode diklat, baik kurikulum dan silabus perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi transportasi.

(4) Menata regulasi penyelenggaraan diklat SDM transportasi

Bentuk, struktur, sistem dan organisasi harus senantiasa menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi. Salah satu upaya penunjang untuk mengembangkan SDM Transportasi yaitu Restrukturisasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang disertai dengan penyiapan regulasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan SDM transportasi.

(5) Meningkatkan tata kelola diklat dan kualitas lulusan

Badan Pengembangan SDM Perhubungan merupakan suatu organisasi yang bersifat dinamis, sehingga diperlukan upaya yang senantiasa memperhatikan dan menganalisis dinamika lingkungan strategis yang ada, baik isu strategis nasional dan isu strategis internasional.

Restrukturisasi kelembagaan mencakup peningkatan status lembaga pendidikan serta pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di seluruh UPT Badan Pengembangan SDM

Perhubungan, peningkatan Balai Pendidikan dan Pelatihan menjadi Pendidikan Tinggi (Politeknik/Akademi), dan Eselonisasi atau penyempurnaan eselon (peningkatan eselon) untuk beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT), penyempurnaan organisasi Sekolah Tinggi menjadi Institut dan juga harus terbuka terhadap organisasi multimoda transportasi dalam rangka ikut mendukung sistem logistik nasional serta pembentukan unit dalam organisasi yang secara khusus menangani dan mengelola kinerja pegawai Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

(6) Meningkatkan penyerapan lulusan diklat transportasi

Peningkatan penyerapan lulusan diklat dapat dilakukan dengan melakukan inventarisasi data lulusan diklat transportasi melalui penyusunan *database* lulusan diklat di lingkungan BPSDM Perhubungan, serta upaya promosi dan sosialisasi secara optimal dalam skala yang lebih luas. Komitmen bersama dan kerjasama dengan *stakeholder*, baik dalam skala nasional maupun internasional perlu dilakukan sebagai salah satu upaya percepatan penyerapan lulusan diklat transportasi.

c) Sasaran meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan, dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas penelitian transportasi, melalui strategi antara lain :

(1) Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya peneliti serta tenaga fungsional pendukung

Peningkatan kualitas penelitian dapat dicapai dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya peneliti serta tenaga fungsional pendukung sehingga penelitian yang dihasilkan kedepannya dapat berkualitas sehingga mampu menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

(2) Peningkatan sinergitas antara Badan Litbang Perhubungan dengan pengguna jasa penelitian

Peningkatan kualitas penelitian dapat dicapai dengan meningkatkan sinergitas antara Badan Litbang Perhubungan dengan pengguna jasa penelitian dalam rangka meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian.

(3) Peningkatan kerjasama penelitian antar lembaga riset dan industri

Peningkatan kualitas penelitian dapat dicapai dengan meningkatkan kerjasama penelitian antar lembaga riset dan industri untuk merumuskan kebijakan strategis penyelenggaraan transportasi.

(4) Penyempurnaan regulasi dan kelembagaan untuk penguatan peran Badan Litbang Perhubungan

Penguatan peran penelitian dan pengembangan perhubungan perlu ditingkatkan melalui penyempurnaan regulasi dan kelembagaan sehingga dapat berperan aktif dalam menentukan

kebijakan pembangunan sektor perhubungan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

- d) Sasaran meningkatnya kinerja capaian dalam mewujudkan *good governance*, dengan arah kebijakan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja, melalui strategi antara lain :
- (1) Penuntasan agenda reformasi birokrasi melalui penataan kelembagaan
Peningkatan kinerja capaian dalam mewujudkan *good governance* melalui penuntasan agenda reformasi birokrasi dengan penataan kelembagaan baik dari sisi organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusianya.
 - (2) Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja serta keuangan Kementerian Perhubungan
Peningkatan kinerja capaian dalam mewujudkan *good governance* melalui penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja dan keuangan Kementerian Perhubungan secara terintegrasi, terpercaya dan dapat diakses publik.
 - (3) Penyediaan layanan informasi transportasi
Peningkatan kinerja dalam mewujudkan *good governance* dengan penyediaan layanan informasi transportasi yang dapat diakses publik secara mudah. Kemudahan informasi terhadap layanan transportasi sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan transportasi yang berkualitas.
 - (4) Penyederhanaan perizinan sektor transportasi
Penyederhanaan perizinan sektor transportasi dijadikan sebagai langkah dalam perbaikan pelayanan publik di sektor transportasi. Penyederhanaan ini ditujukan agar tercapai pelayanan publik yang efisien, transparan, cepat, akuntabel, dan dapat memberikan kepastian hukum, serta sebagai usaha untuk meningkatkan dunia investasi transportasi di Indonesia.
 - (5) Penerapan *e-government* di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Peningkatan kinerja capaian dalam mewujudkan *good governance* melalui penerapan *e-government* di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi untuk meningkatkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien.
 - (6) Penyediaan ruang partisipasi publik
Peningkatan kinerja capaian dalam mewujudkan *good governance* dengan membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam menyusun dan mengawasi penerapan kebijakan di sektor transportasi, sehingga setiap kebijakan dapat secara nyata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

e) Sasaran meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan, dengan arah kebijakan meningkatkan kuantitas dan kualitas penetapan dan implementasi regulasi sektor transportasi, melalui strategi antara lain :

(1) Pemetaan arah/ kebutuhan kerangka regulasi

Peningkatan penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan dengan melakukan pemetaan arah/ kebutuhan kerangka regulasi untuk mempercepat pelaksanaan prioritas pembangunan transportasi selama 5 (lima) tahun ke depan.

(2) Peningkatan koordinasi dengan instansi lainnya

Peningkatan penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi lainnya terkait penyelesaian peraturan perundang-undangan.

(3) Percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan

Peningkatan penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan dengan percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai amanah undang-undang bidang transportasi. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan amanah undang-undang bidang transportasi perlu dipercepat agar dapat menjadi landasan dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

(4) Percepatan pelaksanaan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi di bidang transportasi

Peningkatan penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan dengan melakukan percepatan pelaksanaan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi di bidang transportasi.

(5) Evaluasi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan yang menghambat percepatan pembangunan transportasi

Peningkatan penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan dengan melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan menghambat percepatan pembangunan transportasi. Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dapat diminimalisir untuk mempercepat pembangunan sektor transportasi.

f) Sasaran menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi, dengan arah kebijakan menerapkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, melalui strategi antara lain :

(1) Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan tahan terhadap dampak perubahan iklim/ cuaca ekstrim

Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan peningkatan penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi

melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan tahan terhadap dampak perubahan iklim/cuaca ekstrim. Prasarana dan sarana transportasi yang ramah lingkungan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengurangi pemanasan global yang disumbangkan dari sektor transportasi.

(2) Pemanfaatan bahan bakar yang berbasis energi baru terbarukan.
Pemanfaatan bahan bakar yang berbasis *fossil fuel* saat ini sangat tinggi, sementara jumlah bahan bakar *fossil fuel* terus menipis. Dengan kondisi tersebut pemanfaatan bahan bakar yang berbasis energi baru terbarukan di sektor transportasi harus dikedepankan.

(3) Penerapan sistem manajemen transportasi yang efektif dan efisien
Penerapan sistem manajemen transportasi yang efektif dan efisien dilakukan untuk mewujudkan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang disumbangkan dari sektor transportasi dan peningkatan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi.

(4) Mendorong pengguna kendaraan pribadi berpindah ke transportasi umum/massal

Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan peningkatan penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi dengan mendorong penggunaan angkutan umum/massal terutama bagi masyarakat pengguna kendaraan pribadi.

g) Sasaran meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan *clean governance*, dengan arah kebijakan pelaksanaan pengawasan intern yang berintegritas, professional dan amanah, melalui strategi antara lain :

(1) Mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal sebagai konsultan dan *quality assurance*.

Dalam rangka mendorong terwujudnya *clean governance* serta memastikan tujuan pembangunan transportasi dapat dicapai secara hemat, efisien, efektif dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka Inspektorat Jenderal telah mencanangkan perubahan paradigma yang diarahkan kepada peningkatan peran Inspektorat Jenderal menjadi konsultan dan katalisator yang lebih mengarah kepada penghantar bagi suatu unit kerja untuk meningkatkan kualitas kinerjanya sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku serta lebih memberikan solusi atas masalah dan hambatan yg dihadapi unit kerja tersebut dalam mencapai tujuan organisasi.

(2) Peningkatan kualitas hasil pengawasan

Peningkatan kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan *clean governance* melalui peningkatan kualitas hasil pengawasan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

(3) Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Pengawasan

Peningkatan kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan *clean governance* melalui peningkatan kualitas dan

kompetensi SDM pengawasan di Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

3) Kapasitas Transportasi

Dalam rangka meningkatkan kapasitas transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan 5 (lima) sasaran, yaitu : (1) Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda; (2) Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang; (3) Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia; (4) Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan; dan (5) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

Dalam mencapai sasaran peningkatan kapasitas transportasi ditempuh melalui strategi pencapaian sebagai berikut :

a) Sasaran meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda, dengan arah kebijakan meningkatkan kapasitas, konektivitas/ aksesibilitas antar wilayah dan keterpaduan antarmoda/multimoda, melalui strategi antara lain :

(1) Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda diwujudkan salah satunya melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi. Kualitas perencanaan akan sangat menentukan kualitas pembangunan sektor transportasi selama 5 (lima) tahun ke depan.

(2) Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berdasarkan *outcomes*

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda diwujudkan salah satunya melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berdasarkan *outcomes*, sehingga pembangunan transportasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dapat dirasakan langsung manfaat pembangunan oleh masyarakat.

(3) Mendorong pembangunan infrastruktur transportasi melalui kerjasama Pemerintah dan badan usaha serta melalui pembiayaan swasta

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda melalui peningkatan kerjasama pemerintah dan badan usaha serta peningkatan investasi swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi nasional melalui penguatan kelembagaan dan sistem perencanaan proyek-proyek yang akan dikerjasamakan.

Kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur transportasi antara lain : Penyelenggaraan kerjasama pemerintah dan badan usaha pada sektor perkeretaapian sebanyak 6 proyek sampai pada tahun 2019; Penyelenggaraan kerjasama pemerintah dan badan usaha pada sektor transportasi laut ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 10 proyek; serta Penyiapan dokumen terhadap infrastruktur transportasi udara yang siap ditawarkan kepada swasta sampai pada tahun 2019 sebanyak 3 proyek.

(4) Pembangunan jaringan pelayanan yang terintegrasi antarmoda

Dalam setiap peraturan perundang-undangan transportasi diamanahkan untuk menyusun tatanan dan rencana induk masing-masing moda, yaitu rencana induk jaringan lalu-lintas dan angkutan jalan, tatanan perkeretaapian nasional, tatanan kepelabuhanan nasional dan tatanan kebandarudaraan nasional, serta tersusunnya perencanaan umum jaringan jalan nasional dan jalan tol. Salah satu faktor yang diamanahkan dalam penyusunan tatanan dan rencana induk transportasi adalah keterpaduan intra dan antarmoda transportasi.

Pada dasarnya transportasi antarmoda/ multimoda adalah pembangunan transportasi yang mempertimbangkan jenis dan karakteristik sistem transportasi yang digunakan, dan mempertimbangkan sisi efisiensi, efektivitas dan kemudahan sistem operasinya, sehingga mampu melahirkan sistem transportasi yang berdaya saing tinggi. Upaya keterintegrasian ini diwujudkan melalui antara lain ketersediaan angkutan kereta api di bandar udara dan pelabuhan.

(5) Penyiapan konsep dan implementasi angkutan laut dari barat ke timur Indonesia

Dalam rangka menjamin ketersediaan barang dengan harga yang terjangkau diperlukan konsep untuk memperkuat jalur pelayaran yang dititikberatkan pada Indonesia bagian Timur yang dimaksudkan selain untuk mengkoneksikan jalur pelayaran dari Barat ke Timur Indonesia juga akan mempermudah akses niaga dari negara-negara Pasifik bagian selatan ke negara Asia bagian Timur. Pada prinsipnya, ketersediaan pelayanan angkutan kapal dari barat ke timur Indonesia merupakan penataan trayek tetap dan teratur yang harus didukung dengan pengembangan pelabuhan agar dapat melayani kapal dengan ukuran besar, mengingat saat ini untuk terminal-terminal domestik, ukuran kapal peti kemas yang bisa masuk tidak lebih dari 2600 TEUs dan kebanyakan hanya mampu melayani kapal ukuran 800 atau 900 TEUs, dengan demikian akan mewujudkan efisiensi biaya logistik nasional.

- b) Sasaran meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang, dengan arah kebijakan meningkatkan produksi moda transportasi, melalui strategi antara lain:
- (1) Penerbitan regulasi untuk mendorong produktivitas moda transportasi
Saat ini dan di masa mendatang pemerintah berusaha untuk mengurangi hambatan regulasi untuk menuju penyelenggaraan transportasi yang terbuka dan modern melalui penyederhanaan perizinan dan perizinan yang berbasis elektronik. Keberhasilan melakukan transformasi penyelenggaraan sektor transportasi yang lebih terbuka kepada pasar melalui persaingan sehat dan kepastian berinvestasi, akan menjadi kunci berkembangnya industri sektor transportasi nasional.
 - (2) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana transportasi
Untuk meningkatkan produksi angkutan barang dan penumpang, dalam 5 (lima) tahun ke depan pemerintah berupaya untuk menyediakan prasarana transportasi dan memberikan peluang kepada badan usaha untuk ikut berpartisipasi dalam penyediaan prasarana transportasi serta mendorong dunia usaha untuk meningkatkan ketersediaan sarana transportasi.
 - (3) Peningkatan efektivitas distribusi transportasi nasional dan regional
Peningkatan produksi angkutan penumpang dan barang melalui peningkatan efektivitas distribusi transportasi nasional dan regional.
- c) Sasaran meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia, dengan arah kebijakan meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia, melalui strategi antara lain :
- (1) Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah-wilayah perbatasan dan wilayah-wilayah terluar
Jaringan transportasi ke depan akan diperluas dan dibangun lebih banyak lagi untuk meningkatkan keseimbangan transportasi antara Jawa dan luar Jawa dan meningkatkan aksesibilitas di daerah kawasan timur Indonesia, daerah terpencil, dan pedesaan, kawasan perbatasan, serta daerah tertinggal lainnya, melalui percepatan pembangunan infrastruktur transportasi;
 - (2) Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi di wilayah terpencil, pedalaman, perbatasan dan rawan bencana;
Selain upaya penyediaan prasarana transportasi juga dilakukan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan konektivitas yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Selain untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, prasarana transportasi juga diarahkan untuk peningkatan aksesibilitas

daerah rawan bencana melalui penyediaan bandar udara yang dapat didarati pesawat Hercules dan pelabuhan untuk kepentingan pasokan logistik di saat terjadi bencana alam.

(3) Penyediaan sarana angkutan keperintisan

Guna merangsang pertumbuhan wilayah, pemerintah berupaya untuk membuka keterisolasian daerah terpencil dan pedalaman agar mempunyai keterkaitan dengan daerah maju melalui penyediaan pelayanan angkutan keperintisan darat, laut dan udara.

d) Sasaran meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan, dengan arah kebijakan mengembangkan sistem angkutan umum massal dengan orientasi kepada angkutan bus maupun rel dengan fasilitas alih moda terpadu, melalui strategi antara lain :

(1) Penyiapan konsep angkutan umum massal perkotaan yang lebih matang dan komprehensif

Penyiapan konsep angkutan umum massal perkotaan yang lebih matang dan komprehensif bertujuan untuk meningkatkan jumlah penduduk perkotaan yang akan menggunakan sistem angkutan umum, meninggalkan kendaraan pribadinya di rumah, dan menciptakan transportasi kota yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkeadaban. Kota akan bertahan secara lingkungan dan efisiensi energi kalau pergerakan ekonominya didukung oleh sistem angkutan umum cepat masal yang didukung dengan jaringan pengumpan (*feeder services*).

(2) Pengembangan BRT

Penerapan angkutan umum massal perkotaan salah satunya dilakukan melalui pengembangan *Bus Rapid Transit* (BRT). Penerapan sistem BRT perlu terpadu dalam fisik/prasarana, pelayanan, serta dalam konteks transportasi cerdas dengan memanfaatkan *Information Technology*. Transportasi antarmoda di perkotaan perlu dibangun dengan memperhatikan pengembangan transportasi tidak bermotor dalam rangka menuju terwujudnya transportasi perkotaan yang berkelanjutan, yang didukung komitmen yang kuat dari Kepala Daerah dalam bentuk perencanaan, pendanaan dan kesiapan pengoperasian.

(3) Pembangunan dan pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis rel

Selain pengembangan angkutan umum perkotaan dengan BRT, angkutan perkotaan dapat dilakukan melalui pembangunan angkutan massal perkotaan berbasis rel.

(4) Penyediaan dana subsidi (PSO)

Penerapan angkutan umum dengan BRT dan MRT dianggap tidak menarik bagi kota-kota yang belum menerapkannya karena dipersepsikan membebani anggaran. Oleh karena itu untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem angkutan umum yang handal dan berkelanjutan dibutuhkan antara lain dukungan

kebijakan secara nyata dari pemerintah di sektor anggaran melalui Penyediaan Dana Subsidi (PSO) yang terarah.

- e) Sasaran meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan, dengan arah kebijakan meningkatkan aplikasi teknologi informasi dalam sistem manajemen perkotaan, melalui strategi antara lain :

- (1) Penerapan sistem informasi lalu-lintas secara *real time*, penerapan *Area Traffic Control System (ATCS)* dan *Virtual Mobility*

Penerapan Manajemen Sistem Transportasi Perkotaan yang modern, mulai dari skala mikro persimpangan dan ruas jalan dengan Manajemen Lalu-Lintas sampai kepada *full-scale demand management* seperti *Electronic Road Pricing*. Dalam skala dan kondisi tertentu yang memungkinkan, *Area Traffic Control System (ATCS)* dapat dikembangkan secara efektif hanya kalau ruas-ruas jalan tidak berada dalam keadaan jenuh (*over-saturated*). Jaringan jalan dalam keadaan macet parah pada semua ruasnya akan tidak efektif apabila diterapkan *Area Traffic Control System (ATCS)*. Transportasi kota dengan 2 (dua) komponen utama yakni jaringan jalan dan sistem angkutan umum perlu dinaungi oleh Sistem Manajemen Transportasi yang komprehensif dan sesuai dengan hierarki pergerakan, fasilitas ruang jalan, dan skala kepadatan/kemacetan lalu-lintas yang ada.

- (2) Penerapan sistem tiket elektronik yang terintegrasi

Intelligent Transport System (ITS) pada prinsipnya adalah penerapan teknologi maju di bidang elektronika, komputer dan telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman dan nyaman sekaligus ramah lingkungan. Sistem ini mempunyai tujuan dasar untuk membuat sistem transportasi yang mempunyai kecerdasan, sehingga dapat membantu pemakai transportasi dan pengguna transportasi untuk mendapatkan informasi, mempermudah transaksi, meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana transportasi, mengurangi kemacetan atau antrian, meningkatkan keamanan dan kenyamanan, mengurangi polusi lingkungan, mengefisienkan pengelolaan transportasi.

3. Anggaran Kementerian Perhubungan

- a. Dalam pelaksanaan DIPA tahun 2015 secara keseluruhan terdapat Anggaran Rupiah Murni (RM), Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Badan Layanan Umum (BLU), dan Pencantuman Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) pada Unit Organisasi sebagai berikut :

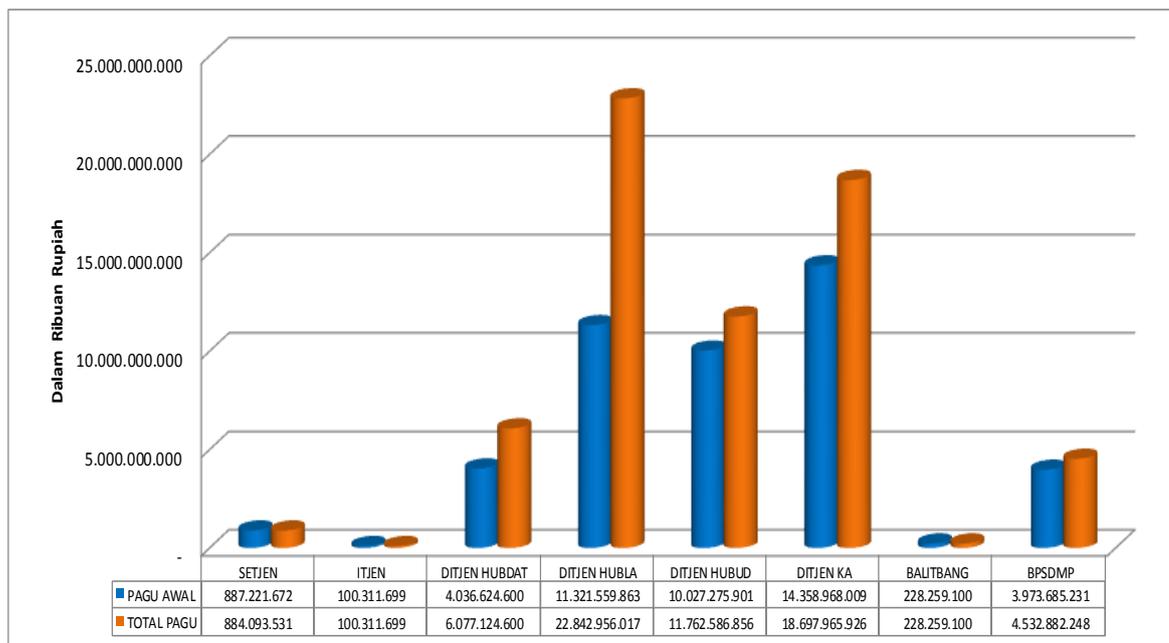
Tabel 1.3 Perkembangan Alokasi Pagu Dana Tahun Anggaran 2015
Kementerian Perhubungan

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO.	UNIT KERJA	JUMLAH UPT/SATKER	PAGU AWAL	APBN-P.TA. 2015	PENCANTUMAN PHLN	PENAMBAHAN PAGU BLU DAN PNBP	REALOKASI TUNKIN	TOTAL PAGU
1	SETJEN	18	887.221.672	-	-	-	(3.128.141)	884.093.531
2	ITJEN	1	100.311.699	-	-	-	-	100.311.699
3	DITJEN HUBDAT	82	4.036.624.600	2.040.500.000	-	-	-	6.077.124.600
4	DITJEN HUBLA	328	11.321.559.863	11.521.396.154	-	-	-	22.842.956.017
5	DITJEN HUBUD	162	10.027.275.901	1.718.615.000	-	16.695.955	-	11.762.586.856
6	DITJEN KA	21	14.358.968.009	4.311.789.505	24.080.271	-	3.128.141	18.697.965.926
7	BALITBANG	5	228.259.100	-	-	-	-	228.259.100
8	BPSDMP	26	3.973.685.231	427.900.000	-	131.297.017	-	4.532.882.248
JUMLAH		643	44.933.906.075	20.020.200.659	24.080.271	147.992.972	-	65.126.179.977

Sumber : Biro Keuangan dan Perlengkapan

Grafik 1.5
PERKEMBANGAN ALOKASI PAGU DANA TAHUN ANGGARAN 2015
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



Sumber : Biro Keuangan dan Perlengkapan

b. Anggaran Belanja Kementerian Perhubungan Tahun 2015

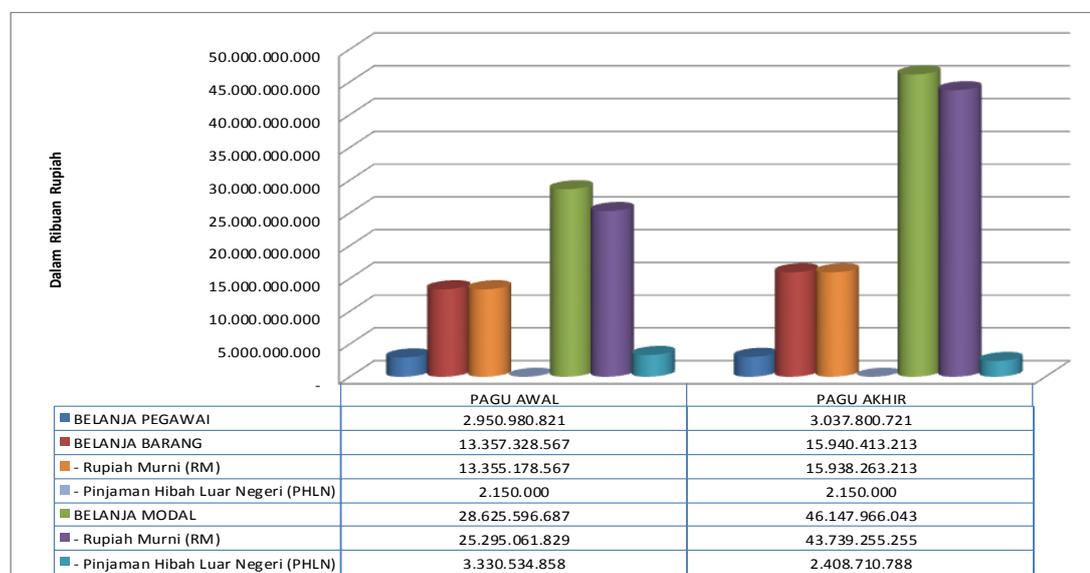
Tabel 1.4 Anggaran Belanja Kementerian Perhubungan Tahun 2015

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO.	JENIS BELANJA	PAGU AWAL	PAGU AKHIR
I.	BELANJA PEGAWAI	2.950.980.821	3.037.800.721
II.	BELANJA BARANG	13.357.328.567	15.940.413.213
	- Rupiah Murni (RM)	13.355.178.567	15.938.263.213
	- Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)	2.150.000	2.150.000
III.	BELANJA MODAL	28.625.596.687	46.147.966.043
	- Rupiah Murni (RM)	25.295.061.829	43.739.255.255
	- Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)	3.330.534.858	2.408.710.788
JUMLAH		44.933.906.075	65.126.179.977

Sumber : Biro Keuangan dan Perlengkapan

Grafik 1.6
ALOKASI PAGU DANA TAHUN ANGGARAN 2015
PER JENIS BELANJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



Sumber : Biro Keuangan dan Perlengkapan

- c. Dalam upaya pelaksanaan DIPA tahun 2015 agar terselenggara dengan tertib, terkendali, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, telah dilaksanakan monitoring pelaksanaan anggaran termasuk menampung dan mengupayakan semaksimal mungkin penyelesaian masalah yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran. Monitoring dan pembinaan anggaran ini dilaksanakan dengan mempedomani :
- 1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 71 Tahun 2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan;
 - 2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
 - 3) Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 3 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Anggaran, *E-Monitoring* dan Pengendalian Program/ Kegiatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - 4) Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 4 Tahun 2010 tanggal 01 Juni 2010 tentang Percepatan Peningkatan Daya Serap DIPA Tahun 2010 di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- d. Realisasi DIPA tahun 2015 berdasarkan data monitoring dan pembinaan anggaran bersama-sama dengan Subsektor/ Badan tercermin sebagai berikut :

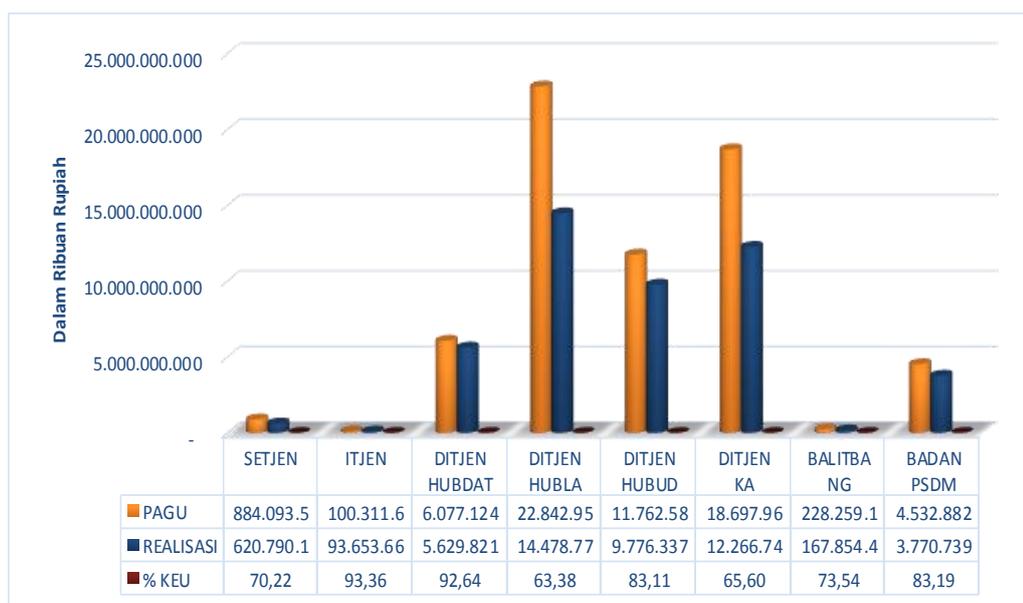
Tabel 1.5
REKAPITULASI PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2015
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO.	UNIT ESELON I	PAGU	REALISASI	% KEU
I	SETJEN	884.093.531	620.790.175	70,22
II	ITJEN	100.311.699	93.653.661	93,36
III	DITJEN HUBDAT	6.077.124.600	5.629.821.787	92,64
IV	DITJEN HUBLA	22.842.956.017	14.478.777.310	63,38
V	DITJEN HUBUD	11.762.586.856	9.776.337.016	83,11
VI	DITJEN KA	18.697.965.926	12.266.743.176	65,60
VII	BALITBANG	228.259.100	167.854.403	73,54
VIII	BADAN PSDM	4.532.882.248	3.770.739.391	83,19
JUMLAH		65.126.179.977	46.804.716.919	71,87

Sumber : Biro Keuangan dan Perlengkapan

Grafik 1.7
REKAPITULASI PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2015
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



Sumber : Biro Keuangan dan Perlengkapan

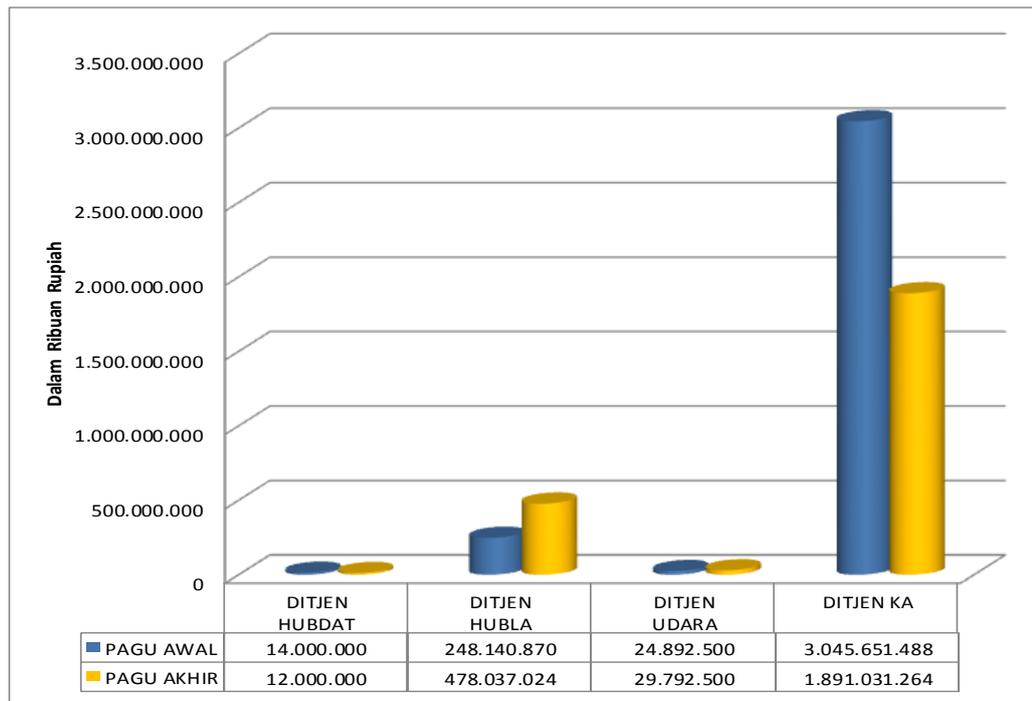
- e. Pada Tahun Anggaran 2015 pagu dana Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) terdiri dari :

Tabel 1.6
PERKEMBANGAN ALOKASI DANA
PINJAMAN HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) TAHUN ANGGARAN 2015
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO.	UNIT KERJA	PAGU AWAL	APBN-P	PENCANTUMAN PHLN	PAGU AKHIR
1	DITJEN HUBDAT	14.000.000	(2.000.000)	-	12.000.000
2	DITJEN HUBLA	248.140.870	229.896.154	-	478.037.024
3	DITJEN UDARA	24.892.500	4.900.000	-	29.792.500
4	DITJEN KA	3.045.651.488	(1.178.700.495)	24.080.271	1.891.031.264
JUMLAH		3.332.684.858	(945.904.341)	24.080.271	2.410.860.788

Sumber : Biro Keuangan dan Perlengkapan



Grafik 1.8 Perkembangan alokasi dana Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun Anggaran 2015 Kementerian Perhubungan

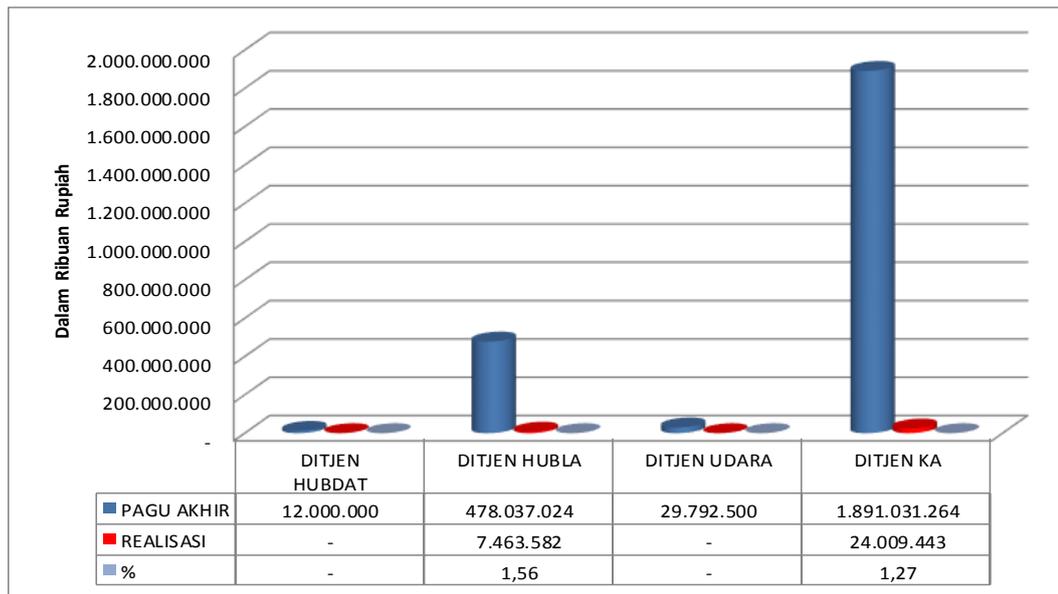
- f. Realisasi Anggaran Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun 2015 terdiri dari :

Tabel 1.7 Realisasi Anggaran Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun Anggaran 2015 Kementerian Perhubungan

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO.	UNIT KERJA	PAGU AKHIR	REALISASI	%
1	DITJEN HUBDAT	12.000.000	-	-
2	DITJEN HUBLA	478.037.024	7.463.582	1,56
3	DITJEN UDARA	29.792.500	-	-
4	DITJEN KA	1.891.031.264	24.009.443	1,27
JUMLAH		2.410.860.788	31.473.024	1,31

Sumber : Biro Keuangan dan Perlengkapan



Sumber : Biro Keuangan dan Perlengkapan

Grafik 1.9 Realisasi Anggaran Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun Anggaran 2015 Kementerian Perhubungan

4. Peristiwa Penting 2015



23 JANUARI 2015

PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN DERMAGA PADA TERMINAL CURAH CAIR ANTARA KEMENHUB DENGAN PT.PELINDO (PERSERO) DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PELABUHAN KUALA TANJUNG





9 FEBRUARI 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
MERESMIKAN APLIKASI *FLIGHT APPROVAL ONLINE*.



10 FEBRUARI 2015

KEYNOTE SPEECH SEMINAR
MERAH PELUANG BISNIS DI JALUR
SUTERA MARITIM DAN TOL LAUT.



10 MARET 2015

KUNJUNGAN KERJA MENTERI
PERHUBUNGAN DAN
PELETAKAN BATU PERTAMA
TERMINAL TIMUR TIRTONADI,
SURAKARTA, JAWA TENGAH.



17 MARET 2015

PELUNCURAN BUKU *KAI RECIPE*,
PERJALANAN TRANSFORMASI KERETA API
INDONESIA, AUDITORIUM FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS UI SALEMBA.



8 APRIL 2015

MERESMIKAN PENGOPERASIAN KERETA API PETI KEMAS MENANDAI DIOPERASIKANNYA JALUR KERETA API YANG MENGHUBUNGAN TERMINAL PETI KEMAS TANJUNG PERAK SURABAYA DENGAN LAYANAN KERETA API.



06 MEI 2015

PERESMIAN DAN PENGOPERASIAN PELAYARAN PERDANA KAPAL RORO KM. MUTIARA PERSADA III RUTE PANJANG LAMPUNG - TANJUNG PERAK SURABAYA DI PROVINSI LAMPUNG (TOL LAUT).



18 MEI 2015

*GROUND*BREAKING PENGEMBANGAN BANDAR UDARA INTERNATIONAL SYAMSUDIN NOOR BANJARMASIN.



20 MEI 2015

MENTERI PERHUBUNGAN MERESMIKAN ACARA *COMMERCIAL LAUNCHING* PERIZINAN ANGKUTAN UDARA *ONLINE* GUNA MENDUKUNG MODERNISASI LAYANAN.



13 JUNI 2015

PERESMIAN DERMAGA 6
PELABUHAN PENYEBERANGAN
BAKAUHENI DAN PERESMIAN
KMP SEBUKU.



19 JUNI 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
IGNASIUS JONAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN RAHMAT
GOBEL MENINJAU KAPAL PELNI
GUNUNG DEMPO SEBELUM
BERLAYAR MEMBAWA
KEBUTUHAN POKOK KE INDONESIA
TIMUR.



20 JUNI 2015

PERESMIAN PENGOPERASIAN
PELABUHAN TANJUNG BATU,
KABUPATEN BELITUNG



06 JULI 2015

PERESMIAN STASIUN KERETA API
PALMERAH DAN PENGOPERASIAN
JALUR GANDA KA LINTAS DURI -
TANGERANG, PALMERAH.



22 JULI 2015

PERESMIAN PERAKITAN PRODUKSI 1.000 UNIT BUS BESAR *BUS RAPID TRANSIT* (BRT) TAHUN ANGGARAN 2015 DI UNGARAN JAWA TENGAH.



29 AGUSTUS 2015

PERESMIAN KMP LEMA, KMP ERANA, KMP ILE LABALEKAN, KMP MOINIT, KMP BAMBIT, PELABUHAN ARAR, PELABUHAN PENYEBERANGAN WAIGEO, PELABUHAN LAUT ARAR, GEDUNG DAN FASILITAS DIKLAT BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) SORONG.



18 AGUSTUS 2015

PENINJAUAN OPERASI EVAKUASI JATUHNYA PESAWAT TRIGANA AIR, SENTANI PAPUA



21 SEPTEMBER 2015

PERESMIAN PENGOPERASIAN PERDANA MESIN BOR BAWAH TANAH ANTAREJA OLEH PRESIDEN JOKO WIDODO.



23 SEPTEMBER 2015

PENANDATANGANAN
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA DIRJEN
PERKERETAAPIAN KEMENHUB,
PEMKOT SURABAYA DAN PT.
KERETA API INDONESIA
(PERSERO) DI SURABAYA.



6 OKTOBER 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
MERESMIKAN KN . PATROLI DI
BATAM DAN KUNJUNGAN KE
DERMAGA.



10 OKTOBER 2015

PENINJAUAN JALUR KERETA API
BANDARA INTERNASIONAL
MINANGKABAU, PADANG.



10 NOVEMBER 2015

PRESIDEN JOKO WIDODO
MERESMIKAN PEMBANGUNAN
KAPAL TERNAK KM CAMARA
NUSANTARA 1 DI BANGKALAN,
JAWA TIMUR



21 NOVEMBER 2015

KUNJUNGAN KERJA MENHUB DI STASIUN KEBAYORAN, PARUNG PANJANG DAN PALMERAH.



14 DESEMBER 2015

PRESIDEN JOKO WIDODO DIDAMPINGI MENTERI PERHUBUNGAN IGNASIUS JONAN, MENTERI AGRARIA/ KEPALA BPN FERRY MURSIDAN BALDAN, DIREKTUR UTAMA PT KAI EDI SUKMORO, DAN DIREKTUR UTAMA PT ANGKASA PURA II BUDI KARYA SUMADI, MENINJAU PROGRES PEMBANGUNAN KERETA API BANDARA SOEKARNO HATTA.



27 DESEMBER 2015

PERESMIAN BANDARA KOMODO OLEH PRESIDEN JOKO WIDODO DAN MENTERI PERHUBUNGAN IGNASIUS JONAN.

BAB II

PENINGKATAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN

1. Perhubungan Darat

- a) Program Peningkatan Keselamatan dan Keamanan
 Pada tahun 2015 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan program peningkatan keselamatan dan keamanan sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	2012	2013	2014	2015
1.	Peluncuran Dekade Aksi Keselamatan Jalan Tahun 2011 – 2020.	Peringatan <i>Traffic Victims Day</i> tanggal 25 November 2012 di DKI Jakarta.	Inpres No. 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan tanggal 11 April 2013	-	-
2.	Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Pelaksanaan di 10 provinsi : Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Maluku, Papua	Pelaksanaan di 11 provinsi : Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Bali, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Gorontalo	Pelaksanaan di <i>Jakarta Safety Walk</i> di Kementerian Perhubungan – Bundaran HI	1. Pelaksanaan Pekan Nasional Keselamatan Jalan di Daerah (Sumbar, Kaltim, Sulsel, Jabar). 2. Pelaksanaan Pekan Nasional Keselamatan Jalan di Jakarta
3.	Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (KMSK)	Pembentukan KMSK di 3 (tiga) Provinsi : NTB, Kalimantan Tengah, Jambi	Pembentukan KMSK di 2 (dua) Provinsi : DI Yogyakarta dan Bali	Pembentukan KMSK di 2 (dua) Provinsi : NTT dan Sulawesi Selatan	Pembentukan KMSK di 2 (dua) Provinsi : Sumatera Barat (Padang), Kepulauan Riau (Tanjung Pinang)
4.	<i>Workshop</i> Manajemen Kampanye Keselamatan	1. Provinsi Gorontalo 2. Provinsi Papua Barat 3. Provinsi DI Yogyakarta	1. Sumatera Utara 2. Sulawesi Selatan 3. Maluku	1. Papua 2. Sumatera Barat 3. Sulawesi Tengah	1. Belitung 2. Jambi
5.	Perbaikan Daerah Rawan Kecelakaan	Lokasi di <i>Ring Road</i> Utara, Sragen, Provinsi Jawa Tengah	1. Temanggung 2. Bali (Singaraja-Denpasar, Ruas jalan Padang Bai, Maliling-Tabanan)	1. Provinsi Sumatera Barat 2. Provinsi Bali 3. Provinsi Nusa Tenggara Barat	1. Provinsi Jawa Tengah 2. Provinsi Jawa Timur

NO.	KEGIATAN	2012	2013	2014	2015
6.	Inspeksi Alur Pelayaran Daratan	Provinsi Riau Provinsi Kalsel (Sungai Barito)	-	-	-
7.	Inspeksi Keselamatan Jalan	Provinsi Banten Provinsi Jawa Barat	1. Provinsi Riau 2. Provinsi Jambi 3. Provinsi Bengkulu	1. Provinsi Kalimantan Selatan 2. Provinsi Kalimantan Timur	1. Provinsi Jawa Barat 2. Provinsi Jawa Tengah
8.	Audit Keselamatan Jalan	Provinsi NAD Provinsi Sumatera Utara	1. Provinsi Lampung 2. Provinsi Palembang	1. Provinsi Sulawesi Utara 2. Provinsi Gorontalo	-
9.	Audit Prasarana Alur	Provinsi Sumsel (Sungai Musi) Provinsi Kalteng (Sungai Kahayan)	Provinsi Kambi (Sungai Batanghari)	3. Provinsi Kalimantan Selatan 4. Provinsi Bali	1. Provinsi Sumatera Selatan 2. Provinsi Kalimantan Timur 3. Provinsi Bali
10.	Sosialisasi Pembentukan Forum LLAJ	Provinsi Jawa Tengah Provinsi Sumatera Utara Provinsi Kalimantan Selatan	-	-	-
11.	<i>Workshop</i> Manajemen Keselamatan	Provinsi Jambi Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Gorontalo	-	-	Yogyakarta Surabaya
12.	Pemilihan Pelajar Pelopor	Diikuti oleh 16 orang mewakili 14 provinsi	Diikuti oleh 22 orang pelajar dari 17 provinsi	Diikuti oleh 30 orang pelajar dari 19 provinsi	Diikuti oleh 50 orang pelajar dari 22 provinsi
13.	Pemberdayaan Masyarakat Peduli Keselamatan	Diikuti oleh 289 peserta yang ikut seleksi penilaian	Diikuti oleh 139 peserta yang ikut seleksi penilaian	Diikuti oleh 144 peserta yang ikut seleksi penilaian	Masih dalam proses seleksi
14.	Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan	Diikuti oleh 59 orang mewakili 30 provinsi, dengan pemenang dari NTB	Diikuti oleh 58 orang mewakili 29 provinsi, dengan pemenang dari Jawa Tengah	Diikuti oleh 56 orang mewakili 29 provinsi, dengan pemenang dari Yogyakarta	Diikuti oleh 57 orang mewakili 29 provinsi, dengan pemenang dari DKI Jakarta

NO.	KEGIATAN	2012	2013	2014	2015
15.	Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan Umum	Ada tiga jenis, yaitu : AKAP, Taksi dan B3 di mana setiap jenis diikuti oleh 40 peserta	Ada tiga jenis, yaitu: AKAP, Taksi dan B3 di mana setiap jenis diikuti oleh 40 peserta	Ada tiga jenis, yaitu AKAP, Taksi dan B3 di mana setiap jenis diikuti oleh 30 peserta	Ada tiga jenis, yaitu: AKAP diikuti 26 peserta, taksi diikuti 26 peserta dan B3 diikuti 28 peserta
16.	Sistem Manajemen Kecepatan (SMK) pada perusahaan angkutan umum	1. <i>Workshop</i> SMK di Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya; 2. Kajian SMK untuk angkutan barang	<i>Workshop</i> SMK di DKI Jakarta, Balikpapan (Kalimantan Timur), dan Sulawesi Selatan	<i>Workshop</i> SMK di Lampung, Batam, dan Jawa Barat	<i>Workshop</i> SMK di Surabaya, Makassar

Sumber : Direktorat KTD, Ditjen Hubdat - 2015.



Gambar 2.1 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Tahun 2015



Gambar 2.2 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Tahun 2015



Gambar 2.3 Sosialisasi Penetapan Batas Kecepatan PM 111 Tahun 2015



Gambar 2.4 Sosialisasi Penetapan Batas Kecepatan PM 111 Tahun 2015

b) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Keselamatan Transportasi Darat pada tahun 2015 diterima oleh 450 Kabupaten/Kota dengan besaran nilai yang terus meningkat dari tahun ke tahun, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1 Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keselamatan Transportasi Darat

No.	Tahun	Jumlah Kota/Kabupaten/Propinsi	Total Nilai DAK
1	2011	424	Rp. 100.000.000.000
2	2012	444	Rp. 131.430.190.000
3	2013	471	Rp. 221.006.000.000
4	2014	467	Rp. 235.121.290.000
5	2015	450	Rp. 254.815.200.000

Sumber : Bagian Perencanaan - Setditjen Perhubungan Darat, 2015.

2. Perhubungan Laut

a. Menurunnya angka kecelakaan Transportasi laut

1) Kejadian kecelakaan

Kejadian kecelakaan dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: alam, manusia dan faktor lainnya. Dalam menentukan rasio kejadian kecelakaan kapal tidak terlepas dari jumlah Surat Perintah Berlayar (SPB) yang diterbitkan. Jumlah kejadian kecelakaan kapal dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan salah satunya melalui penerbitan Surat Perintah Berlayar (SPB) yang lebih selektif. Adapun pada tahun 2015 jumlah kejadian kecelakaan kapal maupun jumlah Surat Perintah Berlayar (SPB) sebagai berikut :

Tabel 2.2 Kejadian Kecelakaan Kapal

NO.	BULAN	JUMLAH KEJADIAN KECELAKAAN (KAPAL)	SURAT PERINTAH BERLAYAR (SPB)
1	JANUARI	7	29.828
2	FEBRUARI	5	29.509
3	MARET	2	29.203
4	APRIL	5	28.956
5	MEI	4	29.750
6	JUNI	7	29.828
7	JULI	3	29.632
8	AGUSTUS	5	29.763
9	SEPTEMBER	5	29.830
10	OKTOBER	3	29.545

NO.	BULAN	JUMLAH KEJADIAN KECELAKAAN (KAPAL)	SURAT PERINTAH BERLAYAR (SPB)
11	NOVEMBER	3	29.228
12	DESEMBER	0	29.328
	TOTAL	49	354.399

- 2) Pada tahun 2015 terdapat jumlah Pedoman Standar Keselamatan yang disusun sebanyak 11 (sebelas) dokumen yaitu :
- Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM. 7 Tahun 2015 tentang Kewajiban Pelaporan Kecelakaan Kapal.
 - Peraturan Dirjen tentang Tata Cara Pemberian Kemudahan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal Wisata (*Yacht*) Asing di Pelabuhan Indonesia.
 - Peraturan Dirjen Nomor HK.103/3/9/DJPL-15 tentang Tata Cara Pemberian Surat Persetujuan Penggunaan Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal.
 - Standar dan tata cara penerbitan SPB *online* di 16 UPT DJPL sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2015 tentang Pelayanan Surat Persetujuan Syahbandar Secara *Online*.
 - Pedoman Desain dan Pemasangan Elemen Visibel Pada Alarm Darurat Umum di Kapal Penumpang (Msc.1/ Circ.1418)
 - Penyamaan Pemahaman Terhadap Rekomendasi Yang Telah Direvisi Tentang Pengujian Peralatan Keselamatan (Resolusi Msc.81(70)) (Msc.1/ Circ.1489)
 - Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) VTS Makassar
 - Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) VTS Balikpapan
 - Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) VTS Pontianak
 - Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) VTS Samarinda
 - Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) VTS Jakarta

b. Jumlah sarana dan prasarana keselamatan

- 1) Jumlah pembangunan dan *Upgrade* GMDSS
 Pada tahun 2015 jumlah pembangunan dan *upgrade* GMDSS terdapat realisasi sebesar 21 unit yaitu :

Tabel 2.3 Realisasi Pembangunan dan *Upgrade* GMDSS

NO	PENDANAAN	LOKASI	KETERANGAN
1	APBN TA. 2015	Kuala Langsa	Pembangunan
		Pangkalan Susu	Pembangunan
		Gunung Sitoli	Pembangunan
		Air Bangis	Pembangunan
		Gilimanuk	Pembangunan
		Sintete	Pembangunan
		Jakarta	<i>Upgrade</i>
		Tarakan	<i>Upgrade</i>

NO	PENDANAAN	LOKASI	KETERANGAN
		Merauke	<i>Upgrade</i>
2	APBNP TA. 2015	Teluk Dalam	Pembangunan
		Selat Panjang	Pembangunan
		Rengat	Pembangunan
		Dabo Singkep	Pembangunan
		Probolinggo	Pembangunan
		Waingapu	Pembangunan
		Luwuk	Pembangunan
		Kaimana	Pembangunan
		Serui	Pembangunan
		Banjarmasin	<i>Upgrade</i>
		Bitung	<i>Upgrade</i>
		Sorong	<i>Upgrade</i>



Gambar 2.5 GMDSS SROP Pangkalan Susu Disnav Kelas 1 Belawan



Gambar 2.6 GMDSS di Stasiun Radio Pantai (SROP) Kelas IV Air Bangis

- 2) Jumlah Pembangunan dan *Upgrade* VTS
 Pada Tahun Anggaran 2015 jumlah pembangunan dan *upgrade* VTS terdapat 5 unit yaitu pada lokasi :

NO	LOKASI
1	Distrik Navigasi Kelas I Belawan
2	Distrik Navigasi Kelas I Tg. Priok
3	Distrik Navigasi Kelas I Surabaya
4	Distrik Navigasi Kelas I Bitung
5	Distrik Navigasi Kelas I Palembang



Gambar 2.7 Distrik Navigasi Kelas I Surabaya Stasiun Radio Pantai (SROP) Kelas I Surabaya

- 3) Jumlah pembangunan/ lanjutan/ penyelesaian kapal patroli
 - a) Pembangunan Baru Kapal Patroli
 - (1) Pembangunan Baru 2 (dua) unit Kapal Patroli Kelas II (*multiyears*) dan Pembangunan Baru 6 (enam) unit Kapal Patroli Aluminium Kelas III (*multiyears*)

Telah dilakukan peletakan lunas *keel laying* di galangan kapal PT. Karimun Anugerah Sejati bertempat di Batam pada tanggal 02 November 2015 yang dihadiri oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bersama para Direktur atau perwakilan galangan dari PT. Anugerah Karimun Sejati (2 unit), PT. Tri Ratna Diesel Indonesia (2 unit), PT. Proskuneco Kadarusman (1 unit), PT. Ben Santosa (2 unit), PT. Batam Expresindo Shipyard (1 unit).



Gambar 2.8 Peletakan Lunas *Keel Laying*

- (2) Pembangunan 10 (sepuluh) Kapal Patroli Kelas V aluminium (selesai dibangun Tahun 2015)

Telah selesai dibangun 10 (sepuluh) Kapal Patroli kelas V aluminium oleh Galangan PT. Eka Multi Bahari dan ditempatkan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Hubla, yaitu :

Tabel 2.4 Pembangunan 10 (sepuluh) Kapal Patroli Kelas V aluminium (selesai dibangun Tahun 2015)

No	UPT	Nama Kapal	Jumlah
1	Ka. KSOP Kelas IV Nunukan	KNP. 5202	1 unit
2	Ka. KSOP Kelas III Tarakan	KNP. 5203	1 unit
3	Ka. Ktr. Kesyahbandaran Utama Makasar	KNP. 5204	1 unit
4	Ka. Ktr. Kesyahbandaran Utama Belawan	KNP. 5205	1 unit
5	KUPP. Kelas II Tual	KNP. 5206	1 unit
6	Ka. KSOP. Kelas II Pontianak	KNP. 5207	1 unit
7	Ka. KSOP. Kelas III Kupang	KNP. 5208	1 unit
8	Ka. KSOP. Kelas III Tanjung Wangi	KNP. 5209	1 unit
9	KUPP. Kelas II Saumlaki	KNP. 5210	1 unit
10	Ka. KSOP. Kelas I Panjang	KNP. 5211	1 unit



Gambar 2.9 Kapal Patroli Kelas V Aluminium

b) Penyelesaian Kapal Patroli

- (1) Pembangunan baru 10 (sepuluh) unit Kapal Patroli kelas IV (selesai dibangun tahun 2015)

Pembangunan Kapal Patroli Kelas IV sebanyak 10 (sepuluh) unit Kapal Patroli *fiberglass* dibangun dengan rincian :

- (a) 2 (dua) unit dikerjakan oleh galangan kapal CV. Cisanggarung Putra Mandiri
- (b) 6 (enam) unit dikerjakan oleh galangan kapal PT. Mutiara
- (c) 2 (dua) unit dikerjakan oleh galangan kapal PT. Kawi Eka Karya

Adapun penempatan kapal-kapal tersebut pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Hubla antara lain :

No	UPT	Nama Kapal	Jumlah
1	Ka. KSOP Kelas IV Pangkal Balam-Babel	KNP. 486	1 unit
2	KUPP Kelas II Tanah Grogot-Kaltim	KNP. 487	1 unit
3	Ka. Kesyahbandaran Utama Tanjung	KNP. 488	1 unit

No	UPT	Nama Kapal	Jumlah
	Priok-DKI Jakarta		
4	Ka. KSOP Kelas IV Kumai-Kalteng	KNP. 489	1 unit
5	KUPP Kelas II Amamapare-Papua Barat	KNP. 490	1 unit
6	KUPP Kelas III Amahai-Maluku	KNP. 491	1 unit
7	KUPP Kelas II Nabire-Papua	KNP. 492	1 unit
8	KUPP Kelas II Labuha/ Babang-Maluku Utara	KNP. 493	1 unit
9	KUPP Kelas III Belang-Sulut	KNP. 494	1 unit
10	KSOP Kelas IV Gorontalo-Gorontalo	KNP. 495	1 unit



- (2) Pembangunan Baru 25 (dua puluh lima) unit Kapal Patroli Kelas V fiberglass

Pembangunan Kapal Patroli Kelas V sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, yang dikerjakan oleh galangan kapal PT. Kelinci Mas Persada (5 unit), PT. Karya Tajur Tangsi (10 unit), PT. Kurnia Marina (5 unit), PT. Mina Anugrah Sukses (5 unit), dan ditempatkan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Hubla, yaitu :

No	Unit Kerja	Nama Kapal	Jumlah
1	Ka. KSOP Kelas V Bagan Siapi-API-Riau	KNP. 5177	1 unit
2	KUPP. Kelas III Juwana-Jateng	KNP. 5178	1 unit
3	Ka. KSOP. Kelas V Kalibaru-DKI Jakarta	KNP. 5179	1 unit
4	Ka. KSOP. Kelas V Tanjung Pandan-Babel	KNP. 5180	1 unit
5	KUPP. Kelas III Rembang-Jateng	KNP. 5181	1 unit
6	Ka. KSOP. Kelas IV Bima-NTB	KNP. 5182	1 unit
7	KUPP. Kelas III Nusa Penida-Bali	KNP. 5183	1 unit
8	Ka. KSOP. Kelas V Pangkalan Bun-Kalteng	KNP. 5184	1 unit
9	KUPP Kelas III Baranusa-NTT	KNP. 5185	1 unit
10	KUPP Kelas III Kereng Bengkirai-Kalteng	KNP. 5186	1 unit
11	KUPP. Kelas III Pantai Cermin-Sumut	KNP. 5187	1 unit
12	KUPP. Kelas III Pulau Kampai-Sumut	KNP. 5188	1 unit
13	KUPP. Kelas III Tanjung Tiram-Sumut	KNP. 5189	1 unit
14	KUPP. Kelas III Sei Barombong-Sumut	KNP. 5190	1 unit
15	KUPP. Kelas III Tanjung Sarang Elang-	KNP. 5191	1 unit

No	Unit Kerja	Nama Kapal	Jumlah
	Sumut		
16	KUPP. Kelas III Awarange/ Barru-Sulsel	KNP. 5192	1 unit
17	KUPP. Kelas II Tulahu-Maluku	KNP. 5193	1 unit
18	KUPP. Kelas II Ulu Siau-Sulut	KNP. 5194	1 unit
19	KUPP. Kelas II Polewali-Sulbar	KNP. 5195	1 unit
20	KUPP. Kelas I Bau-Bau-Sultra	KNP. 5196	1 unit
21	Ka. KSOP. Kelas V Meulaboh-NAD	KNP. 5197	1 unit
22	KUPP. Kelas III Kuala Gaung-Riau	KNP. 5198	1 unit
23	KUPP. Kelas III Kendawangan-Kalbar	KNP. 5199	1 unit
24	KUPP. Kelas III Ketapang-Jatim	KNP. 5200	1 unit
25	KUPP. Kelas III Sangkulirang-Kaltim	KNP. 5201	1 unit



(3) Penyelesaian Pembangunan 4 (empat) unit Kapal Patroli Kelas II

Telah selesai dibangun Kapal Patroli Kelas II sebanyak 4 (empat) unit, dengan rincian antara lain:

- (a) 3 (tiga) unit dilaksanakan di Galangan Kapal PT. Karimun Anugrah Sejati, telah dilaksanakan penyelesaian pembangunannya dan telah mencapai tahap pekerjaan sebesar 100 % (seratus persen); sedangkan
- (b) Untuk 1 (satu) unit dikerjakan oleh Galangan Kapal PT. Daya Radar Utama.

Penempatan lokasi untuk keempat kapal tersebut yaitu : Pangkalan Bitung, Pangkalan Tanjung Uban, Pangkalan Tanjung Perak, dan Pangkalan Tual.



c) Jumlah pembangunan/ lanjutan/ penyelesaian kapal kenavigasian

Rencana pembangunan kapal di lingkungan Ditjen Hubla ditargetkan sebanyak 10 unit dan terealisasi sebanyak 15 kapal dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5 Rincian Rencana Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian Kapal Kenavigasian

NO	KEGIATAN	UNIT
1	Pembangunan Kapal Induk Perambuan tahap I paket A dan paket B	5 Unit
2	Pembangunan Kapal Pengamat Perambuan (KPP) tahap I paket A dan paket B	5 Unit
3	Pembangunan Kapal Kelas I Kenavigasian tahap II paket A, paket B dan C	5 Unit

c. Keamanan dalam penyelenggaraan transportasi laut

Pada Tahun 2015 telah terjadi 6 (enam) kali gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi laut.

Tabel 2.6 Gangguan Keamanan Dalam Penyelenggaraan Transportasi Laut Tahun 2015

NO	NAMA, TIPE BENDERA NOMOR IMO KAPAL	TANGGAL KEJADIAN	POSISI KEJADIAN	URAIAN KEJADIAN	AKSI NEGARA PANTAI	KET.
1	REHOBOT TANKER INDONESIA	30 Januari 2015	Sekitar Perairan Pulau Naim	2 Perahu dengan 8 OTK diindikasikan membajak kapal	Memantau, meningkatkan keamanan dan koordinasi dengan aparat keamanan	Jumlah kru 14 orang dan 2 ABK telah ditemukan di atas rakit di sekitar Pulau Naim
2	GLOBAL AQUARIUS CARGO PANAMA 9550436	30 Januari 2015	01:64.N 103:33.11 E sekitar Perairan Kepri	Diindikasikan pembajakan	Memantau, meningkatkan keamanan dan koordinasi dengan aparat keamanan	Tidak ada informasi lainnya
3	CAPE MERCURY SINGAPORE 9150755	25 Februari 2015	01:04.24 U 103:36.24 T sekitar Perairan Kepri	Diindikasikan dicuri	Meningkatkan patroli dan koordinasi dengan keamanan lainnya	
4	TRINIDAD LUXEMBURG MMSI 253272000	21 April 2015	01:09.32 U 103:56.54 T	<i>DISTRESS</i>	Diinformasikan ke UPT Ditjen Hubla	

NO	NAMA, TIPE BENDERA NOMOR IMO KAPAL	TANGGAL KEJADIAN	POSISI KEJADIAN	URAIAN KEJADIAN	AKSI NEGARA PANTAI	KET.
5	JOAQUIM TANKER 9133989	08 Agustus 2015	Selat Malaka	Kapal dibajak	Koordinasi KSOP Dumai dengan Aparat LANAL dan LAN PLP Tg.Uban	Kapal telah ditarik ke Lanal Dumai
6	KM.HENDRISON Jenis Kapal Kayu	28 Oktober 2015	1 Mil, Utara Pelabuhan Harbour Bay Batam	Dugaan Konsleting Listrik	KN.Sarotama dan KN.Alugara melakukan Aksi Pemadaman	3 Orang ABK selamat

3. Perhubungan Udara

a. Program Keselamatan Penerbangan

Dalam rangka peningkatan keselamatan penerbangan, Ditjen Perhubungan Udara telah melakukan upaya peningkatan keselamatan penerbangan dengan melaksanakan :

1) Sertifikasi Pesawat Udara

Tabel 2.7 Sertifikasi Pesawat Udara

Total Aircraft Registered	1.510 unit
Total Expired Certificate	368 unit
Total Valid Certificate	1.142 unit
Total Aircraft Registered by AOC 121	549 unit
Total Aircraft Registered by AOC 135	317 unit
Total Aircraft Registered by AOC 137, OC 91, Pilot School and FASI	276 unit
Total Aircraft Registered in 2015	80 unit
Total Aircraft Deregistered in 2015	35 unit
Total Expired Certificate Less Than 3 Years	94 unit
Total Expired Certificate More Than 3 Years	202 unit
Civil Airplanes Serviceable	986 unit
Civil Helicopters Serviceable	156 unit

Sumber : Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara

Ditjen Perhubungan Udara melaksanakan penegakkan hukum dan sanksi administratif terhadap operator penerbangan dengan melakukan sebagai berikut :

Tabel 2.8 Penegakkan Hukum dan Sanksi Administratif

No.	Operator Penerbangan	Sanksi Administratif
1. 2.	PT. Sigar Dirgajaya Utama (AMO 145) PT. Bhinneka Aviation Service (AMO 145)	Pembekuan sementara Air Operator Maintenance (AMO) 2
1. 2. 3.	PT. Penerbangan Angkasa Semesta (AOC 135) PT. Asian One Air (AOC 135) PT. Elang Nusantara Airlines (AOC 135)	Pembekuan Air Operator Certificate (AOC) 121 dan 135 sejumlah 3 operator penerbangan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.	PT. Nusantara Buana Air (AOC 135) PT. Asconusa Air Transport (AOC 135) PT. Manunggal Air Service (AOC 121) PT. Republic Express (AOC 121) PT. Mandala Airlines (AOC 121) PT. Merpati Nusantara Airlines (AOC 121) PT. Sky Aviation (AOC 121) PT. Sky Aviation (AOC 135) PT. Air Maleo (AOC 121) PT. Pacific Royal Airways (AOC 135) PT. Survey Udara Penas (AOC 135)	Pencabutan Air Operator Certificate (AOC) 121 dan 135 sejumlah 11 operator penerbangan
1. 2. 3. 4. 5. 6.	PT. Asialink Cargo (AOC 121) PT. Wings Abadhi Airlines (AOC 121) PT. Mitra Aviassi Perkasa (PSC 141) PT. Bali International Flight Academy (PSC 141) Pelita Training Center (AMTO 147) PT. Star Aero Engineering (AMO 145)	Peringatan kesatu kepada 2 (dua) operator penerbangan (AOC 121), 2 (dua) sekolah penerbangan (PSC 141) dan 2 (dua) sekolah teknik penerbangan (AMTO 147 dan AMO 145).

Sumber : Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara

Ditjen Perhubungan Udara secara rutin melakukan *ramp check* pesawat udara dan *surveillance* di beberapa lokasi pada hari biasa dan hari besar.

Terkait kecelakaan penerbangan Air Asia QZ8501 yang hilang kontak pada tanggal 28 Desember 2014, Direktorat Kelaikan Udara melakukan beberapa langkah tindak lanjut menerbitkan Surat Edaran antara lain :

- a) Surat Edaran mengenai Keselamatan Penerbangan saat beroperasi;
- b) Surat Edaran mengenai instruksi pelaporan insiden, *Return to Apron* (RTA), *Return to Base* (RTB) dan *Diversion*;
- c) Pemeriksaan langsung ke beberapa *Flight Operations Office (Flops)* Maskapai Penerbangan di Cengkareng dan Surabaya;
- d) *Ramp check* Pesawat di Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Halim PK (seluruh pesawat khusus untuk Indonesia Air Asia/ IAA) ;

- e) Ramp *Check* khusus Narkoba di Bandara Ngurah Rai dan Soekarno-Hatta;
 - f) Pengarahan terkait Aspek Keselamatan dan Keamanan Penerbangan pada seluruh Direktur Operasi Maskapai Penerbangan, Angkasa Pura dan LPPNPI;
 - g) Melakukan *special safety audit* terhadap Indonesia Air Asia (IAA).
- 2) Sertifikasi dan Register Pada Bandar Udara Umum dan Khusus, Register *Heliport* Baik Penerbitan (*Initial*) maupun Perpanjangan (*Recurrent*) Yang Dilaksanakan Sebagai Berikut :

Tabel 2.9 Sertifikasi dan register bandar udara, *heliport*, dan *helideck*

KEGIATAN	INITIAL	RECURRENT	JUMLAH
Sertifikasi bandar udara	7	24	31
Register bandar udara niaga umum	7	1	8
Register bandar udara bukan niaga (khusus)	1	3	4
<i>Heliport</i>	7	-	7
<i>Helideck</i>	2	-	2
<i>Elevated Heliport</i>	7	-	7
<i>Surface Level</i>	4	1	5
<i>Shipboard Heliport</i>	11	-	11

Sumber : Direktorat Bandar Udara

- 3) Progres USOAP/UNI EROPA dan FAA
- a) Audit ICAO pada 8 (delapan) area yang telah ditindaklanjuti dengan Rencana Tindak Perbaikan (*Correction Action Plan*) yaitu :
 - (1) *Primary Aviation Legislation* (LEG);
 - (2) *Civil Aviation Organization* (ORG);
 - (3) *Personnel Licensing and Training* (PEL);
 - (4) *Aircraft Operations* (OPS);
 - (5) *Airworthiness of Aircraft* (AIR);
 - (6) *Aircraft Accident and Incident Investigation* (AIG);
 - (7) *Air Navigation Services* (ANS);
 - (8) *Aerodromes and Ground Aids* (AGA).

Dengan memberikan tanggapan melalui rencana tindak perbaikan (*Corrective Action Plan*) yang mencakup rincian lengkap agar dapat menyelesaikan temuan ICAO secara efektif.

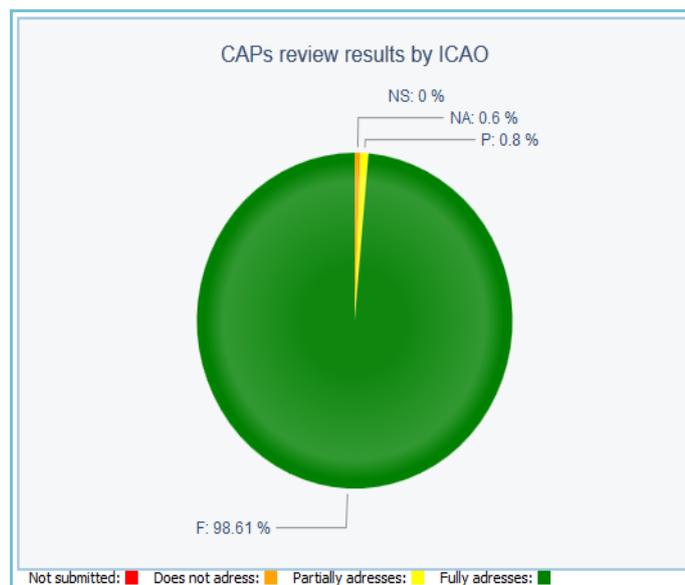
Rencana tindak atas hasil audit ICAO USOAP sampai dengan 19 November 2015 telah disetujui sebesar 96,22% *fully address* dan *off-site evaluation* telah diajukan bulan September 2015.

- b) Terkait dengan Larangan Terbang oleh Uni Eropa :

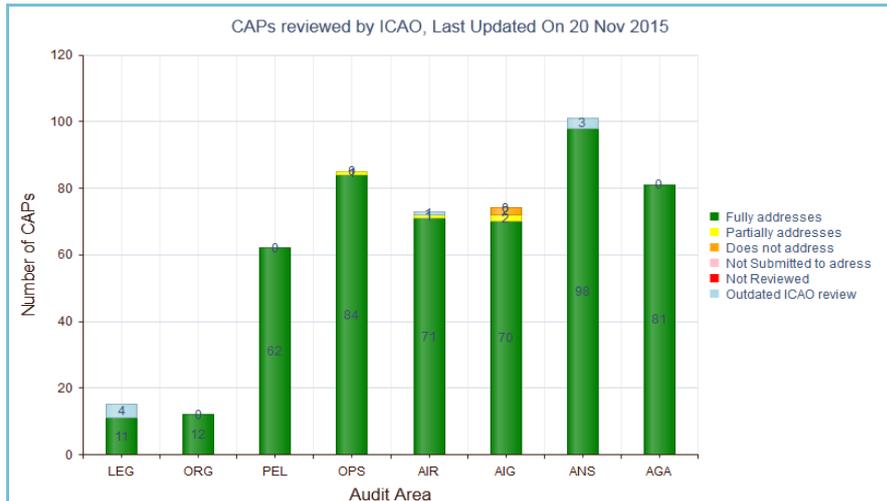
- (1) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah mengikuti ASC (*Air Safety Committee*) Meeting tanggal 24 - 25 November 2015 di Brussels-Belgia dan mengajukan Maskapai Penerbangan Nasional untuk dilepaskan dari daftar larangan terbang yaitu Citilink, Lion Air dan Batik Air;
- (2) Hasil dari *ASC meeting* tersebut akan ditindaklanjuti dengan verifikasi terhadap 3 (tiga) maskapai penerbangan nasional tersebut pada bulan April tahun 2016;
- (3) Direncanakan pada *ASC meeting* bulan Juni 2016, Ditjen Perhubungan Udara akan mengajukan tambahan 4 (empat) maskapai penerbangan nasional untuk diusulkan agar dapat dilepas dari daftar larangan terbang.

c) FAA :

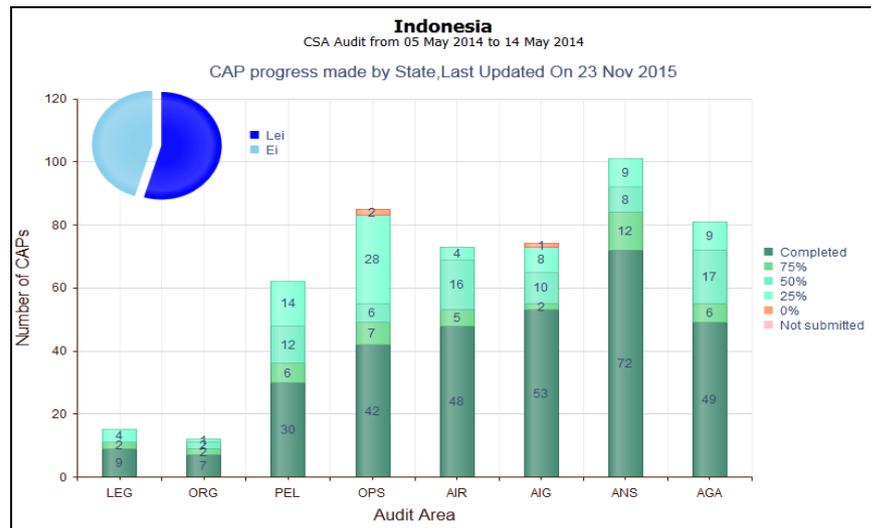
- (1) Hasil *review* pada bulan Mei 2015 terdapat 21 temuan dan telah ditindaklanjuti pada bulan September 2015 sebanyak 20 temuan dan 1 (satu) temuan terkait *Law Enforcement Procedure*.
- (2) Status penyelesaian *Corrective Action Plan* hasil FAA *Technical Review* 2015 terkait *Law Enforcement Procedure* ditindaklanjuti dengan diterbitkannya SKEP Dirjen Perhubungan Udara Nomor KP. 623 Tahun 2015 tentang Prosedur dan Mekanisme Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di bidang Penerbangan tanggal 29 Oktober 2015.
- (3) Rencana pelaksanaan *International Aviation Safety Assesment (IASA)* pada 28 Februari 2016.



Grafik 2.1 Status *Corrective Action Plan (CAP)* : 98,61% Fully Addressed



Grafik 2.2 Detail CAPs Progress Made by State Based on Area



Grafik 2.3 Grafik Detail Cap Progress Made by State Based on Critical Element

4) Kalibrasi Fasilitas Penerbangan

Pada Tahun 2015 telah melaksanakan operasi penerbangan kalibrasi sejumlah 1.660,58 jam terbang pada Unit Penyelenggara Bandar Udara, Airnav Indonesia, PT. Angkasa Pura I (Persero) dan PT. Angkasa Pura II (Persero) serta bandar udara khusus sebagai berikut :

Tabel 2.10 Pelaksanaan Operasi Penerbangan Balai Besar Fasilitas Kalibrasi Penerbangan

Kegiatan	Jam Terbang	Kegiatan	Jam Terbang
Pelaksanaan kalibrasi	1.377,18 jam	Flight Training	23,40 jam
Surveillance Check	240,35 jam	Charter Flight	7,85 jam
Test Flight	3,35 jam	Test Flight Console	2,15 jam;
Proficiency Check	6,30 jam		

Sumber : Balai Besar Fasilitas Kalibrasi Penerbangan

5) Uji Kontingensi Narkoba

a) Pelaksanaan Pengujian Narkoba:

Tabel 2.11 Pengujian Narkoba

No.	Personil	Jumlah
1.	Penerbang	1.261 orang
2.	Calon penerbang	913 orang
3.	<i>Cabin Crew</i>	459 orang
4.	<i>Calon Cabin Crew</i>	674 orang
5.	<i>Flight Operation Officer</i>	4 orang
6.	Calon FOO	299 orang
7.	PKP-PK, ATC	-

Sumber : Balai Kesehatan Penerbangan

Terkait penanganan kasus personil penerbangan yang positif mengkonsumsi narkoba setelah dilakukan uji tes narkoba di kantor Balai Kesehatan Penerbangan yaitu sebanyak 6 (enam) orang.

b) *Random check* Narkoba di Bandar Udara dan Pesawat Udara

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala BNN Nomor PM 9 Tahun 2012 dan Nomor 01 Tahun 2012 Tanggal 30 Januari 2012 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Pada Transportasi Darat, Laut Udara dan Kereta Api selama kurun waktu Tahun 2015, Balai Kesehatan Penerbangan telah melakukan pemeriksaan Narkoba melalui *ramp check* di 35 bandar udara sejumlah 3.002 orang.



Gambar 2.10 Menteri Perhubungan Mengunjungi Balai Kesehatan Penerbangan

b. Program Keamanan Penerbangan Nasional

Dalam rangka meningkatkan keamanan penerbangan di seluruh Indonesia, telah diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional (revisi PM 31 Tahun 2013 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional).

Program Keamanan Penerbangan Nasional bertujuan: melindungi keselamatan, keteraturan dan efisiensi penerbangan di Indonesia melalui

pemberian regulasi, standar dan prosedur serta perlindungan yang diperlukan bagi penumpang, awak pesawat udara, personil di darat dan masyarakat dari tindakan melawan hukum.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan beberapa kegiatan di bidang keamanan penerbangan sebagai berikut :

(1) Pengesahan Dokumen *Airport Emergency Plan* (AEP)

Kewajiban penyusunan *Airport Emergency Planning* merupakan persyaratan yang diatur dalam ICAO *Airport Service Manual Document 9137-AN 898 part 7* tentang *Airport Emergency Planning* dengan melakukan pembinaan meliputi peningkatan kemampuan personil PKP-PK, peningkatan peralatan PKP-PK dan Persyaratan Standar Operasi yang diharapkan adanya nilai tambah untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel 2.12 Pengesahan Dokumen AEP

No	Bandar Udara	No	Bandar Udara
1.	Bandar Udara Blimbingsari-Banyuwangi	10	Bandar Udara Cut Ali-Tapak Tuan
2.	Bandar Udara Aroepalla-Selayar	11.	Bandar Udara Silampari
3.	Bandar Udara Sultan Bantilan-Tolitoli	12.	Bandar Udara Andi Jemma-Masamba
4.	Bandar Udara Cakrabuana-Cirebon	13.	Bandar Udara Tambolaka-Waikabuba
5.	Bandar Udara Sultan Babullah-Ternate	14.	Bandar Udara Seko
6.	Bandar Udara Jos Orno Imsula-MOA	15.	Bandar Udara Legaligo-Boa
7.	Bandar Udara Kuabang-Kao	16.	Bandar Udara Rendani-Manokwari
8.	Bandar Udara Japura-Rengat	17.	Bandar Udara Tempuling-Riau
9.	Bandar Udara Haluoleo-Kendari	18.	Bandar Udara Tuhup-Murung Raya

Sumber : Direktorat Keamanan Penerbangan

(2) Perizinan di Bidang Keamanan Penerbangan, Pelayanan Darurat dan Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya yaitu sebagai berikut :

(a) Izin Angkutan *Dangerous Goods* pada 33 (tiga puluh tiga) lembaga:

Tabel 2.13 Izin Angkutan *Dangerous Goods*

No.	Operator Penerbangan	No.	Operator Penerbangan
1.	Cardig Air dari Halim Perdana Kusuma	18.	Raya Airways dari Soekarno-Hatta
2.	Lufansha Air dari Soekarno Hatta	19.	Alfa Trans Dirgantara dari Sentani
3.	Garuda Indonesia <i>all route</i>		

No.	Operator Penerbangan	No.	Operator Penerbangan
4	Garuda Indonesia dari Ngurah Rai (Khusus <i>Oxygen Compress</i>)	20.	Alda Trans Papua dari Sentani
5.	Garuda Indonesia dari Soekarno-Hatta (Khusus <i>Oxygen Compress</i>)	21.	Susi Air dari Sentani
6.	Dimonim Air dari Sentani dan Nabire	22.	Deraya Air dari Sentani
7.	Qantas Airways dari Soekarno-Hatta	23.	Eva Airways dari Soekarno-Hatta
8.	Air Maleo dari Halim Perdana Kusuma	24.	Sriwijaya Air dari dan ke Timika
9.	All Nippon Airways dari Soekarno-Hatta	25.	Royal Brunei dari Soekarno-Hatta
10	Singapore Airline dari Soekarno-Hatta	26.	Vietnam Airline dari Soekarno-Hatta
11.	Cathay Pacific dari Soekarno-Hatta	27.	Tri MG Airline dari Balikpapan, Halim dan Sentani
12.	Etihad Airways dari Soekarno-Hatta	28.	Philippines Airline dari Soekarno-Hatta
13.	Trigana Air dari Sentani	29.	My Indo Airline dari Sentani
14.	Aviastar dari Nabire	30.	Pegasus Air Service dari Timika
15.	Transnusa dari Bali dan Kupang	31.	Cardig Air dari Sentani
16.	Pegasus Air Service dari Nabire	32.	Susi Air dari Nabire
17.	Jhonlin Air Transport dari Timika	33.	Trigana Air dari Timika, Nabire dan Wamena

Sumber : Direktorat Keamanan Penerbangan

- (b) Pengesahan *Dangerous Goods Handling Manual* 15 (lima belas) operator penerbangan

Tabel 2.14 Pengesahan *Dangerous Goods* HM

No	Operator Penerbangan	No	Operator Penerbangan
1	Lufthansa German Airlines	9.	Raya Airways
2	All Nippon Airlines	10.	Alfa Trans Dirgantara
3	Singapore Airlines	11.	Susi Air
4	Etihad Airways	12.	Eva Airways
5	Trigana Air	13.	Royal Brunei Airlines
6	Aviastar	14.	Tri MG Airlines
7	Jhonlin Air Transport	15.	Vietnam Airlines
8.	Transnusa Aviation Mandiri		

Sumber : Direktorat Keamanan Penerbangan

- (c) Sertifikat pemeriksaan keamanan pos dan kargo pada 7 perusahaan

Tabel 2.15 Pemeriksaan keamanan pos dan kargo

No.	Perusahaan Pos dan Kargo	Status
1.	PT. Birotika Semesta	Cabang Baru (PKKP saja yang baru)
2.	PT. Apollo Kualanamu	<i>update</i> PKKP
3.	PT. Adhya Avia Prima	Cabang Baru (PKKP saja yang baru)

No.	Perusahaan Pos dan Kargo	Status
4.	PT. Citra Lintas Angkasa	Cabang Baru (PKKP saja yang baru)
5.	PT. Ghita Avia Trans	PKKP sudah di sahkan Dirjen (Perpanjangan)
6.	PT. Fajar Anugrah Semesta	PKKP sudah di sahkan Dirjen (Perpanjangan)
7.	PT. Duta Angkasa Prima Kargo	PKKP sudah di sahkan Dirjen (Perpanjangan)

Sumber : Direktorat Keamanan Penerbangan

- (d) Sertifikat lembaga diklat pada 25 (dua puluh lima) lembaga diklat PKP-PK dan *Salvage, Aviation Security*

Tabel 2.16 Sertifikat Lembaga Diklat Bidang Keamanan

No	Lembaga Diklat	No	Lembaga Diklat
1.	Unit DIKLAT PT. AP II (Persero)	14.	<i>Center For Excellence - AP I</i>
2.	PT. Pradana Satya Jaya	15.	PT. Cahaya Trans Nusantara (CTNUSA)
3.	PT. Farin Training Center	16.	PT. Cahaya Trans Nusantara (CTNUSA)
4.	<i>Gapura Learning Center</i> PT. Gapura Angkasa	17.	PT. Prathita Titian Nusantara (PTN)
5.	<i>Gapura Learning Center</i> PT. Gapura Angkasa	18.	PT. Prathita Titian Nusantara (PTN)
6.	LPP Lima Widya	19.	<i>Learning Center</i> PT. JAS Tbk
7.	<i>Bali Aviation Training Center</i> (BATC)	20.	<i>Learning Center</i> PT. JAS Tbk
8.	<i>Lion Training Center</i> (LTC) / (ATC)	21.	PT. Triando Mandiri Investama (PSPP)
9.	PT. NURMA	22.	PT. Bina Kerja Cemerlang (BIJAC)
10.	PT. NURMA	23.	<i>Aviation Training Centre</i> (ATC)
11.	BPPP Curug	24.	PT. Quarta Aviation Training Center
12.	BPPP Curug	25.	PT. Quarta Aviation Training Center
13.	BPPP Curug		

Sumber : Direktorat Keamanan Penerbangan

- (e) *Airport Security Programme* pada 20 Bandar Udara

Tabel 2.17 *Airport Security Programme*

No.	Bandar Udara	No.	Bandar Udara
1.	Bandar Udara Ahmad Yani-Semarang (<i>Amandement</i>)	11.	Bandar Udara SM. Kaharuddin (<i>Initial</i>)

2.	Bandar Udara Adi Sumarmo-Solo (<i>Amandement</i>)	12.	Bandar Udara Wamena (<i>Initial</i>)
3.	Bandar Udara Adi Sucipto- Jogjakarta (<i>Amandement</i>)	13.	Bandar Udara Babullah- Ternate (<i>Amandement</i>)
4.	Bandar Udara El Tari-Kupang (<i>Amandement</i>)	14.	Bandar Udara Haluoleo- Kendari (<i>Initial</i>)
5.	Bandar Udara Pattimura-Ambon (<i>Amandement</i>)	15.	Bandar Udara Soekarno- Hatta-Jakarta (<i>Amandement</i>)
6.	Bandar Udara Syamsuddin Noor- Banjarmasin (<i>Amandement</i>)	16.	Bandar Udara Sentani- Jayapura (<i>Amandement</i>)
7.	Bandar Udara Frans Kaisiepo-Biak (<i>Amandement</i>)	17.	Bandar Udara Mopah- Merauke (<i>Initial</i>)
8.	Bandar Udara Douw Aturure- Nabire (<i>Amandement</i>)	18.	Bandar Udara Cakrabuana (<i>Initial</i>)
9.	Bandar Udara Kuala Pembuang (<i>Amandement</i>)	19.	Bandar Udara Aroepalla- Selayar (<i>Initial</i>)
10.	Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri- Palu (<i>Amandement</i>)	20.	Bandar Udara Tunggul Wulung-Cilacap (<i>Initial</i>)

Sumber : Direktorat Keamanan Penerbangan

- (f) *Aircraft Operator Security Programme (AOSP)* 12 operator penerbangan

Tabel 2.18 AOSP

No.	<i>Airline</i>	No.	<i>Airline</i>
1.	Firefly	7.	Lion Air
2.	Air France	8.	Wings Air
3.	Lufthansa	9..	Indonesia Air Asia
4.	Kalstar	10.	Garuda Indonesia
5.	Raya Airways	11.	Royal Jordanian
6.	Alda Trans Papua	12.	Nam Air

Sumber : Direktorat Keamanan Penerbangan

- (3) Rekapitulasi Penerbitan Lisensi Pelayanan PKP-PK dan *Salvage*

Tabel 2.19 Penerbitan Lisensi PKP-PK dan *Salvage*

No.	Penerbitan Lisensi di Unit Kerja	Jumlah Personel					Total
		<i>Basic</i>	<i>Junior</i>	<i>Senior</i>	TPK. PK	<i>Salvage</i>	
1	UPBU	94	117	73	32	-	316
2	PT. Angkasa Pura I	122	20	7	-	21	170
3	PT. Angkasa Pura II	49	41	46	-	4	140
4	Badan Usaha Bandar	14					14

No.	Penerbitan Lisensi di Unit Kerja	Jumlah Personel					
		Basic	Junior	Senior	TPK. PK	Salvage	Total
	Udara (BUBU)						
	TOTAL	279	178	126	32	25	640

Sumber : Direktorat Keamanan Penerbangan

(4) Perpanjangan Lisensi Pelayanan PKP-PK dan *Salvage*

Tabel 2.20 Perpanjangan Lisensi PKP-PK

No.	Perpanjangan Lisensi di Unit Kerja	Jumlah Personel					
		Basic	Junior	Senior	TPK. PK	Salvage	Total
1	UPBU	83	34	52	-	-	169
2	PT. Angkasa Pura I	147	-	115	-	25	287
3	PT. Angkasa Pura II	97	49	202	-	79	427
4	Bandara Khusus	33	-	-	-	-	33
	TOTAL	360	83	369	-	104	916

Sumber : Direktorat Keamanan Penerbangan

(5) Penambahan peralatan keamanan penerbangan di UPBU

- (a) Pemasangan perimeter *Intruder Detection System (PIDS)* di Bandar Udara Palu dan Gorontalo.
- (b) Pemasangan *X-Ray* dan WTMD di 9 (sembilan) Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) : Langgur, Namniwel, Moa, Larat, Tebelian, Waisai, Anambas, Sabang, dan Wakatobi.
- (c) *Explosive Trace Detector (ETD)* di 3 (tiga) UPBU : Wamena, Sorong dan Atambua.
- (d) *CCTV* di 9 (sembilan) UPBU : Muara Bungo, Melak, Susilo Sintang, Sumbawa, Nunukan, Mamuju, Sibolga dan Bau-bau, Buol.

Adapun upaya yang sedang dilakukan untuk meningkatkan keamanan di bandar udara adalah dengan melakukan :

Instalasi Pagar berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara.

4. Perkeretaapian

Kereta api mempunyai keunggulan dibanding dengan transportasi lain yaitu penyelenggaraan pengangkutan dalam jumlah besar atau banyak, efisiensi dalam konsumsi BBM dan penyebaran polusi yang paling rendah dibandingkan moda angkutan lain, sudah selayaknya didukung didalam upaya perbaikan dan pengembangannya.

Penyelenggaraan perkeretaapian saat ini, sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian tidak lagi monopoli pelaksanaannya, dalam arti pihak swasta yang berbadan hukum Indonesia dimungkinkan untuk menjadi penyelenggara yang meliputi penyelenggara prasarana, penyelenggara sarana, ataupun sekaligus penyelenggara sarana dan prasarana perkeretaapian.

Sesuai dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian, bahwa aspek Keselamatan Perkeretaapian merupakan hal yang menjadi prioritas dengan ditunjang oleh semua aspek dalam penyelenggaraan perkeretaapian, yaitu aspek sarana, prasarana, operasional dan SDM. Penyelenggara sarana dan prasarana perkeretaapian wajib melakukan pemeriksaan dan perawatan agar sarana dan prasarana perkeretaapian tetap dalam kondisi yang laik operasi. Dalam aspek operasional dan aspek SDM, penyelenggara wajib melakukan pembinaan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari segi regulator, peningkatan keselamatan merupakan hal yang pokok, oleh sebab itu pemerintah dalam hal ini Ditjen Perkeretaapian menetapkan standar, pedoman dan ketentuan yang harus dilakukan oleh operator. Disamping itu juga pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan pengujian dan sertifikasi terhadap sarana dan prasarana perkeretaapian yang akan dioperasikan serta SDM perkeretaapian. Dengan demikian setidaknya ada jaminan keselamatan untuk pengoperasian kereta api.

Dalam rangka peningkatan keselamatan di bidang SDM, operator wajib menggunakan SDM yang memenuhi kualifikasi keahlian atau kecakapan sesuai dengan bidang kerjanya. SDM perkeretaapian yang telah mengikuti pelatihan dan memenuhi kualifikasi keahlian atau kecakapan diberikan sertifikat dari pemerintah atau badan hukum Indonesia yang telah memenuhi persyaratan akreditasi.

Sertifikat untuk kualifikasi kecakapan atau keahlian wajib dimiliki SDM perkeretaapian, seperti sertifikat Awak Sarana, sertifikat Pemimpin Perjalanan Kereta Api (PPKA), serta sertifikat Penjaga Pintu Perlindungan.

Sertifikasi SDM Perkeretaapian dari tahun 2011 - 2015 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.21 Sertifikat Kompetensi SDM Perkeretaapian yang diterbitkan Ditjen Perkeretaapian 2011-2015

No.	Jenis Sertifikat Kecakapan SDM Perkeretaapian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Masinis	182	1.372	356	181	299
2	Asisten Masinis	178	587	277	265	600
3	PPKA (Pengatur Perjalanan KA)	340	0	896	500	283
4	PJL (Penjaga Pintu Perlindungan)	924	0	591	344	205
5	JPJ (Juru Pemeriksa Jalan)	451	0	114	0	232

No.	Jenis Sertifikat Kecakapan SDM Perkeretaapian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
6	Penguji Sarana Perkeretaapian	32	0	0	20	1
7	Penguji Prasarana Perkeretaapian	62	0	0	38	3
8	Inspektur Sarana Perkeretaapian	17	0	0	0	1
9	Inspektur Prasarana Perkeretaapian	31	0	0	0	3
10	Auditor Perkeretaapian	41	0	0	0	4
	Jumlah	2.258	1.959	2.237	1.348	1.631

Mengingat pergerakan/ frekuensi perjalanan KA yang cukup padat dengan lintas yang padat serta masih adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan transportasi serta adanya faktor eksternal (banjir, longsor, dan lain -lain) maka kejadian kecelakaan KA tidak mustahil akan terjadi. Berikut ini data kecelakaan dari tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.22 Jumlah dan Jenis Kecelakaan Angkutan Kereta Api Tahun 2010-2015

No	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Tabrakan KA Dengan KA	Kejadian	3	1	2	0	1	5
	<i>Accidents Between Trains Against Trains</i>	<i>Accident</i>						
2	Tabrakan KA Dengan Kendaraan	Kejadian	26	22	-	-	-	-
	<i>Accidents Between Trains Against Vehicles</i>	<i>Accident</i>						
3	Anjlokkan	Kejadian	25	23	21	25	33	68
	<i>Derailment</i>	<i>Accident</i>						
4	Terguling	Kejadian	4	2	2	1	0	0
	<i>Rolling</i>	<i>Accident</i>						
5	Banjir / Longsor	Kejadian	6	1	4	7	2	0
	<i>Flood / Lanslide</i>	<i>Accident</i>						
6	Lain-lain	Kejadian	4	6	2	6	3	0
	<i>Others</i>	<i>Accident</i>						
TOTAL		Kejadian	68	55	31	39	39	73

Pada tahun 2015 jumlah kejadian kecelakaan sebanyak 73 kejadian atau mengalami kenaikan 46,58 % dari tahun sebelumnya. Dari jumlah kejadian tersebut, anjlokkan

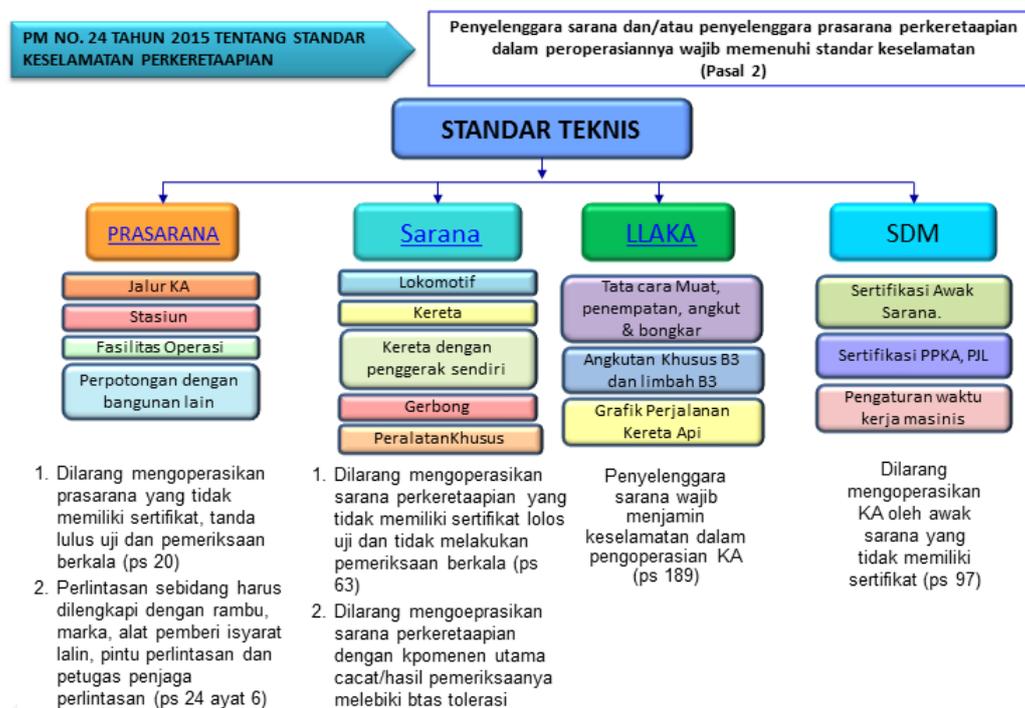
merupakan kejadian terbanyak dengan 68 kejadian atau 93,15 % dari total kejadian kecelakaan tahun 2015.

Tabel 2.23 *Rate Of Accident*

TAHUN	JUMLAH KECELAKAAN	KM TEMPUH	RoA (Rate Of Accident)
2011	33	50.140.079	0,66
2012	31	65.635.028	0,47
2013	39	53.961.479	0,72
2014	39	60.363.012	0,65
2015	73	63.710.056	1,15

Sumber : Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Untuk pemenuhan pedoman standar keselamatan perkeretaapian pada Tahun 2015 telah diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian, dimana dalam peraturan tersebut mengatur bahwa Penyelenggara sarana dan/atau penyelenggara prasarana perkeretaapian dalam peroperasiannya wajib memenuhi standar keselamatan. Berikut ini merupakan Bagan Standar Keselamatan Perkeretaapian.



Gambar 2.11 Bagan Standar Keselamatan Perkeretaapian

Ditjen Perkeretaapian juga menerapkan Penggunaan Rekayasa Teknologi guna menunjang Faktor Keselamatan sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan kereta api, dalam hal ini penerapan penggunaan rekayasa teknologi antara lain :

- Melanjutkan Penerapan/Pemasangan SKKO/ATP Lintas Utara dan Lintas Selatan Jawa;

- b. Pemasangan SKKO/ATP untuk Jabodetabek (Spektek SKKO/ATP) untuk Jabodetabek diusulkan selevel dengan ATCS level 1;
- c. Pemasangan ATP di Sarana;
- d. Pemasangan alat pemantau pergeseran tanah/ longsor;
- e. Pemantauan Batas Kecepatan Kereta api;
- f. Pemasangan CCTV untuk membantu pemantauan di stasiun, perlintasan, dan jalur KA.

5. Subsektor Penunjang

a. Studi Peningkatan Keselamatan dan Keamanan

Badan Litbang Perhubungan telah melakukan Studi terkait dengan Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi sebanyak 47 studi dengan judul sebagai berikut.

Tabel 2.24 Studi Peningkatan Keselamatan dan Keamanan dan Keselamatan Transportasi Tahun 2015

STUDI	JUDUL STUDI
Peningkatan Keselamatan dan Keamanan	1. Studi Aplikasi Pencatatan dan Verifikasi Kendaraan Masuk dan Keluar Wilayah.
	2. Profil Pengujian Kendaraan Bermotor.
	3. Sistem Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.
	4. Penelitian Pengembangan Pendeteksi Dini Longsoran dan Anjlogan Pada Prasarana Kereta Api.
	5. Penyusunan Pedoman Akreditasi dan Sertifikasi Pengujian Kendaraan Bermotor.
	6. Survey Fasilitas Perlengkapan Jalan Propinsi pada Ruas Jalan Patuk - Wonosari di Kabupaten Gunung Kidul.
	7. Kajian Fasilitas perlengkapan dan pendukung jalan di kota Wonosari Kabupaten Gunung Kidul (Ruas Jalan Agus Salim - Sugiyapranata).
	8. Evaluasi Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Bab Keselamatan.
	9. Analisis <i>Walkability</i> Dalam Upaya Meningkatkan Kenyamanan dan Keselamatan Pejalan Kaki di Stasiun Bogor dan Bandung.
	10. Studi Karakteristik dan Persepsi Pengguna Sepeda Motor Pada Arus Mudik dan Balik Lebaran 2015 (Bekasi - Brebes).
	11. Studi Karakteristik dan Persepsi Pengguna Sepeda Motor Pada Arus Mudik dan Balik Lebaran 2015 (Cirebon - Subang).
	12. Kajian Penertiban Kendaraan Tidak Bermotor (Becak) di Wilayah Kota Cirebon.

STUDI	JUDUL STUDI
	<ol style="list-style-type: none"> 13. Kajian Peningkatan Fasilitas Pejalan Kaki di Perkotaan Wonosari. 14. Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) Magelang. 15. Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) Cimahi. 16. Pengaruh Sarana dan Prasarana Terhadap Keselamatan Berlalu-Lintas di Kota Bogor. 17. Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) Kediri. 18. Kajian Audit jalan Guna Mengurangi Rawan Kecelakaan di Jalan Raya Kabupaten Ciamis. 19. Studi Penyusunan Profil Keselamatan Transportasi Darat di Kota Mataram. 20. Studi Bidang Keselamatan Lalu-Lintas di Kota (Solok) Padang. 21. Studi Profil Bidang Keselamatan Lalu-Lintas di Kota Banjarbaru. 22. Analisis Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan di Indonesia. 23. Peningkatan Keselamatan Lalu-Lintas Pada Daerah Rawan Kecelakaan di Kota Batam (Studi Kasus di Jalan Umum Bareleng). 24. Penelitian Pengembangan Penyelenggaraan Ujian Keahlian Pelaut di Indonesia. 25. Penelitian Standar Kapal dan Alur Pelayaran Pada Simpul Jaringan Trayek Utama (<i>Trunk Route</i>). 26. Kajian Tingkat Persepsi Masyarakat Terhadap Peralatan Keselamatan Pada Moda Transportasi Laut dan Penyeberangan di Provinsi Maluku. 27. Kajian Analisis Pemilihan Lokasi Pengganti Pelabuhan Cilamaya. 28. Kajian Kewenangan Statutori Kapal Berbendera Indonesia Yang Berlayar Ke Luar Negeri. 29. Kajian Dampak Pengerukan dan Reklamasi Dalam Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan di Indonesia. 30. Penelitian Pengembangan <i>Software</i> untuk Metoda Analisa <i>Damage Tolerance Repair</i> Struktur Pesawat Terbang (Swakelola). 31. Penelitian Implementasi ADS-B di Indonesia (Swakelola). 32. Studi Kebutuhan Peralatan dan SDM Balai Penelitian Teknologi Keselamatan Penerbangan (Swakelola). 33. Pengkajian Peningkatan Fungsi Pengawasan Keamanan dan Keselamatan Penerbangan Kantor Otoritas Bandara di Bandar Udara Sultan Hasanuddin-Makassar. 34. Pengkajian Faktor Frekuensi Insiden dan Kecelakaan Terhadap Pemilihan Maskapai Penerbangan. 35. Kajian Manajemen Pergerakan Kendaraan di Apron Bandar Udara Dalam Meningkatkan Keselamatan Penerbangan. 36. Kajian Optimalisasi Peran Kantor Otoritas Bandara Dalam

STUDI	JUDUL STUDI
	Rangka Pelaksanaan Tugas/ Fungsi Pengawasan Pada Bandara Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU).
37.	Kajian Rasio Beban Kerja SDM Kantor Otoritas Bandara Terhadap Tugas dan Fungsi Pengawasan Pada Bandara.
38.	Kajian Pemeliharaan Fasilitas Peralatan Keamanan di Bandar Udara Djalaluddin-Gorontalo.
39.	Kajian Sistem Pengamanan di Sekitar Wilayah Kerja Bandar Udara.
40.	Kajian Penerapan SMS di Bandar Udara Raden Inten II-Lampung.
41.	Evaluasi Kinerja Petugas Keamanan Bandar Udara Raden Inten II-Lampung.
42.	Kajian <i>Crashworthiness</i> Pada Struktur Pesawat Udara.
43.	Kajian Keamanan dan Keselamatan Penerbangan di Bandar Udara Haluoleo Kendari.
44.	Kajian Pemotongan Bukit di Bandar Udara Sebagai Standar Keselamatan Penerbangan.
45.	Kajian Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Wunopito Lewoleba Kabupaten Lembata.
46.	Kajian Analisis Faktor yang Mempengaruhi Hasil Kerja ATC di Bandar Udara.
47.	Distribusi Pengguna <i>Commuter Line</i> (CL) dalam Pemanfaatan Fasilitas Publik Pejalan Kaki Mencapai Objek Wisata Kebun Raya Bogor.
48.	Sistem Informasi Pergudangan di Palembang.

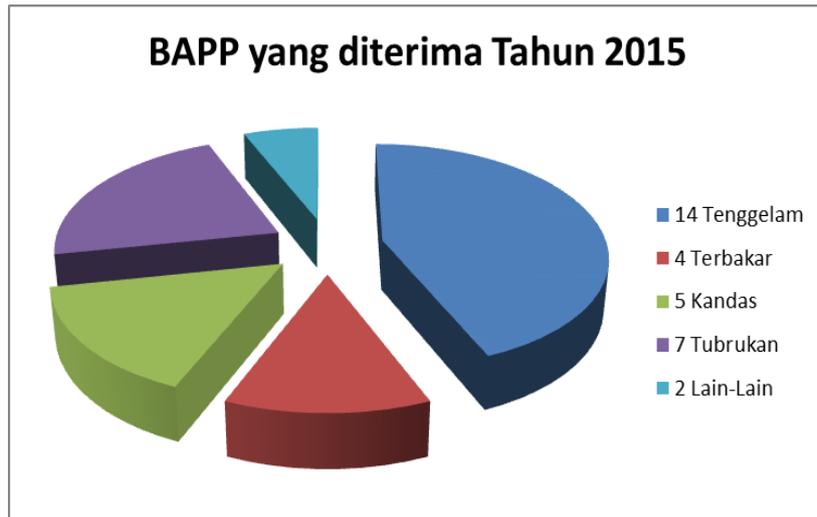
b. Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal

1) Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kapal

Selama tahun 2015 Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah melimpahkan berkas Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) Kecelakaan Kapal kepada Mahkamah Pelayaran sebanyak 32 (tiga puluh dua) berkas terdiri dari :

Tabel 2.25 Berkas BAPP Kecelakaan Kapal yang diterima Mahkamah Pelayaran 2015

No.	Uraian	Jumlah
1	Tenggelam	14
2	Kandas	5
3	Terbakar	4
4	Tubrukan	7
5	Lain-Lain	2
	Jumlah	32



Selama tahun 2015 Mahkamah Pelayaran telah menindaklanjuti dan menyelesaikan berkas perkara kecelakaan kapal yang meliputi tunggakan perkara tahun 2014 sebanyak 14 berkas dan berkas BAPP tahun 2015 sebanyak 5 berkas BAPP dari 32 berkas BAPP, sehingga keseluruhan berkas yang telah diputus oleh Mahkamah Pelayaran sebanyak 19 berkas.

Tabel 2.26 Rekapitulasi berkas BAPP Mahkamah Pelayaran 2015

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	BAPP tunggakan 2014	14	14 BAPP Tunggakan 2014, telah diputus di tahun 2015
2	BAPP tahun 2015	32	5 BAPP telah diputus tahun 2015, 27 BAPP dalam proses penjadwalan sidang dan proses persidangan
	Jumlah BAPP yang diproses Mahpel	46	Tahun 2015 diputus 19 berkas, 27 berkas BAPP dalam proses persidangan untuk tahun 2016

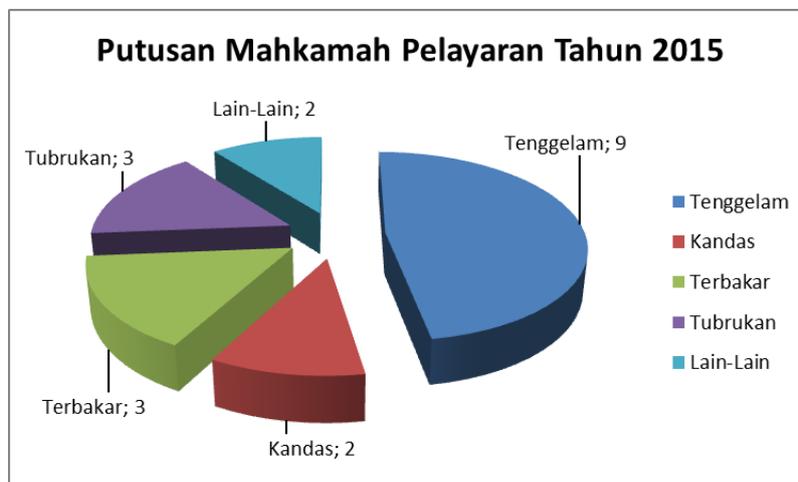
Selama tahun 2015 Mahkamah Pelayaran telah menyelesaikan putusan sebanyak 19 putusan sebagai berikut :

Tabel 2.7 Jumlah Putusan Mahkamah Pelayaran 2015

No.	Uraian	Jumlah
1	Tenggelam	9
2	Kandas	2
3	Terbakar	3

No.	Uraian	Jumlah
4	Tubrukan	3
5	Lain-Lain	2
	Jumlah	19

Sumber : Mahkamah Pelayaran



Grafik 2.4 Putusan Mahkamah Pelayaran Tahun 2015

2) Penugasan Tim Majelis Mahkamah Pelayaran pada Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal di daerah

Dalam keadaan tertentu di mana para pihak tidak dapat hadir di Jakarta disebabkan karena kendala teknis maupun ekonomi, Mahkamah Pelayaran dapat melaksanakan Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal di daerah/ tempat kejadian kecelakaan kapal (*Locus Delicti*), sebagai salah satu alternatif Proses Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal. Prosedur dan tata cara persidangan pada prinsipnya sama dengan sidang yang dilaksanakan di kantor Mahkamah Pelayaran di Jakarta, hanya lokasi tempat pelaksanaan sidang di daerah.

Pada tahun 2015 dilaksanakan persidangan pada Kantor Kesyahbandaran Utama/ Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/ Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dengan 20 kali persidangan sebagai berikut :

Tabel 2.28 Pelaksanaan Persidangan Lanjutan Kecelakaan Kapal di Daerah-Daerah pada Tahun 2015

NO	TEMPAT SIDANG	WAKTU	KASUS KECELAKAAN KAPAL
1	KSOP Kupang	19-21 Jan 15	Tenggelam KM. Jala Sejahtera 2
2	KSOP Gresik	04- 06 Feb 15	Kandas KM. Dewaruci Jaya
3	KSU Surabaya	25 – 27 Maret 2015	Tenggelam KM. Asia Dua
4	KSOP Pulau Sambu	14-16 April	Terbalik TK. Sri Yaris ditunda KT.

NO	TEMPAT SIDANG	WAKTU	KASUS KECELAKAAN KAPAL
		2015	Cahaya Perkasa
5	KSOP Jambi	11-13 Mei 2015	TK. Sumber Cipta II menubruk tiang jembatan
6	KSOP Merauke	25-29 Mei 15	Tubrukan KM. Tatamailau Vs KM. Patar
7	KSOP Banjarmasin	10-12 Juni 2015	Tenggelam KT. KSA I menunda TK. RMN 362
8	KSOP Gresik	15-17 Juni 2015	Tenggelam KM. Pertama-I
9	KSOP Balikpapan	05-07 Agt15	Kandas LCT. Agung Samudera
10	UPP Sungai Danau Satui	12-14 Agt 15	Tenggelam LCT. Nunukan Jaya I
11	KSOP Kupang	19-21 Agt 15	Terbakar KM. Nemberela
12	UPP Kelas III Kalbut, Situbondo	26-28 Agt 15	Tenggelamnya KLM. Karya Utama II
13	KSU Belawan	01-04 Sep 15	Tenggelam KM. Kumala Endah
14	KSU Belawan	01-04 Sep 15	Tenggelam KT. Maiden Nautica
15	KSOP Kotabaru	07 - 09 Okt 15	Tenggelam KM. Andromeda
16	KSOP Samarinda	20 - 23 Okt 15	Tubrukan KM. Fortune dengan Jetty Conveyor
17	KSOP Tembilahan/KSOP Pekanbaru	28 - 30 Okt 15	Tenggelam KT. Asenho-296
18	KSOP Kelas II Palembang	10-13 Nov 15	Tubrukan KM. Sinar Jimbaran Vs KM. Mochtar Prabu Mangkunegara
19	UPP Bajoe	18-20 Nov 15	Kandasnya KMP. Kota Muna
20	UPP Kelas III Buleleng	15-17 Des 15	Kandasnya Km. Anugerah Abadi-I



Gambar 2.12 Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal Tenggelamnya KM. Pertama-1 di KSOP Gresik, Jawa Timur, 2015.

3) Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal di Jakarta

Dalam beberapa kasus kecelakaan kapal yang ditangani Mahkamah Pelayaran dilaksanakan proses persidangan di Kantor Mahkamah Pelayaran di Jakarta. Sidang tersebut meliputi Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal Tahap I ataupun Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal tahap II. Sidang Tahap II dilaksanakan bertujuan guna memperoleh informasi lebih lanjut terkait kasus kecelakaan kapal karena belum lengkapnya keterangan yang diperoleh dari Tersangkut (Nakhoda, Pemimpin Kapal dan/atau Perwira Kapal) serta para Saksi dan Saksi Ahli pada waktu Sidang I karena tidak dapat dihadirkan dalam persidangan.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan sebanyak 17 kali proses Sidang Pemeriksaan lanjutan Kecelakaan Kapal yang dilaksanakan di Kantor Mahkamah Pelayaran, Jakarta sebagai berikut :

- a) Sidang I Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal Tenggelam KM. Jala Sejahtera 2 pada tanggal 21 januari 2015
- b) Sidang I Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal Miring dan terbaliknya KM. BJL I pada tanggal 3 Februari 2015
- c) Sidang I Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal Tenggelam KM. Asia Dua pada tanggal 25 Februari 2015
- d) Sidang I Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal Terbakarnya KM. Buddy Rakhmadi pada tanggal 17 Maret 2015
- e) Sidang II Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal Tenggelamnya KM. Jala Sejahtera pada tanggal 26 Februari 2015
- f) Sidang II Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal Kandasnya KM. Dewaruci Jaya pada tanggal 3 Maret 2015
- g) Sidang II Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal terbakarnya KM. Buddy Rakhmadi pada tanggal 28 April 2015
- h) Sidang II Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan kapal terbaliknya TK. Sri Yaris ditunda KT. Cahaya Perkasa pada tanggal 4 Mei 2015
- i) Sidang II Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal tenggelamnya TB. KSA I pada tanggal 30 Juni 2015
- j) Sidang II Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal tenggelamnya KM. Pertama I pada tanggal 1 Juli 2015
- k) Sidang II Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal tubrukannya KM. Tatamailau VS KM. Patar pada tanggal 3-4 Agustus 2015
- l) Sidang II Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal tenggelamnya KM Pertama I pada tanggal 10 Agustus 2015
- m) Sidang II Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal terbakarnya KM. Nemberela pada tanggal 1 September 2015
- n) Sidang II Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal tenggelam Karya Utama II pada tanggal 22 September 2015

- o) Sidang II Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal tenggelam LCT Nunukan Jaya I pada tanggal 6 Oktober 2015
- p) Sidang II Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal tenggelam KM. Kumala Endah pada tanggal 19 Oktober 2015
- q) Sidang II Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal tenggelam KM Andromeda XXII pada tanggal 25 November 2015

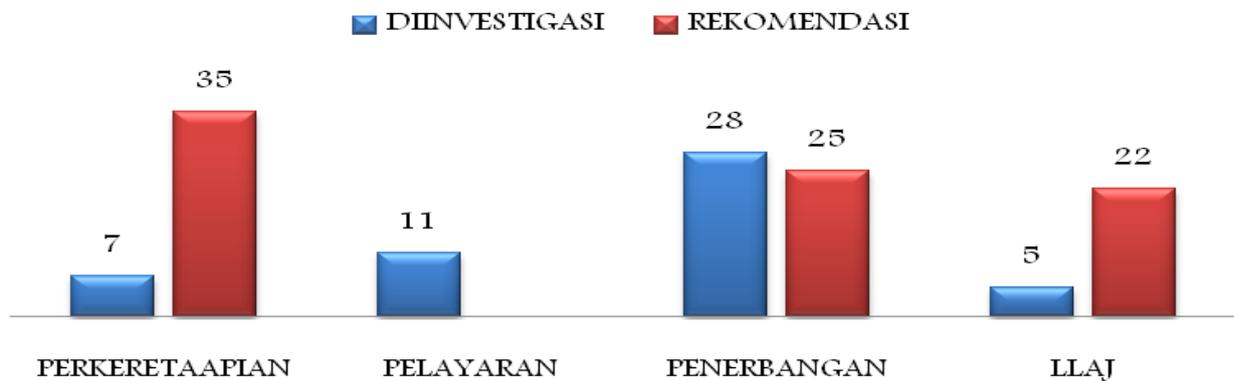


Gambar 2.13 Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal Tenggelmnya KM. Asia Dua di Kantor Mahkamah Pelayaran, Jakarta, 2015.

c. **Investigasi Kecelakaan Transportasi**

Selama Tahun 2015, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) melaksanakan program sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi. Pelaksanaan tugas utama investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi dijabarkan menjadi tugas masing-masing Sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi yang dapat diuraikan sebagai berikut : Secara keseluruhan Komite Nasional Keselamatan Transportasi melaksanakan investigasi terhadap 51 (lima puluh satu) kecelakaan pada semua moda transportasi yang terdiri dari 7 (tujuh) kecelakaan Perkeretaapian, 11 (sebelas) kecelakaan Pelayaran 28 (dua puluh delapan) kecelakaan penerbangan dan 5 (lima) kecelakaan lalu-lintas dan angkutan jalan. Sementara jumlah rekomendasi yang dikeluarkan oleh KNKT selama periode 2015 berjumlah 82 (delapan puluh dua) rekomendasi keselamatan yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) rekomendasi pada moda perkeretaapian, 25 (dua puluh lima) rekomendasi moda penerbangan dan 22 (dua puluh dua) rekomendasi moda transportasi lalu-lintas dan angkutan jalan.

**JUMLAH KECELAKAAN YANG DIINVESTIGASI DAN
REKOMENDASI KESELAMATAN YANG
DIKELUARKAN KNKT TAHUN 2015**



Grafik 2.5 Jumlah Kecelakaan Yang Diinvestigasi KNKT Tahun 2015

1) Investigasi dan Penelitian Kecelakaan Perkeretaapian

Pada Tahun 2015, Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian melaksanakan investigasi terhadap 7 (tujuh) kecelakaan Perkeretaapian dengan menghasilkan 18 rekomendasi keselamatan. Adapun jumlah produksi atau kilometer tempuh yang dihasilkan moda transportasi kereta api sepanjang tahun 2015 adalah sebesar 62.618.416 km, naik sebesar 3,7% dari tahun 2014 yang mencapai 60.363.012 km. Kecelakaan Perkeretaapian yang diinvestigasi KNKT sepanjang tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.29 Investigasi dan Penelitian Kecelakaan Perkeretaapian Tahun 2015

No	Tanggal	Nama KA	Lokasi	Kategori	Faktor Penyebab Utama
1.	19 Februari 2015	KA 2911 angkutan barang isi CPO	Km 10+690 emplasemen St. Titipapan yang tidak difungsikan sebagai stasiun, lintas St. Medan - St. Belawan, Medan, Divisi Regional I Sumatera Utara	Anjlokkan	Prasarana
2	23 Mei 2015	KA 56 Bangunkarta dengan KA 2502A	Emplasemen St. Waruduwur, Daop III Cirebon	Tumburan	Prasarana
3.	15 Juni 2015	KA 3029 dengan KA 3027	Km 279+500/600 petak jalan antara St. Kotabaru - St. Metur, Sub Divre III.2 Tanjungkarang	Tumburan	Prasarana

No	Tanggal	Nama KA	Lokasi	Kategori	Faktor Penyebab Utama
4.	23 September 2015	KRL 1156 dengan KRL 1154	St. Juanda Km 4+300, Daop I Jakarta	Tumburan	SDM
5.	6 Oktober 2015	KA 3024 dengan KA 3026	Emplasemen St. Negeri Agung Km 148+216, Sub Divre III.2 Tanjungkarang	Tumburan	Proses
6.	8 November 2015	KA 3025	Km 203 petak jalan antara St. Gilas - St. Sungaituha, Sub Divre III.2 Tanjungkarang	Anjlokkan	Proses
7.	8 November 2015	Langsiran Bakalan KA BBR	Emplasemen stasiun kereta api pengisian batu bara/ Train Loading Station (TLS), Sub Divre III.1 Kertapati	Anjlokkan	Proses

Tabel 2.30 Jumlah Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian Tahun 2015

KECELAKAAN TRANSPORTASI KERETA API				
	Tumburan Antar KA	Anjlokkan/ Terguling	Lain-lain	Jumlah
Diinvestigasi KNKT	4	3	-	7
KORBAN				
	Meninggal	Luka-luka	Jumlah	
Total Korban	0	50	50	

Sumber : Database KNKT 31 Desember 2015

Kecelakaan Kereta Api



Gambar 2.14 KRL 1156 menumbur KRL 1154 di St. Juanda Km 4+300, Daop I Jakarta, tanggal 23 September 2015.

2) Investigasi dan Penelitian Kecelakaan Pelayaran

Pada Tahun 2015, Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran melaksanakan investigasi terhadap 11 kecelakaan pelayaran dan keseluruhannya masih dalam proses penyelesaian laporan. Adapun jumlah *Port Of Call* yang dihasilkan selama tahun 2015 adalah sebesar 306.685 kali dibanding 312.334 kali pada Tahun 2014 yang artinya terjadi penurunan sebesar 1,20%.

Tabel 2.31 Jumlah Investigasi Kecelakaan Pelayaran Tahun 2015

KECELAKAAN TRANSPORTASI PELAYARAN					
Diinvestigasi KNKT	Kapal Tenggelam	Kapal Terbakar/ Meledak	Kapal Tubrukan	Kandas	Jumlah
	3	4	3	1	11
KORBAN					
Total Korban	Meninggal/ Hilang	Luka-luka			Jumlah
	1	-			1

Sumber : Database KNKT, 31 Desember 2015

Gambar 2.15 Kecelakaan Pelayaran Tahun 2015



Tabel 2.32 Daftar Kecelakaan Pelayaran Yang Diinvestigasi Komite Nasional Kecelakaan Transportasi Tahun 2015.

No.	Tanggal	Nama Kapal	Lokasi	Kategori	Faktor Penyebab Utama	Rekomendasi
1	14 Mei 2015	KM. Asia Raya	Kupang, Nusa Tenggara Timur	Terbakar	-	-
2	28 Juni 2015	MT. Navigator Aries dan MV. Leo Perdana	Di sekitar <i>bouy</i> 6 Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS), Jawa Timur	Tubrukan	-	-

No.	Tanggal	Nama Kapal	Lokasi	Kategori	Faktor Penyebab Utama	Rekomendasi
3	01 September 2015	KM. Meratus Banjar 2	Perairan Laut Jawa, Jawa Timur	Tenggelam	-	-
4	20 September 2015	KM. Otong Kosasih	Pelabuhan Khusus Pusri, Palembang, Sumatera Selatan	Terbakar	-	-
5	15 November 2015	KM. New Glory	Dermaga ICT Pelabuhan Tanjung Perak	Terbakar	-	-
6	16 November 2015	KMP. Wihan Sejahtera	Teluk Lamong, Jawa Timur	Tenggelam	-	-
7	21 November 2015	KM. Nusa Bintang	Perairan Sekitar Pulo Merak, Cilegon, Banten	Terbakar	-	-
8	29 November 2015	MV. Sea Prince	Perairan Nongsa Pura, Batam	Tubrukan	-	-
9	04 Desember 2015	MV. Hanjin Aqua	Perairan Selat Sunda Sekitar P. Sangiang	Kandasnya	-	-
10	16 Desember 2015	MV. Thorco Cloud dengan MV. Stolt Commitment	Perairan Belakang Padang Batam	Tubrukan dan Kandasnya	-	-
11	19 Desember 2015	MV. Marina Baru 02	Perairan Selat Bone Sulawesi Selatan	Tenggelam	-	-

Sumber : Database KNKT, 31 Desember 2015

3) Investigasi dan Penelitian Kecelakaan Penerbangan

Pada Tahun 2015, Sub Komite Kecelakaan Penerbangan melaksanakan investigasi terhadap 28 kecelakaan transportasi penerbangan komersial berjadwal dan tidak berjadwal dengan menghasilkan 8 rekomendasi keselamatan. Sementara pada tahun 2014 terjadi 30 *accident* dan 7 *serious incident*. Produksi jam terbang (*Flying Hours*) yang dihasilkan selama tahun 2015 adalah sebesar 935.202 jam terbang, naik sebesar 1,6% di banding tahun 2014 yang sebesar 920.357 jam terbang. Kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa paling banyak terjadi di dekat Oksibil, Kabupaten Bukit Bintang, Papua pada 16 Agustus 2015. Pesawat ATR-420 300 yang dioperasikan Trigana Air Service yang sejatinya terbang dari Jayapura menuju Oksibil ini jatuh di sisi sebuah bukit, total korban 54 orang korban tewas.

Tabel 2.33 Jumlah Investigasi Kecelakaan Penerbangan Komersial Berjadwal dan Tidak Berjadwal Tahun 2015

KECELAKAAN PENERBANGAN				
Diinvestigasi KNKT	Accident	Serious Incident	Incident	Jumlah
	11	17	0	28
KORBAN				
Total Korban	Meninggal	Luka-luka	Hilang	Jumlah
	65	10	0	75

Sumber : Database KNKT, 31 Desember 2015

Gambar 2.16 Kecelakaan Penerbangan Tahun 2015



Serious Incident Pesawat Boeing 737-900 PT. BATIK AIR Di Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta Pada Tanggal 6 November 2015.

Kecelakaan Pesawat PAC 750XL PT. KOMALA AIR di Bandara Perintis Ninia, Papua Pada Tanggal 12 Agustus 2015.

4) Investigasi dan Penelitian Kecelakaan Tertentu Kendaraan Bermotor Umum

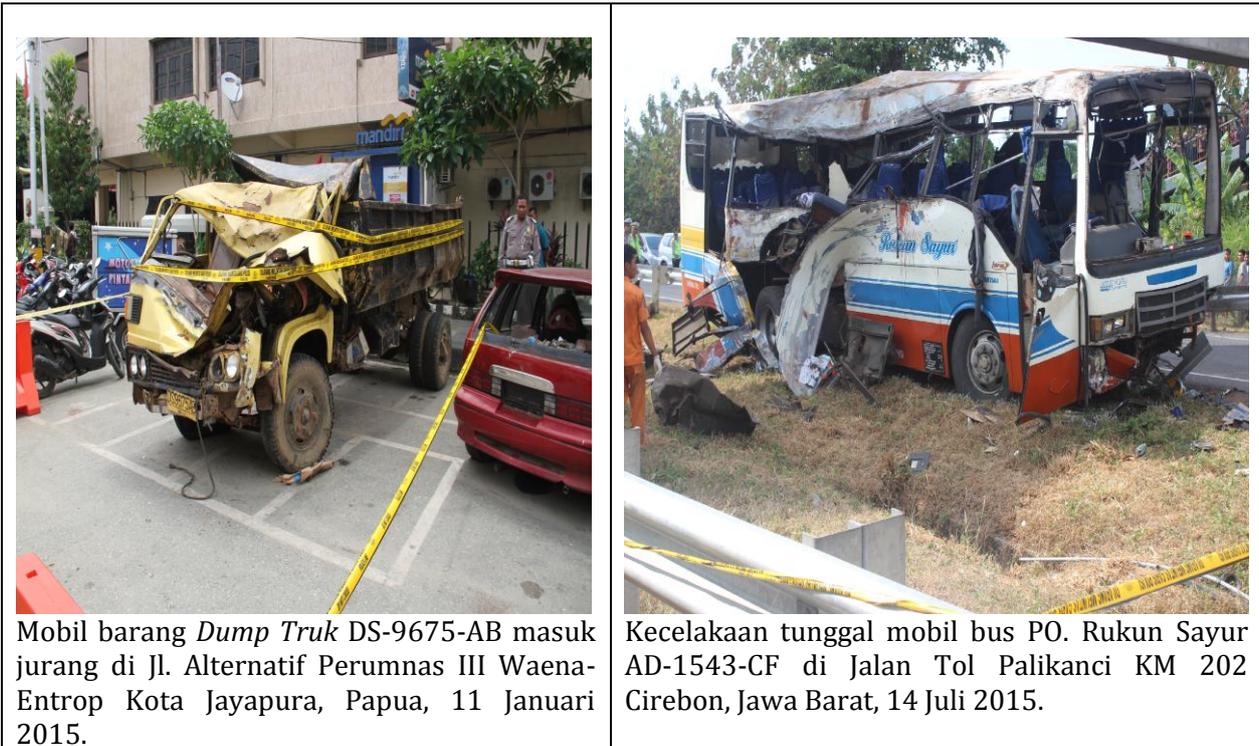
Pada Tahun 2015, Sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan melaksanakan investigasi terhadap 5 (lima) kecelakaan Tertentu Kendaraan Bermotor Umum dengan menghasilkan 2 (dua) laporan final serta 3 (tiga) *draft* laporan final dan 22 rekomendasi keselamatan. Jumlah ini sama dengan kecelakaan Tertentu Kendaraan Bermotor Umum yang diinvestigasi KNKT selama tahun 2014.

Tabel 2.34 Jumlah Investigasi Kecelakaan Tertentu Kendaraan Bermotor Umum Tahun 2015

KECELAKAAN TERTENTU KENDARAAN BERMOTOR UMUM				
	Tabrakan	Terguling	Terbakar	Jumlah
Diinvestigasi KNKT	2	3	0	5
KORBAN				
	Meninggal	Luka-luka	Hilang	Jumlah
Total Korban	70	141	0	211

Sumber : Database KNKT, 31 Desember 2015

Gambar 2.17 Kecelakaan Bermotor Tahun 2015



Tabel 2.35 Daftar Kecelakaan Tertentu Kendaraan Bermotor Umum Yang Diinvestigasi Komite Nasional Kecelakaan Transportasi Tahun 2015

No	Tanggal	Lokasi	Kategori
1.	11 Januari 2015	Kecelakaan tunggal mobil barang <i>Dump Truk</i> DS-9675-AB masuk jurang di Jl. Alternatif Perumnas III Waena-Entrop Kota Jayapura, Papua.	Terguling
2.	20 Februari 2015	Kecelakaan Tunggal Mobil Bus B-7222-KGA Terguling di Jl. Tol Jatingaleh KM 9+300, Semarang.	Terguling
3.	14 Juli 2015	Kecelakaan tunggal mobil bus PO.Rukun Sayur AD-1543-CF di Jalan Tol Palikanci KM 202 Cirebon, Jawa Barat.	Tabrakan
4.	3 Desember 2015	Kecelakaan Tunggal Mobil Elf B-8378-OU di ruas Tol Cipali Km. 307 Cirebon, Jawa Barat.	Terguling
5.	6 Desember 2015	Kecelakaan antara <i>MetroMini</i> Jurusan Kalideres Grogol dengan <i>Commuter Line</i> di Perlintasan Sebidang Muara Angke.	Terguling

- 5) Pelaksanaan Seminar/ *Workshop*/ Sosialisasi yang di selenggarakan oleh KNKT Tahun 2015:
- a) Pelaksanaan Seminar/ *Workshop*/ Sosialisasi yang diselenggarakan oleh KNKT Tahun 2015 :
- (1) Sosialisasi Pencegahan dan Investigasi Kecelakaan Penerbangan Tahun 2015 di Jakarta pada tanggal 2 September 2015, dengan jumlah peserta 100 orang;
 - (2) Sosialisasi Preventif Kecelakaan Transportasi Jalan Tahun 2015 di Bogor, Jawa Barat, dengan jumlah peserta 100 orang;
 - (3) Sosialisasi Preventif Kecelakaan Transportasi Kereta Api Tahun 2015 di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 30 September 2015, dengan jumlah peserta 100 Orang;
 - (4) Sosialisasi Pencegahan dan Investigasi kecelakaan Pelayaran Tahun 2015 di Banten, pada tanggal 7 Oktober 2015, dengan jumlah peserta 100 orang.
- b) Kegiatan *Training* yang diselenggarakan oleh KNKT :
- (1) *Fundamental Marine Investigation Course* (FMED), tanggal 24-26 Februari 2015 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dengan jumlah peserta 42 orang;
 - (2) *Fundamental Marine Investigation Course* (FMED), Tanggal 26-28 Mei 2015 di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan jumlah peserta 34 orang;
 - (3) *Advanced Road Safety Investigation Course*, tanggal 25-29 Mei 2015, Jakarta, dengan jumlah peserta 50 orang.
 - (4) *Fundamental Marine Investigation Course* (FMED), tanggal 15 s.d 17 September 2015 di Medan, Sumatra Utara, dengan Jumlah peserta 40 orang;
 - (5) *Fundamental Marine Investigation Course* (FMED), tanggal 24 s.d 26 November 2015 di Bali, dengan Jumlah peserta 40 orang
- c) Kegiatan Kunjungan/ Pertemuan Tingkat International yang telah dihadiri :
- (1) Menghadiri *The MH370 Investigators and Accredited Representative (AR) Team Meeting*, di Putrajaya, Malaysia pada tanggal 9-11 Febtuari 2015;
 - (2) Menghadiri *The 8th China-ASEAN Working Group Meeting on Regional Air Services Arrangements*, Nanjing, Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 15 s.d 21 Maret 2015;
 - (3) Mengikuti investigasi dengan Tim CAD Hongkong terkait serious incident pesawat Airbus A 330-223 Registrasi B-LNF di Hongkong pada tanggal 2 s.d 6 Mei 2015;
 - (4) Menghadiri *Maritime Safety Tribunal (KMST)* di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 11 s.d 12 Juni 2015;
 - (5) Mengikuti *16th Indonesia Transport Safety Assistance Package (ITSAP) Project Review Group Meeting* di Gold Coast, Australia pada tanggal 8 s.d 11 Juni 2015;
 - (6) Menghadiri *Asia Pacific Regional Aviation Safety Team (APRAST) 3rd Meeting Of The Asia Pacific Accident Investigation Group*

- (APAC AIG/3) dan ICAO Regional Accident Investigation Workshop, Asia and Pacific Regions di Colombo, Srilangka pada tanggal 22 s.d 27 Juni 2015;
- (7) Menghadiri *The MH370 Investigators and Accredited Representative (AR) Team Meeting* di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 27 s,d 29 Juli 2015;
 - (8) Pertemuan *Marine Accident Investigators Forum in Asia (MAIFA)* ke-18 di Singapore pada tanggal 4 s.d 6 Agustus 2015;
 - (9) Menghadiri *Internatioan Society of Air Safety Investigators (ISASI) Annual Seminar* Tahun 2015, di Augsburg, Jerman pada tanggal 22 s.d 28 Agustus 2015.
 - (10) Pertemuan MAIIF ke-24, *International Conference on the Safety Investigation of Marine Casualty* ke-4 di Turki pada tanggal 8 s.d 10 September 2015
- d) Penyelenggaraan *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Komite Nasional Keselamatan Transportasi dengan Lembaga Pendidikan Atau Badan Lain:
- (1) MoU dengan Universitas Pakuan tentang Program Peningkatan SDM di Bidang Manajemen Investigasi Safety Kecelakaan Transportasi dan Pertukaran Informasi di Bogor pada tanggal 17 Februari 2015;
 - (2) Mou dengan Yayasan Adi Upaya tentang Program Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di Bekasi pada tanggal 25 Maret 2015;
 - (3) MoU dengan Basarnas tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi di Jakarta pada tanggal 17 April 2015;
 - (4) MoU dengan BP2TD Bali tentang Program Peningkatan SDM di Bidang Manajemen Investigasi *Safety* Kecelakaan Transportasi dan Pertukaran Informasi di Gianyar, Bali pada tanggal 24 April 2015;
 - (5) MoU dengan Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto tentang Program Pemanfaatan SDM dan Pertukaran Informasi di Yogyakarta pada tanggal 21 Mei 2015;
 - (6) MoU dengan Universitas Nurtanio Bandung tentang Program Pemanfaatan SDM dan Pertukaran Informasi di Bandung pada tanggal 21 Mei 2015;
 - (7) MoU dengan Universitas Suryadarma tentang Program Pemanfaatan SDM dan Pertukaran Informasi di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2015;
 - (8) MoU dengan PPNS Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2015;
 - (9) MoU dengan Polri tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi di Jakarta pada tanggal 1 September 2015;
 - (10) MoU dengan Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) tentang Pemanfaatan Sumber Daya Dalam Rangka Peningkatan Keselamatan Pelayanan Navigasi Penerbangan di Tangerang pada Tanggal 2 Oktober 2015;

- (11) MoU dengan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya di Surabaya pada tanggal 8 Oktober 2015;
- (12) MoU dengan Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi (FSPT) di Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengkajian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bandung pada tanggal 27 Oktober 2015;
- (13) MoU dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tentang Program Pemanfaatan Sumber Daya Dalam Rangka Peningkatan Keselamatan Transportasi Laut di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2015.



Gambar 2.18 *In House Training* Teknik Investigasi kecelakaan Jalan Bandung 14 Desember 2015.



Gambar 2.19 Sosialisasi Preventif Kecelakaan Pelayaran. Cilegon, 5 November 2015.

d. Penilaian Keselamatan Transportasi Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Sektor Transportasi (*Transportation Safety Award/TSA*)

- 1) Pedoman Penilaian Keselamatan Transportasi/ *Transportation Safety Award* (TSA) disusun berdasarkan :
 - a) Kriteria Organisasi (komitmen dan kebijakan, serta manajemen keselamatan) dengan bobot nilai 15%.

- b) Kriteria SDM (dukungan SDM terhadap keselamatan dan pembinaan internal perusahaan terhadap SDM keselamatan) dengan bobot nilai 40%.
 - c) Kriteria Sarana (standar pengadaan dan pelaksanaan keselamatan, dan standar perawatan sarana) dengan bobot nilai 35%.
 - d) Kriteria Pendukung Manajemen Keselamatan (database, dan system pelaporan operasional) dengan bobot nilai 10%.
- 2) Peserta penilaian keselamatan transportasi merupakan usulan dari masing-masing sub sektor yang terdiri dari Operator Kereta Api, Operator Bus AKAP, Operator Bus Pariwisata, Operator Taxi, Operator Kapal Penyeberangan, Operator Kapal Laut Penumpang, dan Operator Penerbangan;
 - 3) Sosialisasi kegiatan penilaian dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi yaitu Surabaya, Pekanbaru dan Jakarta dan telah dilakukan *self Assessment* kepada para operator penyelenggara angkutan transportasi yang akan dinilai tersebut;
 - 4) Penilaian lapangan dilakukan berdasarkan hasil *self assessment* kepada 92 (sembilan puluh) operator pelayanan jasa angkutan transportasi;

Tabel 2.36 *Timeline Kegiatan Transportation Safety Award*

No.	Tanggal	Keterangan
1	26 Februari 2015	Terbit: Dokumen Pemilihan, Nomor : 02/DP-JK1/POKJAULP/II/PKKPJT'15, untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Pedoman dan Penilaian Keselamatan Transportasi dalam upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Sektor Transportasi (Transportation Safety Award/TSA)
2	13 April 2015	Terbit Surat Perintah Kerja: 13 April 2015 - 13 November 2015 (7 bulan kalender)
3	22 Mei 2015	Presentasi Laporan Pendahuluan di PKKPJT
4	1 Juni 2015	Asistensi Penyusunan Pedoman TSA di PKKPJT
5	8 Juni 2015	Asistensi Penyusunan Pedoman TSA di PKKPJT
6	12 Juni 2015	Rapat Pembahasan Penyusunan Pedoman TSA di PKKPJT
7	22-24 Juli 2015	Konsinyering Pembahasan Penyusunan Pedoman TSA dan Perumusan Kriteria Penilaian TSA di Hotel Grand Cempaka, Bogor
8	3 Agustus 2015	Rapat Pembahasan TSA terkait rencana Sosialisasi
9	13-15 Agustus 2015	Sosialisasi TSA di Hotel Majapahit, Surabaya
10	20-22 Agustus 2015	Sosialisasi TSA di Pekanbaru di Hotel Arya Duta, Pekanbaru
11	27-29 Agustus 2015	Sosialisasi TSA di Hotel Arya Duta, Jakarta
12	4 September 2015	Rapat Pembahasan Hasil Sosialisasi TSA di Bogor
13	8 September 2015	Rapat Persiapan Survei (Visiting) TSA di PKKPJT

No.	Tanggal	Keterangan
14	15 Oktober 2015	Rapat Persiapan Survei (Visiting) TSA dan sketsa Tropi di PKKPJT
15	29 Oktober 2015	Rapat Progres Hasil Survei TSA di PKKPJT
16	22 Desember 2015	Penyerahan Penghargaan TSA oleh Menteri Perhubungan

- 5) Dari hasil penilaian TSA tersebut diperoleh 3 (tiga) operator penyelenggara transportasi yang unggul atas pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu :
- PT. Garuda Indonesia (Persero)
 - PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP I Jakarta;
 - Perum DAMRI;



Gambar 2.20 Penyerahan Penghargaan TSA oleh Menteri Perhubungan

- 6) Penyelenggaraan penyerahan penghargaan penilaian keselamatan Transportasi (*Transportation Safety Award*) dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 dengan mengundang seluruh operator penyelenggara angkutan transportasi yang dinilai baik oleh BUMN/BUMD, maupun swasta.
- e. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Pada Sektor Transportasi**

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Operasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kota Surabaya dengan sasaran simpul transportasi (darat, laut, udara dan perkeretaapian).

Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) diikuti ± 100 orang wakil masing – masing unit kerja/instansi Pemerintah/BUMN/BUMS dan stakeholders terkait di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan hasil operasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada simpul transportasi di wilayah Surabaya dengan pemeriksaan tes urin dari 311 orang *sampling*, 308 orang

atau sekitar 99,04% dinyatakan negatif (-) dan 3 orang atau sekitar 0,96% dinyatakan positif (+) yaitu :

- 1) Pelabuhan Tanjung Perak
Indikasi positif yang didapat dari hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) orang Juru Mudi dan 1 (satu) orang Siswa Pandu dinyatakan positif (+) dikarenakan hasil tes urin yang bersangkutan mengandung BZO yang berasal dari obat yang dijual di pasaran.
- 2) Bandara Juanda
Indikasi positif yang didapat dari hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) orang Co Pilot dinyatakan positif (+) dikarenakan hasil tes urin yang bersangkutan mengandung kodein yang berasal dari obat dengan resep dokter.

Hasil kesepakatan rapat, tim merekomendasikan agar *Co-Pilot* yang terindikasi positif (+) tidak layak terbang dan diserahkan kepada pihak maskapai (Citilink). Kemudian oleh pihak maskapai (Citilink) menyerahkan kepada BNN Kota Surabaya untuk melakukan pemeriksaan secara intensif (Cek Laboratorium di Polda) dan memberikan pembinaan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Begitu juga dengan petugas di pelabuhan, Tim Satgas P4GN menyerahkan kepada pihak Syahbandar Tanjung Perak untuk mengambil tindakan lanjut dengan melakukan pemeriksaan secara intensif dan memberikan pembinaan kepada yang bersangkutan serta pihak manajemen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 2.21 Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Gelap Narkotika (P4GN) di Surabaya.

BAB III PENINGKATAN PELAYANAN

1. Layanan Sarana dan Prasarana Transportasi

a. Layanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat

Pada Tahun 2015 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan program peningkatan pelayanan sebagai berikut :

1) Sarana

a) BUS AKAP (Antar Kota Antar Provinsi)

Posisi bus AKAP pada tahun 2014 sebanyak 926 perusahaan otobus yang terdiri dari 22.544 unit bus, mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi sebanyak 934 perusahaan otobus yang terdiri dari 23.464 unit bus.

b) Bus Pariwisata

Posisi bus Pariwisata pada tahun 2014 sebanyak 1.422 perusahaan otobus yang terdiri dari 19.834 unit bus, mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi sebanyak 1.480 perusahaan otobus yang terdiri dari 21.277 unit bus.

c) Kapal Penyeberangan

Sampai dengan tahun 2015 terdapat 369 unit kapal SDP yang beroperasi dengan jenis kapal yaitu Ro-Ro dan 14 unit LCT (*Landing Craft Tank*).

Tabel 3.1 Jumlah Kapal SDP Yang Beroperasi Tahun 2011-2015

No.	Jenis Kapal	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kapal Ro-Ro	228	254	306	321	355
2.	Kapal LCT	12	13	16	14	14
3.	Kapal cepat penumpang	2	-	0	0	0
4.	Kapal penumpang/ bus air	4	2	6	2	0
Jumlah		246	269	328	337	369

Sumber : Direktorat LLASDP, Ditjen Hubdat - 2015.

Sedangkan untuk jumlah kapal penyeberangan yang beroperasi berdasarkan kepemilikan sebanyak 369 unit, pemilik/ operatornya adalah PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Kerja Sama Operasi (KSO), swasta dan Pemda.

Tabel 3.2 Jumlah Kapal Penyeberangan Jenis Ro-Ro Berdasarkan Kepemilikan Tahun 2015

No.	Pemilik/operator	Jumlah
1.	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	132
2.	Kerja Sama Operasi (KSO)	0
3.	Swasta	203
4.	Pemda	20
Jumlah		355

Sumber : Direktorat LLASDP, Ditjen Hubdat - 2015.



Gambar 3.1 Peresmian KMP Sebuku oleh Bapak Presiden RI pada 13 Juni 2015 untuk Lintas Merak - Bakauheni

d) Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN)

Posisi Bus ALBN pada tahun 2015 sebanyak 38 unit bus untuk lintas Pontianak – Kuching dan 15 unit bus untuk lintas Pontianak – Bandar Sri Begawan.

Tabel 3.3 Perkembangan Sarana ALBN di Indonesia

No.	Negara / Perusahaan	Jumlah Armada Bus / Tahun (kendaraan)				
		2011	2012	2013	2014	2015*
Pontianak - Kuching						
I.	INDONESIA	19	19	19	19	18
II.	MALAYSIA	20	20	20	20	20
Jumlah Keseluruhan		39	39	39	39	38
Pontianak - Bandar Sri Begawan						
I.	INDONESIA	10	10	10	10	10
II.	BRUNEI DARUSSALAM	5	5	5	5	5
Jumlah Keseluruhan		15	15	15	15	15

Sumber : Direktorat LLAJ - Ditjen Hubdat, 2015.

e) Perkembangan *BUS RAPID TRANSIT* (BRT)

Persentase pengguna angkutan umum perkotaan di Indonesia terus mengalami penurunan persentasi, rata-rata sebesar 1% per tahun (MTI, 2005), bahkan di kota Jakarta diperkirakan mencapai 3% per tahun (Sitramp, 2004, JUTPI, 2010).

Pengembangan sistem BRT (*busway*) Jakarta sejak 2004 merupakan inovasi reformasi angkutan umum berdasarkan *lesson learned* kota-kota di dunia, namun masih jauh dari mencukupi kebutuhan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dua Puluh Enam kota, dengan bantuan Kemenhub, telah memulai inovasi sistem mini BRT dengan beberapa keterbatasan, yang dikenal dengan "*sistem transit*".

Kepemilikan kendaraan pribadi baik sepeda motor dan mobil yang meningkat karena kemudahan yang dinikmati penggunaannya memberikan kontribusi terhadap kenaikan jumlah tersebut.

Tabel 3.4 Perkembangan *Bus Rapid Transit* (BRT) di Indonesia

No.	Kota	Nama	Tahun	Skema Pembiayaan
1	DKI Jakarta	Transjakarta	2004	APBD
2	Batam	Bus Pilot Project	2005	APBN
3	Bogor	Trans Pakuan	2006	APBN
4	Bandung	Trans Metro Bandung	2006	APBN
5	Yogyakarta	Trans Jogja	2007	APBN
6	Semarang	Trans Semarang	2009	APBN
7	Pekanbaru	Trans Metro	2009	APBN
8	Manado	Trans Kawanua	2009	APBN
9	Gorontalo	Trans Hulontalo	2010	APBN
10	Palembang	Trans Musi	2010	APBN
11	Surakarta	Batik Solo Trans	2010	APBN
12	Ambon	Trans Ambonia	2011	APBN
13	Denpasar	Trans Sarbagita	2011	APBN
14	Bandar Lampung	Trans Bandar Lampung	2011	APBD
15	Tangerang	Trans Jabodetabek Tangerang	2012	APBN
16	Bekasi	Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway	2012	APBN
17	Martapura (OKU Timur)	Trans Martapura	2012	APBD
18	Padang	Trans Padang	2013	APBN
19	Musi Banyuasin	Trans Muba	2013	APBD
20	Kendari	Trans Lulo	2013	APBD
21	Balikpapan	Trans Balikpapan	2013	APBD
22	Makassar	Trans Mamminasata	2014	APBN
23	Medan	Trans Mebidangro	2014	APBN
24	Sidoarjo	Trans Gerbangkertosusilo	2014	APBN
25	Bandung	Trans Bandung Raya	2014	APBN
26	Tangerang Selatan	Trans Anggrek	2014	APBD

Sumber : Direktorat BSTP - Ditjen Hubdat, 2015.

2) Prasarana

a) Terminal Penumpang

Posisi Terminal Penumpang pada Tahun 2015 sebanyak 823 lokasi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5 Jumlah Terminal Penumpang Seluruh Indonesia Tahun 2011-2015

Tipe Terminal	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015*
TIPE A	123	123	123	143	143
TIPE B	278	277	293	325	325
TIPE C	262	288	295	355	355
TOTAL	663	688	711	823	823

Sumber : Direktorat LLAJ, Ditjen Hubdat, 2015



Gambar 3.2 Salah satu bentuk pelayanan pada Terminal Penumpang Tipe A Tirtonadi, Solo

b) Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (UPKB)

Pada tahun 2015, dari 509 kabupaten/ kota terdapat unit pengujian kendaraan bermotor yang menggunakan alat uji nonmekanik sebanyak 211 unit, alat uji mekanik sebanyak 260 unit, dan alat uji keliling sebanyak 38 unit, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6 Jumlah Pengujian Kendaraan Bermotor seluruh Indonesia Tahun 2011-2015

Jenis Alat	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015*
NON MEKANIK	285	285	285	211	211
MEKANIK	347	347	347	282	260

Jenis Alat	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015*
KELILING	25	25	38	38	38
TOTAL	657	657	670	531	509

Sumber : Direktorat LLAJ, Ditjen Hubdat, 2015

c) Unit Penimbangan Pengujian Kendaraan Bermotor (UPPKB)

Posisi Unit Penimbangan (UPPKB) pada tahun 2015 sebanyak 142 unit, dengan keseluruhan nilai tersebut dalam status beroperasi.

Tabel 3.7 Jumlah Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor Seluruh Indonesia Tahun 2011-2015

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Operasi	137	136	129	128	142
Tidak Operasi	24	45	17	18	-
TOTAL	161	181	146	146	142

Sumber : Direktorat LLAJ, Ditjen Hubdat, 2015

d) Pelabuhan Penyeberangan

Sampai tahun 2015, jumlah pelabuhan penyeberangan yang telah beroperasi sebanyak 222 unit, terdiri dari 35 pelabuhan yang diselenggarakan Indonesia Ferry (Persero), 135 pelabuhan oleh Dinas Perhubungan, 4 (empat) oleh UPT Ditjen Perhubungan Darat dan sisanya sebanyak 48 pelabuhan belum ditetapkan karena masih dalam proses penyelesaian pembangunan.

Tabel 3.8 Perkembangan Pelabuhan Penyeberangan Tahun 2011-2015

No.	Penyelenggara	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	PT. ASDP Persero	34	34	34	35	35
2.	Dinas Perhubungan	113	106	106	106	135
3.	UPT Ditjen Perhubungan Darat	3	4	4	4	4
4.	Dalam Proses Pembangunan	33	40	40	40	48
Jumlah		173	183	184	185	222

Sumber : Direktorat LLASDP, Ditjen Hubdat, 2015

e) *Area Traffic Control System (ATCS)*

Salah satu pemecahan lalu-lintas, khususnya di persimpangan pada kawasan perkotaan adalah penerapan sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu-Lintas (APILL) Terkoordinasi atau yang lebih dikenal dengan *Area Traffic Control System (ATCS)* sebagai salah satu dari instrumen *Intelligence Transport System (ITS)*. Secara umum ATCS terdiri dari 4 (empat) komponen utama, yaitu APILL, Perangkat Pendeteksi Kendaraan (*Detector*), Jaringan Komunikasi dan Ruang Kendali Lalu-Lintas (*Control/ Center Room*). Dalam kurun waktu tahun 1996 sampai dengan 2010 telah dilakukan pembangunan ATCS pada beberapa lokasi yaitu Bandung, DKI Jakarta, Surabaya, Batam, Bekasi, Pekanbaru, Tegal, Bukittinggi, Manado, Balikpapan, Surakarta, Pontianak, Malang, Sragen, Tangerang, dan Bogor.

Tabel 3.9 Perkembangan *Area Traffic Control System (ATCS)* di Indonesia Tahun 2011 - 2015

No.	Nama Kota	Awal Pembangunan	Skema Pembiayaan	Keterangan
1	Sarbagita	2011	APBN	Menggunakan teknologi dalam negeri berbasis kabel. Sudah dikembangkan <i>Variable Message Sign (VMS)</i> dan <i>bus priority</i>
2	Samarinda	2011	APBN, APBD Provinsi Kalimantan Timur dan APBD Kota Samarinda	Menggunakan teknologi dalam negeri berbasis kabel
3	Semarang	2011	APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kota Semarang	Menggunakan teknologi dalam negeri berbasis kabel
4	Medan	2012	APBN, dan APBD Kota Medan	Menggunakan teknologi dalam negeri berbasis kabel
5	DIY	2012	APBN	ATCS berbasis <i>wireless</i> . Sudah dikembangkan <i>bus priority</i>
6	Denpasar	2012	APBD Kota Denpasar	Menggunakan teknologi dalam negeri berbasis kabel
7	Cirebon	2012	APBD Kota Cirebon	Menggunakan teknologi dalam negeri, merupakan langkah awal penerapan ATCS karena belum dilengkapi dengan <i>detector</i>
8	Padang	2013	APBN	Menggunakan teknologi dalam negeri berbasis kabel
9	Bandar Lampung	2014	APBN	Menggunakan teknologi dalam negeri berbasis kabel
10	Pekalongan	2014	APBN	Menggunakan teknologi dalam negeri berbasis kabel
11	Bangka Belitung	2015	APBN	Menggunakan teknologi dalam negeri berbasis kabel
12	Palu	2015	APBN	Menggunakan teknologi dalam negeri berbasis kabel
13	Kediri	2015	APBN	Menggunakan teknologi dalam negeri berbasis kabel
14	Sidoarjo	2015	APBN	Menggunakan teknologi dalam negeri berbasis kabel

Sumber : Direktorat BSTP Ditjen Hubdat, 2015.

3) Kegiatan Penunjang

a) Keperintisan Angkutan Jalan

Besaran subsidi operasional keperintisan angkutan jalan terjadi peningkatan pada tahun 2015 sebesar 25,08% atau Rp. 21.684.901.000 dibandingkan dengan tahun 2014. Hal tersebut dikarenakan kenaikan biaya operasional dan jumlah trayek perintis yang terlayani.

Tabel 3.10 Penyelenggaraan Keperintisan LLAJ Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Subsidi			
		Propinsi	Trayek	Jumlah (Rupiah)	%
1	2011	24	157	52.651.254.000	9,15%
2	2012	25	169	55.974.523.000	6,31%
3	2013	25	188	64.774.897.000	15,72%
4	2014	28	208	86.459.798.000	33,47%
5	2015	30	217	92.427.479.000	6,90%

Sumber : Direktorat LLAJ, Ditjen Hubdat – 2015.

b) Keperintisan Angkutan Penyeberangan

Besaran subsidi operasional lintas perintis pada tahun 2014 sebesar Rp.244.678.000.000,- untuk 181 lintas, meningkat pada tahun 2015 dengan nilai subsidi sebesar Rp.447.143.000.000,- dengan jumlah lintas penyeberangan sebanyak 210 lintas. Jika dilihat dari besaran nilai subsidi dengan jumlah lintas penyeberangan pada tahun 2015, maka terlihat adanya ketidaksesuaian antara jumlah lintas dengan besaran subsidi. Hal tersebut dikarenakan biaya operasional yang melambung tinggi dengan terjadinya kenaikan harga bahan bakar minyak.

Tabel 3.11 Perkembangan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

No.	Tahun	Jumlah Lintas Penyeberangan	Nilai Subsidi (Milyar Rupiah)
1	2011	117	157,852
2	2012	134	170,000
3	2013	169	297,700
4	2014	181	244,678
5	2015	210	447,143

Sumber : Direktorat LLASDP - Ditjen Hubdat, 2015.

c) Produksi Angkutan Penyeberangan

Angka produksi angkutan penyeberangan pada tahun 2015, produksi penumpang sebanyak 65.220.965 orang dan kendaraan sebanyak 16.73.466 unit yang terdiri dari roda 2 dan roda 4 atau lebih.

Tabel 3.12 Produksi Angkutan Penyeberangan

No.	Tahun	Penumpang (orang)	Kendaraan R-4 (unit)	Kendaraan R-2 (unit)	Barang (ton)
3	2011	52.589.081	5.605.469	6.550.439	96.997
4	2012	58.673.855	5.605.699	7.264.604	48.599
5	2013	60.036.781	15.267.384		-
6	2014	64.638.781	16.245.657		54.599
7	2015	65.220.965	16.733.466		-

Sumber : Direktorat LLASDP - Ditjen Hubdat, 2015

b. Layanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut

Meningkatnya Kinerja Pelayanan dengan direalisasikannya 3 (tiga) Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut sebagai berikut :

- 1) SK Standard Pelayanan Minimal Angkutan Penumpang Laut.
Sesuai Permenhub Nomor PM 37/ 2015 dan perubahannya Permenhub Nomor PM 119/ 2015.
- 2) SK Trayek Tol Laut.
SK Dirjen Hubla Nomor AL.108/6/2/DJPL-15 tanggal 26 Oktober 2015 tentang Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut Tahun Anggaran 2015.
- 3) SK Trayek PSO Angkutan Penumpang Laut.
SK Dirjen Hubla Nomor AL.108/7/6/DJPL-15 tentang Jaringan Trayek Kapal Penumpang PT PELNI Yang Mendapat Penugasan Pelayanan Publik Penumpang Kelas Ekonomi.

c. Layanan Sarana dan Prasarana Transportasi Udara

- 1) Sarana Transportasi Udara
 - a) Armada Pesawat Udara

Tabel 3.13 Armada Pesawat Udara

URAIAN			2011	2012	2013	2014	2015
Pesawat	Udara	yang	1.209	1.324	1.434	1.455	1.510
terdaftar							
Pesawat	Udara	yang	865	950	1.026	1.074	1.142
beroperasi							

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
AOC 121	426	478	511	530	549
AOC 135	253	276	282	294	317
AOC 137, OC 91, Pibt School & FASI	186	196	233	250	276
Pesawat Udara Fixed Wing yang beroperasi	746	818	881	935	986
Pesawat Udara Rotary Wing yang beroperasi	119	132	145	139	156
Pesawat Udara yang telah didaftar tanda pendaftaran	165	205	185	156	80
Pesawat Udara yang telah dihapus tanda pendaftaran	83	84	60	60	35

Sumber : Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara

b) Jumlah Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) Niaga yang beroperasi :

(1) Berjadwal sebanyak 17 perusahaan :

Tabel 3.14 Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal

No.	Operator Penerbangan	No.	Operator Penerbangan
1.	PT. Garuda Indonesia, Tbk	10.	PT. Tri M.G. Intra Asia Airlines
2.	PT. Lion Mentari Airlines	11.	PT. Asi Pudjiastuti Aviation
3.	PT. Indonesia AirAsia	12.	PT. Transnusa Aviation Mandiri
4.	PT. Wings Abadi	13.	PT. Nam Air;
5.	PT. Trigana Air Service	14.	PT. Batik Air
6.	PT. Travel Express	15.	PT. My indo airlines
7.	PT. Sriwijaya Air	16.	PT. Indonesia AirAsia Extra
8.	PT. Kalstar Aviation	17.	PT. Citilink Indonesia
9.	PT. Cardig Air (cargo)		

Sumber : Direktorat Angkutan Udara

(2) Tidak Berjadwal sebanyak 45 perusahaan :

Tabel 3.15 Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal

No.	Operator Penerbangan	No.	Operator Penerbangan
1.	PT. Garuda Indonesia, Tbk	24.	PT. Jhonlin Air Transport
2.	PT. Trigana Air Service	25.	PT. Amur Aviation Indonesia
3.	PT. Pelita Air Service	26.	(PT. Unindo Air Charter)
4.	PT. Deraya	27.	PT. Nusantara Air Charter
5.	PT. Gatari Air Service	28.	PT. Asialink Cargo Airlines
6.	PT. Indonesia Air Transport, Tbk	29.	PT. Sayap Garuda Indah
7.	PT. East Indonesia Air Taxi and Charter Service (Eastindo)	30.	PT. Enggang Air Service
8.	PT. Airfast Indonesia	31.	PT. Pegasus Air Services
9.	PT. Air Pasifik Utama	32.	PT. Surya Air
10.	PT. Intan Angkasa Air Service	33.	PT. Asian One Air
11.	PT. National Utility Helicopters	34.	PT. Ersa Eastern Aviation
12.	PT. Pura Wisata Baruna	35.	PT. Matthew Air Nusantara
13.	PT. Derazona Air Service	36.	PT. Jayawijaya Dirgantara (Kargo)
14.	PT. Transwisata Prima Aviation	37.	PT. Airborn Indonesia
15.	PT. Travira Air	38.	PT. Angkasa Super Service

No.	Operator Penerbangan	No.	Operator Penerbangan
16.	PT. Tri M.G. Intra Asia Airlines	39.	PT. Marta Buana Abadi
17.	PT. Penerbangan Angkasa Semesta	40.	PT. Komala Indonesia
18.	PT. Ekspres Transportasi Antar Benua PT. Aviastar Mandiri	41.	PT. Transnusa Aviation Mandiri
19.	PT. Asi Pudjiastuti Aviation	43.	PT. Elang Nusantara Air
20.	PT. Whitesky Aviation	44.	PT. Elang Lintas Indonesia
21.	PT. Hevilift Aviation Indonesia (PT. Nyaman Air)	45.	PT. Alda Trans Papua PT. Weststar Aviation
22.	PT. Dabi Air		

Sumber : Direktorat Angkutan Udara

2) Prasarana Bandar Udara

a) Peresmian Terminal Baru

(1) Peresmian Terminal Penumpang Bandar Udara Wamena

Terminal penumpang baru Bandar Udara Wamena terletak di Kabupaten Jayawijaya - Papua diresmikan pada 30 Desember 2015 oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo.

Gedung terminal penumpang seluas 4.000 m² dibangun tahun 2014 sampai Tahun 2015 dengan anggaran APBN mencapai 54 Miliar. Gedung terminal baru ini untuk menggantikan terminal lama yang terbakar pada tahun 2011.



Gambar 3.3 Terminal Penumpang Bandar Udara Wamena

(2) Peresmian Terminal Penumpang Bandar Udara Utarom Kaimana

Terminal penumpang baru Bandar Udara Utarom di Kaimana diresmikan oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo pada 30 Desember 2015. Pembangunan terminal baru yang bersih dan nyaman merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada penumpang. Terminal baru ini memiliki luas 1800 m² dengan kapasitas 102 penumpang.



Gambar 3.4 Terminal Penumpang Bandar Udara Utarom

(3) Peresmian Terminal Penumpang Bandar Udara Labuan Bajo

Terminal penumpang baru Bandar Udara Komodo diresmikan oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo pada tanggal 27 Desember 2015. Terminal dengan luas 9.687 m² ini merupakan upaya peningkatan pelayanan dan mendukung pariwisata di Pulau Komodo.

Selain pembangunan gedung terminal penumpang baru, landas pacu Bandar Udara Komodo Labuan Bajo diperpanjang menjadi 2250 m² x 45 m² sehingga mampu didarati pesawat berbadan besar.



Gambar 3.5 Terminal Penumpang Bandar Udara Labuan Bajo

b) Bandar Udara yang telah selesai dibangun namun belum diresmikan adalah sebagai berikut:

(1) Bandar Udara Domine Eduard Osok – Sorong :

Kategori Kelas I (Satu) dengan Koordinat 00°.55'.00" S, 131°.41'.00" E.

Tabel 3.16 Data Bandara DEO-Sorong

Data Bandar Udara DEO - Sorong	
1) Arah Runway : 09 -27	7) Stopway : 60 m x 30 m
2) Runway : 2.060 m x 45 m	8) Pesawat beroperasi : Boeing 737-300
3) Taxiway : 186,5 m x 23 m	9) Gedung Terminal : 13.700 m ²
4) Apron : 395 m x 96 m	
5) Runway Strip : 2.120 m x 150 m	
6) RESA : 90m x 60 m	

Sumber: Direktorat Bandar Udara



Gambar 3.6 Terminal , Runway, Ruang Check -in dan Ruang Tunggu Bandar Udara DEO-Sorong

(2) Bandar Udara Matahora – Wakatobi

Terletak di Kota Wakatobi, Sulawesi Tenggara dengan kategori penggunaan hierarki klasifikasi domestik yaitu pengumpan tersier 4C. Kelas II dengan koordinat : 05° 17'26,42" S 123° 38' 10,40" E 05° 17'26,42" S 123° 38' 10,40" E.

Tabel 3.17 Data Bandar Udara Matahora - Wakatobi

Data Bandar Udara Matahora Wakatobi :	
1) Arah Runway : 14 – 32	7) Stopway
2) Runway : 2.000 m x 30 m	8) Pesawat beroperasi : ATR.72-500
3) Taxiway : 107 m x 18 m.	9) Gedung Terminal : 1.524 m ²
4) Apron : 103 m x 73 m	
5) Runway Strip : 2.270 m x 150 m	
6) RESA : belum ada	

Sumber : Direktorat Bandar Udara



Gambar 3.7 Bandar Udara Matahora-Wakatobi

(3) Bandar Udara Djalaluddin-Gorontalo

Bandar Udara Djalaluddin-Gorontalo terletak 30 km dari Kota. Menurut klasifikasi bandar udara termasuk kelas II Tipe C Pengelola Bandar Udara; Ditjen Perhubungan Udara dengan koordinat ARP (*Aerodrome Reference Point*) S 00° 38' 27" ; E 122° 51' 02" dan Elevasi Bandar Udara (*MSL : Mean Sea Level*) 18 M.

Tabel 3.18 Data Bandar Udara Djalaludin - Gorontalo

Fasilitas Sisi Udara	1.	Landas pacu (<i>Runway</i>)	2500 x 45 (51 F/C/W/T)
	2.	Landas hubung (<i>Taxiway</i>)	- 115 x 23 (51 F/C/W/T) - 115 X 23 (51 F/C/W/T)
	3.	Landas parkir (<i>Apron</i>)	230 x 80 (51 F/C/W/T)
	4.	<i>Runway Strip</i>	2.680 m x 300 m
	5.	RESA	2 X (90 X 60)
	6.	Pesawat Beroperasi	B. 737 - 800 NG
Fasilitas Sisi Darat	7.	Terminal Penumpang / Domestik (m ²)	1.754
	8.	Administrasi / Operasi (m ²)	1.912
	9.	Hanggar (m ²)	
	10.	Menara kontrol LLU atau ATC Tower (m ²)	180
	11.	Terminal Barang (m ²)	1.452
	12.	Luas Lahan Bandar Udara (Ha)	66.9
	13.	Parkir Kendaraan (m ²)	3.902

Sumber : Direktorat Bandar Udara



Gambar 3.8 Bandar Udara Djalaluddin-Gorontalo

(4) Bandar Udara Juwata –Tarakan

Bandar Udara Juwata Tarakan adalah Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Ditjen Perhubungan Udara merupakan Bandar Udara Kelas I dengan koordinat 003° 19' 37" S 117° 34' 10" E.

Tabel 3.19 Data Bandar Udara Juwata-Tarakan

Data Bandar Udara Juwata - Tarakan	
ARAH RUNWAY : 06-24	STRIP : 2370 m x 150 m
ELEVASI : 20 (feet)	RESA : R/W 06=90 m x 90 m
	STOPWAY : N/A
RUNWAY : 2250 m x 45 m	PESAWAT OPERASI/TERKRITIS : B. 737 - 400 RTOW 135.500 lbs, B 737 900 ER RTOW 157.000 lbs (Surat Dirjen AU.004/2/14/DJPU.DAU.2013 tanggal 5 Februari 2013)
TAXIWAY : A. 82.5 m x 23 m B. 82.5 m x 23 m	GEDUNG TERMINAL (LUASAN DAN KAPASITAS : 12.440 M2 (TERMINAL BARU)
APRON : Lama =335 m x 70 m Baru=177 mx 97 m	

Sumber : Direktorat Bandar Udara



Gambar 3.9 Terminal baru dan ruang tunggu Bandar Udara Juwata Tarakan

- c) Pembangunan Fasilitas Keamanan Penerbangan di 118 lokasi Bandar Udara meliputi pengadaan Kendaraan Fasilitas PKP-PK untuk memenuhi kategori kendaraan PKP-PK di bandar udara, fasilitas penunjang personil PKP-PK, fasilitas pemeriksaan penumpang dan Bagasi (*X-Ray*, *WTMD*, *HHMD*), dan lain-lain.



Gambar 3.10 Menteri Perhubungan saat melalui *X-Ray*

3) Kebijakan di Bidang Angkutan Udara

a) Perizinan Angkutan Udara *Online*

- (1) Dasar pelaksanaan perizinan angkutan udara *online*:
 - (a) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2015 tentang Perizinan Angkutan Udara *Online*,
 - (b) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) Bandar Udara.
- (2) Tujuan Pelaksanaan adalah untuk memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat umum dan industri penerbangan sipil tentang proses pemberian perizinan di bidang angkutan udara secara cepat, mudah, akurat dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi secara *online*.
- (3) *Soft Launching* Sistem Perizinan Angkutan Udara *Online* pengajuan *Flight Approval (FA)* secara *online* dilaksanakan tanggal 2 Februari 2015 dan sebagai *Pilot Project* adalah Batik Air, Indonesia Air Asia dan Singapore Airlines.

Commercial Launching pengajuan *Flight Approval (FA)* secara *online* dengan aplikasi yang sudah disempurnakan pada tanggal 6 Februari 2015. Aplikasi perizinan *online* sudah dapat digunakan namun masih perlu penyempurnaan untuk dapat mengakomodir dinamika industri penerbangan nasional.

Selama Tahun 2015 aplikasi tersebut telah mengeluarkan izin sebagai berikut :

- (a) Aplikasi Izin Rute sudah mengeluarkan 2.036 penerbitan Izin Rute.
- (b) Untuk Izin Usaha hingga saat ini belum ada pengajuan izin usaha baru.

- (c) Aplikasi *Flight Approval* Berjadwal sudah mengeluarkan 15.056 penerbitan FA dan Aplikasi *Flight Approval* Tidak Berjadwal sudah menghasilkan 10.577 penerbitan FA.

Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi perizinan *online* (FA, izin rute, dan SIUP) terhambat dengan adanya masalah terkait Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Kelas Ekonomi sebagai berikut :

- (a) Terdapat perubahan harga avtur lebih dari Rp. 12.000; secara 3 bulan berturut turut.
- (b) Terdapat perubahan nilai tukar rupiah yang menyebabkan perubahan BOP.
- (c) Terdapat badan usaha angkutan udara menetapkan tarif melebihi tarif batas atas yang ditetapkan pemerintah (PM 51 Tahun 2014) dikarenakan adanya perubahan harga avtur dan kurs Dollar terhadap rupiah.

Untuk itu telah dilakukan revisi perubahan terhadap PM 51 Tahun 2014 dengan menerbitkan PM 126 Tahun 2015 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

b) *Indonesia Airport Slot Management*

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2015 dan Tentang Perizinan Angkutan Udara *Online*, dan Nomor PM 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) Bandar Udara telah *dilaunching* Perizinan Angkutan Udara Online dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Dirjen Perhubungan Udara Nomor KP. 280 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan *Slot Time*.

Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) Bandar Udara yaitu: Setiap pergerakan pesawat udara di Bandar Udara wajib memperoleh persetujuan *slot time* (*Slot Clearance*).

Pengelola *Slot Time* adalah Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara Navigasi Penerbangan. Pihak yang melakukan koordinasi penerapan alokasi ketersediaan waktu terbang (*slot time*) adalah :

Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara membentuk Unit Pelaksana Koordinasi *Slot* (UPKS) yang merupakan unit yang bertugas sebagai fasilitator dan/atau mediator penerapan *slot time* di Bandar Udara yang menjadi area tugasnya.

Mengelola *slot* untuk:

- (1) Penerbangan Berjadwal Dalam Negeri (*Regular Flight*) untuk Bandar Udara:

Tabel 3.20 Pengelola *Slot Time* di Bandar Udara

No.	Bandar Udara	No.	Bandar Udara
1.	Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman(Sepinggalan) – Balikpapan (BPN)	5.	Bandar Udara Kualanamu – Medan (KNO)
2.	Bandar Udara Soekarno Hatta – Jakarta (CGK)	6.	Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II – Palembang (PLM)

No.	Bandar Udara	No.	Bandar Udara
3.	Bandar Udara Sentani – Jayapura (DJJ)	7.	Bandar Udara Juanda – Surabaya (SUB)
4.	Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Denpasar (DPS)	8.	Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar (UP)

Sumber : Direktorat Angkutan Udara

(2) Penerbangan Berjadwal dan Tidak berjadwal luar negeri (Internasional) di seluruh bandar udara yang melayani penerbangan luar negeri termasuk penerbangan :

- (a) Penerbangan tambahan pada saat libur hari besar keagamaan, libur nasional dan libur sekolah (*Seasonal Extra Flight*);
- (b) Penerbangan tambahan tidak terencana (*Rush Extra Flight*);
- (c) Penerbangan *Charter* (berjadwal/ tidak Berjadwal) karena alasan komersial;
- (d) Penyelenggara Bandar Udara ;
- (e) Penyelenggara Navigasi Penerbangan setempat.

Penerbangan berjadwal dalam negeri (*Regular Flight*) di luar 8 (delapan) bandar udara tersebut dan untuk seluruh penerbangan tidak berjadwal (*Irregular Flight*).

Biaya operasional IASM saat ini didukung secara berimbang antara PT. Angkasa Pura I (Persero), PT. Angkasa Pura II (Persero) dan LPPNPI;

- (a) IASM bekerja berdasarkan data *notice of airport capacity (NAC)* yang disediakan oleh Unit Pelaksana Koordinator *Slot*;
- (b) Pemantauan *slot* secara berkala (*Regular Slot Monitoring*) yang dilakukan Pelaksana Koordinator *slot* (UPKS).

c) Pengawasan terhadap pelanggaran tarif angkutan udara berjadwal dalam negeri kelas ekonomi pada badan usaha angkutan udara antara lain :

Tabel 3.21 Pengawasan Terhadap Pelanggaran Tarif Angkutan Udara Berjadwal Dalam Negeri

No.	Nama Airline dan Route	No.	Nama Airline dan Route
1.	PT. Garuda Indonesia Rute : BDJ – BPN, BDJ – SUB, BDJ – CGK, BDJ – JOG, SUB- BDO, SUB-JBB	6.	PT. NAM Air Rute : JOG – PNK, PLM-JOG, KOE-MOF, SUB-DPS, DPS-MOF, DPS-KOE, DPS-WGP
2.	PT. Lion Mentari Airlines Rute : JOG-BDO, SRG-BTH	7.	PT. Batik Air Rute : SUB-CGK, SUB-AMQ
3.	PT. Wings Abadi Rute : Kualanamu-Sibolga, KOE-MOF, SRG-SUB, MKW-KMN, SOQ-FKQ, NBX-AMQ, NBX-DJJ.	8.	PT. Asi Pudjiastuti Aviation Rute : MKQ – KEI, MTW- BPN, MTW-BDJ, MKW – WSR, MKW-NTI, MKW-BIK
4.	PT. Citilink Indonesia Rute : SUB - HLP, CGK – UPG, SUB-BDJ, SUB-DPS, SRG-HLP	9.	PT. Kalstar Aviation Rute : SUB - SMQ, SUB – DPS
5.	PT. Sriwijaya Air Rute : SUB-KDI, SUB-BEJ, UPG-SOQ, SUB-CGK, SUB-BPN, SUB-KOE, JOG-BPN, JOG-CGK, JOG-SUB, SUB-TTE	10.	PT. Travel Express Aviation Rute : CGK – SOQ, JOG-PNK,WMX- DJJ, SOQ-FKQ, MKW-SOQ
		11.	PT. Jhonlin Air Transport Rute : BDJ – BTW,BDJ-KBU

Sumber : Direktorat Angkutan Udara

Ditjen Perhubungan Udara telah memberikan surat peringatan kepada badan usaha angkutan udara antara lain kepada:

Tabel 3.22 Surat Peringatan Kepada Badan Usaha

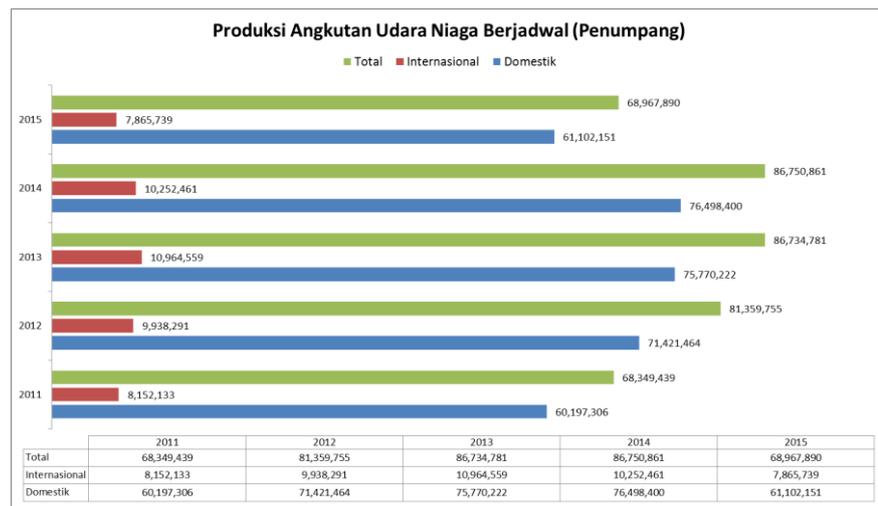
No.	Nama Airline yg diberikan SP	No.	Nama Airline yg diberikan SP
1.	PT. Garuda Indonesia : 3 SP	7.	PT. Asi Pudjiastuti Aviation : 6 SP
2.	PT. Lion Mentari Airlines : 2 SP	8.	PT. Kalstar Aviation : 1 SP
3.	PT. Wings Abadi : 5 SP	9.	PT. Travel Express Aviation : 4 SP
4.	PT. Citilink Indonesia : 3 SP	10.	PT. Jhonlin Air Transport : 1 SP
5.	PT. Sriwijaya Air : 4 SP	11.	PT. Batik Air Service : 2 SP
6.	PT. NAM Air : 2 SP		

Sumber : Direktorat Angkutan Udara

d) Produksi Angkutan Udara

(1) Jumlah Penumpang Domestik dan Internasional

Pada tahun 2015 jumlah penumpang domestik dan internasional sebanyak 68.967.890 penumpang menurun 29,49% dibandingkan penumpang Tahun 2014 sebanyak 86.750. 860 dengan rincian sebagai berikut :

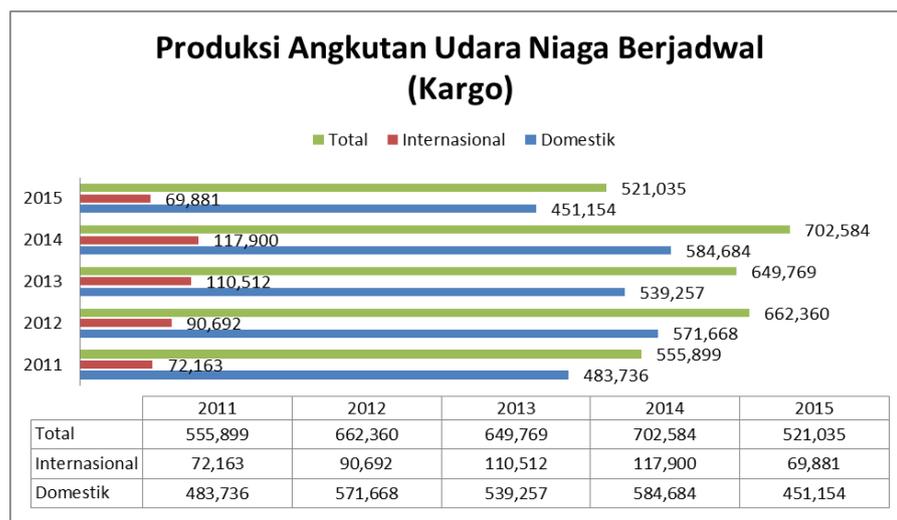


Grafik 3.1 Jumlah Penumpang Domestik dan Internasional

(2) Jumlah Kargo Domestik dan Internasional

Angkutan kargo domestik dan internasional pada tahun 2015 sebanyak 521.035 ton, lebih rendah 25,84 % dari Tahun 2014 sebanyak 702.584 ton.

Adapun rincian data produksi angkutan kargo sebagai berikut :



Grafik 3.2 Jumlah Angkutan Kargo Domestik dan Internasional

e) Angkutan Udara Perintis

Pada tahun 2015, subsidi angkutan udara perintis sebesar Rp. 441.203.251.530,- (alokasi subsidi BBM di 11 (sebelas) bandar udara sebesar Rp. 24.531.000.000,- yang diselenggarakan di 25 (duapuluh lima) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)). Berdasarkan SKEP Dirjen Perhubungan Udara : KP 469 tahun 2014 tentang Rute dan Penyelenggara Subsidi Angkutan Udara Perintis serta Penyelenggara Subsidi Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun Anggaran 2015, rute penerbangan perintis sebanyak 216 rute perintis (66 merupakan rute baru). Jumlah Provinsi terhubung 26 provinsi dan jumlah kota terhubung di 200 kota.

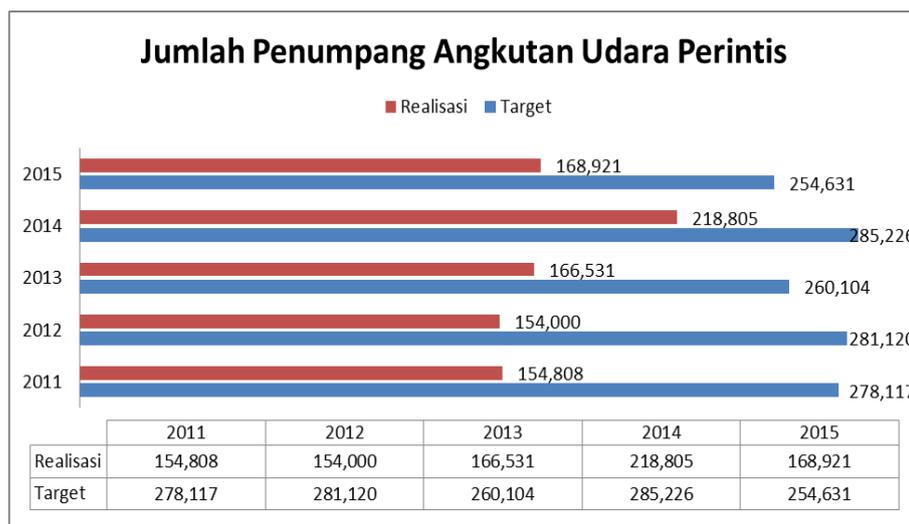
Pada tahun 2015 terdapat 4 (empat) badan usaha angkutan udara niaga yang menjadi operator pelaksana angkutan udara perintis, yaitu :

Tabel 3.23 Operator Pelaksana Angkutan Udara Perintis

NO	OPERATOR	TIPE PESAWAT	KAPASITAS (SEATS)	LOKASI
1	PT. ASI Pudjiastuti Aviation	C208B dan PC-6	(10 – 12) (7 – 9)	Nagan Raya, Takengon, Gn. Sitoli, Bengkulu, Dabo Singkep, Palangkaraya, Samarinda, Ketapang, Sabu, Ternate, Manokwari, Sorong, Jayapura, Merauke, Nabire, Timika, dan Wamena
2	PT. Aviastar Mandiri	DHC 6 (Twin Otter)	18	Samarinda, Tolitoli, Masamba, Selayar dan Langgur
3	PT. Trigana Air Service	DHC 6	18	Timika
4	PT. Marta Buana Abadi	C208B	(10 – 12)	Jayapura

Sumber : Direktorat Angkutan Udara

Realisasi jumlah penumpang Angkutan Udara Perintis, pada tahun 2015 sebanyak 168.921 penumpang dari target sebanyak 254. 631 penumpang, menurun 33,66% jika dibandingkan Tahun 2014 sebanyak 218.805 penumpang dari target 285.226 penumpang .

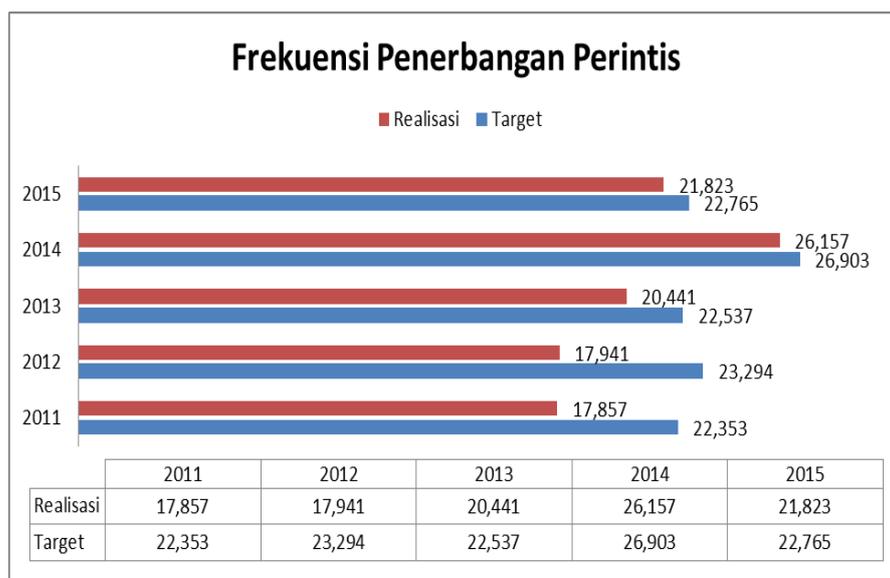


Grafik 3.3 Jumlah Penumpang Penerbangan Perintis

Sedangkan frekuensi penerbangan realisasinya mencapai 21.823 penerbangan (94,20 %) dari target sebanyak 22.765 penerbangan. Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan disebabkan oleh :

- (1) Ketidaksiapan Bandara dari sisi teknis untuk operasional angkutan udara perintis;
- (2) Terbatasnya penyedia jasa (operator angkutan udara perintis) untuk memenuhi persyaratan minimal mekanisme penyedia jasa)
- (3) Pembatalan penerbangan yang disebabkan pesawat mengalami kerusakan dan tidak adanya pesawat cadangan;
- (4) Kurangnya informasi terkait jadwal penerbangan perintis;

Berikut ini disampaikan data capaian penumpang dan jumlah frekuensi penerbangan perintis dalam 5 (lima) tahun terakhir :



Grafik 3.4 Jumlah Frekuensi Penerbangan Perintis

f) Pelaksanaan Angkutan Lebaran

(1) Keberangkatan Penumpang Angkutan Udara Dalam Negeri

Angkutan Lebaran Tahun 2015 (1436 H) dalam negeri terdapat penambahan 3 lokasi pemantauan baru, dari sebelumnya 32 bandar udara pada tahun 2014 menjadi 35 bandar udara tahun 2015.

Pada periode H-7 s.d. H+7 jumlah penumpang berangkat sebanyak 3.675.884 penumpang. Berdasarkan data Januari – Juni 2015, diperoleh rata-rata penumpang berangkat per hari biasa sebanyak 171.374 penumpang.

Jika dibandingkan antara rata-rata penumpang masa Lebaran dengan rata-rata penumpang harian terjadi kenaikan sebesar 34,09%.

Penumpang berangkat pada masa lebaran tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 6,21% dibandingkan penumpang tahun 2014 dari 3.461.023 penumpang menjadi sebanyak 3.675.884 penumpang di Tahun 2015.

(2) Keberangkatan Penumpang Udara Luar Negeri

Dari H-7 sampai dengan H+7 jumlah penumpang berangkat angkutan udara luar negeri sebanyak 553.912 penumpang.

Berdasarkan data Januari – Juni 2015, diperoleh rata-rata penumpang berangkat per hari biasa sebesar 33.600 penumpang.

Apabila dibandingkan antara penumpang masa Lebaran dengan penumpang harian terjadi kenaikan sebesar 2,68%.

Namun demikian, penumpang berangkat tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 3,31% dibandingkan tahun 2014 dari 572.901 penumpang pada tahun 2014 menjadi 553.912 penumpang di tahun 2015.

(3) Pelaksanaan Penambahan Kapasitas Angkutan Udara masa Lebaran

Penambahan kapasitas angkutan udara ini dihitung untuk periode H-7 s.d. H+7 tanggal 10 Juli s.d. 25 Juli 2015.

Dari jumlah 17 badan usaha angkutan udara niaga berjadwal yang beroperasi, 12 di antaranya mengajukan dan menggunakan *Flight Approval (FA)* guna menambah kapasitas tempat duduk (*extra flight*) untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada rute-rute penerbangan dalam negeri. Operator Penerbangan yang mengajukan *FA* untuk penambahan kapasitas tersebut adalah:

Tabel 3.24 Operator Penerbangan yang mengajukan *Flight Approval*

No.	Operator Penerbangan	No.	Operator Penerbangan
1.	PT. Aviastar Mandiri	7.	PT. Lion Mentari Airlines
2.	PT. Batik Air	8.	PT. NAM Air
3.	PT. Citilink Indonesia	9.	PT. Sriwijaya Airlines
4.	PT. Garuda Indonesia	10.	PT. Travel Express Aviation
5.	PT. Indonesia Air Asia	11.	PT. Trigana Air Services
6.	PT. Kalstar Aviation	12.	PT. Wings Abadi Airlines

Sumber : Direktorat Angkutan Udara

Penambahan kapasitas tempat duduk untuk penerbangan dalam negeri yang diajukan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dengan menggunakan *FA* sebanyak 282.610 tempat duduk dengan frekuensi sebanyak 1.626 penerbangan.

Sementara penambahan kapasitas tempat duduk penerbangan luar negeri diajukan oleh 6 perusahaan asing dan 1 badan usaha angkutan udara niaga, yaitu:

Tabel 3.25 Penambahan Kapasitas Tempat Duduk Penerbangan Luar Negeri

No.	Operator Penerbangan	No.	Operator Penerbangan
1.	Garuda Indonesia	5.	Qantas Airways
2.	Singapore Airlines	6.	China Airlines
3.	Jetstar Asia Airlines	7.	Cathay Pacific
4.	Silk Air		

Penambahan kapasitas tempat duduk untuk penerbangan luar negeri yang diajukan sebanyak 25.120 tempat duduk dengan frekuensi sebanyak 55 penerbangan masih di bawah jumlah penambahan yang diperkirakan.

- (4) Kelengkapan fasilitas Pusat Koordinasi Angkutan Udara Lebaran Pusat Koordinasi Angkutan Lebaran tahun 2015 subsektor Perhubungan Udara telah dilengkapi dengan beberapa fasilitas, diantaranya adalah: Fasilitas *CCTV* baik dari bandar udara yang dipantau maupun bandar udara yang tidak dipantau telah terhubung secara *online* dengan Pusat Koordinasi, sehingga pengamatan kondisi bandar udara dapat dilakukan langsung melalui *CCTV*.

Fasilitas *CCTV* yang terhubung di 27 bandar udara sebagai berikut:

Tabel 3.26 Lokasi Fasilitas *CCTV* di 27 bandar udara

No.	Bandar Udara	No.	Bandar Udara
1.	Soekarno-Hatta	15.	Haluoleo (Kendari)
2.	Kualanamu (Medan)	16.	Tjilik Riwut (Palangkaraya)
3.	Minangkabau (Padang)	17.	Temindung (Samarinda)
4.	Sultan Mahmud Badaruddin II (Plbg)	18.	Sultan Baabullah (Ternate)
5.	Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru)	19.	Sentani (Jayapura)
6.	Juanda (Surabaya)	20.	Radin Inten II (Lampung),
7.	Ngurah Rai (Denpasar)	21.	Fatmawati Soekarno
8.	Hasanuddin (Makassar)	22.	(Bengkulu)
9.	Sepinggan (Balikpapan)	23.	H. Asan (Sampit)
10.	Adi Sucipto (Jogjakarta)	24.	Rahadi Oesman (Ketapang)
11.	Juwata (Tarakan)	25.	Kalimara (Berau)
12.	Hang Nadim (Batam)	26.	Iskandar (Pangkalanbun),
13.	Mutiara (Palu)	27.	Sultan Muhammad
14.	Jalaludin (Gorontalo)		Salahuddin (Bima), H.A.S.
			Hanandjoeddin (Tanjung Pandan).

(5) Radar *ADS-B (Automatic Dependent Surveillance – Broadcast)* guna melihat kepadatan lalu lintas pesawat udara khususnya di wilayah udara sekitar Bandar Udara Soekarno Hatta.

g) Pelaksanaan Angkutan Udara Haji Tahun 1435 H/2015 M

(1) Dasar Hukum pelaksanaan haji di Indonesia merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah yang dikoordinir oleh Kementerian Agama berikut menetapkan operator penerbangan yang akan mengangkut jemaah haji dari Indonesia menuju Arab Saudi dan sebaliknya.

Sedangkan Kementerian Perhubungan membantu Kementerian Agama menghitung asumsi biaya angkutan udara haji dari embarkasi Haji ke Arab Saudi sebagai salah satu komponen BPIH.

Disamping itu Kementerian Perhubungan mengevaluasi kelaikan pesawat yang telah ditetapkan untuk mengangkut jemaah haji, karena setiap pesawat udara yang masuk dan atau dioperasikan di Indonesia wajib dievaluasi berdasarkan peraturan keselamatan penerbangan sipil Indonesia sesuai *Standard Civil Aviation Safety Regulation (CASR)*.

Kementerian Perhubungan mengevaluasi pelaksanaan angkutan udara haji terkait dengan kinerja operator pelaksana yang ditunjuk oleh Kementerian Agama.

(2) Kegiatan angkutan udara haji tahun 1436 H/2015 M dilaksanakan pada 12 (dua belas) embarkasi Haji sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji Tahun 1436H/2015M sebagai berikut :

Tabel 3.27 Embarkasi dan Debarkasi Haji

ACEH	MEDAN	PADANG	PALEMBANG
BATAM	JAKARTA	SOLO	SURABAYA
BALIKPAPAN	BANJARMASIN	MAKASSAR	MATARAM

Sumber : Direktorat Angkutan Udara

(3) Selain menetapkan bandar udara embarkasi dan debarkasi, Pemerintah juga menetapkan embarkasi haji antara melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Penetapan Bandara Embarkasi Haji Antara Tahun 1436 H/ 2015 M sebagai berikut:

Tabel 3.28 Embarkasi Antara

Bandar Udara	Bandar Udara
Bandar Udara Jalaluddin Gorontalo	Bandar Udara Radin Inten II Lampung
Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya	Bandar Udara Fatmawati-Bengkulu
Bandar Udara Sultan Thaha Jambi	

Sumber : Direktorat Angkutan Udara

- (4) Badan Usaha Angkutan Udara yang mengangkut Jemaah Haji sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pelaksana Transportasi Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 1436 H/ 2015 M adalah PT. Garuda Indonesia Airlines 11 unit pesawat dan Saudi Arabia Airlines 10 unit pesawat.

Garuda Indonesia menerbangkan Jamaah Haji dari bandar udara : Aceh, Padang, Balikpapan, Medan, Solo dan Banjarmasin.

Sedangkan Saudi Arabia Airlines dari Palembang, Surabaya dan Batam.

- (5) Phase Pemberangkatan dan Kepulangan Jamaah Haji Indonesia:

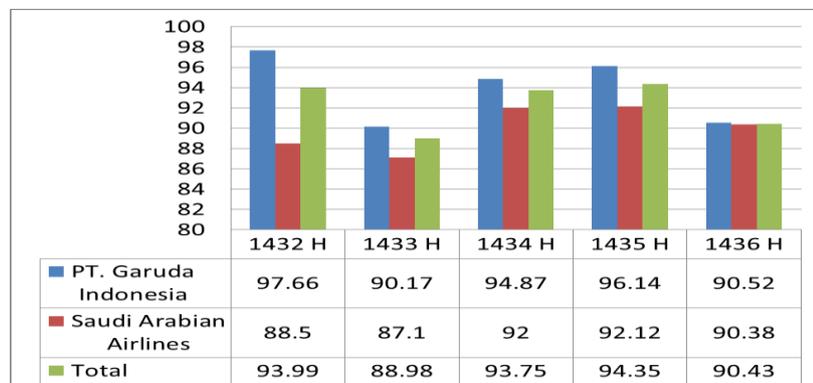
- (a) Phase I (Pemberangkatan) tanggal 21 Agustus-1 September 2015 :

Rencana 157.071 jamaah dengan 376 kloter, terealisasi 156.336 jamaah dengan 376 kloter, *open seat* 2.189 tempat duduk.

Tabel 3.29 Rincian Penerbangan Operator Penerbangan Haji

RINCIAN PENERBANGAN		
Operator Penerbangan	JEMAAH	KLOTER
GARUDA INDONESIA	82.871	210
SAUDI ARABIAN ARLINES	73.465	166

Pada Phase I (Keberangkatan) 744 tidak berangkat dikarenakan meninggal, sakit sehingga tidak jadi berangkat, mengundurkan diri karena alasan tertentu, visa yang belum selesai.



Grafik 3.5 On Time Performance Phase I (Pemberangkatan) Tahun 2011 sd 2015

Tabel 3.30 Alasan Keterlambatan pada Phase I (Pemberangkatan)

NO.	MASKAPAI PENERBANGAN	1435 H/ 2014 M	1436H/ 2015M		
			TEKNIS	OPERASIONAL	TOTAL
1.	PT . Garuda Indonesia	8	0	20	20
2.	Saudi Arabian Airlines	13	1	15	16
		21			36

(b) Phase II (pemulangan) : Tanggal 28 September -26 Oktober 2015

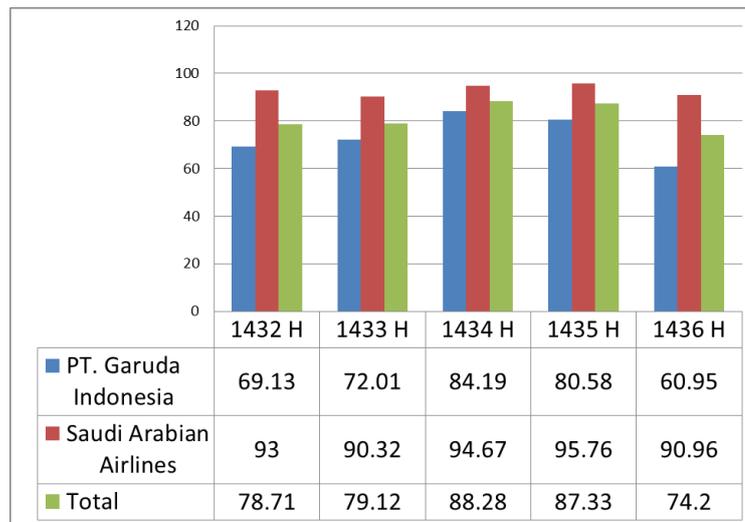
Rencana pemulangan 156.336 jemaah 376 kloter, realisasi 155.465 jemaah 376 kloter dan *open seat* 2.975 tempat duduk.

Sebanyak 872 Jemaah tidak dipulangkan, sakit, meninggal (tragedi ambruknya *crane* pada pembangunan Masjidil Haram).

- i. Gelombang I : 28 September – 11 Oktober 2015 berangkat dari Jeddah.
- ii. Gelombang II : 12 – 26 Oktober 2015 berangkat dari Madinah.

Tabel 3.31 Rincian Penerbangan *Phase II* Operator Penerbangan Haji

Rincian Penerbangan		
Operator Penerbangan	Jemaah	Kloter
GARUDA INDONESIA	82.352	210
SAUDI ARABIAN ARLINES	156.336	166



Grafik 3.6 *On Time Performance Phase II* (Pemulangan) Tahun 2011 sd 2015

Tabel 3.32 Alasan Keterlambatan pada *Phase II* (Pemulangan)

NO.	Operator Penerbangan	1435 H/ 2014 M	1436H/ 2015M		
			TEKNIS	OPERASIONAL	TOTAL
1.	PT . Garuda Indonesia	40	3	79	82
2.	Saudi Arabian Airlines	7	1	15	15
		47			

d. Layanan Sarana dan Prasarana Transportasi Perkeretaapian

Guna meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa kereta api, Ditjen Perkeretaapian pada tahun 2015 pada Bidang Prasarana telah melakukan kegiatan Pembangunan Jalur KA sepanjang 179,33 Km. Dengan pembangunan jalur KA tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kecepatan operasional KA sehingga waktu tempuh dapat relatif lebih singkat. Untuk bidang sarana pada tahun 2015 Ditjen Perkeretaapian telah dilaksanakan pengadaan sarana perkeretaapian antara lain :

- 1) Pengadaan Kereta Inspeksi, *multiyears* 2014–2015 sejumlah 1 (satu) unit;
- 2) Pengadaan TMC lebar *spoor* 1.435 mm sejumlah 1 (satu) unit;
- 3) Pengadaan Lori Inspeksi sejumlah 5 (lima) unit;
- 4) Rehabilitasi/ perbaikan KRD dan Kereta Inspeksi sejumlah 5 (lima) unit;
- 5) Pengadaan Kereta Ukur Prasarana, *Track* dan *LAA*, *multiyears* 2015–2016, sejumlah 1 (satu) unit;
- 6) Perbaikan 1 (satu) set, masing-masing 4 (empat) unit, KRL KfW;
- 7) Pengadaan Kereta Kedinasan sejumlah 1 (satu) unit;
- 8) Pengadaan Gerbong Datar (PPCW) sejumlah 10 (sepuluh) unit;
- 9) Pengadaan Gerbong Terbuka (ZZOW) sejumlah 10 (sepuluh) unit;
- 10) Pengadaan Kereta Inspeksi sejumlah 1 (satu) unit;
- 11) Pengadaan Sarana Kerja Gerbong (PPCW, ZZOW) lebar *spoor* 1.067 mm untuk Trans Sumatera sejumlah 20 (dua puluh) unit;
- 12) Kereta Inspeksi lebar *spoor* 1.067 mm (1 set @ 2 unit) *multiyears* 2015–2016;

Perawatan fasilitas sarana perkeretaapian meliputi :

- 1) Perawatan 2 set *Crane* KRC 800 N;
- 2) Perawatan dan kalibrasi peralatan uji sarana; dan
- 3) Operasional dan perawatan sarana milik negara.

Pengadaan fasilitas pengujian sarana perkeretaapian

- 1) Penambahan daya listrik Depo Depok; dan
- 2) *Overhaul crane* KRC 800 N.
- 3) Pengadaan peralatan uji dan perlengkapan uji sarana kereta api portabel.

Uraian	Maksud dan Tujuan	Manfaat
<p>Pengadaan TMC lebar <i>Spoor</i> 1.435 mm</p> <p>Dalam pelaksanaan pekerjaan perawatan jalan rel harus berpedoman pada standar yang telah ditentukan, di mana di antaranya untuk mengatrol dan membawa rel-</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pelayanan dan kelancaran angkutan kereta api. b. Menjamin kelaikan operasi prasarana perkeretaapian. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Mendukung industri dalam negeri; b. Membuka lapangan pekerjaan baru dan menyerap tenaga kerja; c. Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa perhubungan yang berkualitas untuk meningkatkan

Uraian	Maksud dan Tujuan	Manfaat
<p>rel kereta api yang telah dibongkar memerlukan peralatan khusus <i>Track Motor Car</i> (TMC). TMC memiliki sistem penggerak sendiri dan juga dapat digunakan untuk menarik rangkaian kereta/gerbong.</p>		<p>kesejahteraan rakyat;</p> <p>d. Tersedianya pemulihan fungsi prasarana perkeretaapian;</p> <p>e. Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian; dan</p> <p>f. Meningkatkan kinerja pelayanan terutama keselamatan.</p>

Gambar 3.11 Pengadaan TMC lebar *spoor* 1.435 mm



Gambar 3.12 Pengadaan Lori Inspeksi

Uraian	Maksud dan Tujuan	Manfaat
<p>Pengadaan Lori Inspeksi</p> <p>Dalam melaksanakan pembangunan prasarana perkeretaapian, pelaksana pembangunan yaitu Satker Prasarana Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi agar pembangunan tersebut dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan. Dalam melakukan pengawasan tersebut, Satker melakukan</p>	<p>a. Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mendukung kelancaran pembangunan prasarana perkeretaapian.</p> <p>b. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah menyediakan sarana untuk melakukan inspeksi sewaktu-waktu pembangunan prasarana perkeretaapian.</p>	<p>a. Mendukung industri dalam negeri;</p> <p>b. Membuka lapangan pekerjaan baru dan menyerap tenaga kerja;</p> <p>c. Tersedianya aksesibilitas pelayanan perkeretaapian;</p> <p>d. Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian; dan</p> <p>e. Penambahan jumlah armada siap operasi</p>

Uraian	Maksud dan Tujuan	Manfaat
<p>inspeksi langsung ke lokasi pembangunan. Namun Satker menemui kesulitan melakukan inspeksi ke lokasi yang tidak dapat ditempuh melalui alat transportasi darat. Untuk itu, Satker-Satker tersebut perlu memiliki suatu sarana yang dapat digunakan sewaktu waktu untuk melakukan inspeksi yaitu Lori.</p>		



Gambar 3.13 Pengadaan Kereta Kedinasan

Uraian	Maksud dan Tujuan	Manfaat
<p>Pengadaan Kereta Kedinasan</p> <p>Pengadaan Kereta Kedinasan yang tidak berpengerak sendiri diharapkan mampu meningkatkan pengawasan Pemerintah dalam kegiatan pembangunan bidang perkeretaapian untuk meningkatkan pelayanan dan keselamatan melalui kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perkeretaapian. Pengelolaan dan Pemanfaatan aset Kereta Kedinasan tersebut nantinya akan menjadi aset Direktorat Jenderal Perkeretaapian.</p> <p>Saat ini Direktorat Jenderal</p>	<ol style="list-style-type: none"> Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mendukung tugas pembinaan Pemerintah di bidang perkeretaapian. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memudahkan Pemerintah khususnya Direktorat Perkeretaapian melakukan pengawasan, pengendalian dan pengaturan pembangunan perkeretaapian. 	<ol style="list-style-type: none"> Mendukung industri dalam negeri; Membuka lapangan pekerjaan baru dan menyerap tenaga kerja; Tersedianya pemulihan fungsi prasarana perkeretaapian; Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian; dan Meningkatkan kinerja pelayanan terutama keselamatan.

Uraian	Maksud dan Tujuan	Manfaat
Perkeretaapian sudah memiliki 4 (empat) unit Kereta Kedinasan yang terdiri dari Kereta Utama 1 (satu) unit, Kereta Penumpang 2 (dua) unit dan Kereta Makan dilengkapi Pembangkit Listrik 1 (satu) unit sehingga direncanakan untuk melengkapi rangkaian operasional Kereta kedinasan tersebut dengan penambahan 1 (satu) unit Kereta VIP yang nantinya dalam pengoperasiannya ditarik oleh lokomotif yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.		



Gambar 3.14 Kereta Inspeksi

Uraian	Maksud dan Tujuan	Manfaat
<p>Pengadaan Kereta Inspeksi</p> <p>Pengadaan Kereta Inspeksi diharapkan mampu meningkatkan pengawasan Pemerintah untuk kegiatan pembangunan bidang perkeretaapian untuk meningkatkan pelayanan dan keselamatan melalui kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Prasarana Perkeretaapian dan Pengelolaan</p>	<p>a. Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mendukung pembangunan Prasarana Perkeretaapian dan menjamin kelaikan operasi prasarana perkeretaapian.</p> <p>b. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memudahkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian</p>	<p>a. Mendukung industri dalam negeri;</p> <p>b. Membuka lapangan pekerjaan baru dan menyerap tenaga kerja;</p> <p>c. Tersedianya pemulihan fungsi prasarana perkeretaapian;</p> <p>d. Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian; dan</p> <p>e. Meningkatkan kinerja pelayanan terutama keselamatan.</p>

Uraian	Maksud dan Tujuan	Manfaat
<p>aset Kereta Inspeksi tersebut nantinya akan menjadi aset Direktorat Jenderal Perkeretaapian.</p> <p>Saat ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian sudah memiliki 2 (dua) unit Kereta Inspeksi dan direncanakan kedua unit tersebut akan ditempatkan di Satker Pengembangan Prasarana Perkeretaapian Sumatera Utara dan Satker Pengembangan Prasarana Perkeretaapian Sumatera Selatan. Kereta Inspeksi TA 2015 ini dirancang dan dibuat untuk dapat dirangkaikan (<i>couple</i>) dengan pengadaan Kereta Inspeksi <i>multiyears</i> TA 2014 – 2015 sehingga nantinya menjadi 1 (satu) set Kereta Inspeksi yang terdiri dari 2 (dua) unit.</p>	<p>melakukan inspeksi dan pemantauan pembangunan Prasarana Perkeretaapian.</p>	



Gambar 3.15 Pengadaan Gerbong Datar (PPCW)



Gambar 3.16 Pengadaan Gerbong Terbuka (ZZOW)

Uraian	Maksud dan Tujuan	Manfaat
<p>Pengadaan Gerbong Datar (PPCW)</p> <p>Dalam pembangunan prasarana perkeretaapian, Satker</p>	<p>a. Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah agar target penyelesaian pembangunan prasarana dapat sesuai</p>	<p>a. Mendukung industri dalam negeri; b. Membuka lapangan pekerjaan baru dan menyerap tenaga kerja;</p>

Uraian	Maksud dan Tujuan	Manfaat
<p>pelaksana sangat memerlukan sarana kerja untuk mendukung pembangunan seperti Gerbong Terbuka untuk mengangkut <i>balast</i> dan Gerbong Datar untuk mengangkut rel dan wesel. Saat ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah memiliki 20 (dua puluh) unit Gerbong Terbuka dan 20 (dua puluh) unit Gerbong Datar yang ditempatkan di Satker Pembangunan Jalur Ganda Cirebon – Kroya sebanyak 10 (sepuluh) unit Gerbong Terbuka, Satker Pengembangan Perkeretaapian sebanyak 10 (sepuluh) unit Gerbong Terbuka, Satker Pengembangan Perkeretaapian Jawa Tengah sebanyak 20 (dua puluh) unit Gerbong Datar.</p> <p>Dengan kondisi yang ada saat ini, kebutuhan Gerbong Terbuka tersebut sangat mendesak mengingat Satker-Satker lain seperti Satker Pengembangan Perkeretaapian Jawa Barat, Satker Peningkatan Jalan Kereta Api Lintas Selatan Jawa, Satker Peningkatan Jalan Kereta Api Lintas Utara Jawa, dan Satker Pembangunan <i>Double – Double Track</i> sangat memerlukan dukungan Gerbong Terbuka dan Gerbong Datar tersebut.</p>	<p>target sehingga pemanfaatan dari pembangunan tersebut dapat dirasakan masyarakat.</p> <p>b. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mendukung pembangunan prasarana perkeretaapian yang dilaksanakan oleh pemerintah.</p>	<p>c. Penyelesaian pembangunan prasarana perkeretaapian sesuai target;</p> <p>d. Tersedianya aksesibilitas pelayanan perkeretaapian sesuai target; dan</p> <p>e. Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian.</p>

Uraian	Maksud dan Tujuan	Manfaat
<p>Pengadaan Gerbong Terbuka (ZZOW)</p> <p>Dalam pembangunan prasarana perkeretaapian, Satker</p>	<p>a. Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah agar target penyelesaian pembangunan prasarana dapat sesuai</p>	<p>a. Mendukung industri dalam negeri;</p> <p>b. Membuka lapangan pekerjaan baru dan menyerap tenaga kerja;</p> <p>c. Penyelesaian</p>

Uraian	Maksud dan Tujuan	Manfaat
<p>pelaksana sangat memerlukan sarana kerja untuk mendukung pembangunan seperti Gerbong Terbuka untuk mengangkut balast dan Gerbong Datar untuk mengangkut rel dan wesel. Saat ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah memiliki 20 (dua puluh) unit Gerbong Terbuka dan 20 (dua puluh) unit Gerbong Datar yang ditempatkan di Satker Pembangunan Jalur Ganda Cirebon – Kroya sebanyak 10 (sepuluh) unit Gerbong Terbuka, Satker Pengembangan Perkeretaapian sebanyak 10 (sepuluh) unit Gerbong Terbuka, Satker Pengembangan Perkeretaapian Jawa Tengah sebanyak 20 (dua puluh) unit Gerbong Datar.</p> <p>Dengan kondisi yang ada saat ini, kebutuhan Gerbong Terbuka tersebut sangat mendesak mengingat Satker-Satker lain seperti Satker Pengembangan Perkeretaapian Jawa Barat, Satker Peningkatan Jalan Kereta Api Lintas Selatan Jawa, Satker Peningkatan Jalan Kereta Api Lintas Utara Jawa, dan Satker Pembangunan <i>Double – Double Track</i> sangat memerlukan dukungan Gerbong Terbuka dan Gerbong Datar tersebut.</p>	<p>target sehingga pemanfaatan dari pembangunan tersebut dapat dirasakan masyarakat.</p> <p>b. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mendukung pembangunan prasarana perkeretaapian yang dilaksanakan oleh pemerintah.</p>	<p>pembangunan prasarana perkeretaapian sesuai target;</p> <p>d. Tersedianya aksesibilitas pelayanan perkeretaapian sesuai target; dan</p> <p>e. Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian.</p>

2. SDM Transportasi

a. Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Darat

Penyelenggaraan Pengembangan SDM Perhubungan Darat pada tahun 2015 sebagai berikut :

1) Pendidikan Pembentukan

Terdapat 12 (dua belas) program pendidikan pembentukan yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan SDM Perhubungan Darat antara lain:

NO	JENIS DIKLAT PEMBENTUKAN
1	Diklat Awal DII Penguji Kendaraan Bermotor (PKB)
2	Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP)
3	Diploma III Teknik Bangunan dan Jalur Perkeretaapian (TBJP)
4	Diploma III Teknik Mekanika Perkeretaapian (TMP)
5	Diploma III Teknik Elektro Perkeretaapian (TEP)
6	Diploma III Manajemen Transportasi Perkeretaapian (MTP)
7	Diploma IV MKTJ Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan (MKTJ)
8	Diploma IV Teknik Keselamatan Otomotif (TKO)
9	Diploma III Penguji Kendaraan Bermotor (PKB)
10	Diploma IV Transportasi Darat
11	Diploma III Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
12	Diploma III Perkeretaapian (KA)

Sedangkan jumlah target dan realisasi lulusan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.33 Target dan Realisasi Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Darat Tahun 2015

NO	SATKER	LULUSAN		PERSENTASE %
		TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5
1	Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi	176	176	100
2	Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal	142	142	100
3	Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun	0	0	0
3	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat Palembang	54	54	100
4	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat Bali	60	58	96,67
JUMLAH		432	430	99,54

Sumber : Satker Pengembangan SDM Perhubungan Darat

Jumlah lulusan pendidikan Pembentukan Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Tahun 2015 tidak ada dikarenakan awal penerimaan peserta pendidikan Pembentukan berlangsung pada tahun 2014, sehingga awal kelulusan peserta pendidikan pembentukan (Program DIII) adalah pada tahun 2017.

2) Pendidikan Penjenjangan

Program pendidikan penjenjangan hanya dilaksanakan pada Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi yaitu Diploma IV Transportasi Darat *Extension* yang menargetkan 50 peserta, namun hanya terealisasi sebesar 13 peserta Diploma IV Transportasi Darat. Adapun jumlah lulusan pendidikan penjenjangan sebesar 0 peserta dari 0 peserta yang ditargetkan, dikarenakan tidak ada peserta yang mendaftar pada Diploma IV Transportasi Darat *Extension* di Tahun 2014.

3) Pelatihan Teknis

Pelatihan Teknis (*Short Course*) ini dilaksanakan di semua Satker/ UPT Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat guna meningkatkan kemampuan teknis di bidang perhubungan darat dengan jumlah target dan realisasi lulusan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.34 Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan Teknis (*Short Course*) SDM Perhubungan Darat Tahun 2015

NO	SATKER	LULUSAN		PERSENTASE %
		TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5
1	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat	1752	1.284	73,29
2	Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi	826	494	59,81
3	Politeknik Keselamatan Transpotasi Jalan Tegal	3.150	1828	58,03
4	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat Palembang	336	167	49,70
5	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat Bali	1354	1100	81,24
6	Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun	192	190	98,96
	JUMLAH	7.610	5.063	66,53

Sumber : Satker Pengembangan SDM Perhubungan Darat

4) Pelatihan Lainnya

Pelatihan lainnya diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat dapat terealisasi sebesar 100 % dari 85 peserta yang ditargetkan, sedangkan di Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi terealisasi sebanyak 350 peserta.

Tabel 3.35 Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan Lainnya SDM Perhubungan Darat Tahun 2015

NO	SATKER	LULUSAN		PERSENTASE %
		TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat	85	85	100
2	Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi	350	350	100
	JUMLAH	435	435	100

Sumber : Satker Pengembangan

Secara keseluruhan program pengembangan SDM berdasarkan target dan realisasi lulusan yang diselenggarakan oleh Satker SDM Perhubungan Darat dapat dilihat sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.36 Target dan Realisasi Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Perhubungan Darat Tahun 2015

NO	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	LULUSAN		PERSENTASE %
		TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendidikan Pembentukan	432	430	99,54
2	Pendidikan Penjenjangan	0	0	-
3	Pelatihan Teknis	7139	5123	71,76
4	Pelatihan Lainnya	435	435	100,00
JUMLAH		8006	5988	74,79

Sumber : Satker Pengembangan SDM Perhubungan Darat

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan persentase Pendidikan dan Pelatihan pada SDM Perhubungan Darat Tahun 2015 mencapai 74,79% dimana Lulusan Diklat Pembentukan sebesar 99,54%, Lulusan Pelatihan Lainnya sebesar 100%, sedangkan Lulusan Pendidikan Penjenjangan belum tercapai sesuai rencana.

b. Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Laut

Penyelenggaraan Pengembangan SDM Perhubungan Laut pada tahun 2015 sebagai berikut:

1) Pendidikan Pembentukan

Terdapat 9 (sembilan) program pendidikan pembentukan terdiri dari Diploma IV Nautika, Diploma IV Teknika, Diploma IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan, Diklat Pelaut III Nautika, Diklat Pelaut III Teknika, Diklat Pelaut IV Nautika, Diklat Pelaut IV Teknika, Diklat Pelaut Dasar Nautika dan Diklat Pelaut Dasar Teknika yang diselenggarakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan SDM Perhubungan Laut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.37 Target dan Realisasi Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Laut Tahun 2015

NO	SATKER	LULUSAN		PERSENTASE %
		TARGET	REALISASI	
1	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta	500	395	19.32
2	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	360	405	93.33
3	Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar	300	320	106.67
4	Politeknik Pelayaran Surabaya	343	168	48.98
5	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh	0	0	0

NO	SATKER	LULUSAN		PERSENTASE
		TARGET	REALISASI	%
6	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang	750	294	39.20
7	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong	240	240	100.00
8	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong	232	123	53.02
JUMLAH		2,725	1.945	71.38

Sumber : Satker Pengembangan SDM Perhubungan Laut

2) Pelatihan Peningkatan (*Upgrading Training*)

Program pelatihan peningkatan ditujukan untuk para pelaut yang sudah memenuhi syarat jam berlayar dan ingin meningkatkan sertifikat pelaut ke jenjang yang lebih tinggi, yang dibagi berdasarkan tingkat jenjang teknis profesi kepelautan yang mencakup aspek manajemen dan operasional level, sesuai dengan persyaratan *Standard Training Certificated Watckeping (STCW CODE)*. Ketentuan Pelatihan, Sertifikat, dan Tugas Jaga bagi pelaut juga merupakan ketentuan dari *International Maritime Organization (IMO)*.

Tabel 3.38 Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan Penjenjangan SDM Perhubungan Laut Tahun 2015

NO	SATKER	LULUSAN		PERSENTASE
		TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta	1200	740	61,67
2	Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta	5,173	4,406	85.17
3	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	900	505	56,11
4	Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar	470	476	67.61
5	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang	1,228	56	4.56
6	Politeknik Pelayaran Surabaya	1,980	1,412	71,31
7	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong	600	1,320	220
8	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong	120	137	114.16
9	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati	150	118	78.67
JUMLAH		12,055	9,170	76.07

Sumber : Satker Pengembangan SDM Perhubungan Laut

3) Pelatihan Penyegaran (*Refreshing Training*)

Pelatihan Penyegaran (*Refreshing Training*) yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang telah ditunjuk adalah sebagai berikut :

Tabel 3.39 Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan Penyegaran SDM Perhubungan Laut Tahun 2015

NO	SATKER	LULUSAN		PERSENTASE
		TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta	600	519	86.50
2	Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar	100	206	206.00
JUMLAH		700	725	103.57

4) Pelatihan Pemutakhiran (*Updating Training*)

Pelatihan Pemutakhiran diselenggarakan untuk penyesuaian ijazah pelaut sesuai dengan Amandemen Manila STCW 2010. Berdasarkan Peraturan yang termuat dalam STCW 2010, pelaut pemegang sertifikat STCW 1978 Amandemen 1995 harus disesuaikan berdasarkan STCW 1978 Amandemen 2010 dari tingkat dasar sampai tingkat 1. Bagi pemegang ijazah pelaut yang masih bersertifikat STCW 1978 Amandemen 1955 diberi kesempatan hingga diharapkan dengan terselenggaranya pelatihan pemutakhiran, pada tahun 2016 seluruh pelaut segera memperbaharui ijazah-ijazah yang telah dimiliki agar sesuai dengan STCW 1978 Amandemen 2010.

Tabel 3.40 Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan Pemutakhiran SDM Perhubungan Laut Tahun 2015

No	PROGRAM PELATIHAN	LULUSAN		PERSENTASE
		TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut	180	0	0.00
2	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta	15000	1990	13.27
3	Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta	9180	8244	89.80
4	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	7920	1944	24.55
5	Politeknik Ilmu Pelayaran Makasar	750	1936	258.13
6	Politeknik Pelayaran Surabaya	12,600	1,342	10.65
7	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran barombong	2,640	7,396	280.15
8	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong	360	304	84.44
9	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Aceh	200	147	73.50
JUMLAH		48,830	23,303	47.72

Sumber : Satker Pengembangan SDM Perhubungan Laut

5) Pelatihan Ketrampilan Khusus Pelaut (PKKP)

Pelatihan Ketrampilan Khusus Pelaut (PKKP) SDM Perhubungan Laut diselenggarakan oleh seluruh Satker Pengembangan SDM Perhubungan Laut sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.41 Program dan Realisasi Lulusan PKKPSDM Perhubungan Laut Tahun 2015

NO	SATKER	LULUSAN		PERSENTASE
		TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pehubungan Laut	300	109	36.33
2	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta	32666	63299	193.78
3	Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta	41,990	41,290	98.33
4	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	45560	100,753	221.14
5	Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar	15654	51,546	329.28
6	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang	19,287	16,695	86.56
7	Politeknik Pelayaran Surabaya	48,270	64,650	133.93
8	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong	13,740	36,724	267.28
9	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong	3,457	3,666	106.05
10	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh Besar	5,750	7,974	138.68
11	Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta	1,080	964	89.26
JUMLAH		227,754	387,670	170.21

Sumber : Satker Pengembangan SDM Perhubungan Laut

6) Pelatihan Lainnya

Pelatihan lainnya diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.42 Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan Lainnya SDM Perhubungan Laut Tahun 2015

NO	SATKER	LULUSAN		PERSENTASE
		TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong	280	480	171.43
2	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh Besar	164	164	100.00
JUMLAH		444	644	145.05

Sumber : Satker Pengembangan SDM Perhubungan Laut

Seluruh program pendidikan dan pelatihan SDM Perhubungan Laut yang diselenggarakan pada tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.43 Program dan Realisasi Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Perhubungan Laut Tahun 2015

NO	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	LULUSAN		PERSENTASE
		TARGET	REALISASI	%
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pendidikan Pembentukan	2,725	1,945	71.38
2	Pelatihan Peningkatan	12,055	9,170	76.07
3	Pelatihan Penyegaran (<i>Refreshing Training</i>)	700	725	103.57
4	Pelatihan Pemutakhiran (<i>Updating Training</i>)	48,830	23,303	47.72
6	Pelatihan Ketrampilan Khusus Pelaut (PKKP)	227,754	387,670	170.21
7	Pelatihan Lainnya	444	644	145.05
	JUMLAH	292,508	423,457	144.77

Sumber : Satker Pengembangan SDM Perhubungan Laut

c. Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Udara

1) Pendidikan Pembentukan

Program pendidikan pembentukan yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan SDM Perhubungan Udara sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.44 Program Pendidikan Pembentukan

NO	JENIS DIKLAT PEMBENTUKAN
1	DIV Teknik Navigasi Udara
2	D III Teknik Listrik Bandara
3	D III Lalu-Lintas Udara
4	D III Komunikasi Penerbangan
5	D III Teknik Navigasi Udara
6	DIII PLLU
7	DIII Teknik Listrik Bandara
8	DIII Teknik Bangunan dan Landasan
9	DIII Teknik Mekanikal Bandara
10	DIII Pemandu Lalu-Lintas Udara
11	DIII Penerangan Aeronautika
12	DIII Komunikasi Penerbangan
13	DIII Pertolongan Kecelakaan Penerbangan
14	DIII Manajemen Transportasi Udara
15	DIII Operasi Bandar Udara

NO	JENIS DIKLAT PEMBENTUKAN
16	DII Penerbang
17	D II Teknik Pesawat Udara
18	Non Diploma Teknik Pesawat Udara

Tabel 3.45 Target dan Realisasi Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Udara Tahun 2015

NO	SATKER	LULUSAN		PERSENTASE %
		TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug	448	406	90.63
2	Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan	90	85	94.44
3	Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya	186	185	99.46
4	Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar	120	115	95.83
5	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Banyuwangi	44	42	95.45
JUMLAH		888	833	93.81

Sumber : Satker Pengembangan SDM Perhubungan Udara

2) Pendidikan Penjenjangan

Program pendidikan penjenjangan pada UPT SDM Perhubungan Udara pada tahun 2015 adalah seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.46 Target dan Realisasi Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan Udara Tahun 2015

NO	SATKER	LULUSAN		PERSENTASE %
		TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug	382	385	100.79
2	Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan	40	28	70,00
JUMLAH		422	413	97.87

Sumber : Satker Pengembangan SDM Perhubungan Udara

3) Pelatihan Teknis

Jumlah lulusan pelatihan teknis yang diselenggarakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan SDM Perhubungan Udara terdapat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.47 Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan Teknis SDM Perhubungan Udara Tahun 2015

NO	SATKER	LULUSAN		PERSENTASE %
		TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara	535	533	99.63
2	Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug	555	429	77.30
3	Akademi Teknik Dan Keselamatan Perbangan Medan	765	713	93.20
4	Akademi Teknik Dan Keselamatan Perbangan Surabaya	1240	1121	90.40
5	Akademi Teknik Dan Keselamatan Perbangan Makassar	945	865	91.53
6	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi	163	67	41.10
7	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Curug	450	763	169.56
8	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Jayapura	1095	724	66.12
9	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Palembang	1114	893	80.16
	JUMLAH	6862	6108	89.01

Sumber : Satker Pengembangan SDM Perhubungan Udara

4) Pelatihan Lainnya

Jumlah lulusan pelatihan lainnya sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.48 Target dan Realisasi Lulusan Pelatihan Lainnya SDM Perhubungan Udara Tahun 2015

NO	SATKER	LULUSAN		PERSENTASE %
		TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug	140	140	100.00
2	Akademi Teknik Dan Keselamatan Perbangan Medan	310	535	172.58
3	Akademi Teknik Dan Keselamatan Perbangan Surabaya	124	124	100.00
	JUMLAH	574	799	139.20

Sumber : Satker Pengembangan SDM Perhubungan Udara

Secara keseluruhan program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pendidikan dan pelatihan SDM Perhubungan Udara dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.49 Target dan Realisasi Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Perhubungan Udara Tahun 2015

NO	PROGRAM PELATIHAN	LULUSAN		PERSENTASE %
		TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendidikan Pembentukan	888	833	93.81
2	Pendidikan Penjenjangan	422	413	97.87
3	Pelatihan Teknis	6862	6108	89.01
4	Pelatihan Lainnya	574	799	139.20
	JUMLAH	8746	8153	93.22

Sumber : Satker Pengembangan SDM Perhubungan Udara

d. Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur Perhubungan

1) Pelatihan Prajabatan

Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peningkatan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dalam melaksanakan tugas pemerintah.

2) Pelatihan Struktural/ Kepemimpinan

Pelatihan ini dimaksudkan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jabatan struktural eselon tertentu, serta memiliki kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawasan pengetahuan yang komprehensif dan semangat pengabdian yang berorientasi kepada pelayanan prima serta pengembangan partisipasi masyarakat. Pada tahun 2015 terdapat 3 (tiga) pelatihan yaitu PIM II, PIM III dan PIM IV.

3) Pelatihan Fungsional

Pelatihan Fungsional merupakan pelatihan untuk memenuhi ataupun meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki Jabatan Fungsional yang terdiri dari tingkat ahli dan tingkat terampil. Pelatihan ini diselenggarakan di Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan.

4) Pelatihan Teknis/ Manajerial

Pelatihan Teknis/ Manajerial adalah pelatihan yang dilakukan agar SDM mempunyai kemampuan *soft skill* maupun *hard skill* yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

5) Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Perhubungan
Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menciptakan SDM Aparatur Perhubungan yang berkualitas dan kompeten dibidangnya.

6) Rintisan Pendidikan Gelar

Rintisan Pendidikan Gelar diselenggarakan dalam rangka memberikan beasiswa kepada pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk menempuh pendidikan S2 dan S3.

Tabel 3.50 Rekapitulasi Target dan Realisasi Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur Perhubungan Tahun 2015

NO	PROGRAM PELATIHAN	LULUSAN		PERSENTASE
		TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelatihan Prajabatan	829	786	94.81
2	Pelatihan Struktural/Kepemimpinan	282	277	98.23
3	Pelatihan Fungsional	158	148	93.67
4	Pelatihan Teknis Manajerial	3,618	3,316	91.65

NO	PROGRAM PELATIHAN	LULUSAN		PERSENTASE
		TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Perhubungan	9159	7365	80,41
6	Rintisan Pendidikan Gelar	137	109	79,56
JUMLAH		14183	12001	84,62

Sumber : Satker Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan

3. Penelitian dan Pengembangan

Pada tahun anggaran 2015, Badan Litbang Perhubungan telah menyelesaikan 294 studi yang terdiri dari 72 studi besar, 10 studi sedang dan 212 studi kecil. Gambar di bawah ini menunjukkan perkembangan jumlah studi dari tahun 2011 - 2015.



Grafik 3.7 Perkembangan Jumlah Penelitian Tahun 2011 – 2015

Badan Litbang Perhubungan selain melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan juga melaksanakan kegiatan penunjang antara lain :

a. Lomba Penelitian

Menyelenggarakan Lomba Penelitian Transportasi Tingkat Nasional dengan tema “Efisiensi Biaya Logistik Melalui Transportasi Multimoda”. Kegiatan ini bertujuan untuk menampung dan menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam mengatasi permasalahan transportasi.

Lomba Penelitian Transportasi Tingkat Nasional Tahun 2015 dilaksanakan di 10 (sepuluh) regional, yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Manado, Makassar, Ambon dan Jayapura, dengan melibatkan perguruan tinggi setempat.

Tim Penilai pada Lomba Penelitian Transportasi Tahun 2015 terbagi menjadi 2 (dua) Tim Penilai, yaitu Tim Penilai Tingkat Regional yang terdiri dari Kepala Dinas

Perhubungan Propinsi, Kepala Dinas Perhubungan Kota, Perguruan Tinggi di masing-masing regional, dan DPP ALFI/ILFA Propinsi di masing-masing regional dan Tim Penilai Tingkat Nasional yang terdiri dari para Pakar Transportasi Kementerian Perhubungan, Perguruan Tinggi dan Praktisi.

b. Penugasan Khusus Menteri Perhubungan

- 1) Monitoring angkutan lebaran 2015
- 2) Monitoring Angkutan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016
- 3) Evaluasi Kemanfaatan Investasi Pembangunan Sektor Transportasi
- 4) Usulan Daerah terkait dengan permintaan Studi maupun evaluasi terhadap kegiatan transportasi darat, laut, udara dan kereta api yang akan dilaksanakan di daerah.

c. Seminar/Workshop/FGD

Telah dilaksanakan ± 37 kegiatan Seminar/ *Workshop*/ FGD beberapa di antaranya :

- 1) Kebijakan Penerapan *Environmentally Sustainable Transport* (EST) Perkotaan di Indonesia
- 2) Uji Publik Standar Pelayanan Minimum (SPM) Penumpang Angkutan Laut, Sungai Danau dan Penyeberangan
- 3) Uji Publik Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Standar Pelayanan Minimum Kereta Api
- 4) Penyusunan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek
- 5) Strategi Pembangunan Dan Pengembangan BRT di Kota Metropolitan dan Kota Besar Secara Efektif dan Efisien

d. Temu Karya Peneliti

Temu Karya Peneliti diselenggarakan pada tanggal 7 Oktober 2015 dengan tema "Manfaat Hasil Penelitian bagi Peningkatan Pelayanan Sektor Transportasi", menampilkan 4 (empat) penyaji sebagai perwakilan dari masing-masing Pusat Penelitian di lingkungan Badan Litbang, dengan judul penelitian berikut :

- 1) Pedoman Teknis Pemanfaatan Keterpaduan Kepelabuhan Dengan Penyeberangan oleh Dedy Aryanto
- 2) Basic Design Pesawat Latih *Flying School* Dengan Meningkatkan Kandungan Lokal oleh Minda Mora, S.T., M.T.
- 3) Pedoman Umum Perancangan Integrasi Stasiun Kereta Api Dengan *Shelter Bus Rapit Transit* (BRT) oleh Yessy Gusleni, S.E.,M.M.Tr.
- 4) Alternatif Desain Penataan Perlintasan Sebidang di Indonesia oleh Drs. Sabungan Hutapea., M. Kom.

e. Rakornis

Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 9 s.d 10 Maret 2015 di Jakarta dengan tema "Melalui Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Kita Tingkatkan Keselamatan dan Pelayanan Jasa Transportasi".

Acara dimaksud dibuka oleh Menteri Perhubungan dan dihadiri kurang lebih 400 peserta yang terdiri dari pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan, Badan Litbang Kementerian/ Lembaga, Dinas Perhubungan Propinsi, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Perguruan Tinggi, Dewan Pakar Transportasi, Asosiasi dan instansi lain yang terkait.

Beberapa tindak lanjut yang dilakukan oleh Badan Litbang Perhubungan berdasarkan perolehan hasil Rakornis Tahun 2015 adalah :

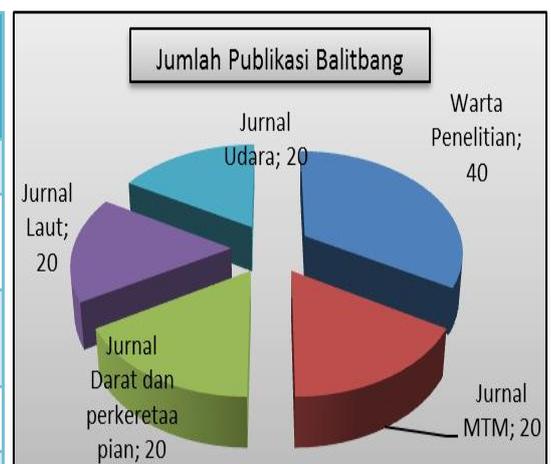
- 1) Melaksanakan hasil Kesepakatan Kerjasama (MoU) Pemanfaatan Hasil Riset antara Badan Litbang Perhubungan, LIPI, BPPT, dengan Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Perhubungan Udara serta PT. LEN (Persero) dan PT INTI (Persero) yang disaksikan oleh Menteri Perhubungan;
- 2) Melaksanakan Lomba Penelitian Transportasi Tingkat Nasional Tahun 2015;
- 3) Mengusulkan SK Menteri Perhubungan tentang Dewan Pakar Transportasi;
- 4) Mengusulkan MoU (*Memorandum of Understanding*) MoA (*Memorandum of Agreement*) antara Badan Litbang dan Perguruan Tinggi;
- 5) Klinik Transportasi Badan Litbang Perhubungan akan menginventarisasi studi dan melaksanakan studi tentang usulan permasalahan di daerah terkait dengan keselamatan, pelayanan dan logistik;
- 6) Inventarisasi dan Rencana Penelitian Kedepan;
- 7) Mengadakan media untuk harmonisasi dan sinergi berupa sinkronisasi data dan forum penelitian transportasi;
- 8) Portal media komunikasi verifikasi transportasi yang memuat : daftar pakar sesuai keahlian dan substansi penelitian, daftar penelitian berdasarkan wilayah/provinsi, dan keterhubungan pelayanan portal di daerah.
- 9) Pelaksanakan kegiatan Survei Asal Tujuan Transportasi Nasional pada Tahun 2016.

f. Publikasi Hasil Penelitian

Jumlah keseluruhan publikasi adalah 22 kali, terdiri dari 6 (enam) penerbitan warta penelitian dan masing-masing 4 (empat) penerbitan jurnal penelitian transportasi multimoda, darat, laut dan udara. Jumlah makalah yang dipublikasikan pada warta penelitian sebanyak 40 makalah, sedangkan total makalah yang dipublikasikan pada jurnal penelitian sebanyak 80 makalah. Komposisi jumlah makalah terpublikasi ditampilkan pada gambar berikut.

Tabel 3.51 Jumlah Makalah Yang Dipublikasi Tahun 2015

	Publikasi	Jumlah Penerbitan (per tahun)	Jumlah Makalah (per tahun)
1.	Warta Penelitian	6	40
2.	Jurnal Transportasi Manajemen Transportasi Multimoda	4	20
3.	Jurnal Transportasi Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	4	20
4.	Jurnal Transportasi Perhubungan Laut	4	20
5.	Jurnal Transportasi Perhubungan Udara	4	20



Sumber : Badan Litbang Perhubungan, Januari 2016

Selain publikasi yang ada di lingkungan Badan Litbang Perhubungan, peneliti Badan Litbang juga berupaya untuk mempublikasikan tulisannya di jurnal-jurnal internasional. Tabel di bawah ini memaparkan penelitian yang dipublikasikan di tingkat internasional pada tahun 2015.

Tabel 3.52 Makalah Yang Dipublikasikan Pada Publikasi Internasional Tahun 2015

NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	PUBLIKASI INTL	EDISI PENERBITAN
Eny Yuliiawati (Peneliti Muda Transportasi Udara)	<i>System Dynamics Model for Airport Characterization in Hub-and-spoke Networks</i>	<i>International Journal of Technology</i> (IJTecth)	Vol.6, No.5 (SE) (2015)
Imam Sonny (Peneliti Pertama Transportasi Darat)	<i>The Development of a Freight Distribution Model for Connecting Inter-Island Freight Transport</i>	<i>International Journal of Technology</i> (IJTecth)	Vol.6 No.5 (2015), p-ISSN 2086-9614; s-ISSN 2087-2100
Susanti Handayani (Peneliti Pertama Transportasi Darat)	<i>Model Uncertainty Traffic Intra Urban Toll Road With Geometric Brownian Motion Approach</i>	<i>International Journal of Technology</i> (IJTecth)	Dalam proses penerbitan

Sumber : Badan Litbang Perhubungan, Januari 2016

g. Studi Peningkatan Pelayanan

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan, Badan Litbang Perhubungan telah melakukan studi terkait dengan peningkatan pelayanan sebanyak 144 studi, antara lain studi mengenai :

STUDI	JUDUL STUDI
Peningkatan Pelayanan	1. Studi Kelembagaan BPTJ
	2. Penelitian Pengoperasian Angkutan Lingkungan
	3. Penyusunan Pedoman Analisis Dampak Lalu-Lintas dan Sertifikasi Analisis Dampak Lalu-Lintas
	4. Studi Penyusunan Evaluasi Desain Terminal Penumpang Tipe A
	5. Pengembangan Teknologi Penggunaan Jalur KA
	6. Review Rencana Induk ASDP
	7. Studi Penyusunan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek
	8. Penetapan Kelas Stasiun Kecil Untuk Stasiun Pada Jaringan Kereta Api Nasional
	9. Penetapan Kelas Stasiun Besar Untuk Stasiun Pada Jaringan Kereta Api Nasional
	10. Studi Implementasi CNG Pada Kendaraan Angkutan Umum
	11. Kajian Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Juknis Pelaksanaan DAK Tahun

STUDI	JUDUL STUDI
	2016
12.	Validasi Survey Potensi Angkutan Lebaran Tahun 2015
13.	Penelitian Kebutuhan Fasilitas Kapal Penumpang Berdasarkan Gender
14.	Penelitian Optimalisasi Jaringan Angkutan Laut di Indonesia.
15.	Kajian Pelabuhan UPT yang Dapat Diusahakan Dengan Model Badan Layanan Umum (BLU)
16.	Studi Penyusunan Rencana Induk (<i>Masterplan</i>) Bandar Udara (Kontraktual)
17.	Penelitian Evaluasi dan Kesiapan <i>Air Navigation Training Area</i> (Swakelola)
18.	Studi Biaya Jasa Pelayanan Navigasi (Swakelola)
19.	Pengkajian Peningkatan Pelayanan <i>Air Traffic Services</i> (ATS) di Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
20.	Pengkajian Strategi Peningkatan Pelayanan Publik di Bandar Udara (Tindak Lanjut Surat Edaran No. HK.209/I/II PHB. 2014)
21.	Integrasi Rencana Induk Transportasi Nasional (Sistranas Pada Tatranas);
22.	Penyusunan Pedoman Evaluasi Kemanfaatan Investasi Transportasi Publik;
23.	Penyusunan Pedoman Implementasi Standar Pelayanan Bidang Perhubungan (studi kasus SPM bidang angkutan jalan);

4. *Good Governance*

a. **Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan pada tahun 2014 telah dilaksanakan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan melalui Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, dan telah dilakukan evaluasi penilaian oleh Kementerian PAN dan RB dengan hasil penilaian 70,34 % (kategori BB).

Terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2014 telah dilaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) Kementerian Perhubungan Tahun 2014 oleh Tim Assesor Kementerian Perhubungan dan telah selesai *submit* pada tanggal 13 Juli 2015 dengan nilai indeks RB 88,17 interperetasi "Sangat Baik". Sebagai kelanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan telah ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 191 Tahun 2015 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan.

Telah ditetapkan Dokumen Usulan dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 724 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015. Penyusunan pokok-pokok kegiatan dalam Dokumen Usulan dan *Road Map* dimaksud menyesuaikan dengan Nawa Cita, Rencana Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan. Pada tanggal 27 Mei 2015 telah dilaksanakan Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan :



Gambar 3.17 Pengarahan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan

b. Laporan SIMAK BMN

- 1) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mengacu kepada :
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
 - b) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 39 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
 - d) Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara.
- 2) Nilai Barang Milik Negara (BMN) Tahunan Neraca *Audited* Tahun Anggaran 2014 di lingkungan Kementerian Perhubungan yang telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan *Up. Direktur Jenderal Kekayaan Negara* dengan mempergunakan pola Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) adalah sebesar Rp. 162.934.388.992.710,- .

Nilai tersebut berdasarkan hasil penggabungan Laporan Barang dari Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1) sampai dengan 31 Desember 2014.

- 3) Nilai Barang Milik Negara (BMN) Tahunan Neraca *Unaudited* Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Kementerian Perhubungan yang telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan Up. Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan mempergunakan pola Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) adalah sebesar Rp. 187.101.869.567.245,- .

Nilai tersebut berdasarkan hasil penggabungan Laporan Barang dari Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1) sampai dengan 31 Desember 2015.

4) Perbandingan Saldo

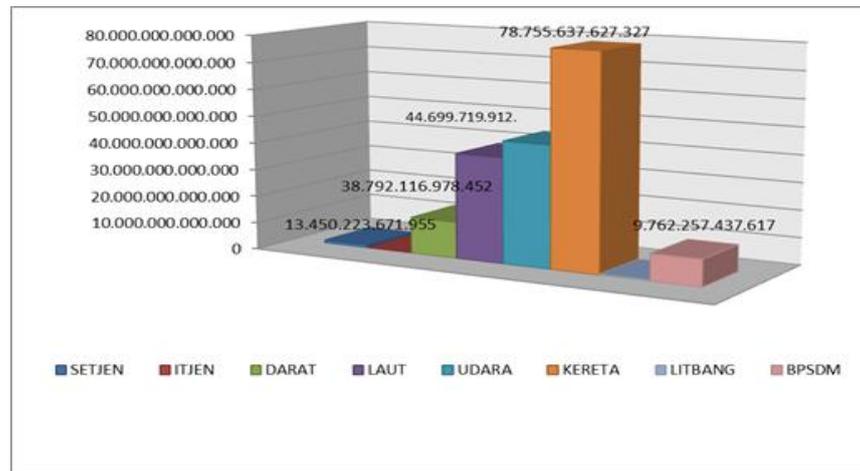
- (1) Perbandingan pada Neraca Tahunan *Audited* posisi per 31 Desember 2014 sebesar Rp.162.934.388.992.710,- dan Neraca Tahunan *Unaudited* posisi per 31 Desember 2015 sebesar Rp.187.101.869.567.245,- terdapat selisih penambahan sebesar Rp. 24.167.480.574.535,- dengan rincian sebagai berikut :

- (a) Uraian perbandingan posisi neraca per unit kerja Eselon I sebagaimana berikut :

Tabel 3.53 Perbandingan posisi neraca per unit kerja Eselon I

No.	Unit Kerja	Neraca Tahunan <i>Audited</i> 31 Desember 2014 (Rp)	Neraca Tahunan <i>Unaudited</i> 31 Desember 2015 (Rp)	Perubahan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4-3)
1.	Sekretariat Jenderal	1.005.302.226.870	1.149.132.173.251	143.829.946.381
2.	Inspektorat Jenderal	14.345.161.612	11.910.431.156	(2.434.730.456)
3.	Ditjen Perhubungan Darat	11.281.996.035.315	13.450.223.671.955	2.168.227.636.640
4.	Ditjen Perhubungan Laut	31.403.073.249.337	38.792.116.978.452	7.389.043.729.115
5.	Ditjen Perhubungan Udara	39.256.259.699.289	44.699.719.912.557	5.443.460.213.268
6.	Ditjen Perkeretaapian	70.865.034.738.024	78.755.637.627.327	7.890.602.889.303
7.	Badan Litbang Perhubungan	484.028.041.475	480.871.334.930	(3.156.706.545)
8.	Badan Pengembangan SDM	8.624.349.840.788	9.762.257.437.617	1.137.907.596.829
T O T A L		162.934.388.992.710	187.101.869.567.245	24.167.480.574.535

Perbandingan Nilai BMN pada Neraca *Unaudited* 2015 per unit kerja Eselon I :

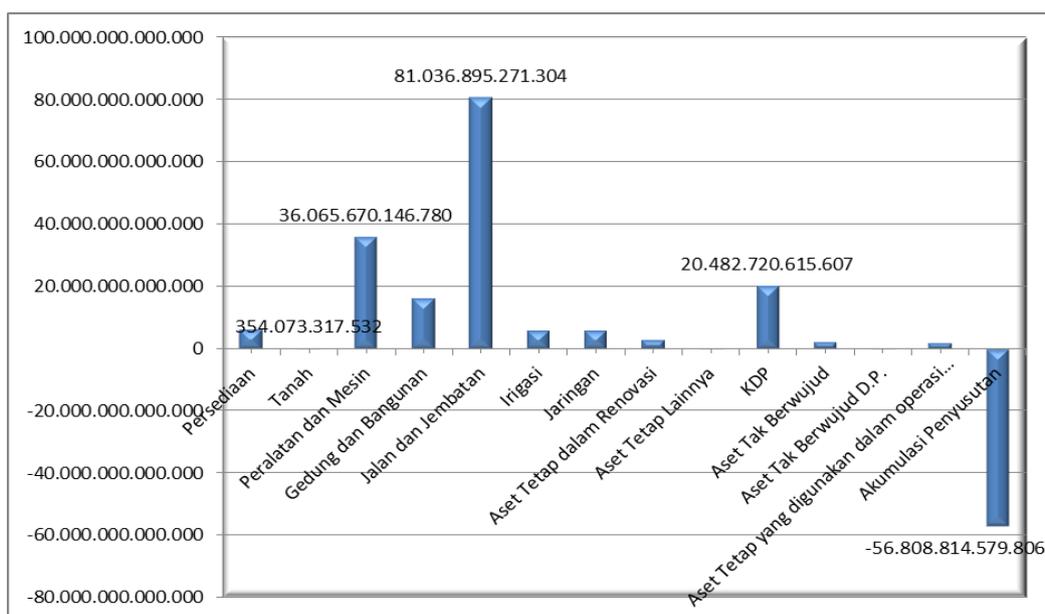


(b) Uraian per akun pada Neraca *Audited* per 31 Desember 2014 dan Neraca *Unaudited* per 31 Desember 2015 Kementerian Perhubungan terdiri dari :

Tabel 3.54 Perbandingan Nilai BMN per akun pada Neraca *Unaudited* TA. 2015

No.	Akun Neraca	Neraca <i>Audited</i> 31 Desember 2014 (Rp.)	Neraca <i>Unaudited</i> 31 Desember 2015 (Rp.)	Perubahan (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4-3)
1.	Persediaan	862.844.171.724	6.466.720.371.158	5.603.876.199.434
2.	Tanah	60.812.300.827.487	63.354.073.317.532	2.541.772.490.045
3.	Peralatan dan Mesin	28.870.264.095.122	36.065.670.146.780	7.195.406.051.658
4.	Gedung dan Bangunan	13.372.781.277.560	16.548.831.267.069	3.176.049.989.509
5.	Jalan dan Jembatan	65.584.508.299.130	81.036.895.271.304	15.452.386.972.174
6.	Irigasi	4.995.408.823.838	6.115.133.544.141	1.119.724.720.303
7.	Jaringan	5.732.060.691.007	5.992.338.991.495	260.278.300.488
8.	Aset Tetap dalam Renovasi	2.476.149.144.638	3.023.184.106.553	547.034.961.915
9.	Aset Tetap Lainnya	469.137.551.578	499.948.948.122	30.811.396.544
10.	KDP	25.000.074.482.283	20.482.720.615.607	(4.517.353.866.676)
11.	Aset Tak Berwujud	2.681.353.514.194	2.262.887.026.513	(418.466.487.681)
12.	Aset Tak Berwujud D.P.	15.907.507.700	35.353.587.440	19.446.079.740
13.	Aset Tetap yang digunakan dalam operasi pemerintah	1.557.986.613.917	2.026.926.953.337	468.940.339.420
14.	Akumulasi Penyusutan	(49.496.388.007.468)	(56.808.814.579.806)	(7.312.426.572.338)
T O T A L		162.934.388.992.710	187.101.869.567.245	24.167.480.574.535

Perbandingan Nilai BMN per akun pada Neraca *Unaudited* TA. 2015 :



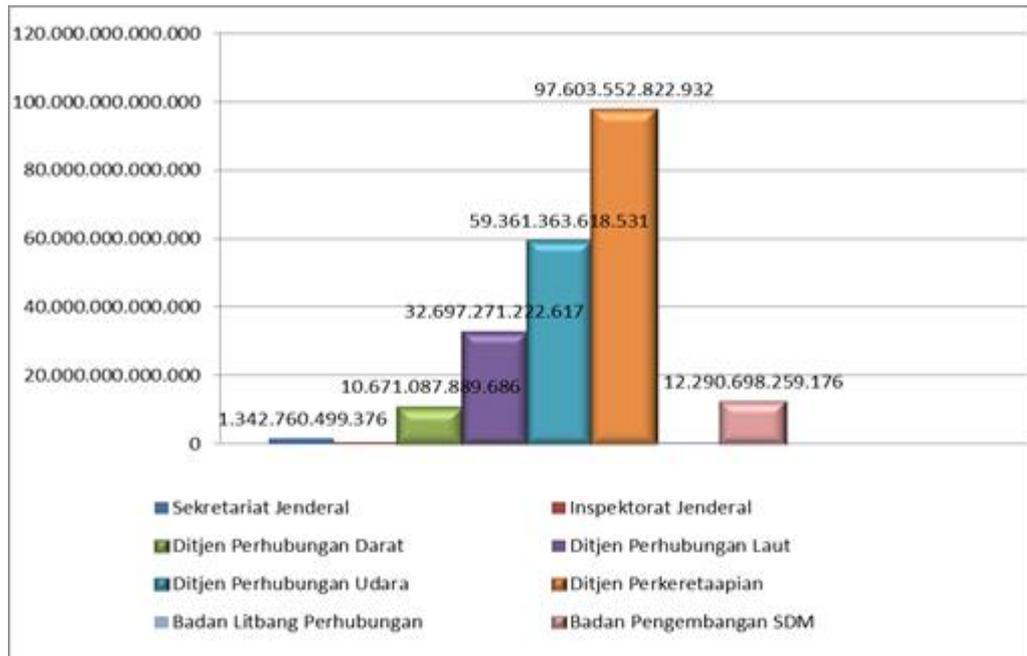
(2) Perbandingan Saldo pada Barang Milik Negara Intrakomptabel

- (a) Perbandingan Laporan Barang Milik Negara Intrakomptabel *Audited* per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 183.716.242.874.364,- dan Laporan Barang Milik Negara Intrakomptabel *Unaudited* per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 214.047.813.277.739,- terdapat selisih penambahan sebesar Rp. 30.331.570.403.375,- dengan uraian per unit kerja Eselon I terdiri dari:

Tabel 3.55 Perbandingan Laporan Barang Milik Negara Intrakomptabel *Audited dan Unaudited*

No.	Unit Kerja	Laporan Intrakomptabel <i>Audited</i> 31 Desember 2014 (Rp.)	Laporan Intrakomptabel <i>Unaudited</i> 31 Desember 2015 (Rp.)	Perubahan (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4-3)
1.	Sekretariat Jenderal	1.163.409.306.244	1.342.760.499.376	179.351.193.132
2.	Inspektorat Jenderal	27.305.809.501	24.577.739.976	(2.728.069.525)
3.	Ditjen Perhubungan Darat	9.130.816.752.591	10.671.087.889.686	1.540.271.137.095
4.	Ditjen Perhubungan Laut	19.600.648.952.867	32.697.271.222.617	13.096.622.269.750
5.	Ditjen Perhubungan Udara	50.690.188.801.199	59.361.363.618.531	8.671.174.817.332
6.	Ditjen Perkeretaapian	92.125.390.562.286	97.603.552.822.932	5.478.162.260.646
7.	Badan Litbang Perhubungan	63.768.175.868	56.501.225.445	(7.266.950.423)
8.	Badan Pengembangan SDM	10.914.714.513.808	12.290.698.259.176	1.375.983.745.368
T O T A L		183.716.242.874.364	214.047.813.277.739	30.331.570.403.375

Perbandingan Nilai Intrakomptabel *Unaudited* 2015 per unit kerja Eselon I :

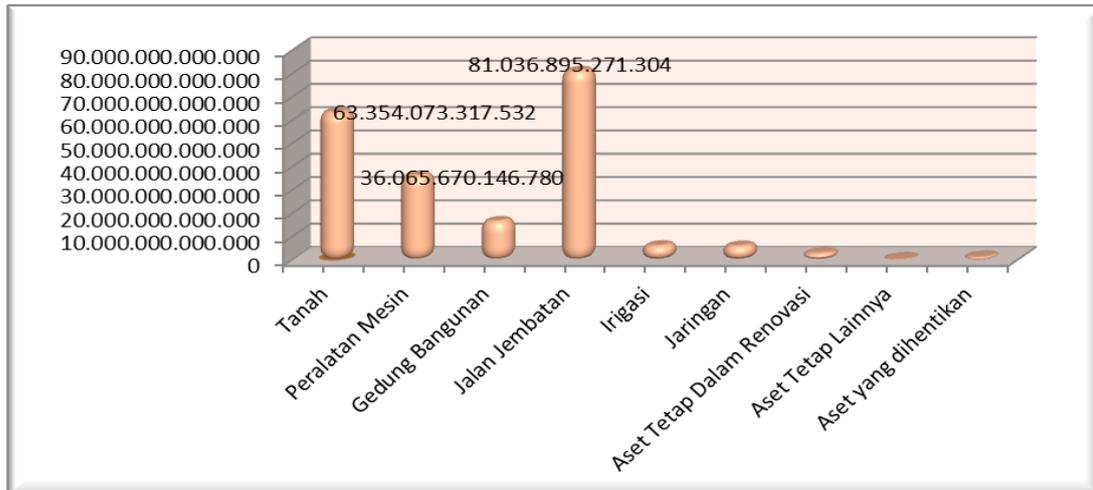


(b) Uraian per akun pada Laporan Intrakomptabel *Audited* per 31 Desember 2014 dan Laporan Intrakomptabel *Unaudited* per 31 Desember 2015 Kementerian Perhubungan terdiri dari:

Tabel 3.56 Perbandingan Nilai BMN per akun pada Laporan Intrakomptabel *Unaudited* TA. 2015

No.	Akun Neraca	Laporan Intrakomptabel <i>Audited</i> 31 Desember 2014 (Rp.)	Laporan Intrakomptabel <i>Unaudited</i> 31 Desember 2015 (Rp.)	Perubahan (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4-3)
1.	Tanah	60.812.300.827.487	63.354.073.317.532	2.541.772.490.045
2.	Peralatan Mesin	28.870.264.095.122	36.065.670.146.780	7.195.406.051.658
3.	Gedung Bangunan	13.372.781.277.560	16.548.831.267.069	3.176.049.989.509
4.	Jalan Jembatan	65.584.508.299.130	81.036.895.271.304	15.452.386.972.174
5.	Irigasi	4.995.408.823.838	6.115.133.544.141	1.119.724.720.303
6.	Jaringan	5.732.060.691.007	5.992.338.991.495	260.278.300.488
7.	Aset Tetap Dalam Renovasi	2.476.149.144.638	3.023.184.106.553	547.034.961.915
8.	Aset Tetap Lainnya	469.137.551.578	499.948.948.122	30.811.396.544
9.	Aset yang dihentikan	1.403.632.164.004	1.411.737.684.743	8.105.520.739
T O T A L		183.716.242.874.364	214.047.813.277.739	30.331.570.403.375

Perbandingan Nilai BMN per akun pada Laporan Intrakomptabel
Unaudited TA. 2015.



c. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan

- 1) Penyusunan kebijakan-kebijakan di bidang keuangan berkaitan dengan penyusunan dan pelaporan keuangan. Hasilnya adalah sebagai berikut :
 - a) Menerbitkan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM. 11 Tahun 2015 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2014 dan telah disampaikan kepada seluruh Eselon I di Lingkungan Kemenhub untuk diteruskan kepada unit kerja di bawah kendalinya sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal Nomor KU. 008/102/5 Phb 2015 tanggal 23 Juli 2015.
 - b) Menyusun *draft* Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- 2) Penyusunan *Action Plan* Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kemenhub, pelaksanaan upaya-upaya untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan-temuan terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan rekomendasi BPK. Hasilnya telah disampaikan kepada BPK dan Kementerian Keuangan.
- 3) Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan. Hasilnya adalah sebagai berikut :

Kementerian Perhubungan menyusun Laporan Keuangan untuk Bagian Anggaran 022 dan Bagian Anggaran Belanja Subsidi (999.07) per triwulan.

 - a) Secara garis besar, Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Bagian Anggaran 022 untuk Tahun 2014 (*Audited*) dan Tahun 2015 (*Unaudited*) adalah sebagai berikut :

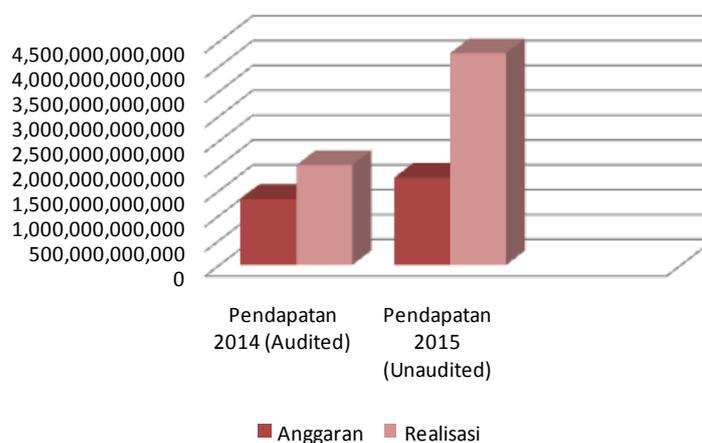
Tabel 3.57 Laporan Realisasi Anggaran

(dalam Rupiah)

Uraian	LK 2014 (Audited)		LK 2015 (Unaudited)	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	1.331.289.046.545	2.013.747.142.168	1.761.800.489.691	4.267.969.747.272
Jumlah Pendapatan	1.331.289.046.545	2.013.747.142.168	1.761.800.489.691	4.267.969.747.272
Belanja Pegawai	2.569.680.819.246	2.360.706.602.572	3.037.846.723.248	2.675.026.878.798
Belanja Barang	10.415.617.150.538	7.387.401.880.936	15.940.285.289.752	12.813.818.122.888
Belanja Modal	24.270.776.463.516	18.958.316.041.721	46.148.047.964.000	31.306.908.092.739
Belanja Modal Non Kas	-	16.345.224.000	0	0
Jumlah Belanja	37.256.074.433.300	28.722.769.749.220	65.126.179.977.000	46.795.753.094.425

Sumber : Biro Keuangan dan Perlengkapan

Grafik 3.8 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Laporan Keuangan Kemhub Bagian Anggaran 022 Tahun 2014 (Audited) dan 2015 (Unaudited)



Grafik 3.9 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Laporan Keuangan Kemenhub Bagian Anggaran 022 Tahun 2014 (*Audited*) dan 2015 (*Unaudited*)

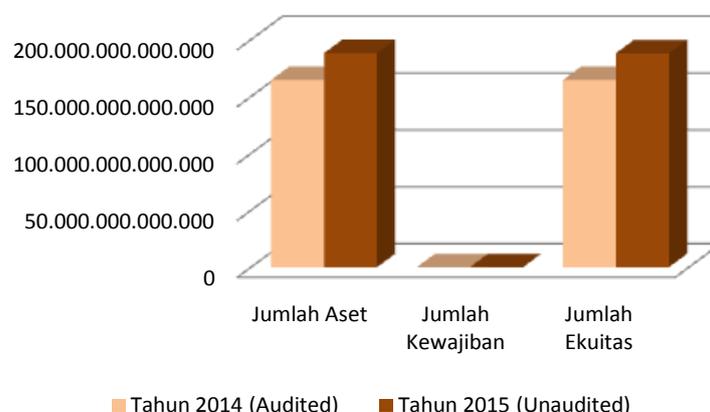


Tabel 3.58 Neraca

URAIAN	TA. 2014 (<i>Audited</i>)	TA. 2015 (<i>Unaudited</i>)
Aset Lancar	4.626.897.066.595	7.116.738.965.781
Aset Tetap	155.704.623.514.500	176.766.613.224.170
Piutang Jangka Panjang	0	0
Aset Lainnya	4.129.903.418.833	4.202.458.044.623
Jumlah Aset	164.461.423.999.928	188.085.810.234.574
Kewajiban Jangka Pendek	54.517.948.084	91.238.411.789
Jumlah Kewajiban	54.517.948.084	91.238.411.789
Ekuitas	164.406.906.051.844	187.994.571.822.785
Jumlah Ekuitas	164.406.906.051.844	187.994.571.822.785
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	164.461.423.999.928	188.085.810.234.574

Sumber : Biro Keuangan dan Perlengkapan

Grafik 3.10 Perbandingan Neraca Laporan Keuangan Kemenhub Bagian Anggaran 022 Tahun 2014 (*Audited*) dan 2015 (*Unaudited*)



Tabel 3.59 Laporan Operasional Kemenhub Tahun 2014 (*Audited*) dan 2015 (*Unaudited*)

URAIAN	31/12/2015 (<i>Unaudited</i>)	31/12/2014 (<i>Audited</i>)
KEGIATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN		
PENDAPATAN OPERASIONAL		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	4.208.249.217.451	-
Pendapatan Hibah	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	4.208.249.217.451	-
BEBAN OPERASIONAL		
Beban Pegawai	2.833.611.215.941	-
Beban Persediaan	464.256.271.424	-
Beban Barang dan Jasa	4.141.089.028.555	-
Beban Pemeliharaan	3.894.532.795.381	-
Beban Perjalanan Dinas	844.260.593.850	-
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	2.051.510.932.536	-
Beban Bantuan Sosial	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.799.547.231.277	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	13.924.241.641	-
Beban Lain-lain	0	-
JUMLAH BEBAN	22.042.732.310.605	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(17.834.483.093.154)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1.734.384.550	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	395.477.744.684	-
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	(393.743.360.134)	-
SURPLUS/(DEFISIT)KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	311.519.977.337	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	489.640.350	-
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) KEG. NON OPERASIONAL LAINNYA	311.030.336.987	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(82.713.023.147)	-
POS LUAR BIASA		
Beban Luar Biasa	0	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	0	-
SURPLUS/DEFISIT LO	(17.917.196.116.301)	-

Tabel 3.60 Laporan Perubahan Ekuitas Kemenhub Tahun 2014 (*Audited*) dan 2015 (*Unaudited*)

URAIAN	31-Des-15	31-Des-14
EKUITAS AWAL	164.406.906.051.844	-
SURPLUS/DEFISIT LO	(17.917.196.116.301)	-
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN	(2.304.072.101.262)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	(2.304.072.101.262)	-
PENYESUAIAN NILAI KEWAJIBAN	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	4.358.529.163.996	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	(290.607.742.804)	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	19.116.267.841	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	2.700.906.073.912	-
LAIN-LAIN	1.929.114.565.047	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	39.450.404.824.508	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	23.587.665.770.941	-
EKUITAS AKHIR	187.994.571.822.785	-

Laporan Keuangan Kemenhub Bagian Anggaran 022 Tahun 2013 telah diaudit oleh BPK RI dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas sesuai dengan Surat Anggota BPK RI Nomor : 41/S/III-XIV/05/2015 tanggal 26 Mei 2015 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2014.

- b) Laporan Keuangan Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) Tahun 2014 (*Audited*) dan Tahun 2015 (*Unaudited*) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.61 Laporan Realisasi Anggaran

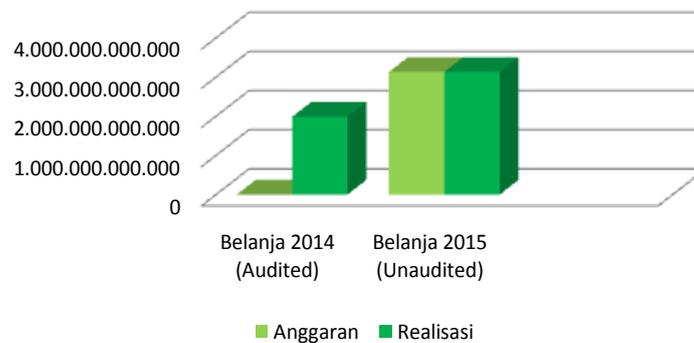
Uraian	LK 2014 (<i>Audited</i>)		LK 2015 (<i>Unaudited</i>)	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	0	22.013.497.602	0	153.933.663.298
Jumlah Pendapatan	0	22.013.497.602	0	153.933.663.298
Belanja Subsidi	1.431.307.428.000	1.985.122.142.554	3.130.952.020.000	3.130.853.487.618
Jumlah Belanja	1.431.307.428.000	1.985.122.142.554	3.130.952.020.000	3.130.853.487.618

Sumber : Biro Keuangan dan Perlengkapan

Grafik 3.11 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Laporan Keuangan Kemenhub Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA. 999.07) Tahun 2014 (*Audited*) dan 2015 (*Unaudited*)



Grafik 3.12 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Laporan Keuangan Kemenhub Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA. 999.07) Tahun 2014 (*Audited*) dan 2015 (*Unaudited*)



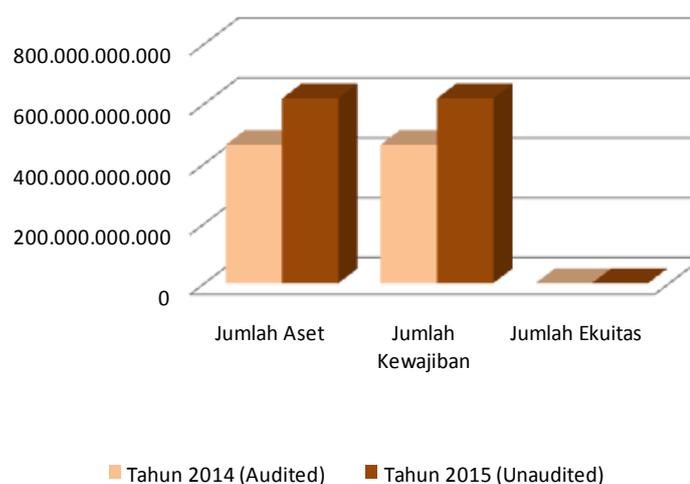
Tabel 3.62 Perbandingan Neraca Laporan Keuangan Kemenhub Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA. 999.07) Tahun 2014 (*Audited*) dan 2015 (*Unaudited*)

URAIAN	TA. 2014 (<i>Audited</i>)	TA. 2015 (<i>Unaudited</i>)
Aset Lancar	23.025.442.648	0
Aset Tetap	0	0
Aset Lainnya	594.691.112.797	462.630.866.285
Jumlah Aset	617.716.555.445	462.630.866.285
Kewajiban Jangka Pendek	617.716.555.445	462.630.866.285

URAIAN	TA. 2014 (<i>Audited</i>)	TA. 2015 (<i>Unaudited</i>)
Jumlah Kewajiban	617.716.555.445	462.630.866.285
Ekuitas	0	0
Jumlah Ekuitas	0	0
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	617.716.555.445	462.630.866.285

Sumber : Biro Keuangan dan Perlengkapan

Grafik 3.13 Perbandingan Neraca Laporan Keuangan Kemenhub Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA. 999.07) Tahun 2014 (*Audited*) dan 2015 (*Unaudited*)



- 4) Melaksanakan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani pelaporan keuangan dalam menghadapi sistem pelaporan keuangan berbasis akrual melalui pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis yaitu :

No.	Nama Bimtek	Pelaksanaan	Peserta	Narasumber
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Dilaksanakan dalam 6 tahap mulai tanggal 14 April s.d. 28 Agustus 2015 di 5 lokasi yaitu Bali, Bogor, Surabaya, Medan dan Makassar. Materi yang disampaikan oleh Narasumber meliputi : a. Gambaran Umum Akuntansi Akrual. b. Proses Bisnis Aplikasi SAIBA. c. Materi Aplikasi SAIBA. d. Kebijakan Akuntansi	Peserta yang diundang untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Perhubungan merupakan operator/pelaksana Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dari 652 (enam ratus lima puluh dua) Kantor/Satker di Lingkungan Kementerian	Narasumber berasal dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan-RI.

		Pemerintahan. e. Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual (LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK).	Perhubungan, dimana masing-masing Kantor/Satker diminta untuk mengirimkan 2 (dua) orang peserta.	
2.	Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Akuntansi Piutang di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2015	Bimbingan Teknis dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 15 s.d. 18 Desember 2015. Materi yang disampaikan oleh Narasumber dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan meliputi : a. Sistem pengendalian Internal Piutang di Lingkungan Kemenhub. b. Tata kelola Piutang Negara c. Penatausahaan dan Akuntansi Piutang termasuk penyisihan piutang Tak Tertagih d. Simulasi Penatausahaan piutang.	Peserta yang diundang untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Akuntansi Piutang di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2015 ini merupakan operator/ pelaksana Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dari Kantor/Satker atau Unit Eselon I yang memiliki nilai piutang cukup besar yaitu sebanyak 146 Kantor/Satker.	Narasumber berasal dari : a. Inspektorat Jenderal. b. Biro Keuangan dan Perlengkapan. c. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan d. Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain Kementerian Keuangan.

- 5) Melaksanakan upaya-upaya dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kemenhub. Hasilnya adalah :
- Telah ditindaklanjuti temuan-temuan BPK RI pada periode sebelumnya;
 - Tersusunnya *Grand Design* yang akan dilaksanakan dan dipantau secara memadai dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebagai berikut :

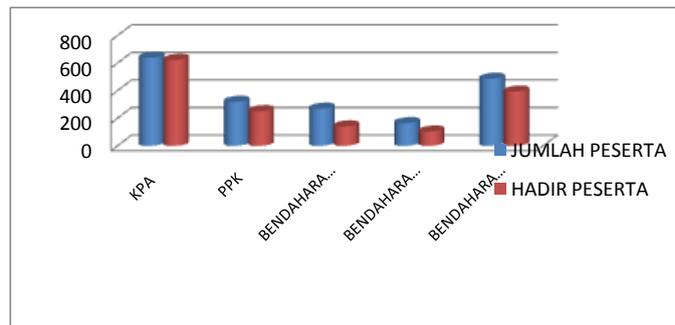


- 6) Pembekalan Pengelola Anggaran TA 2015
 Pada Tahun 2015 Biro Keuangan dan Perlengkapan telah mengadakan Pembekalan Pengelola Anggaran antara lain :

Tabel 3.63 Kegiatan Pembekalan Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2015

KEGIATAN	JUMLAH PESERTA	HADIR PESERTA	WAKTU	TEMPAT
PEMBEKALAN KPA	639	623	JAKARTA, 4 s.d 5 Maret 2015	DHANAPALA
PENGARAHAN PPK	320	252	YOGYAKARTA, 2 s.d 3 Sept 2015	ALANA HOTEL
PENGARAHAN BENDAHARA PENGELUARAN TAHAP I	270	141	YOGYAKARTA, 25 s.d 27 Sept 2015	CAVINTON
PENGARAHAN BENDAHARA PENGELUARAN TAHAP II	165	104	JAKARTA, 2 s/d 4 Desember 2015	SWISS BELL HOTEL
PENGARAHAN BENDAHARA PENERIMAAN	487	394	JAKARTA, 21 s/d 22 Oktober 2015	MERLYNN PARK HOTEL

Grafik 3.14 Kegiatan Pembekalan Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2015



Gambar 3.18 Pembukaan Pembekalan Bendaharawan Pengeluaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2015

d. Pelaksanaan *E-Performance* di Lingkungan Kementerian Perhubungan

E-Performance atau Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja adalah aplikasi yang berfungsi untuk membantu proses pengumpulan dan pengukuran data kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. *E-Performance* dapat diakses melalui jaringan intranet/ internet di alamat website Kementerian Perhubungan, yaitu <http://www.dephub.go.id>.

Pada tanggal 10 Maret 2015, dikeluarkan IM 4 Tahun 2015 terkait Penerapan Teknologi Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dimana Sekretaris Jenderal menugaskan Kepala Biro Perencanaan serta Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan untuk memindahkan seluruh penganggaran dan semua aset Teknologi Informasi yang berkaitan dengan *E-Government* kepada Pusat Data dan Informasi secara bertahap sepanjang tidak menyangkut Teknis Operasional Transportasi.

Beberapa manfaat yang didapat dari penggunaan *E-Performance* :

- 1) Terbentuknya keseragaman format data kinerja sesuai peraturan yang diacu, yaitu PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2010;
- 2) Meningkatnya akurasi hasil proses pengumpulan dan pengukuran data kinerja, karena data diinput dan diukur per periode tertentu (bulanan);
- 3) Informasi dan laporan yang dihasilkan dapat digunakan untuk menyusun LAKIP sehingga proses pembuatannya menjadi lebih mudah;
- 4) Integrasi dengan sistem lain, seperti sistem *e-Monitoring* dan *e-Reporting*.

Aplikasi *E-Performance* nantinya akan digunakan untuk :

- 1) Penyampaian laporan kinerja masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan atas pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan berbasis *web* dalam rangka penyusunan laporan kinerja Kementerian Perhubungan;
- 2) Upaya peningkatan nilai atas laporan kinerja Kementerian Perhubungan;
- 3) Dapat digunakan sebagai embrio dalam pengembangan aplikasi untuk penilaian kinerja individu.

e. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja (PK)

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengharuskan kepada Menteri sampai dengan pejabat Eselon II setiap akhir tahun untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Biro Perencanaan *c.q* Bagian Analisa dan Evaluasi berdasarkan KM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Perhubungan, diamanatkan untuk melaksanakan Penyusunan LAKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2015, LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2015, LAKIP Biro Perencanaan Tahun 2015, Penyusunan Penetapan Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2016, Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2016 dan Penetapan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2016.

Kewajiban penyusunan LAKIP ini pun diperkuat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Di Tahun 2015, KemenPAN dan RB telah melakukan evaluasi dan penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Perhubungan untuk tahun 2014, dengan hasil penilaian **sebesar 68,51 dengan kategori BAIK**. Secara angka Kementerian Perhubungan mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan adanya perubahan bobot komponen penilaian dari MENPAN dan RB sesuai dengan PermenPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mengalami perubahan bobot komponen dan penilaian kriteria yang makin diperketat, di mana lebih melihat hasil nyata (*outcome*) dan penilaian publik terhadap pelayanan yang diberikan. Adapun rincian penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.64 Rincian Komponen Penilaian

NO.	KOMPONEN	TAHUN PENILAIAN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Perencanaan Kinerja	19,47	20,59	24,40	25,47	26,42	20,19
2.	Pengukuran Kinerja	11,75	12,70	13,02	14,33	14,43	16,02
3.	Pelaporan Kinerja	7,88	8,75	10,13	11,11	11,18	10,28
4.	Evaluasi Kinerja	4,83	5,31	5,52	7,68	7,55	7,04
5.	Capaian Kinerja	9,08	9,93	11,98	11,14	12,22	14,98
	Total	53,01	57,29	65,05	69,73	71,80	68,51
	Kategori	CC	CC	B	B	B	B

f. Penyederhanaan perizinan di Lingkungan Kementerian Perhubungan

1) Penyederhanaan Perizinan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut

Telah dilaksanakannya penyederhaan perizinan sebanyak 6 (enam) perizinan antara lain :

- a) *E-licensing* Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL).
- b) *E-licensing* Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS).
- c) Penyederhanaan Birokrasi dalam pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing (IPKA).

- d) Pendelegasian kewenangan penandatanganan dari Eselon II ke Eselon III untuk Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA).
- e) Surat Izin Usaha Perekrutan dan penempatan awak kapal (SIUPPAK) (penyederhanaan penerbitan SIUPPAK semula 14 hari kerja menjadi 7 hari kerja sejak pemberkasaan penerbitan setelah verifikasi dilaksanakan).
- f) Penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB) secara *online*.

2) Penyederhanaan Perizinan di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian

Pada Tahun 2015, Capaian Jumlah penyederhanaan perizinan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian mencapai 100%. Capaian penyederhanaan perizinan sebagaimana tabel di bawah ini :

Uraian	Target	Realisasi	Capaian %
Jumlah penyederhanaan perizinan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	20	20	100

Dalam rangka mewujudkan *good governance* khususnya pada penyederhanaan perizinan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2015, melakukan penyederhanaan perizinan antara lain :

- a) Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum, antara lain ;
 - (1) Penetapan Trase Jalur KA;
 - (2) Penetapan Badan Usaha;
 - (3) Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum;
 - (4) Izin Usaha;
 - (5) Izin Pembangunan;
 - (6) Izin Operasi.
- b) Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum :
 - (1) Izin Usaha;
 - (2) Izin Operasi.
- c) Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus :
 - (1) Persetujuan Prinsip Pembangunan;
 - (2) Penetapan Trase Jalur KA;
 - (3) Izin Pembangunan;
 - (4) Izin Operasi.

g. Keterbukaan Informasi Publik

Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 telah ditetapkan bahwa salah satu Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 adalah Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP), Komisi Informasi melakukan evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik oleh Badan Publik satu kali dalam

setahun; Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Badan Publik dan diumumkan kepada Publik.

Sebagai implementasi dari UU KIP maka Kementerian Perhubungan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1) Layanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi di Kementerian Perhubungan dilakukan secara desentralisasi, untuk lebih meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan pengelolaan informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan sehingga kegiatan Pelayanan Informasi oleh PPID Utama ini dipandang penting untuk dilaksanakan koordinasi dengan setiap unit/satuan kerja (PPID Pelaksana) dalam memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dalam melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan langsung di Lantai I Gedung Cipta, dan Lantai VII Gedung Karya serta layanan melalui media antara lain menggunakan telepon/fax. Telp/Fax: 021 3504631; Email: ppid@dephub.go.id; dan website: <http://www.dephub.go.id/ppid>.

a) Pada Tahun 2015, PPID Kementerian Perhubungan telah melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dengan rincian sebagai berikut :

(1) Menerima 29 permohonan informasi dengan 29 permohonan dikabulkan. Latar belakang pemohon informasi pun beragam diantaranya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM), Mahasiswa, Akademisi dan masyarakat umum. Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk pengawasan kinerja, penelitian.

(2) Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

PPID Utama Kementerian Perhubungan melayani 1 (satu) keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID dan telah diselesaikan 1 (satu) permohonan.

Dokumen ringkasan permohonan dan keberatan informasi publik memuat :

(a) Jumlah permohonan informasi yang diterima;

(b) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;

(c) Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya;

(d) Alasan penolakan permohonan informasi publik.

(3) Kendala Eksternal dan Internal

Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan layanan informasi di Kementerian Perhubungan:

(a) Koordinasi dan sinergi layanan informasi publik antara PPID Pelaksana Sub sektor dengan UPT belum maksimal.

- (b) Masyarakat umum masih belum maksimal memanfaatkan layanan informasi publik karena sudah ada layanan kontak center 151 yang lebih praktis.
- (4) Rekomendasi
- Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi adalah:
- (a) Mengusulkan revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - (b) Mengembangkan sistem pengelola informasi dan dokumentasi dengan melakukan konektivitas pada seluruh PPID di lingkungan Kementerian Perhubungan.



Gambar 3.19 Ruang Layanan Informasi Publik Gedung Cipta lantai 1 dan Gedung Karya lantai 7

- b) Untuk mengakomodir kebutuhan dari PPID Utama dan masing-masing PPID Pelaksana untuk dapat menyelesaikan segala masalah yang melingkupi dalam pelayanan informasi publik terkait sektor transportasi, khususnya dalam mengatasi sengketa informasi publik.
- c) Kementerian Perhubungan membentuk suatu wadah/forum yang bernama Forum PPID Kementerian Perhubungan.

Oleh Karena itu dalam rangka percepatan Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan selaku PPID Pembantu di Kementerian Perhubungan telah menyelenggarakan Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FPPID) 2015 di Surabaya pada tanggal 6 Mei 2015 dengan tema “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baik dan Pelayanan Informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana”. yang dihadiri sekitar 120 orang dari 77 Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dari hasil Forum PPID Kementerian Perhubungan diperoleh Rekomendasi kesimpulan dengan 9 (sembilan) rekomendasi yang harus ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan PPID Kementerian Perhubungan sebagai berikut :

- (1) Pengembangan dan Penyempurnaan *Website* :
Mengajukan usulan penyempurnaan *website* dengan penonjolan Informasi Publik pada halaman *website*, sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dalam sistem satu kali klik saja;
- (2) Pengadaan Ruang Layanan Informasi Publik pada tempat yang strategis yang dapat menjadi etalase keterbukaan Informasi Publik Kementerian Perhubungan;
- (3) Mengisi Rubrik Yang Masih Kosong :
Segera mengisi beberapa Informasi Publik yang masih kosong, antara lain : Perjanjian dengan pihak ketiga tahun 2014, Catatan atas laporan keuangan Tahun 2014 dsb;
- (4) Informasi Publik Terbaru :
Melakukan pembahasan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala seperti DIPA, LAKIP, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, RENSTRA, Laporan SABMN dan Data Statistik, dll;
- (5) Melakukan Pengisian Informasi Pejabat Publik Secara Lengkap :
Memperbaharui Profil pejabat publik di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan dibuat *form* isian data diri singkat beserta foto. Informasi Pejabat Publik diperbaharui segera seiring dengan pelantikan perubahan pejabat (sementara ini hanya diisi dengan nama, alamat kantor, dan nomor kantor serta telepon kantor saja);
- (6) Permintaan Informasi Melalui *Contact Center* 151 :
Eskalasi tiket terkait dengan permintaan informasi publik dari *Contact Center* 151 akan didokumentasikan, dikelola dan diselesaikan dengan mekanisme pelayanan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Mendorong Pembentukan PPID Pelaksana UPT :
Kembali mengingatkan pada seluruh PPID pelaksana UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk membentuk PPID Pelaksana UPT. Dari 537 UPT, yang sudah memiliki penetapan PPID pelaksana UPT sebanyak 112 UPT. Selanjutnya bagi setiap PPID Pelaksana UPT yang sudah dibentuk agar diminta alamat email untuk dibuatkan milis sebagai media komunikasi antar para PPID;
- (8) Penghargaan PPID Pelaksana UPT terbaik :
Saat ini sedang disiapkan mekanisme penilaian untuk penghargaan PPID UPT terbaik yang paling rutin memberikan laporan pelayanan informasi publik secara berkala kepada Sekretaris Jenderal selaku PPID Utama;

(9) Memperbaharui KP 807 Tahun 2013 :

Keputusan Sekretaris Jenderal selaku PPID Utama Kementerian Perhubungan Nomor KP 807 Tahun 2013 tentang Klasifikasi Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan akan segera diperbaharui sesuai dengan mekanisme penetapan klasifikasi informasi disertai hasil uji konsekuensi;



Gambar 3.20 Kegiatan Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2015 di Surabaya

- d) Penghargaan Terhadap PPID Pelaksana
Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan terus diupayakan salah satunya dengan cara memberikan penghargaan kepada PPID UPT yang kooperatif. Penghargaan ini diberikan kepada PPID UPT yang secara konsisten telah menjalankan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional dan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Langkah-Langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
PPID UPT yang mendapatkan penghargaan adalah Kantor Distrik Navigasi Semarang. Penghargaan berupa Sertifikat PPID UPT Kooperatif diserahkan oleh Menteri Perhubungan pada saat Upacara Bendera dalam rangka Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September 2015.



Gambar 3.21 Sertifikat Penghargaan Menteri Perhubungan PPID UPT Navigasi Semarang

- e) Penghargaan Penilaian Mandiri Komisi Informasi Pusat
 Komisi Informasi yang merupakan lembaga mandiri sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang adalah pengawal keterbukaan informasi di Indonesia, yang memiliki tugas utama menyelesaikan sengketa antara masyarakat dengan badan publik terkait dengan informasi publik. Komisi Informasi Pusat memilih metode *self assessment* sebagai mekanisme atau cara mendorong perbaikan Badan Publik dalam mengelola informasi sesuai dengan UU KIP. Pada tahun ini Kementerian Perhubungan telah dinilai oleh Komisi Informasi Pusat melalui *self assement* dan memperoleh Peringkat IV dengan nilai keterbukaan informasi 91,445.



Gambar 3.22 Sertifikat Penghargaan Kementerian Perhubungan meraih peringkat IV Badan Publik Pemerintahan Terbaik dalam Anugerah Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik 2015

- f) Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Informasi pada PPID Pelaksana
 Telah dilaksanakan juga kegiatan pemantauan pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana UPT Kementerian Perhubungan, dilakukan di 4 (empat) lokasi di Jakarta, dan Bekasi (Sekolah Tinggi Transportasi Darat, Kantor Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, Sekolah

Tinggi Ilmu Pelayaran, dan KSOP Pelabuhan Marunda); serta di 2 provinsi yaitu Bangka (KSOP Pelabuhan Pangkal Balam, Muntok dan UPP Toboali); sedangkan di Lombok Nusa Tenggara Barat (KSOP Pelabuhan Lembar, Pemenang dan Labuhan Lombok).



Gambar 3.23 Monitoring Pelayanan Informasi pada PPID Pelaksana UPT di KSOP Muntok



Gambar 3.24 Monitoring Pelayanan Informasi pada PPID Pelaksana UPT di KSOP Marunda



Gambar 3.25 Monitoring Pelayanan Informasi pada PPID Pelaksana UPT di Kantor UPP Kelas III Labuhan Lombok

2) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan

Berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan tahun 2015 telah ditetapkan IKU Biro Komunikasi dan Informasi Publik untuk Kementerian Perhubungan adalah “Keterbukaan Informasi Publik” (KIP). Setiap tahun KIP dinilai oleh Komisi Informasi Pusat. Nilai KIP Tahun 2015 sebesar 91,445 diperoleh dari Penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) berdasarkan amanat Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 37 tentang Evaluasi ayat 1 “ Komisi Informasi dapat melakukan pelaksanaan Informasi Publik oleh Badan Publik 1 kali dalam setahun dan ayat 2 Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat satu disampaikan kepada Badan Publik dan diumumkan kepada Publik”. Penilaian ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan

Badan Publik dalam menjalankan kewajiban mengumumkan Informasi Publik, menyediakan Informasi Publik, melayani permohonan Informasi Publik dan melakukan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan UU KIP. Sehingga dapat terjadi refleksi atas kinerja kelembagaan dan munculnya pemahaman dalam pengelolaan informasi publik.

Pada Tahun 2015 jumlah badan publik yang dinilai berjumlah 386 dengan kategori : Kementerian, Pemerintah Provinsi, Lembaga Negara, lembaga Non Struktural, BUMN, Perguruan Tinggi Negara dan Partai Politik Nasional. Metode penilaiannya adalah Kuesioner Penilaian Mandiri (*Self Assessment Questionnaire*) Keterbukaan Informasi Publik dengan indikator sebagai berikut :

- a) Indikator mengumumkan informasi publik, bobot nilai 25%.
- b) Indikator menyediakan informasi publik, bobot nilai 20%.
- c) Indikator pelayanan Informasi Publik, bobot nilai 25%.
- d) Indikator pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik, bobot nilai 30%.

Setelah pengisian kuesioner penilaian mandiri keterbukaan informasi publik maka dilakukan penilaian melalui tiga tahap yaitu :

- a) Verifikasi situs/ portal dan *soft file* yang menekankan pada informasi berkala yang diatur pada pasal 9 UU KIP;
- b) Verifikasi Lanjutan Acak (VLA) yang menekankan pada data dukung dari jawaban kuesioner dari 20 badan publik dengan nilai tertinggi;
- c) Tahap terakhir adalah tahap visitasi terhadap 10 badan publik dengan nilai tertinggi yang menekankan penilaian pada informasi setiap saat, pelayanan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik yang dilakukan pada awal bulan Desember 2015. Tingkat capaian hanya sebesar 95,3 % dikarenakan pada tahap penilaian akhir pada saat dilakukan visitasi Kemenhub tidak dapat menyediakan informasi dan dokumentasi yang meliputi :
 - (1) Penyusunan Peraturan/ Keputusan Menteri diperlukan waktu cepat, sehingga dokumen dalam bentuk Naskah Akademis, Rancangan Peraturan/ Keputusan Menteri, Berita Acara dan Risalah Rapat tidak tersedia sehingga dokumen yang diminta tidak dapat ditampilkan pada website PPID;
 - (2) Lokasi penyimpanan arsip/dokumen kurang representatif dengan lokasi kantor Kemenhub, sehingga tidak dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan secara cepat dan setiap saat;
 - (3) Belum adanya tampilan tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang di Kementerian, yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk peran dan partisipasi masyarakat;
 - (4) Belum tersedianya hasil penelitian/ kajian yang merupakan informasi publik yang sifatnya terbuka.
 - (5) Adanya penambahan variabel untuk metode penilaian dengan Kuesioner Penilaian Mandiri (*Self Assesement Questionnaire*) tahun 2015 yang **mengalami perubahan** dibandingkan dengan metode kuesioner penilaian mandiri tahun 2014, yaitu adanya tambahan

variabel penilaian untuk tahun 2015 “indikator pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik” yang tidak diantisipasi sebelumnya, seperti matrik sebagai berikut :

No.	URAIAN	BOBOT NILAI KUESIONER PENILAIAN MANDIRI	
		Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Indikator mengumumkan informasi publik	40%	25%
2.	Indikator menyediakan informasi publik	30%	20%
3.	Indikator pelayanan Informasi Publik	30%	25%
4.	Indikator pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik	-	30%

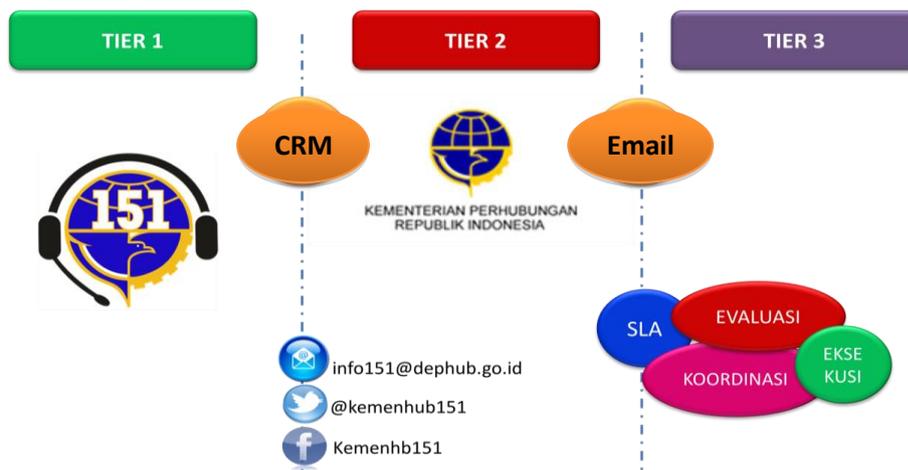
h. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

1) Aplikasi

a) Layanan *Contact Center* 151 Kementerian Perhubungan

Kegiatan Layanan *Contact Center* 151 ini merupakan jenis layanan berbasis TIK terbaru yang dimiliki Kementerian Perhubungan. Layanan ini dimaksudkan untuk menampung semua keluhan, masukan dan permasalahan masyarakat dalam kaitannya dengan pelayanan Kementerian Perhubungan kepada masyarakat di Sektor Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Penunjang.

Layanan *Contact Center* ini beroperasi selama 24 Jam/7 Hari Seminggu yang diawaki oleh operator berpengalaman dalam bidang *Contact Center*. *Contact Center* ini terdiri dari 3 Tingkatan/ Tier; Pada Tier 1 dilayani oleh 20 orang *Agent* dan 1 orang Supervisor, Pada Tier 2 untuk eskalasi Tier 1 dilayani oleh 8 orang *Agent* dan 1 orang Supervisor. Tier 3 untuk eskalasi terakhir dilayani oleh Pejabat terkait langsung dengan permasalahan yang disampaikan secara *On Call*.



Gambar 3.26 Layanan *Contact Center* 151 Kementerian Perhubungan

Kegiatan Layanan *Contact Center* 151 Kementerian Perhubungan ini meliputi:

- (1) Penyediaan Sarana *Call Center*;
 - (a) Lokasi dan Tempat;
 - (b) Perangkat *Call Center*:
 - i. *IP Private Branch exchange* (IPPBX);
 - ii. *Computer Telephony Integration* (CTI);
 - iii. *Interactive Voice Response* (IVR);
 - iv. Komputer Desktop, Telepon dan *Headset*;
 - v. *Announcer, Router* dan *Switch/Hub*
 - vi. *Server IPPBX, Voice Recording* dan Aplikasi CC;
 - vii. *Wallboard* dan *PC Wallboard*.
- (2) Penyediaan Aplikasi *Call Center*;
 - (a) *Automatic Call Distribution* (ACD);
 - (b) *Call Management System* (CMS);
- (3) Penyediaan Sumber Daya Manusia untuk *Call Center*;
- (4) Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Pendukung.



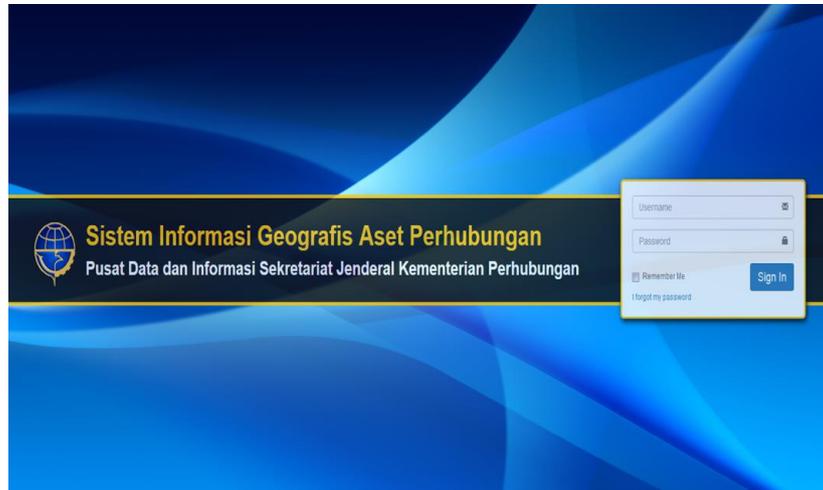
Gambar 3.27 Peluncuran Layanan *Contact Center* 151 Kementerian Perhubungan

b) Pengembangan Sistem Informasi Geografis Aset Perhubungan

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Geografis Aset Perhubungan dilaksanakan dalam rangka memberikan kemudahan dalam memonitoring dan melakukan analisis aset perhubungan yang tersebar diseluruh Indonesia secara spasial, memonitoring kegiatan dikontrakkan mulai dari awal kegiatan sampai dengan serah terima kegiatan melalui integrasi dengan aplikasi *e-Monitoring* dan *reporting*, serta pelaporan kebutuhan kegiatan Hibah maupun Pinjaman Luar Negeri.

Pilihan desain dan teknologi pengembangan Sistem Informasi Geografis Aset Perhubungan setidaknya memenuhi kriteria antara lain : 1. *Spatial-based Approach* (Dikembangkan dengan basis data spasial); 2. *Lite Subsystem of Core System* (Dapat diintegrasikan dengan *E-monitoring* dan *reporting*); 3. *Multi Platform* (Dapat dijalankan di atas pelbagai *platform* sistem informasi); 4. *Seallable* (*PC-Based* dengan *database* yang memiliki skalabilitas yang tinggi); 5. *Simple Use (User's Friendly)*; 6. *Component (object) Based* (Dirancang yang memudahkan untuk

di-reengineering sesuai dengan *business process* pengelolaan aset); 7. *Real-Time Scenarios* (Dikembangkan dengan skenario *real-time (enterprise)*, yang dapat dioperasikan secara *off-line* maupun *on-line*).



Gambar 3.28 Pengembangan Sistem Informasi Geografis Aset Perhubungan

c) Aplikasi Multimedia dalam rangka mendukung pelayanan *Contact Center*

Aplikasi Multimedia pelayanan *Contact Center* dilaksanakan guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, serta mewujudkan keterbukaan informasi publik sehingga perlu adanya media sosialisasi *Call Center* 151 yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat.

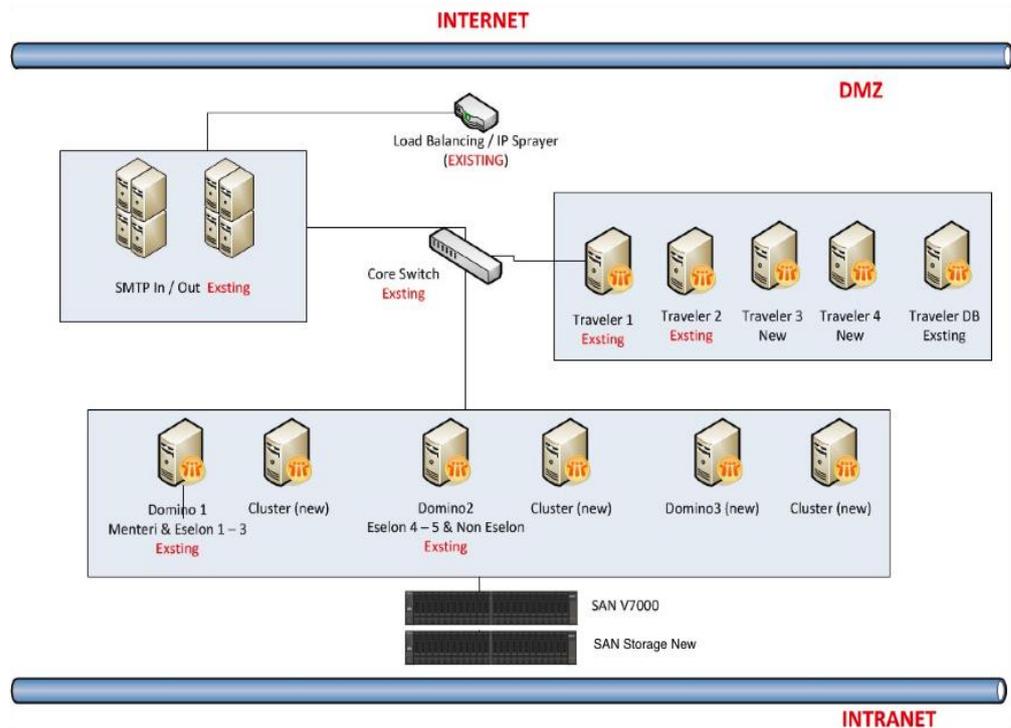
Untuk memudahkan pegawai Internal Kemenhub dalam melayani masyarakat dengan cepat dan mudah, perlu dibuatkan panduan penggunaan *Call Center* yang mudah dipahami dan mudah diakses.

Standard Operating Procedure (SOP) untuk setiap penggunaan aplikasi dibuat secara terperinci dan standard, hal ini penting dilakukan untuk memudahkan dalam Pembuatan Aplikasi Multimedia Dalam Rangka Mendukung Layanan *Contact Center* dan materi sosialisasi berbasis *web* dan multimedia

2) Perangkat Keras dan Infrastruktur Jaringan

a) Peningkatan dan Pengembangan *Email* Dinas Kementerian Perhubungan

Peningkatan jumlah pengguna/*user email* Kementerian Perhubungan yang sangat signifikan dari 3.000 *user* menjadi 31.710 *user* membuat kebutuhan infrastruktur pendukung sistem *email* Kementerian Perhubungan lebih tinggi. Kapasitas server dan penyimpanan perlu ditingkatkan untuk menjamin ketersediaan dan keandalan sistem *email* Kementerian Perhubungan.

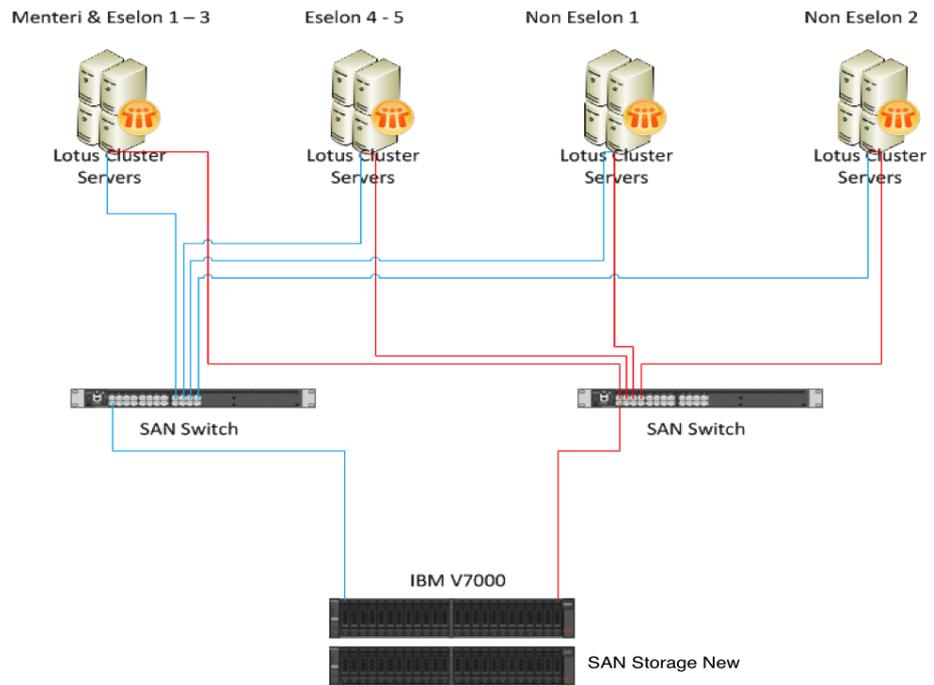


Gambar 3.29 Diagram Rencana Infrastruktur Email Kementerian Perhubungan

Peningkatan dan Pengembangan *Email Dinas* meliputi:

- (1) *Upgrade License Domino Server* dan *Notes Client*;
- (2) Pengembangan Infrastruktur *Email Dinas* Kementerian Perhubungan;
- (3) Peningkatan Kapasitas *Storage*; dan
- (4) Pengadaan *Hardware SAN Switch*.

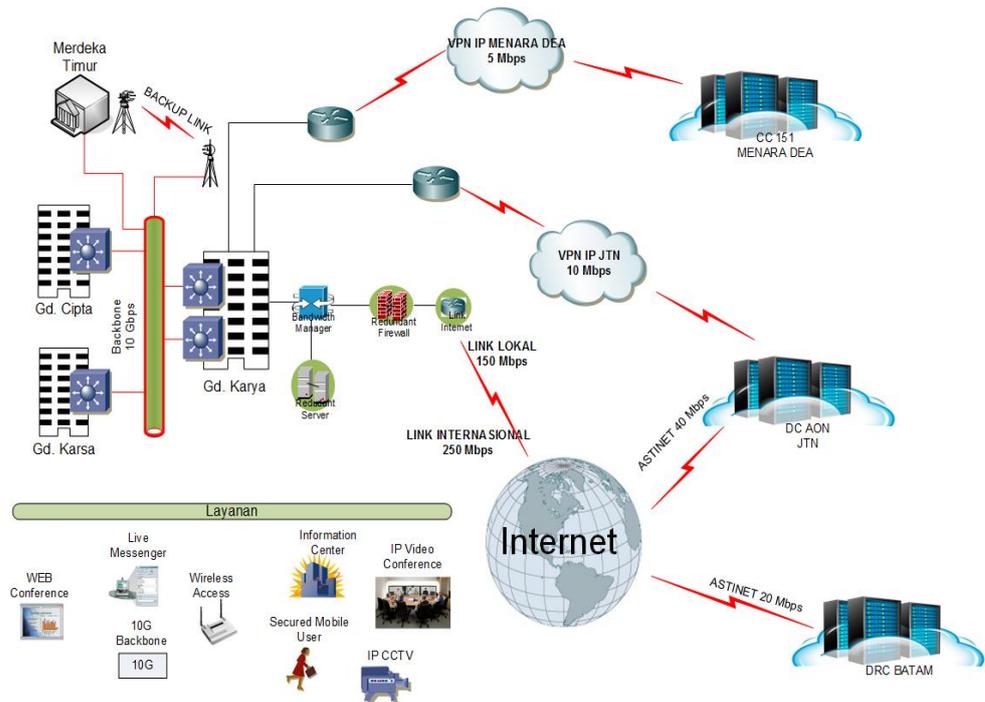
Kegiatan *Upgrading License Domino Server* dan *Notes Client* meliputi: Pengadaan penambahan jumlah lisensi PVU *Domino Server* dan *Client Access*, termasuk *software/system upgrade*; Instalasi dan Konfigurasi Lotus Domino dan *Traveler*; Rekonfigurasi *Load Balancing System* untuk mendukung distribusi beban trafik *email* sesuai konfigurasi sistem *email* baru; Rekonfigurasi *SMTP Gateway cluster* untuk mendukung konfigurasi sistem *email* baru; Rekonfigurasi *DNS cluster* untuk mendukung konfigurasi sistem *email* baru; Rekonfigurasi *Firewall* untuk integrasi konfigurasi sistem; Selama pelaksanaan kegiatan tidak boleh mengakibatkan *system downtime* yang tidak terjadwal. Penjadwalan *system downtime* dapat dilakukan melalui rencana yang matang pada rentang waktu pukul 02.00 – 05.00 WIB; Melakukan *testing* dan *commissioning* sistem terpasang.



Gambar 3.30 Diagram Interkoneksi *Storage Area Network Email* Kementerian Perhubungan

Pengembangan Infrastruktur *Email* Dinas Kementerian Perhubungan dilaksanakan guna meningkatkan kapasitas, keandalan, dan ketersediaan infrastruktur sistem *email* Kementerian Perhubungan antara lain: Pengadaan tambahan 6 buah *server* untuk infrastruktur sistem *email* Kemenhub; Pengadaan tambahan *storage* untuk HA dan peningkatan kapasitas *mailbox* dan *logging* dalam infrastruktur sistem *email* Kemenhub; Instalasi dan pemasangan fisik *server* dan *storage* baru di dalam ruang *data center* Kemenhub; Interkoneksi *server* dan *storage* baru dengan infrastruktur sistem *email*, *storage*, dan jaringan yang ada; Instalasi dan konfigurasi sistem operasi Linux pada *server* baru termasuk optimasi dan penguatan keamanan sistem operasi dan jaringan pada *server* baru; Instalasi dan konfigurasi *storage* baru dengan konfigurasi HA.

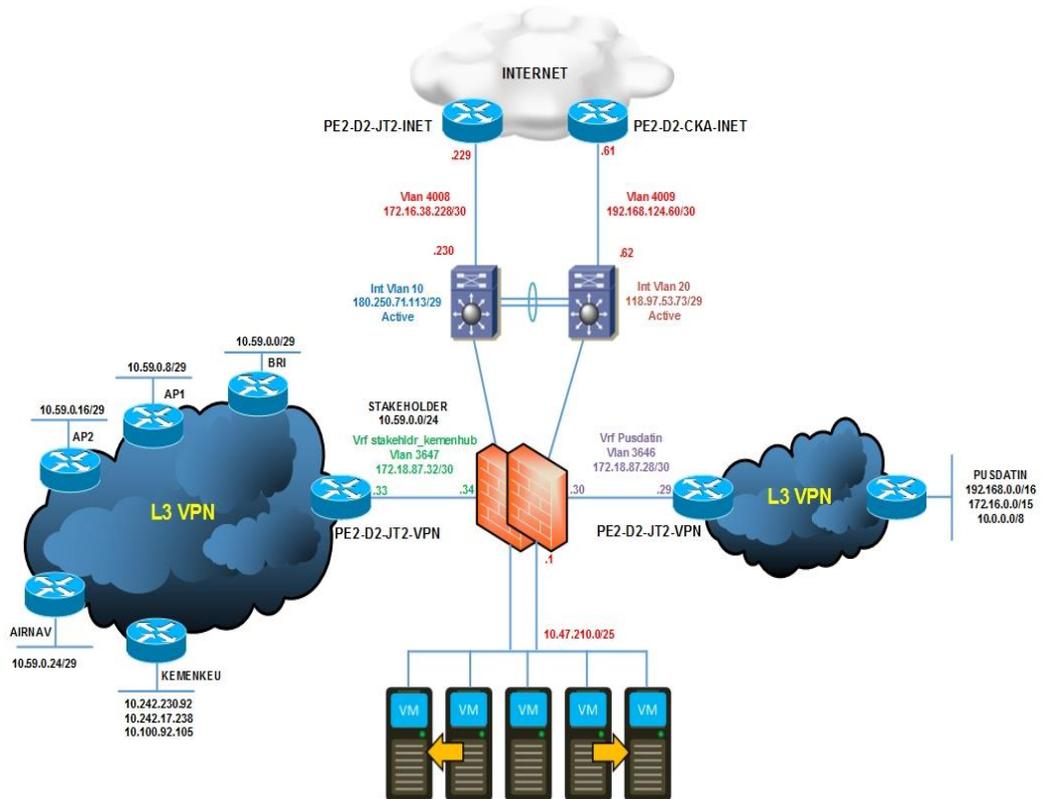
Kegiatan Peningkatan Kapasitas *Storage* antara lain: Pengadaan modul *storwize V7000 storage expansion* dengan kapasitas 10TB RAID5; Instalasi dan pemasangan fisik modul *storage expansion* baru di dalam ruang *data center* Kemenhub; Interkoneksi modul *storage expansion* baru dengan *storage V7000* eksisting infrastruktur sistem *email*, dan jaringan yang ada; Rekonfigurasi *storage* eksisting agar dapat terintegrasi; *Hardening* keamanan *storage*; Instalasi SNMP pada *server* dan *storage* agar dapat dilakukan monitoring dengan sistem monitoring yang ada.



Gambar 3.31 Topologi Jaringan Kementerian Perhubungan

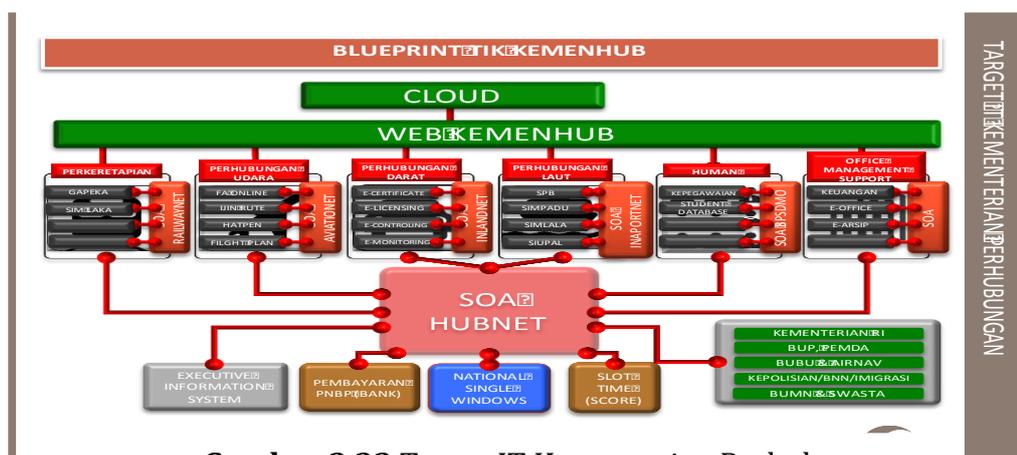
Pengadaan *Hardware SAN Switch* meliputi: Pengadaan lisensi aktivasi *port SAN Switch* untuk meningkatkan kapasitas *port SAN Switch* eksisting; Pengadaan tambahan *FC SFP transceiver SAN Switch* eksisting untuk memenuhi kebutuhan penambahan *storage* dan *server email*; Pengadaan *Firmware Upgrade Renewal*; Pengadaan *Redundant (Failover) Load Balancer* untuk mendukung *High Availability*; Aktivasi dan instalasi *port* tambahan pada masing-masing *SAN Switch* sehingga memiliki 20 *port FC* aktif; Interkoneksi dan Rekonfigurasi *SAN switch zoning* untuk mendukung *high availability* dan *load balancing*; Instalasi dan pemasangan fisik *redundant load balancer* di dalam ruang *data center* Kemenhub; Interkoneksi *redundant load balancer* dengan infrastruktur sistem *email, storage, dan jaringan* yang ada; Instalasi *SNMP SAN Switch dan Load Balancer*.

- b) Kegiatan Pengadaan *Software* berlisensi, *Hardware* pendukung Sistem dan Jaringan Kementerian Perhubungan
 Tujuan dari Pengadaan ini adalah menyediakan infrastruktur *Service Oriented Architecture (SOA)* di Kementerian Perhubungan untuk keperluan integrasi antar aplikasi dari semua Direktorat di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam rangka mendukung *National Single Window* di Indonesia.



Gambar 3.32 Design Kemenhub AON

Manfaat penyediaan infrastruktur *Service Oriented Architecture* (SOA) antara lain : Meningkatkan kemudahan dalam pengembangan service setiap ada perubahan bisnis serta pengelolaan tata layanan secara *nation-wide*; Menyediakan kecepatan pengembangan dalam mengakomodir perubahan; Biaya yang dikeluarkan relatif kecil untuk perubahan atau penambahan *service* baru; Mengurangi *service* yang berulang (*redundant*) serta konsisten dalam penambahan metadata dari setiap *service*; Meningkatkan kapabilitas dalam mengembangkan *service* untuk kebutuhan internal masing-masing unit eselon I dan eselon II yang ada di bawah naungan Kementerian Perhubungan; Dengan kecepatan pengembangan (*time to market / development time*), *open technology*, fleksibel, dan simplifikasi arsitektur TIK, maka sangat diharapkan juga dapat mengurangi biaya investasi dan pemeliharaan jangka panjang.



Gambar 3.33 Target IT Kementerian Perhubungan

3) Inovasi Teknologi Informasi

a) Inovasi Aplikasi

(1) Portal Terpadu Kementerian Perhubungan

Jumlah Pengunjung Portal Kementerian Perhubungan termasuk banyak dengan kunjungan per hari di atas 3.000 orang per hari. Hal ini dapat kita ketahui dari *data log server* maupun dari data *Google Analytics* yang telah disematkan kedalam aplikasi *server*. Kunjungan terhadap portal ini akan melonjak pada momen tertentu seperti ketika ada kecelakaan besar transportasi, hari-hari besar, dan penerimaan CPNS.

Dengan pengembangan *server* digunakan *Load Balancer*, *Failover* dan *Database Replication* yang mendukung terjaminnya ketersediaan situs *web* dan dapat mengatur dan mendistribusikan beban pengunjung kepada beberapa *Cluster* yang ada melalui *Load Balancing*, sehingga akan terwujud portal yang lebih baik dari segi kecepatan, kesetabilan maupun dari segi kualitas data dan informasi (akurat dan terkini).

Melalui Pengembangan Teknologi Portal ini, Kementerian Perhubungan dapat menjaga keberlangsungan konten/ isi dari portal serta dapat memberikan informasi yang lebih cepat dan *realtime* yang dapat diakses dari berbagai macam perangkat keras seperti *PC/Desktop* ataupun *mobile device*. sehingga dapat memberikan layanan informasi yang dapat berjalan secara kontinyu, stabil, cepat dan aman dalam memberikan dukungan tersedianya layanan informasi yang prima di lingkungan Kantor Kementerian Perhubungan.

(2) SISTEM INFORMASI ANGKUTAN DAN SARANA TRANSPORTASI INDONESIA (SIASATI)

Suatu sistem yang berfungsi untuk melakukan pemantauan operasional transportasi yang menitikberatkan kepada pemantauan sarana transportasi tunggal (*single entity transport vehicle*) yang memasuki suatu prasarana transportasi (Terminal, Pelabuhan Laut, Pelabuhan Udara, Pelabuhan Penyeberangan dan Stasiun Keretaapi) atau lokasi tertentu yang ditetapkan sebagai lokasi pemantauan. Sistem ini dilengkapi dengan *traffic counter* untuk penghitungan lalu-lintas (*inbound* maupun *outbound*) pada lokasi yang dikehendaki. Sistem ini menyediakan skema integrasi dengan sistem lain meskipun belum dalam wujud layanan berbasis web (*web services*). Sistem ini secara parsial memberikan layanan berbagi pakai kepada sistem lain dalam bentuk *Extensible Markup Language*.

Apabila sistem ini diterapkan secara berkesinambungan setiap hari maka Kementerian Perhubungan dapat melakukan pemantauan secara “*nearly realtime*” terhadap operasional transportasi dapat melihat data asal-tujuan pergerakan menggunakan sarana transportasi baik penumpang maupun barang.

(3) *E-monitoring* dan *Reporting*

Suatu sistem yang berfungsi untuk melakukan pemantauan realisasi keuangan dan fisik suatu kegiatan dikontrakkan maupun kegiatan

strategis. Sistem ini dilengkapi fitur untuk melakukan input data, pelaporan berjenjang dan pemantauan yang berupa *dashboard* yang mampu memberikan peringatan (*alert*) terhadap kegiatan yang tidak dalam “*track*” nya.

Sistem ini memiliki fasilitas untuk berbagi pakai berupa *web services* yang dapat diakses dengan otorisasi tertentu. Dengan adanya sistem ini maka seluruh kemajuan kegiatan dapat dipantau dan kegiatan yang tidak dalam “*track*” dapat diantisipasi penanganannya lebih dini. Dengan adanya sistem ini, proses pelaporan menjadi lebih mudah dan cepat.

b) Penghargaan

Penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa (LKPP) pada *National Procurement Award 2015*, Kategori Komitmen Pencapaian INPRES Nomor 7 Tahun 2015 pada “Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015”.



Gambar 3.34 Penghargaan *National Procurement Award 2015*

5. Kebijakan Transportasi

b. Pelaksanaan, penelaahan, perencanaan dan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang transportasi darat, perkeretaapian, laut, udara dan penunjang

1) Penyusunan Peraturan Pemerintah

TAHUN			
2013	2014	2015	Jumlah
2	1	2	5

a) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2015.

b) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2015

2) Penyusunan Peraturan Menteri Perhubungan:

NO	Peraturan Menteri Yang Ditetapkan	Jumlah
1	Transportasi Darat	18
2	Transportasi Perkeretaapian	15
3	Transportasi Laut	28
4	Transportasi Udara	84
5	Penunjang	49

a) Peraturan Menteri Perhubungan di Bidang Transportasi Darat

No.	Nomor PM	Tentang
1	PM 25 Tahun 2015 03/02/2015	Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
2	PM 26 Tahun 2015 03/02/2015	Standar Keselamatan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan
3	PM 27 Tahun 2015 04/02/2015	Perubahan atas PM No.10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan
4	PM 28 Tahun 2015 04/02/2015	Perubahan atas PM No. 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek
5	PM 29 Tahun 2015 04/02/2015	Perubahan atas PM No. 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek
6	PM 39 Tahun 2015 13/02/2015	Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan
7	PM 40 Tahun 2015 13-2-2015	Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan
8	PM 63 Tahun 2015 24-3-2015	Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi
9	PM 70 Tahun 2015 02/04/2015	Petunjuk Pelaksanaan Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

No.	Nomor PM	Tentang
10	PM 75 Tahun 2015 15/04/2015	Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalulintas
11	PM 80 Tahun 2015 23/04/2015	Perubahan atas PM 26 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan
12	PM 96 Tahun 2015 03-06-2015	Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu-Lintas
13	PM 111 Tahun 2015 28-07-2015	Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan
14	PM 120 Tahun 2015 18-08-2015	Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Subbidang Keselamatan Transportasi Darat
15	PM 132 Tahun 2015 27-08-2015	Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan
16	PM 133 Tahun 2015 27-08-2015	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
17	PM 134 Tahun 2015 27-08-2015	Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor
18	PM 144 Tahun 2015 25/09/2015	Layanan Uji Tipe Kendaraan Bermotor Secara <i>Online</i>

b) Peraturan Menteri Perhubungan di Bidang Perkeretaapian

No	Nomor PM	Tentang
1	PM 17 Tahun 2015 30/01/2015	Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO)
2	PM 24 Tahun 2015 03/02/2015	Standar Keselamatan Perkeretaapian
3	PM 48 Tahun 2015 20-2-2015	Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api
4	PM 72 Tahun 2015 02/04/2015	Petunjuk Pelaksanaan Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
5	PM 105 Tahun 2015 15-07-2015	Revisi atas PM 72 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
6	PM 122 Tahun 2015 18-08-2015	Perubahan atas Permenhub No. PM 62 Tahun 2013 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian
7	PM 142 Tahun 2015 25-09-2015	Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. 51 Tahun 2012 Tentang Subsidi Angkutan Orang Dengan Kereta Api

No	Nomor PM	Tentang
8	PM 148 Tahun 2015 01/10/2015	Standar Pelayanan Pada Akademi Perkeretaapian Indonesia, Madiun
9	PM 155 Tahun 2015 13/10/2015	Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian
10	PM 156 Tahun 2015 13/10/2015	Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara
11	PM 158 Tahun 2015 15/10/2015	Perubahan atas Permenhub No. PM 17 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik
12	PM 175 Tahun 2015 13/11/2015	Standarisasi Spesifikasi Teknis Kereta Kecepatan Normal Dengan Penggerak Sendiri
13	PM.196 Tahun 2015 21/12/2015	Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api
14	PM.197 Tahun 2015 21/12/2015	Komponen Biaya Yang Dapat Diperhitungkan Dalam Penyelenggaraan Angkutan Perintis Perkeretaapian
15	PM.198 Tahun 2015 21/12/2015	Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik

c) Peraturan Menteri Perhubungan di Bidang Transportasi Laut

No	Nomor PM	Tentang
1	PM 10 Tahun 2015 20/01/2015	Perubahan kedua atas Permenhub No. PM 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin menggunakan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri
2	PM 15 Tahun 2015 22/01/2015	Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan
3	PM 20 Tahun 2015 03/02/2015	Standar Keselamatan Pelayaran
4	PM 23 Tahun 2015 03/02/2015	Peningkatan Fungsi Penyelenggaraan Pelabuhan Pada Pelabuhan Yang Diusahakan Secara Komersial

No	Nomor PM	Tentang
5	PM 37 Tahun 2015 13/02/2015	Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut
6	PM 42 Tahun 2015 16-2-2015	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi TA.2015
7	PM 51 Tahun 2015 20-2-2015	Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
8	PM 52 Tahun 2015 03/03/2015	Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Perhubungan Dalam Rangka Pengelolaan BMN di Lingkungan Kemenhub
9	PM 53 Tahun 2015 03/03/2015	Perubahan atas Permen No. 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkat Muat
10	PM 57 Tahun 2015 11/03/2015	Pemanduan dan Penundaan Kapal
11	PM 93 Tahun 2015 19-05-2015	Perubahan kedua atas PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang Dari dan ke Kapal
12	PM 95 Tahun 2015 20-05-2015	Pedoman Penetapan Harga Jual (<i>Charge</i>) Jasa Kepelabuhanan Yang Diusahakan Oleh BUP
13	PM 104 Tahun 2015 23-06-2015	Rencana Induk Pelabuhan Sampit Provinsi Kalimantan Tengah
14	PM 117 Tahun 2015 10-08-2015	Pemindahan Barang Yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (<i>Long stay</i>) di Pelabuhan Tj. Priok
15	PM 119 Tahun 2015 14-08-2015	Perubahan atas Permenhub No. PM 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut
16	PM 121 Tahun 2015 18-08-2015	Pemberian Kemudahan Bagi Wisatawan Dengan Menggunakan Kapal Pesiar (<i>Cruise</i>) Berbendera Asing
17	PM 130 Tahun 2015 27-08-2015	Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor UPP
18	PM 136 Tahun 2015 28-08-2015	Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengerukan dan Reklamasi
19	PM 154 Tahun 2015 09/10/2015	Pelayanan Surat Persetujuan Syahbandar Secara <i>Online</i>
20	PM 157 Tahun 2015 13/10/2015	Penerapan <i>Inaportnet</i> Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan

No	Nomor PM	Tentang
21	PM 161 Tahun 2015 16/10/2015	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut
22	PM 166 Tahun 2015 28/10/2015	Perubahan atas peraturan Menhub No PM.15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan
23	PM 168 Tahun 2015 30/10/2015	Tarif Angkutan Barang di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik
24	PM 170 Tahun 2015 30/10/2015	Perubahan atas Permenhub No. PM 16 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi
25	PM.191 Tahun 2015 10/12/2015	Perubahan atas Peraturan Menhub No. PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan <i>Inaportnet</i> Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan
26	PM.192 Tahun 2015 10/12/2015	Perubahan atas Peraturan Menhub No. PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan <i>Inaportnet</i> Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan
27	PM.200 Tahun 2015 23/12/2015	Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan No. 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Menyangkut Penumpang Dan Tatanan Barang dan Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri
28	PM.202 Tahun 2015 30/12/2015	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi

d) Peraturan Menteri Perhubungan di Bidang Transportasi Udara

No	Nomor PM	Tentang
1	PM 4 Tahun 2015 6 - 1 - 2015	Penerbitan Sertifikat Operator Pesawat Udara (<i>air operator certificate</i>) Angkutan Udara Niaga
2	PM 5 Tahun 2015 6 - 1 - 2015	Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
3	PM 8 Tahun 2015 15 - 1 - 2015	Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (CASR) part 67 tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan

No	Nomor PM	Tentang
4	PM 9 Tahun 2015 15 - 1 - 2015	Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (CASR) part 174 tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (<i>Aeronautical Meteorologi Information Services</i>)
5	PM 12 Tahun 2015 20 - 1 - 2015	Perizinan Angkutan Udara <i>online</i>
6	PM 13 Tahun 2015 20 - 1 - 2015	Penyelenggaraan Alokasi Waktu Terbang (<i>Slot Time</i>) Bandar Udara
7	PM 14 Tahun 2015 21 - 1 - 2015	Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 830 (CASR) part 830 tentang Pemberitahuan dan Pelaporan Kecelakaan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil Serta Prosedur Investigasi Kecelakaan dan Kejadian Serius Pesawat Udara
8	PM 16 Tahun 2015 22/01/2015	Standar Pelayanan Minimal Pada Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
9	PM 18 Tahun 2015 03/02/2015	Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga
10	PM 21 Tahun 2015 03/02/2015	Standar Keselamatan Penerbangan
11	PM 22 Tahun 2015 03/02/2015	Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandara
12	PM 30 Tahun 2015 09/02/2015	Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Dibidang Penerbangan
13	PM 31 Tahun 2015 12/02/2015	Tarif Dasar, Tarif Dasar Batas Atas dan Tarif Dasar Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum
14	PM 32 Tahun 2015 12/02/2015	Pengamanan Kargo dan Pos Peserta Rantai Pasok Kargo dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara Yang Dilakukan Oleh Badan Usaha Angkutan Udara, <i>Regulated Agent</i> dan <i>Known Consignor</i>
15	PM 33 Tahun 2015 12/02/2015	Pengendalian Jalan Masuk (<i>Access Control</i>) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandara
16	PM 34 Tahun 2015 12/02/2015	Perubahan ketujuh atas Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komersial dan <i>Charter</i>

No	Nomor PM	Tentang
17	PM 35 Tahun 2015 12/02/2015	Penilaian Kinerja Keselamatan Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara (<i>Air Operator Certificate</i>)
18	PM 36 Tahun 2015 12/02/2015	Perubahan atas PM No. 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121
19	PM 38 Tahun 2015 13/02/2015	Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Dalam Negeri
20	PM 41 Tahun 2015 16-2-2015	Perubahan ketiga atas KM. 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
21	PM 43 Tahun 2015 17-2-2015	Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Bandar Udara Untuk Pelayanan Jasa Kebandar Udara
22	PM 44 Tahun 2015 17-2-2015	Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (<i>Civil Aviation Safety Regulation Part 173</i>) tentang Perancangan Prosedur Penerbangan (<i>Flight Procedur Sign</i>)
23	PM 46 Tahun 2015 18-2-2015	Tindakan Pencegahan Terbang (<i>preventive grounding</i>) Terhadap Penerbang Setelah Terjadinya Insiden Serius dan Kecelakaan
24	PM 49 Tahun 2015 20-2-2015	Perubahan atas Permenhub No. KM 29 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 36 Amandemen I tentang Sertifikasi Standar Kebisingan Jenis Pesawat Terbang Kelaikan Udara
25	PM 50 Tahun 2015 20-2-2015	Perubahan atas PM No. 28 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 34 Amandemen I tentang Persyaratan Bahan Bakar Terbuang dan Emisi Gas Buang Untuk Pesawat Udara Yang Digerakkan Dengan Mesin Turbin
26	PM 55 Tahun 2015 11-3-2015	Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (<i>Civil Aviation Dsafety Regulation Part 139</i>) tentang Bandar Udara
27	PM 56 Tahun 2015 11-3-2015	Kegiatan Pengusahaan Bandar Udara
28	PM 59 Tahun 2015 17-3-2015	Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan
29	PM 60 Tahun 2015 17-3-2015	Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 Tentang Pelayanan Informasi Aeronautika

No	Nomor PM	Tentang
30	PM 61 Tahun 2015 18-3-2015	Fasilitas (FAL) Udara
31	PM 62 Tahun 2015 19-3-2015	Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil CASR Bag 27 tentang Standard Kelaikan Udaraan Untuk Helikopter Kategori Normal
32	PM 64 Tahun 2015 26-3-2015	Perubahan atas Peraturan Menhub No. KM 57 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 Tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Untuk Sekolah Penerbangan
33	PM 66 Tahun 2015 01/04/2015	Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Dengan Pesawat Udara Sipil, Asing Ke dan Dari Wilayah Negara Kesatuan RI
34	PM 67 Tahun 2015 01/04/2015	Petunjuk pelaksanaan Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan udara
35	PM 68 Tahun 2015 01/04/2015	Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
36	PM 73 Tahun 2015 06/04/2015	Tarif Angkutan Udara Perintis Tahun 2015
37	PM 76 Tahun 2015 15/04/2015	Perubahan atas Peraturan Menhub No. 27 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 33 Amandemen 1 tentang Standar Kecelakaan Untuk Mesin Pesawat Terbang
38	PM 77 Tahun 2015 22/04/2015	Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara
39	PM 82 Tahun 2015 05/05/2015	Pengecualian Dari Kewajiban Pemenuhan Standard Keselamatan Keamanan dan Pelayanan Penerbangan Sipil
40	PM 83 Tahun 2015 05/05/2015	Perubahan atas Permenhub No. 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandara
41	PM 84 Tahun 2015 05/05/2015	Peraturan Keselamatan Penerbangan Bagian 35 tentang Standar Kelaikudaraan Untuk Baling-Baling Pesawat Terbang

No	Nomor PM	Tentang
42	PM 85 Tahun 2015 05/05/2015	Peraturan Keselamatan Penerbangan Bagian 129 tentang Validasi dan Pengawasan Perusahaan Angkutan Udara Asing dan Operator Asing Yang Mengoperasikan Pesawat Udara Indonesia
43	PM 89 Tahun 2015 08/05/2015	Penanganan Keterlambatan Penerbangan Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia
44	PM 90 Tahun 2015 15/05/2015	Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara Yang Dilayani di Indonesia
45	PM 91 Tahun 2015 15/05/2015	Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kemenhub
46	PM 92 Tahun 2015 18-05-2015	Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional
47	PM 97 Tahun 2015 03-06-2015	Petunjuk Pelaksanaan Kepemilikan dan Penguasaan Pesawat Udara
48	PM 98 Tahun 2015 09-06-2015	Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21 tentang Prosedur Sertifikasi Untuk Produk dan Bagian-Bagiannya
49	PM 103 Tahun 2015 19-06-2015	Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 176 Tahun 2014 tentang Formulasi dan Mekanisme Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan
50	PM 107 Tahun 2015 27-07-2015	Perubahan atas PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Penerbangan Sipil Bagian 121
51	PM 115 Tahun 2015 04-08-2015	Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 tentang Pencarian dan Pertolongan Pada Kecelakaan Pesawat Udara
52	PM 116 Tahun 2015 05-08-2015	Biaya Tambahan Angkutan Udara Perintis Tahun 2015 Akibat Kenaikan <i>Kurs Dollar</i> Amerika Serikat
53	PM 118 Tahun 2015 12-08-2015	<i>Inspector Training System</i> (ITS) Bagi Inspektur Penerbangan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara
54	PM 126 Tahun 2015 18-08-2015	Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
55	PM 127 Tahun 2015 26-08-2015	Program Keamanan Penerbangan Nasional

No	Nomor PM	Tentang
56	PM 128 Tahun 2015 26-08-2015	Pemindahan Pesawat Udara Yang Rusak di Bandara
57	PM 129 Tahun 2015 26-08-2015	Pedoman Penyusunan Perjanjian Tingkat Layanan (<i>Service Level Agreement</i>) Dalam Pemberian Layanan Kepada Pengguna Jasa Bandara
58	PM 131 Tahun 2015 27-08-2015	Peningkatan Pelayanan Keselamatan Navigasi Penerbangan
59	PM 137 Tahun 2015 04-09-2015	Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional
60	PM 138 Tahun 2015 07-09-2015	Perubahan atas Peraturan Menteri No.9 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian Bagian 174
61	PM 140 Tahun 2015 23-09-2015	Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan
62	PM 143 Tahun 2015 25-09-2015	Rencana Induk Bandar Udara H.AS Hang Nadim di Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung
63	PM 145 Tahun 2015 28/09/2015	Standar pelayanan Pada Balai Kesehatan Penerbangan
64	PM 152 Tahun 2015 02/10/2015	Perubahan kedelapan atas Keputusan Menhub No. 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan <i>Charter</i>
65	PM 153 Tahun 2015 02/10/2015	Pengamanan <i>Cargo</i> dan <i>Post</i> Serta Rantai Dasar (<i>Supply Chain</i>) Kargo dan Pos Yang Diangkat Dengan Pesawat Udara
66	PM 159 Tahun 2015 15/10/2015	Perubahan kelima atas Permenhub No. KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
67	PM 160 Tahun 2015 16/10/2015	Peremajaan Armada Pesawat Udara Angkutan Udara Niaga
68	PM 163 Tahun 2015 22/10/2015	Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107 tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak
69	PM 164 Tahun 2015 22/10/2015	Perubahan atas Permenhub No. KM 17 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amandemen 3 tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara
70	PM 165 Tahun 2015 22/10/2015	Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 68 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bandar Udara

No	Nomor PM	Tentang
71	PM 167 Tahun 2015 30/10/2015	Perubahan atas Peraturan Menhub No. PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk Ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandara
72	PM 169 Tahun 2015 30/10/2015	Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 29 tentang Standar Kelas Kendaraan Untuk Helikopter Kategori Transport
73	PM 174 Tahun 2015 12/11/2015	Pembatasan Usia Peralatan Penunjang Pelayanan Deret Pesawat Udara dan Kendaraan Operasional Yang Beroperasi di Sisi Udara
74	PM 177 Tahun 2015 16/11/2015	Perubahan keenam atas Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
75	PM 178 Tahun 2015 16/11/2015	Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara
76	PM 179 Tahun 2015 16/11/2015	Perubahan atas Peraturan Menteri No. PM 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan
77	PM 180 Tahun 2015 18-11-2015	Pengendalian Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia
78	PM 185 Tahun 2015 30-11-2015	Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
79	PM 186 Tahun 2015 30-11-2015	Penunjukan Penyelenggaraan Pengujian Kesehatan Personel Penerbangan
80	PM 187 Tahun 2015 30-11-2015	Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan PM 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan Bandar Udara
81	PM.190 Tahun 2015 08/12/2015	Manajemen Penanganan Operasi Ireguler Bandar Udara
82	PM.193 Tahun 2015 14/12/2015	Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Usaha Bandar Udara Untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan
83	PM.194 Tahun 2015 15/12/2015	Tarif Angkutan Udara Perintis Tahun 2016
84	PM.201 Tahun 2015 28/12/2015	Pengalihan Penyelenggaraan Navigasi Penerbangan

e) Peraturan Menteri Perhubungan di Bidang Penunjang

No	Nomor PM	Tentang
1.	PM 1 Tahun 2015 6 – 1 – 2015	Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
2.	PM 2 Tahun 2015 6 – 1 – 2015	Wewenang, Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan
3.	PM 3 Tahun 2015 6 – 1 – 2015	Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di Bidang Koordinasi Penanaman modal
4.	PM 6 Tahun 2015 7 – 1 – 2015	Pedoman dan Dokumen Standar Pengadaan untuk Pengadaan Jasa Konsultasi Berbentuk Badan Usaha di Lingkungan Kementerian Perhubungan
5.	PM 7 Tahun 2015 14 – 1 – 2015	Pedoman Proses Penyesuaian Pertimbangan Menteri Perhubungan Atas Usulan Tarif Jasa Kepelabuhanan dan Tarif Jasa Kebandarudaraan oleh Badan Usaha
6.	PM 11 Tahun 2015 20 – 1 – 2015	Persyaratan Penyediaan Barang/Jasa di Lingkungan Kemenhub dan Pendampingan Terhadap Proses Pemilihan Penyediaan Barang/Jasa Yang Ditetapkan Pemenangnya Oleh Menteri
7.	PM 19 Tahun 2015 3/2/2015	Pakaian Dinas Harian PNS di Lingkungan Kemenhub
8.	PM 45 Tahun 2015 18-2-2015	Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi
9.	PM 47 Tahun 2015 20-2-2015	Nota Kesepahaman Antara Kementerian Perhubungan dan TNI
10.	PM 54 Tahun 2015 3-3-2015	Standar Pelayanan Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong
11.	PM 58 Tahun 2015 17-3-2015	Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Rencana di Lingkungan Kemenhub
12.	PM 71 Tahun 2015 2/4/2015	Petunjuk Pelaksanaan Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lingkungan BPSDMP
13.	PM 74 Tahun 2015 9/4/2015	Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
14.	PM 78 Tahun 2015 22-04-2015	Perubahan atas PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi

No	Nomor PM	Tentang
15.	PM 79 Tahun 2015 23-04-2015	Persyaratan Penyediaan Barang/Jasa di Lingkungan Kemenhub dan Pendampingan Terhadap Proses Pemilihan Penyediaan Barang/ Jasa Yang Ditetapkan Pemenangnya Oleh Menteri
16.	PM 81 Tahun 2015 05-04-2015	Profil Kompetensi Individu di Lingkungan Kemenhub
17.	PM 86 Tahun 2015 06-06-2015	Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
18.	PM 87 Tahun 2015 06-06-2015	Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
19.	PM 88 Tahun 2015 06-06-2015	Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Surabaya
20.	PM 99 Tahun 2015 18-06-2015	Standar pelayanan pada Balai Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tangerang
21.	PM 100 Tahun 2015 18-06-2015	Standar Pelayanan Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (LP3) Banyuwangi
22.	PM 101 Tahun 2015 18-06-2015	Standar Pelayanan Pada Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Bali
23.	PM 102 Tahun 2015 18-06-2015	Standar Pelayanan Pada Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar
24.	PM 106 Tahun 2015 27-07-2015	Penggunaan Pakaian Dinas Harian Bagi Tenaga Ahli Menteri Perhubungan
25.	PM 108 Tahun 2015 27-07-2015	Standar Pelayanan Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Jayapura
26.	PM 109 Tahun 2015 27-07-2015	Standar Pelayanan Pada Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
27.	PM 110 Tahun 2015 27-07-2015	Standar Pelayanan Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati
28.	PM 112 Tahun 2015 03-08-2015	Standar Pelayanan Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug
29.	PM 113 Tahun 2015 03-08-2015	Standar Pelayanan Pada Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan
30.	PM 114 Tahun 2015 03-08-2015	Pelayanan Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong
31.	PM 123 Tahun 2015 18-08-2015	Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Banyuwangi

No	Nomor PM	Tentang
32.	PM 124 Tahun 2015 18-08-2015	Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran
33.	PM 125 Tahun 2015 18-08-2015	Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi
34.	PM 135 Tahun 2015 28-08-2015	Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja KSOP
35.	PM 139 Tahun 2015 09-09-2015	Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
36.	PM 141 Tahun 2015 23-09-2015	Pakaian Dinas Upacara
37.	PM 146 Tahun 2015 1/10/2015	Perubahan kedua atas Peraturan Menhub No. 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
38.	PM 147 Tahun 2015 1/10/2015	Perubahan kedua atas Peraturan Menhub No. 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di Badan Koordinasi Penanaman Modal
39.	PM 149 Tahun 2015 1/10/2015	Standar Pelayanan Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut, Jakarta
40.	PM 150 Tahun 2015 1/10/2015	Penetapan Standar Pelayanan Pada Sekolah Tinggi Transportasi Darat
41.	PM 151 Tahun 2015 1/10/2015	Standar Pelayanan Pada Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, Curug
42.	PM 162 Tahun 2015 20-10-2015	Standar Pelayanan Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat, Palembang
43.	PM 172 Tahun 2015 4/11/2015	Pedoman Penyusunan Rencana Induk Transportasi (Jabodetabek)
44.	PM 173 Tahun 2015 5/11/2015	Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kemenhub
45.	PM 181 Tahun 2015 20 -11-2015	Perubahan atas Peraturan Menhub No. PM 107 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemenhub.
46.	PM 188 Tahun 2015 30-11-2015	Statuta Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun

No	Nomor PM	Tentang
47.	PM.189 Tahun 2015 4/12/2015	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
48.	PM.195 Tahun 2015 16 -12-2015	Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
49.	PM.199 Tahun 2015 23 -12-2015	Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Kemenhub

Sedangkan untuk Keputusan Menteri Perhubungan yang bersifat penetapan (*Beshiking*) selama tahun 2015 telah diterbitkan 724 Keputusan Menteri.

c. Penyusunan Kesepakatan Bersama/ MoU, Kontrak, Penanganan Penyelesaian Perkara (*to settle a law suit*) dan Pemberian Pertimbangan Hukum (*Legal Opinion*)

- 1) Pembahasan Kesepakatan Bersama (MOU)/ Perjanjian Kerjasama
 - a) Persetujuan Rancangan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dengan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
 - b) Persetujuan Rancangan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dengan POLRI tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan.
 - c) Persetujuan Rancangan Kesepakatan Bersama dan PKS antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Pemkab Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemda Kabupaten Tabanan Provinsi Bali tentang Implementasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS).
 - d) Persetujuan Rancangan Kesepakatan Bersama antara Pusdatin dengan ICIO *Community* tentang Kerjasama Penyelenggaraan Analisa Pemanfaatan Teknologi Informasi di Kementerian Perhubungan.
 - e) Persetujuan Rancangan Kesepakatan Bersama dan PKS antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Pemkab Banyumas dan Pemkot Yogyakarta tentang Implementasi Taman Edukatif Keselamatan Transportasi di Kabupaten Banyumas dan di Kota Yogyakarta.
 - f) Persetujuan Rancangan Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Pemda DIY tentang Pinjam Pakai Barang Milik Daerah.
 - g) Persetujuan Rancangan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dengan Lembaga Administrasi Negara tentang Pengembangan Sistem Administrasi, Manajemen dan Kompetensi Aparatur Negara dibidang Transportasi.

- h) Persetujuan Rancangan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dengan Bank Indonesia tentang Kerjasama dan Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas BI dan Kemenhub RI.
 - i) Persetujuan Rancangan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) tentang Penyediaan dan/ Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - j) Persetujuan Perpanjangan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dengan POLRI tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Pengkajian dan Pengembangan Kelembagaan.
 - k) Persetujuan Rancangan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dengan Universitas Syiah Kuala tentang Pendidikan, Pelatihan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Manajemen di Bidang Perkeretaapian.
 - l) Persetujuan Rancangan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dengan OJK tentang Peningkatan Literasi dan Perluasan Akses Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Masyarakat di Wilayah-Wilayah Terpencil dan Daerah Perbatasan.
 - m) Persetujuan Rancangan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dengan Universitas Sriwijaya tentang Kerjasama di Bidang Perkeretaapian.
 - n) Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan tentang Kerjasama Peminjaman Fasilitas Ruang Kerja di Gedung Lama Milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Untuk Pengembangan Data Centre Kementerian Perhubungan.
 - o) Persetujuan Rancangan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dengan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Rangka Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tipikor di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- 2) Persetujuan Naskah Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Tahun 2015, telah dilakukan pembahasan terhadap Rancangan kontrak Pengadaan Barang/ Jasa yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah), yaitu :
- a) Persetujuan Rancangan Kontrak Perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2015.
 - b) Persetujuan Kontrak Perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2015.
 - c) Persetujuan Kontrak DDT Manggarai 5 (lima) Paket.
 - d) Persetujuan Rancangan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kapal Induk Perambuan 2 (dua) Unit.

- e) Persetujuan Rancangan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kapal Pengamat Perambuan 3 (tiga) Unit.
- f) Persetujuan Rancangan Kontrak Untuk Kegiatan *Procurement of Track Material and Turnout Phase II (1500 km'sp and 500 Units)*.
- g) Persetujuan Rancangan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Pesawat Latih Sayap Tetap *Multiengine* 5 Unit.
- h) Persetujuan Rancangan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Pesawat Latih Sayap Putar *Multiengine* 1 Unit.
- i) Persetujuan Rancangan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Pesawat Latih Sayap Tetap *SingleEngine* 1 Unit.
- j) Persetujuan Addendum Kontrak Nomor 2 Perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2015.
- k) Persetujuan Addendum Kontrak Nomor 4 Perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2015.
- l) Persetujuan Rancangan Kontrak Pengadaan Helicopter Balai Besar Kalibrasi 2 Unit.
- m) Persetujuan Rancangan Kontrak Pengadaan Kapal Latih 1200 GT STIP Marunda.
- n) Persetujuan Rancangan Kontrak Pengadaan Kapal Latih 1200 GT Poltek Pelayaran Surabaya.
- o) Persetujuan Rancangan Kontrak Pengadaan Kapal Latih 1200 GT PIP Makassar.
- p) Persetujuan Rancangan Kontrak Pengadaan Kapal Induk Perambuan 2 Unit.
- q) Persetujuan Rancangan Kontrak Pengadaan Pesawat Udara Bersayap Putar (*Helicopter*) Dilengkapi Dengan FIS 2 Unit, *Multiyears Contract*, 1 Paket.
- r) Persetujuan Rancangan Kontrak Pekerjaan Fisik Paket I Pengembangan Pelabuhan Belawan Fase 1 (Ind-133).
- s) Persetujuan Rancangan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Ka Layang Segmen P23 - P26 Antara Medan – Bandar Khalipah Lintas Medan – Araskabu – Kualanamu (Paket JLKA - 5).
- t) Pekerjaan Pembangunan Jalan Ka Layang Segmen P23 – P30 Stasiun Medan Antara Medan - Bandar Khalipah Lintas Medan – Araskabu - Kualanamu (Paket JLKA-7).
- u) Pekerjaan Penataan Track Eksisting Dan Pemasangan Track Baru Antara Medan - Bandar Khalipah Lintas Medan -Araskabu – Kualanamu (Paket JLKA-24).
- v) Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Stasiun Dan Pemasangan Peralatan Pendukung Pelayanan Di Stasiun Medan (Paket JLKA-25).
- w) Pekerjaan Pembangunan 1 (Satu) Kapal Penyeberangan Penumpang Perintis Ro-Ro 2000 GT Lintas Paciran/Lamongan – Bahaur.
- x) Pekerjaan Pembangunan 1 (Satu) Unit Kapal Kontainer 100 Teus, 12 Paket (Paket A – Paket O).
- y) Persetujuan Rancangan Kontrak Pembangunan Kapal Kelas I Kenavigasian Tahap II Paket A 2 (Dua) Unit.
- z) Persetujuan Rancangan Kontrak Pembangunan Kapal Kelas I

- Kenavigasian Tahap II Paket B 2 (Dua) Unit.
 - aa) Persetujuan Rancangan Kontrak Pembangunan Kapal Kelas I Kenavigasian Tahap II Paket C 1 (Satu) Unit.
 - bb) Persetujuan Rancangan Kontrak Pembangunan Kapal Kelas I Kenavigasian Tahap III Paket A 3 (Tiga) Unit.
 - cc) Persetujuan Rancangan Kontrak Pembangunan Kapal Kelas I Kenavigasian Tahap III Paket B 2 (Dua) Unit.
 - dd) Persetujuan Rancangan Perjanjian Konsesi Antara Direktorat Jenderal Udara dengan PT. Angkasa Pura II.
 - ee) Persetujuan Rancangan Perjanjian Konsesi Antara Direktorat Jenderal Udara dengan PT. Angkasa Pura I.
 - ff) Persetujuan Rancangan Kontrak Perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2016.
 - gg) Persetujuan Rancangan Kontrak Perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Barang Di Laut Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2016.
 - hh) Persetujuan Kontrak Perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2016.
 - ii) Persetujuan Rancangan Perjanjian Konsesi Antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Otoritas Pelabuhan dengan PT. Pelabuhan Indonesia I, II, III, IV (Persero).
- 3) Monitoring Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang di atas 100 Milyar dan Jasa Konsultasi di atas 10 Milyar di Lingkungan Kementerian Perhubungan
- a) Perjanjian Konsesi Kualatanjung antar PT. Pelindo I dengan KSOP Kualatanjung Sumatera Utara.
 - b) Persetujuan Rancangan Perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran Tahun 2015.
- 4) Penanganan Penyelesaian Perkara (*to settle a law suit*):
- a) Perkara Perdata Nomor 950/Pdt.G/2014/PN.SBY, antara Robani Poncowati sebagai Penggugat lawan PT Kereta Api Indonesia, dkk sebagai Para Tergugat antara Robani Poncowati sebagai Penggugat lawan PT Kereta Api Indonesia, dkk sebagai Para Tergugat. (Menhub sebagai Tergugat II) di Pengadilan Negeri Surabaya.
 - b) Perkara Perdata Nomor: 56/Pdt.G/2015/PN.JKT.TIM antara Sdr. Warhadi dkk (Pensiunan Pegawai Perum Damri) lawan Perum Damri dkk, dimana dalam gugatan tersebut Menteri Perhubungan selaku Tergugat III di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
 - c) Perkara Perdata Nomor: 57/Pdt.G/2015/PN.JKT.TIM antara Sdr. Iskandar Putra dkk (Pensiunan Pegawai Perum Damri) lawan Perum Damri dkk, dimana dalam gugatan tersebut Menteri Perhubungan selaku Tergugat III di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
 - d) Perkara Perdata Nomor: 69/Pdt.G/2015/PN.JKT.TIM antara Pegawai Perum Damri lawan Perum Damri dkk, dimana dalam gugatan tersebut

Menteri Perhubungan selaku Tergugat III di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

- e) Gugatan *class action* Perkara Perdata Nomor: 355/PDT.G/2014/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, antara Johannes Hutasoit dkk (Penggugat) Lawan Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* Presiden Republik Indonesia dkk (Tergugat) ; Menteri Perhubungan RI (Tergugat III).
- f) Perkara Perdata Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.BLA antara dr. Soegiarto Soehardjo, Sp.PA lawan Sdr. Anita Kumala Sari dkk (Tergugat), Menteri Perhubungan sebagai Turut Tergugat III di Pengadilan Negeri Blora.
- g) Gugatan Perdata *Citizen Law Suit* Nomor: 349/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST antara Sdr. FX. Arief Poyuono, SE (Penggugat I) dan Sdr. Haris Rusli (Penggugat II) yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Kantor Advokat Habib & Co Lawan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo II) (Tergugat I); Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Tergugat II); Hutchison Port Holdings Limited (Turut Tergugat I); dan PT. Jakarta International Container Terminal (Turut Tergugat II)
- h) Beberapa perusahaan yang bergerak di bidang Kontraktor Umum dan Rental Alat Berat mengajukan uji materiil Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLA).
- i) Sdr. Sigit Sudarmadji mengajukan uji materiil Pasal 118 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- j) Sdr. Capt. Ucok Samuel Bonaparte Hutapea, A.Md, SH, SE, M.Mar, mengajukan uji materiil Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terhadap ketentuan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai Registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XIII/2015 tanggal 21 Mei 2015.
- k) Para Pemohon melalui YLBHI mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945 sesuai Registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XIII/2015.
- l) Sdr. Hi. Subriyanto, pemilik Hotel Mini II Lampung Selatan telah mengajukan gugatan kepada Menteri Perhubungan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan gugatan dimaksud telah terdaftar dalam Perkara Nomor: 67/G/2015/PTUN.JKT.
- m) PT. Sari Indo Prima Line (diwakili oleh Drs. H. Achmad Rowa) telah mengajukan gugatan kepada Menteri Perhubungan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan gugatan dimaksud telah terdaftar dalam Perkara Nomor: 90/G/2015/PTUN-JKT.
- n) Saudara Belki Sampe Angin mengajukan gugatan Tata Usaha Negara kepada Menteri Perhubungan RI yang terdaftar dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 235/G/2015/PTUN.JKT.

- o) Penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah terhadap dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Asrama Dan Kelas Serta Pembangunan Asrama, dan Jalan Asrama Tahap II Tahun 2013 pada Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal.
 - p) Penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tahap III oleh Kementerian Perhubungan di Kabupaten Sorong tahun 2011.
- 5) Pemberian Pertimbangan Hukum (*Legal Opinion*) yang menyangkut tupoksi Kementerian Perhubungan :
- a) Catatan **permohonan** persetujuan izin menempatkan logo perhubungan pada sertifikat DATC yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan dan latihan *Das Aviation Training Centre*.
 - b) Bantuan biaya penyelesaian permasalahan hukum dalam perkara pidana bagi pejabat, mantan pejabat, pegawai dan pensiunan pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - c) Catatan surat Asosiasi Pengelola Terminal Peti Kemas Indonesia (APTPI) perihal permohonan pendaftaran sebagai asosiasi mitra binaan Kementerian Perhubungan RI.
 - d) Catatan surat PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) perihal usulan dana subsidi kapal barang tahun 2015
 - e) Catatan surat *Tokyu - Adhi Joint Operation* perihal keberlakuan jaminan penawaran terhadap pekerjaan konstruksi *double track* jalur selatan Jawa fase III (Kroya - Kutoarjo) JICA Loan No. IP-548.
 - f) Pendapat hukum terkait sewa atas sebagian tanah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan
 - g) Telaah hukum pembahasan permasalahan lahan masyarakat yang terkena sambungan jalan tol Belawan - Medan - Tanjung Morawa (Belmera)
 - h) Telaah surat permohonan penerbitan surat keputusan Menteri Perhubungan terkait penugasan khusus guna proses pengadaan tanah pembangunan bandar udara baru Yogyakarta
 - i) Telaahan hukum rencana penggunaan jasa pengacara internasional terkait penanganan tuntutan ganti rugi pencemaran di Laut Timor
 - j) Telaahan hukum terhadap surat Oei Kim Liong tentang pasal 172 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, yang mengamanatkan kepada Menteri Perhubungan untuk melakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun terhadap besaran ganti kerugian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, 168, dan 170 dan kemudian menetapkannya dengan Peraturan Menteri.

d. **Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan**

Selama tahun 2015 telah didokumentasikan produk hukum Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun peraturan pelaksanaan yang diterbitkan Kementerian Perhubungan maupun oleh instansi lainnya, sebagai berikut:

NO	PRODUK HUKUM	JUMLAH		
		2013	2014	2015
1	Undang-Undang	24	41	0
2	Peraturan Pemerintah	99	102	2
3	Keputusan Presiden	30	52	
4	Peraturan Presiden	110	194	8
5	Instruksi Presiden	9	9	
6	Peraturan Menteri Perhubungan	77	99	202
7	Keputusan Menteri Perhubungan	1389	550	724
8	Instruksi Menteri	7	9	

Penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi telah dilakukan melalui :

- 1) Penyebaran Buletin Informasi Hukum, Penyusunan Himpunan Peraturan Menteri Perhubungan telah diterbitkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu Buku Himpunan Peraturan Menteri Perhubungan Semester II Tahun 2014 dan Buku Himpunan Peraturan Menteri Perhubungan Semester I Tahun 2015 serta media *website* di mana file peraturan perundang-undangan dapat diunduh melalui *website* <http://www.dephub.go.id/> klik *link* regulasi atau *website* <http://jdih.dephub.go.id>.
- 2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Peraturan Perundang-undangan di Bidang Transportasi:

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Lainnya di Bidang Transportasi, telah dilaksanakan pada tanggal 1-3 September 2015 di Yogyakarta, dengan tema: "Optimalisasi Kinerja Melalui Penguatan Regulasi di Bidang Transportasi dalam rangka Mendukung Peningkatan Pelayanan dan Keselamatan Penyelenggaraan Sistem Transportasi Nasional di Lingkungan Kementerian Perhubungan".



Gambar 3.25 Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Peraturan Perundang-undangan di Bidang Transportasi

- 3) Penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang transportasi di beberapa kota antara lain :
- a) Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2015 tentang Perizinan Angkutan Udara *Online*, PM.13 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) Bandar Udara, PM. 21 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Penerbangan, dan PM.22 tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara, pada tanggal 24-27 Februari di Surabaya, Jawa Timur.
 - b) Sosialisasi Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM.1 tahun 2015 tentang Keselamatan Penumpang Moda Transportasi, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran, PM. 23 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Penyelenggaraan Pelabuhan pada Pelabuhan yang Diusahakan Secara Komersial, PM. 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut, PM. 45 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi, PM. 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, tanggal 18-19 Maret 2015 di Makassar.
 - c) Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan, PM.15 tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama lainnya antara Pemerintah dengan BUP di Bidang Kepelabuhanan, PM. 136 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Permenhub Nomor PM. 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi, dilaksanakan pada tanggal 6-9 Oktober 2015 di Manado.
 - d) Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 58 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, PM. 52 Tahun 2015 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau, PM.25 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, PM. 39 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan, PM. 63 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi, PM. 80 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, dilaksanakan pada tanggal 27-30 Oktober 2015 di Samarinda.
 - e) Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, PM. 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, PM. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, PM. 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, PM. 24 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian, PM. 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api, dilaksanakan pada tanggal 11-12 November 2015 di Semarang.
 - f) Sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 21 Mei 2015, di Palembang, Sumatera Selatan, peraturan yang dibahas antara lain :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan, PM 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran, PM 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal dan PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.

- 4) Monitoring dan Laporan Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Kegiatan telah dilaksanakan di 5 (lima) kota yaitu Balikpapan, Denpasar, Palembang, Surabaya, dan Padang.

- 5) Pembinaan dan penilaian jabatan fungsional perancang Peraturan Perundang-Undangan.

Telah dilaksanakan sidang penilaian angka kredit perancang peraturan perundang-undangan di RR Biro Hukum dan KSLN dan telah diselenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama/ Kontrak di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2015 pada bulan November 2015 di Hotel Redtop Jakarta.

- 6) Peningkatan Kerjasama Luar Negeri

- a) Kerjasama Regional

No	Tempat/ Tanggal	Kegiatan
1	Kuala Lumpur, Malaysia 15-19 Februari 2015	<i>BIMP-EAGA Strategic Planning Meeting (SPM)</i>
2	Hanoi, Vietnam 9-10 Maret 2015	Pertemuan <i>3rd TFM</i>
3	Singapura, 17-19 Maret 2015	<i>3rd ASEAN Transport SAR Forum</i>
4	Surabaya, Jawa Timur 20 - 24 April 2015	Rangkaian Pertemuan <i>29th ASEAN Transport Facilitation Working Group (29th TFWG) dan 5th ASEAN CBTP</i>
5	Malaka, Malaysia 11-14 Mei 2015	Rangkaian Pertemuan <i>39th ASEAN Senior Transport Official Meeting (STOM) dan 4th TFM</i>
6	Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam 19-21 Mei 2015	Rangkaian <i>BIMP-EAGA Transport Cluster Working Groups Meeting</i> dan <i>Convergence Meeting Between BIMP-EAGA CIQS dan BIMP-EAGA Transport Working Groups</i>
7	Bangkok, Thailand 15-16 Juni 2015	<i>7th IMT-GT Working Group Meeting on Infrastructure and Transportation (WGIT)</i>
8	Kagoshima, Jepang 27-29 Juli 2015	Pertemuan ke-13 <i>ASEAN-Japan Senior Transport Officials Meeting (13th A-J STOM)</i>

No	Tempat/ Tanggal	Kegiatan
9	Makati City, Filipina 10-14 Agustus 2015	24 th ASEAN Land Transport Working Group (LTWG) Meeting
10	Puerto Princessa, Filipina 8-12 September 2015	3 rd BIMP-EAGA Transport Cluster Meeting
11	Yangon, Myanmar 14 – 18 September 2015	32 nd ASEAN Air Transport Working Group (ATWG)
12	Cebu, Filipina 8-10 Oktober 2015	9 th APEC Transport Ministers Meeting
13	Kuala Lumpur, Malaysia 2-6 November 2015	Rangkaian 40 th ASEAN Senior Transport Officials Meeting (STOM) dan 21 st ASEAN Transport Ministers (ATM) Meeting
14	Puerto Princesa, Filipina 2-3 Desember 2015	10 th BIMP-EAGA Transport Ministers Meeting
15	Korea, 8-11 September 2015	ASEM Symposium on Eurasia Transport & Logistics Network
16	Yangon, Myanmar 14-19 September 2015	Pertemuan 32 nd ASEAN Air Transport Working Group Meeting and Related Meetings

b) Kerjasama Bilateral

No	Tempat/ Tanggal	Kegiatan
1	Gold Coast, Australia 8-11 Juni 2015	Pertemuan ke-16th ITSAP PRG Meeting
2	12 Maret 2015	Pertemuan Joint Working Group ke-2
3	Praha, Republik Ceko 20-26 Februari 2015	Seminar Doing Business in Indonesia
4	Singapura 10-15 Mei 2015	Forum SBLP 2015
5	Langkawi, Malaysia 17-21 Maret 2015	Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition 2015 (LIMA'15),
6	Kazan, Rusia 5-11 April 2015	Pertemuan 1 st Working Group on Transportation and Infrastructure dan SKB ke-10 RI-Rusia
7	21-29 Oktober 2015	Mendampingi Presiden RI dan Menteri Perhubungan Melakukan Kunjungan Kerja ke Amerika Serikat
8	Dili, Timor Leste 3 – 5 November 2015	Pertemuan ke-3 Trilateral Indonesia – Timor Leste – Australia dan Business Forum
9	8-11 Oktober 2015	Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) ke-14 tingkat Menteri Luar Negeri RI – Malaysia

c) Kerjasama Multilateral

No	Tempat/ Tanggal	Kegiatan
1	Kuala Lumpur, Malaysia 10 s/d 11 Maret 2015	Pertemuan <i>The First Regional High-level Meeting of the IMO-NORAD Project</i>
2	Markas besar IMO, london 14-16 april 2015	Pertemuan Sidang ke-102 Komite Hukum <i>International Maritime Organization (IMO)</i>
3	Bangkok, Thailand. 25 - 29 Mei 2015	Sidang Komisi UN-ESCAP ke-71
4	London, Inggris 23 s.d 26 November 2015	Sidang Majelis <i>International Maritime Organization (IMO)</i> ke-29
5	Madrid, Spanyol 14-18 Maret 2015	Seminar Investasi Indonesia : Potensi Bisnis Infrastruktur Tahun 2015-2019
6	Singapura 18-21 Agustus 2015	Pertemuan <i>the 5th Meeting of the Task Force on the Development of Successor ASE Strategic Transport Plan (5th TFM)</i>
7.	Montreal, Kanada 17-20 November 2015	Pertemuan <i>International Civil Aviation Organization (ICAO) World Aviation Forum (IWAf 2015)</i>

d) Penyelenggaraan Pertemuan Internasional di Indonesia

- 1) Penyelenggaraan Pertemuan *ASEAN Transport Facilitation Working Group*, ke-29 di Surabaya, Jawa Timur, 6-10 April 2015
- 2) Penyelenggaraan Pertemuan *ASEAN Transport Facilitation Working Group*, ke-30, *Transit Transport Coordinating Board (TTCB)* ke-7 dan *Expert Group Meeting on ASEAN CBTP* ke 24 di Yogyakarta, 24-28 Agustus 2015.



Gambar 3.36 Penyelenggaraan Pertemuan Internasional di Jakarta

e) Penyusunan Bahan liberalisasi jasa di bidang transportasi dan ASEAN *Economic Community (AEC)*

Jumlah dokumen penyusunan bahan liberalisasi jasa di bidang transportasi dan ASEAN *Economic Community (AEC)*, dengan target 3 (tiga) dokumen

telah tercapai 1 (satu) dokumen bahan liberalisasi jasa di bidang transportasi secara regional, bilateral maupun multilateral (WTO).

- f) Penyusunan Naskah penjelasan ratifikasi perjanjian kerjasama ASEAN sebanyak 5 (lima) dokumen dengan rincian sebagai berikut:
- (1) Ratifikasi *Multilateral Agreement on Air Freight Services (MAFLAFS)* telah selesai diratifikasi dan disahkan dalam bentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pengesahan *ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Air Freight Services* (Persetujuan Multilateral ASEAN mengenai Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Kargo), *Protocol 1 on Unlimited Third, Fourth, and Fifth Freedom Traffic Rights Among Designated Points in ASEAN* (Protokol 1 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga, Keempat, dan Kelima Yang Tidak Terbatas di Antara Titik-Titik Yang Telah Ditunjuk Di ASEAN), dan *Protokol 2 on Umlimited Third, Fourth, and Fifth Freedom Traffic Right Among ll Points With International Airports in ASEAN* (Protokol 2 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga, Keempat, dan Kelima Yang Tidak Terbatas di Antara Semua Titik Dengan Bandar Udara Internasional di ASEAN).
 - (2) Ratifikasi Persetujuan *ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalization of Passenger Air Service/ MAFLPAS* (Persetujuan Multilateral ASEAN tentang Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Penumpang) dan 2 (dua) Protokolnya menghasilkan dokumen naskah penjelasan, naskah terjemahan, dan draft perpres dan telah mendapatkan izin prakarsa serta telah mendapatkan surat selesai Harmonisasi dari Kumham, sedang menunggu diterbitkannya Perpres pengesahan persetujuan dari Sekretariat Kabinet.
 - (3) Ratifikasi Persetujuan *Air Transport Agreement between the Governments of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of The People's Republic of China* (Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok) dan 1 Protokolnya menghasilkan dokumen naskah penjelasan, naskah terjemahan, dan draft perpres dan telah mendapatkan izin prakarsa serta telah mendapatkan surat selesai Harmonisasi dari Kumham, sedang menunggu diterbitkannya Perpres pengesahan persetujuan dari Sekretariat Kabinet.
 - (4) Ratifikasi AFAMT menghasilkan dokumen naskah penjelasan, naskah terjemahan, dan *draft* Perpres dan telah mendapatkan izin prakarsa serta telah mendapatkan surat selesai Harmonisasi dari Kumham, sedang menunggu diterbitkannya Perpres pengesahan persetujuan dari Sekretariat Kabinet.
 - (5) Ratifikasi ACMTA menghasilkan dokumen naskah penjelasan, naskah terjemahan, dan draft perpres dan telah mendapatkan izin prakarsa serta telah menyampaikan kepada Kemlu untuk proses final ratifikasi serta ke Kumham untuk harmonisasi.

6. Transportasi Ramah Lingkungan

a. Transportasi Ramah Lingkungan Sektor Darat

1) Emisi Gas Rumah Kaca

Target pencapaian Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam upaya penurunan Jumlah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor transportasi nasional pada tahun 2015 tercapai dengan prosentase 105,13%. Adapun upaya aksi mitigasi yang telah dilaksanakan guna pencapaian target dimaksud meliputi:

Tabel 3.65 Penurunan Emisi CO₂e Subsektor Transportasi Darat Tahun 2015

No	Aksi Mitigasi	Pencapaian Penurunan Emisi CO ₂ e
1	Mendorong pembinaan dan pengembangan sistem transit - <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT)	0,183052
2	Pembangunan budaya berkendara yang lebih baik	0,001188
3	Pembinaan Pengembangan Prasarana Kendaraan Tidak Bermotor dan Pejalan Kaki (NMT)	0,001736
4	Pemanfaatan Teknologi Lalu-Lintas untuk Kelancaran Lalu-Lintas di Jalan Nasional	0,226705
5	Penerapan Pengendalian Dampak Lalu-Lintas di Jalan Nasional	0,00008732
Total		0,41276832
Target Capaian		0,39

Sumber : Bagian Perencanaan – Setditjen Perhubungan Darat, 2015.

2) Prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan untuk subsektor Perhubungan Darat terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu

- Penerangan Jalan Umum Listrik yang dilengkapi dengan *solar cell* dan sensor cahaya;
- SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran).

3) Proses Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Darat pada tahun 2015 yaitu telah terbit izin lingkungan sebanyak 10 perizinan dan masih dalam proses sebanyak 42 dokumen.

b. Transportasi Ramah Lingkungan Sektor Laut

1) Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Transportasi Nasional yang dapat diturunkan

Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi laut yang dapat diturunkan sebesar 0.00008732 MT CO₂, yang didapat melalui kegiatan pembangunan SBNP yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan pada tahun 2015 yaitu sebanyak 496 unit.

Perhitungan jumlah penurunan emisi didapat dengan cara menghitung akumulasi SBNP tahun 2015 ditambah dengan jumlah tahun-tahun sebelumnya menjadi sejumlah 2.765 Unit, kemudian dikonversi dengan total emisi CO₂, CH₄

dan N2O, sehingga menghasilkan ekuivalensi penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 0,1456 juta ton CO2e.

- 2) Jumlah Prasarana Yang Telah Menerapkan Konsep Ramah Lingkungan
Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan pada tahun 2015 terealisasi sebanyak 496 (empat ratus sembilan puluh enam) unit, dengan rincian sebagai berikut :
- 3) Proses Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Insfrastruktur Transportasi Laut pada tahun 2015 yaitu telah terbit izin lingkungan sebanyak 133 perizinan dan masih dalam proses sebanyak 65 dokumen.

Tabel 3.66 Jumlah Prasarana Yang Telah Menerapkan Konsep Ramah Lingkungan Tahun 2015

NO	KANTOR UPT	JUMLAH PEMBANGUNAN SBNP
1	Distrik Navigasi Belawan	27
2	Distrik Navigasi Sibolga	7
3	Distrik Navigasi Dumai	7
4	Distrik Navigasi Tg. Pinang	23
5	Distrik Navigasi Teluk Bayur	33
6	Distrik Navigasi Semarang	16
7	Distrik Navigasi Cilacap	4
8	Distrik Navigasi Benua	5
9	Distrik Navigasi Kupang	17
10	Distrik Navigasi Banjarmasin	20
11	Distrik Navigasi Pontianak	27
12	Distrik Navigasi Tarakan	1
13	Distrik Navigasi Bitung	13
14	Distrik Navigasi Kendari	20
15	Distrik Navigasi Makssar	4
16	Distrik Navigasi Ambon	29
17	Distrik Navigasi Tual	13
18	Distrik Navigasi Sorong	10
19	Distrik Navigasi Jayapura	27
20	Distrik Navigasi Merauke	13
21	Satker Kenavigasian Kantor Pusat	180
	TOTAL	496

c. Transportasi Ramah Lingkungan Sektor Perkeretaapian

1) Emisi Gas Rumah Kaca

Pada tahun 2015, capaian jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi perkeretaapian yang dapat diturunkan mencapai 273,7%. Capaian penyederhanaan perizinan sebagaimana tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi perkeretaapian yang dapat diturunkan	Juta ton CO2e	0,259	0,709	273,7

Dijelaskan bahwa pencapaian yang melebihi target ini menunjukkan sumbangsih dari subsektor perkeretaapian mencapai 0,709 Juta ton CO2e artinya lebih banyak dari sebagaimana target yang ditetapkan.

Metode perhitungan yang dilakukan untuk penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sub sektor Kereta Api dengan perhitungan yakni sebagai berikut :

i) Rumus

$$\Delta E = E_{KBM} - E_{KA} \dots\dots\dots (1)$$

dimana, ΔE = Indikasi pengurangan emisi kendaraan bermotor oleh KA (kg/thn)

E_{KBM} = Jumlah emisi kendaraan bermotor yang direduksi dengan KA (kg/thn)

E_{KA} = Jumlah emisi yang dihasilkan oleh KA (kg/thn)

$$E_{CO2} = E_{BBM} - e_{CO2} \dots\dots\dots (2)$$

dimana, E_{CO2} = Jumlah emisi CO2 (kg/thn)

E_{BBM} = Jumlah konsumsi BBM (ltr/thn)

e_{CO2} = Tingkat emisi bahan bakar (kg/ltr)

$$K_{BBM} = \ell_{BBM} \times p \times q \dots\dots\dots (3)$$

dimana, K_{BBM} = Jumlah konsumsi BBM (ltr/thn)

ℓ_{BBM} = Konsumsi bahan bakar spesifik (ltr/km/pnp)

p = Panjang rata-rata perjalanan (km)

q = Jumlah penumpang atau barang yang melewati rute tersebut (org/thn)

ii) Koefisien

Tingkat emisi bahan bakar (Sumber: Studi Kebutuhan Energi Sub Sektor Perkeretaapian, 2009)

$$e_{CO2} \text{ Solar} = 2,6664 \text{ kg/ltr}$$

$$e_{CO2} \text{ Premium} = 2,2606 \text{ kg/ltr}$$

$$BBG = 1,4659 \text{ kg/ltr}$$

Konsumsi bahan bakar spesifik angkutan penumpang (Sumber : Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS,2010)

$$\ell_{\text{BBM KA}} = 0,002 \text{ ltr/pnp/km}$$

$$\ell_{\text{BBM BUS}} = 0,0125 \text{ ltr/pnp/km}$$

$$\ell_{\text{BBM Mobil}} = 0,020 \text{ ltr/pnp/km}$$

$$\ell_{\text{BBM Spd Mtr}} = 0,025 \text{ ltr/pnp/km}$$

Konsumsi bahan bakar spesifik angkutan barang (Sumber: Studi Pengembangan Transportasi KA yang efisien dan ramah lingkungan, 2010)

$$\ell_{\text{BBM KA}} = 0,00032 \text{ ltr/ton/km}$$

$$\ell_{\text{BBM TRUCK}} = 0,018 \text{ ltr/ton/km}$$

iii) Asumsi

- 1) Jumlah penumpang atau barang yang melewati rute (q) dihitung dengan mengalikan prediksi jumlah penumpang tahunan dengan *load factor* sebesar 0,7. *Load factor* sebesar 0,7 diperoleh dari Studi Perhitungan *Load Factor* Kereta Api Ekonomi Nasional (2009) yang menggambarkan tingkat okupansi penumpang sebesar 70%;
- 2) Panjang rata-rata perjalanan (p) diperoleh dengan mengalikan panjang lintasan dengan 0,5. Nilai 0,5 diambil dengan mengasumsikan hanya 50% dari jumlah penumpang yang menjalani lintasan program/proyek tersebut;
- 3) Proporsi pengguna kendaraan bermotor yang menggunakan KA (emisi yang direduksi dengan KA) adalah bus 0,2; mobil 0,2; sepeda motor 0,4.

Perhitungan yang dilakukan dalam menganalisa penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor kereta api didapat capaian data sebagai berikut :

- a) Jumlah penumpang atau barang yang melewati rute (q) rata-rata sampai dengan akhir tahun 2015 didapat sebanyak 298.310.000 pnp. hal ini dilihat dari data per tahun (dibandingkan) pada tahun 2014, tahun 2015 terdapat peningkatan jumlah penumpang KA. peningkatan jumlah penumpang KA dipengaruhi oleh bertambahnya KA Perintis dan peningkatan jalur KA;
 - b) Panjang rata-rata perjalanan (p) yang di capai pada tahun 2015 sepanjang 179,33 Km'sp. penambahan jalur KA ini terdiri dari pembangunan jalur KA, Rehabilitasi jalur KA dan Reaktifasi Jalur KA;
 - c) Proporsi pengguna kendaraan bermotor yang menggunakan KA (emisi yang direduksi dengan KA) adalah bus 0,2; mobil 0,2; sepeda motor 0,4 (sesuai dengan hasil kajian sebagaimana dijelaskan pada asumsi tersebut di atas.
- 2) Pengukuran Kebisingan Terhadap Lokomotif Yang Dioperasikan
Ditjen Perkeretaapian pada tahun 2015 telah melaksanakan kegiatan Pengujian Sarana Perkeretaapian, di mana dalam kegiatan tersebut mencakup Aspek

Ramah Lingkungan yaitu Pengujian terhadap Kebisingan Lokomotif. Dengan kegiatan tersebut diharapkan sarana yang akan dioperasikan memenuhi standar kebisingan yang telah ditetapkan sehingga tidak menyebabkan kerusakan pendengaran baik masyarakat di sekitar jalur kereta api maupun pengguna dan awak sarana transportasi perkeretaapian. Berikut ini merupakan data uji Kebisingan lokomotif pada tahun 2015 :

Tabel 3.67 Uji Kebisingan pada Uji Pertama Lokomotif Tahun 2015

No.	Identitas Sarana	Kebisingan (dBA)
1.	CC 206 15 01	78,8
2.	CC 206 15 02	73,6
3.	CC 206 15 03	73,3
4.	CC 206 15 04	77,2
5.	CC 206 15 05	77,1
6.	CC 206 15 06	73,3
7.	CC 206 15 07	81,2
8.	CC 206 15 08	77,2
9.	CC 206 15 09	81,4
10.	CC 206 15 10	73,7
11.	CC 206 15 11	74,3
12.	CC 206 15 12	74,0
13.	CC 206 15 13	73,5
14.	CC 206 15 14	78,2
15.	CC 206 15 15	71,0
16.	CC 206 15 16	78,0
17.	CC 206 15 19	81,0
18.	CC 206 15 20	81,8
19.	CC 206 15 22	76,8
20.	CC 206 15 23	76,5
21.	CC 206 15 25	79,0
22.	CC 206 15 29	82,0
23.	CC 206 15 34	73,2
24.	CC 206 15 35	82,0
25.	CC 206 15 36	75,5
	Rata-rata	76,94

Tabel 3.68 Uji Kebisingan pada Uji Berkala Lokomotif Tahun 2015

No.	Identitas Sarana	Kebisingan (dBA)
1.	CC 201 04 07	75
2.	CC 201 77 23	80
3.	CC 201 78 01	77

No.	Identitas Sarana	Kebisingan (dBA)
4.	CC 201 78 02	75
5.	CC 201 78 05	81
6.	CC 201 83 09	77
7.	CC 201 83 11	75
8.	CC 203 95 04	76,3
9.	CC 203 95 08	79
10.	CC 203 98 10	78
11.	CC 204 03 01	81
12.	CC 206 13 03	82,5
13.	CC 206 13 04	76
14.	CC 206 13 11	81
15.	CC 206 13 47	76
16.	CC 206 13 54	81,2
17.	CC 206 13 73	79
18.	CC 206 13 81	83,5
19.	CC 206 13 84	77
20.	CC 206 13 90	83
21.	CC 206 13 95	84,5
	Rata-rata	78,95

Dari kedua tabel tersebut diatas diperoleh rata-rata kebisingan = $(76,94 + 78,95) / 2 = 77,95$ dBA, hasil tersebut masih dalam batas wajar mengingat ambang batas kebisingan sebesar 85 dBA sesuai PM. 14 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Lokomotif.

- 3) Proses Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian pada tahun 2015 yaitu telah terbit izin lingkungan sebanyak 21 perizinan dan masih dalam proses sebanyak 15 dokumen.

d. Transportasi Ramah Lingkungan Sektor Udara

Pada tahun 2015 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah berhasil menurunkan emisi gas buang CO₂ melalui kegiatan peremajaan pesawat udara, penghijauan, penggunaan energi terbarukan dan melalui kegiatan efisiensi operasional pesawat udara sebagai berikut :

- 1) Penurunan CO₂ tahun 2015 didapatkan sebesar 322.667 Juta ton CO₂ melalui kegiatan “Peremajaan Armada Angkutan Udara”, melalui kegiatan “Penggunaan Energi Terbarukan”, didapatkan penurunan CO₂ sebesar 0,000199 MT CO₂, melalui pembuatan prosedur RNP Approach (RNP 0.3, RNP 0.1) didapatkan sebesar 0.221209 MT CO₂, sedangkan melalui penghijauan lingkungan bandar udara didapatkan sebesar 0.008101 MT CO₂.

Tabel 3.69 Data Penurunan Emisi Karbon CO2 Subsektor Transportasi Udara Tahun 2015

NO.	URAIAN KEGIATAN	NILAI (TON CO2)
A.	TOTAL EMISI YANG DIHASILKAN	8.581.115
B.	PENURUNAN CO2	552.176
1.	<i>Biofuel</i> Pesawat + GSE	0
2.	Penghijauan	8.101
3.	<i>Renewable Energy</i> (Energi terbarukan)	199
4.	<i>Eff Ops</i> + Pwt	0
5.	<i>Reduced Due To PBN</i>	221.209
6.	Peremajaan Pesawat	322.667
TOTAL EMISI AKHIR		8.028.939

Sementara langkah-langkah implementatif yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Ditjen Perhubungan Udara dalam menurunkan emisi gas CO2 di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang telah dilakukan dan direncanakan akan dilakukan kembali secara komprehensif adalah melalui :

- a) Peremajaan pesawat yang dilakukan secara bertahap pada seluruh pesawat udara yang beroperasi.
 - b) Penggunaan *biofuel* dan perbaikan sistem pengoperasian dan perawatan pesawat udara akan mulai dilakukan tahun 2016, diharapkan setiap tahunnya dapat menghemat pemakaian bahan bakar sebesar 3%.
 - c) Penerapan PBN untuk *cruise* (RNP-10) dimulai dari tahun 2015.
 - d) *Eco Airport* dilakukan dengan cara penghijauan di sekitar lokasi bandar udara, mengganti lampu penerangan dengan menggunakan LED/ *solar cell* menggunakan *biofuel* untuk GSE dan menggunakan energi alternatif untuk kebutuhan listrik di bandar udara (pembangkit listrik tenaga surya).
 - e) Berkoordinasi bersama Kementerian ESDM guna mengimplementasikan teknologi pembangkit listrik tenaga surya di lingkungan bandar udara.
- 2) Penerapan prasarana dengan konsep ramah lingkungan, capaian di tahun 2014 (*baseline*) adalah 25 lokasi, sehingga selama periode 5 tahun perencanaan dari tahun 2015 - 2019 secara kumulatif menjadi 50 bandar udara yang mempunyai dokumen pengelolaan lingkungan (sudah memenuhi dokumen AMDAL dan RKL-RPL).
Penerapan konsep ramah lingkungan dihitung berdasarkan kesiapan pemenuhan terhadap dokumen AMDAL dan RKL-RPL di lingkungan bandar udara sekaligus telah menerapkan teknologi ramah lingkungan berupa :
- a) Penggunaan teknologi pembangkit tenaga surya untuk penerangan di lingkungan bandar udara;
 - b) Penerapan konsep *eco airport* melalui penghijauan di lingkungan bandar udara.

- 3) Proses Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Insfrastruktur Transportasi Udara pada tahun 2015 yaitu telah terbit ijin lingkungan sebanyak 79 perijinan dan masih dalam proses sebanyak 123 dokumen.

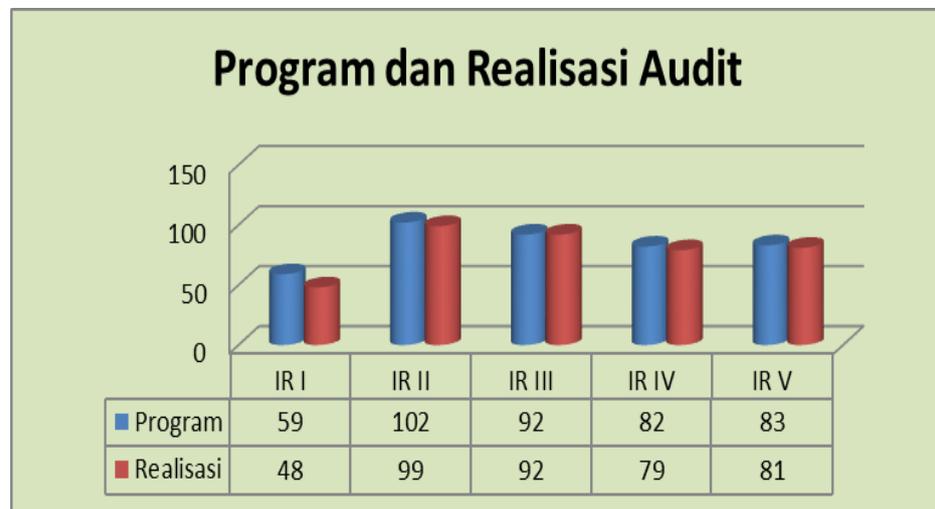
7. Clean Governance

a. Audit

1) Audit Kinerja dan Audit Pengadaan Barang/ Jasa

Pada tahun 2015 Inspektorat Jenderal memprogramkan Audit Kinerja dan Audit Pengadaan Barang/Jasa terhadap 418 Auditi (66,14%) dari total 632 Auditi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam realisasinya teraudit sebanyak 399 Auditi (95,45%).

Grafik 3.15 Rincian Realisasi Pelaksanaan Audit



Sumber : Inspektorat Jenderal

2) Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

ADTT yang dilaksanakan tahun 2015 antara lain meliputi Audit Pengelolaan PNBPN, Audit Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang, Modal, dan Pegawai, Audit Pengadaan Barang dan Jasa, Audit Pemanfaatan Dermaga Pelabuhan, Audit Perencanaan dan Manfaat Pemberian Subsidi Perintis Angkutan Jalan dan Realisasi Operasional Bus Pemadu Moda, serta Angkutan Penyeberangan, Audit Pembayaran Sisa Pekerjaan TA 2014, Audit Pengoperasian Kapal Perintis TA 2014 dan 2015, Audit Pemeriksaan Barang Persediaan, Audit Pengecekan Lapangan dan Perhitungan Ulang atas TL Audit BPK-RI Tahun 2014, Audit Kegiatan verifikasi sisa pekerjaan lanjutan dan perhitungan ulang denda keterlambatan pembangunan, Audit Penyediaan fasilitas umum dan pelayanan di UPT Bandar Udara, Audit Pembangunan Faspel Laut, Audit Pemberian rekomendasi terhadap perusahaan yang ditetapkan dalam Daftar Hitam, Audit Klarifikasi terhadap pengaduan, Audit Pekerjaan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara (IMO) pada Direktorat Jenderal

Perkeretaapian, Audit evaluasi dan klarifikasi penerbangan, serta Audit Prosedur pelaksanaan verifikasi dan persyaratan fasilitas pelayanan penumpang KA dengan skema pembiayaan PSO.

Selain ADTT tersebut di atas, terdapat juga program Audit Khusus, yakni audit yang dilakukan atas lingkup audit yang bersifat khusus terhadap indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang unit kerja atau pegawai, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat, pengembangan dari temuan audit, permintaan tertulis dari unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pelaksanaan Audit Khusus tahun 2015 dilaksanakan sebanyak 13 (tiga belas) kali Audit, yaitu 5 (lima) Audit di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 5 (lima) Audit di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, 2 (dua) Audit di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan 1 (satu) Audit di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

b. **Reviu**

1) **Reviu Laporan Keuangan**

Kegiatan reviu Laporan Keuangan (LK) yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 adalah Pendampingan penyusunan LK Tahunan TA 2014, Reviu LK Tahunan TA.2014, Reviu LK Triwulan I 2015 pada Provinsi Aceh, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Riau, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau, Reviu LK Semester I TA. 2015, Reviu Triwulan III TA. 2015 di Propinsi Maluku Utara, Papua Barat, Kalimantan Selatan, Papua Barat, Kalimantan Barat, dan Kepulauan Riau, serta Reviu LK Tahunan Sementara Tahun 2015 Tingkat UAKPA/B dan UAKPA/B-W pada Propinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.

2) **Reviu Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2014**

Reviu Laporan Kinerja Tahun 2014 Kementerian Perhubungan merupakan penugasan yang diamanahkan kepada Inspektorat Jenderal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Reviu dilaksanakan pada bulan Maret 2015 guna menguji keandalan dan akurasi data/informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja, penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis Kementerian Perhubungan dengan Unit Kerja Eselon I dan II, penyusunan Kertas Kerja Reviu dan Surat Pernyataan Telah Direviu yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal.

3) Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Melalui reviu RKA, Inspektorat Jenderal memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) bahwa RKA di lingkungan Kementerian Perhubungan telah disusun berdasarkan Pagu Anggaran Kementerian Perhubungan dan/atau Alokasi Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Rencana Kerja (Renja) Kementerian Perhubungan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN, standar biaya, dan kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran. Reviu RKA dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada saat penyusunan Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran, yaitu bulan Juli s.d. Oktober 2015.

4) Reviu Revisi Anggaran

Reviu revisi anggaran yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal pada tahun 2015 antara lain meliputi Revisi DIPA Penggabungan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Revisi Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian, Revisi Usulan Penghapusan Catatan Halaman IV DIPA, Revisi Penghematan dan Pemanfaatan Anggaran Perjalanan Dinas/Meeting Konsinyering serta Alokasi Anggaran, Revisi perubahan anggaran belanja modal dan belanja pegawai, Revisi Anggaran, Revisi DIPA, Revisi Anggaran PNBPN, Revisi/Realokasi Anggaran dalam rangka percepatan anggaran, Revisi Usulan Pembukaan Blokir DIPA, Revisi anggaran kenaikan tunjangan kinerja, serta Revisi Anggaran BLU.

c. Evaluasi

1) Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan intern dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam rangka evaluasi SPIP, pada Tahun 2015, Inspektorat Jenderal telah melakukan :

- a) Pembahasan questioner dan langkah kerja dalam pelaksanaan Evaluasi SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b) Evaluasi SPIP pada Entitas Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Laut, Udara, dan Perkeretaapian, BPSDM Perhubungan dan Badan Litbang Perhubungan;
- c) Uji petik SPIP pada Poltekel Surabaya, Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah, Balai LLASDP Bali, ATKP Surabaya, dan Otoritas Bandar Udara Wilayah I Medan.

2) Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Evaluasi LAKIP dilakukan terhadap 3 (tiga) komponen manajemen kinerja yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Inspektorat

Jenderal telah melakukan Evaluasi LAKIP 2014 pada Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan pada bulan Mei 2015.

d. Pendampingan

Pendampingan yang dilaksanakan Tahun 2015, antara lain adalah sebagai berikut :

a) Pendampingan Pagu Kebutuhan

Untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan peran Inspektorat Jenderal sebagai *Quality Assurance*, pengawasan tidak hanya dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan tetapi juga dilakukan mulai proses Perencanaan. Kegiatan pendampingan Inspektorat Jenderal dilakukan pada pembahasan Pagu Kebutuhan yang merupakan kegiatan internal yang dikoordinir oleh Biro Perencanaan yang diselenggarakan pada bulan Februari – Maret 2015 di 3 (tiga) lokasi, yakni Makassar, Medan, dan Bogor. Kegiatan Pendampingan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang diusulkan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan, tidak bermasalah, dan telah dibahas di tingkat daerah melalui koordinasi antara UPT/Satker dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait.

b) Pendampingan Kegiatan Lainnya

Pendampingan yang dilakukan Inspektorat Jenderal pada tahun 2015 adalah pendampingan kegiatan pengadaan Bus *BRT Euro II Engine Model 2 Pintu* sebanyak 1000 unit (APBN-P 2015), pekerjaan pada Balai Teknik Perkeretaapian wilayah Sumatera Bagian Utara Tahun 2015, pembangunan jalan KA Layang antara Medan - Bandar Khalifah Lintas Medan Araskabi - Kualanamu Tahap I, pelaksanaan pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Benoa, kegiatan TA 2015 pada Balai LLAJSDP Bali, proses pemilihan penyedia barang/ jasa pekerjaan, pembangunan faspel laut, pembangunan VTS, rehabilitas dermaga dan trestle, pembangunan bandara, pembangunan akademi perkeretaapian Madiun tahap V dan BPPTD Kalimantan Tahap II, dan normalisasi/ pengembalian fungsi prasarana perkeretaapian.

e. Konsultasi

Konsultasi adalah memberikan suatu petunjuk, pertimbangan, pendapat atau nasehat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, guna mendapat rekomendasi atau alternatif pemecahan masalah dari Inspektorat Jenderal. Konsultasi yang telah dilakukan antara lain konsultasi pembangunan gedung terminal TA 2015, ATCS Kota Palembang, dan konsultasi pengadaan lelang.

f. Pemantauan

1) Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal

Monitoring dan Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit dilaksanakan dengan aktif melalui program pemantauan langsung kepada Auditi yang telah

melewati batas waktu pelaksanaan tindak lanjut (2 bulan setelah tanggal SPT Inspektorat Jenderal).

Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit Tahun 2015 dari hasil audit Inspektorat Jenderal pada UPT dan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan terdapat sebanyak 2.596 temuan, telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 2.198 temuan, dalam proses sebanyak 393 temuan, dan sisa temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 5 temuan, dengan rincian sebagai berikut :

Grafik 3.16 Data Tindak Lanjut Temuan Itjen



Sumber : Inspektorat Jenderal

Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti tahun 2015 sebesar 99,81%, sedangkan untuk persentase hasil audit Inspektorat Jenderal secara keseluruhan dari tahun 2003 s.d. 2015 mencapai 99,89%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.70 Persentase Rekomendasi Hasil Audit Yang Ditindaklanjuti Tahun 2015

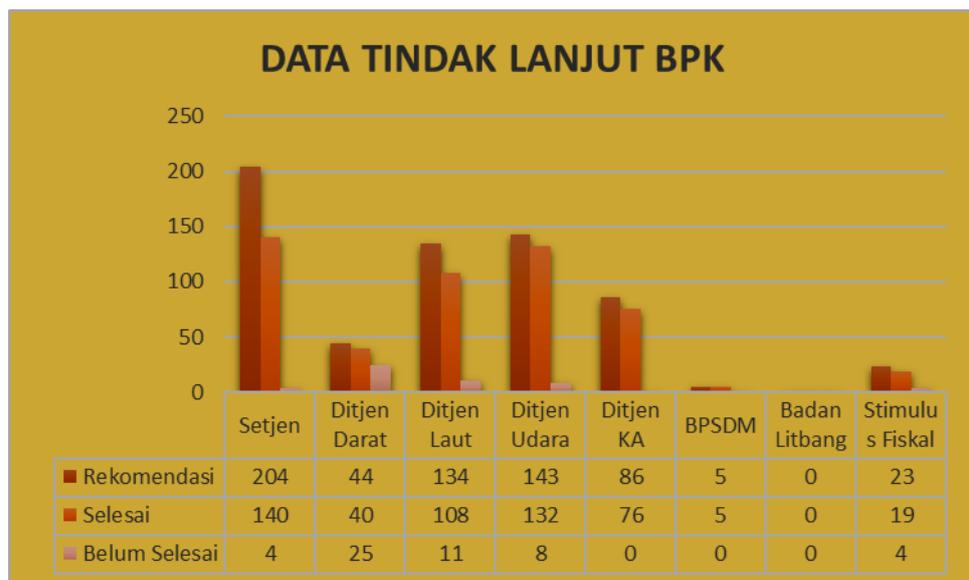
NO	UNIT KERJA	JUMLAH TEMUAN	HASIL PEMANTAUAN REKOMENDASI HASIL AUDIT YANG DITINDAKLANJUTI			
			TUNTAS	PROSES	BELUM DI-TL	TIDAK DAPAT DI-TL
1.	SEKRETARIAT JENDERAL	556	553	3	0	-
2.	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	3.766	3.580	178	0	8
3.	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	21.716	21.237	479	0	0
4.	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	11.128	10.736	364	0	28
5.	DITJEN PERKERETAAPIAN	1.326	1.310	10	5	1
6.	BPSDM PERHUBUNGAN	2.017	2.006	8	0	3
7.	BADAN LITBANG	278	278	0	0	0
TOTAL		40.787	35.299	1.042	5	40
PERSENTASE			86,54	2,55	0,48	0,10

Sumber : Inspektorat Jenderal

2) Koordinasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI)

Hasil pemeriksaan BPK-RI posisi s.d 31 Desember 2015 di lingkungan Kementerian Perhubungan terdapat 639 rekomendasi, telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai sebanyak 520 rekomendasi, sedangkan 115 rekomendasi telah ditindaklanjuti namun belum dinyatakan selesai, serta 2 (dua) rekomendasi belum ditindaklanjuti dan 2 (dua) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Grafik 3.17 Data Tindak Lanjut Temuan BPK



Sumber : Inspektorat Jenderal

g. Kegiatan Pengawasan Lainnya

1) Pembinaan Pengawasan

Kegiatan Pembinaan Pengawasan bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada UPT yang telah menunjukkan kinerja terbaik dengan mengutamakan prinsip 3E+ 1K (Efektif, Efisien, Ekonomis dan Ketaatan). Kegiatan ini merupakan upaya Inspektorat Jenderal untuk merubah paradigma yang selama ini terkesan sebagai *watchdog* menjadi konsultan dan *quality assurance*.

Peringkat UPT dengan Kinerja Terbaik Tahun 2015 :

NO	NAMA UPT	PERINGKAT
1.	Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan	I (Unit Kerja Eselon II)
2.	Distrik Navigasi Kelas II Benoa	I (Unit Kerja Eselon III)
3.	UPP Kelas III Juwana	I (Unit Kerja Eselon IV)



Gambar 3.37 Penyerahan SK Menteri Perhubungan kepada UPT dengan Kinerja Terbaik pada tanggal 17 September 2015 (HARHUBNAS)

2) Sosialisasi Preventif Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN)

Sosialisasi Preventif KKN dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi (TIPIKOR), khususnya program pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Perhubungan, pengendalian gratifikasi, serta membangun integritas pribadi sebagai upaya melawan korupsi kepada seluruh UPT/Satker di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Pada Tahun 2015, Inspektorat Jenderal melaksanakan sosialisasi di 7 (tujuh) Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Papua, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.



Gambar 3.38 Sosialisasi Preventif Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) di Provinsi Sumatera Selatan

3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan KKN (Kormonev AP-KKN) Kementerian Perhubungan

Pelaksanaan kegiatan Kormonev AP-KKN Kementerian Perhubungan Tahun 2015 antara lain adalah:

- a) Uji petik pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK)
- b) Keikutsertaan dalam rapat-rapat koordinasi pelaksanaan Stranas PPK yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal;

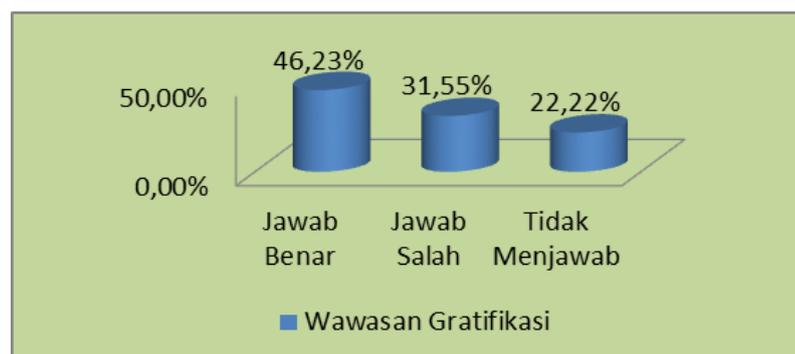
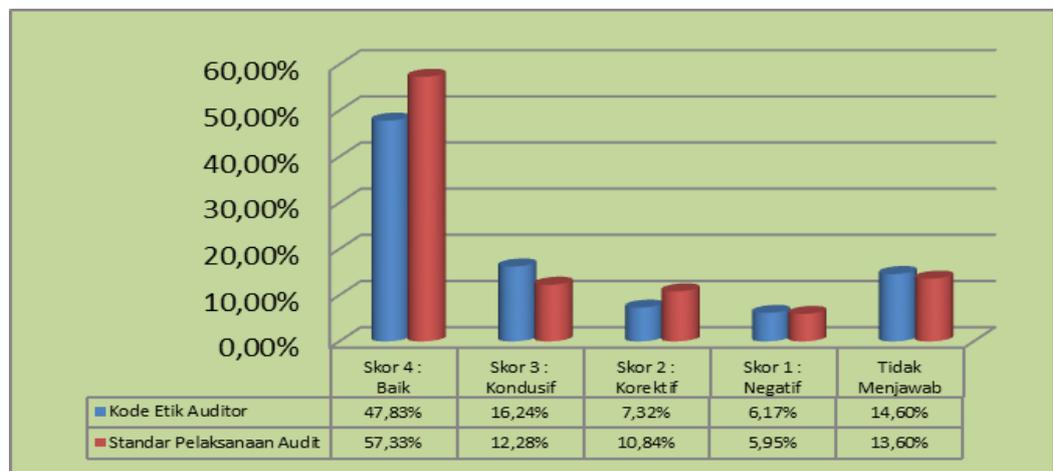
- c) Keikutsertaan dalam seminar maupun *workshop* pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diselenggarakan oleh KPK;
 - d) Keikutsertaan dalam dalam acara Pekan Antikorupsi yang diselenggarakan oleh KPK.
- 4) Aksi Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (AP-KKN) Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan

Pelaksanaan AP-KKN Inspektorat Jenderal tahun 2015 adalah:

- a) Melakukan pembahasan kuesioner kepuasan auditi terhadap pelaksanaan audit Inspektorat Jenderal;
- b) Melaksanakan uji petik AP KKN yang dilaksanakan tanggal 5 s.d 9 November 2015 di 4 (empat) Provinsi, yaitu Lampung, Jawa Timur, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur.

Responden kuesioner kepuasan auditi terhadap pelaksanaan audit Inspektorat Jenderal tahun 2014 dan 2015 berjumlah 126 orang. Kuesioner terdiri dari 3 (tiga) kategori, yakni Kode etik Auditor, Standar Pelaksanaan Audit, dan wawasan gratifikasi dengan skor terbagi menjadi (1) skor 4 penilaian yang baik, (2) skor 3 penilaian yang kondusif, (3) skor 2 penilaian yang bersifat korektif, (4) skor 1 penilaian yang bersifat negatif, dan (5) tidak menjawab, kecuali wawasan gratifikasi terbagi atas jawaban benar, salah, dan tidak menjawab. Hasil yang didapat adalah sebagian besar memberikan penilaian yang baik terhadap kode etik auditor (47,83%) dan standar pelaksanaan audit (57,33%), sedangkan untuk wawasan gratifikasi masih cukup rendah yang menjawab benar. Rinciannya adalah sebagai berikut :

Grafik 3.18 Wawasan Gratifikasi



Sumber : Inspektorat Jenderal

5) Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi dan *Whistleblowing System*

Program pengendalian gratifikasi yang dilakukan pada tahun 2015 adalah :

- a) Monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan oleh KPK dengan melibatkan seluruh Unit Kerja Eselon I pada tanggal 10 s.d. 11 Juni 2015, dengan hasil tersusunnya implementasi potensi gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b) Melaksanakan Bimbingan Teknis UPG bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan KPK sebagai narasumber pada tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2015 di Yogyakarta;
- c) Sosialisasi *whistleblowing system* pada pengadaan barang dan jasa melalui portal pengaduan nasional melalui media *banner*, *videotron*, media visualisasi, serta jurnal transparansi dan buletin kepegawaian;
- d) Penyusunan dan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 28 September 2015 terkait perlindungan bagi pelapor, saksi, dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam rangka pelaksanaan *whistleblowing system* sebagai aksi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- e) Melaksanakan Sosialisasi pengendalian gratifikasi dan *whistleblowing system* serta jaminan perlindungan terhadap *whistleblower* dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Tahun 2015 pada tanggal 03 Desember 2015 di Ruang Mataram Gedung Karya Kementerian Perhubungan.



Gambar 3.39 Suasana Sosialisasi memperingati Hari Anti Korupsi Tahun 2015

6) Evaluasi Pengawasan

Untuk menilai efektifitas pelaksanaan program kerja dan kegiatan Inspektorat Jenderal Tahun 2015, dilakukan evaluasi kegiatan per triwulan. Evaluasi Program Kerja Inspektorat Jenderal Triwulan I dilaksanakan pada tanggal 6 April 2015, Triwulan II/Semester I pada tanggal 9 Juli 2015, Triwulan III pada tanggal 15 s.d. 17 Oktober 2015, serta Triwulan IV/Pra Rapat Dinas dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 6 Desember 2015.

7) Seminar Pengawasan

Seminar Pengawasan merupakan salah satu cara peningkatan kompetensi pegawai Inspektorat Jenderal. Pada tahun 2015 seminar dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, yakni:

- a) Sosialisasi Tata Cara Penilaian Sasaran Kerja Pegawai pada tanggal 20 Januari 2015 Ruang Rapat Brawijaya, Gedung Karsa Lantai VI, Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat;
- b) Sosialisasi Peningkatan Kapabilitas APIP pada tanggal 5 Juni 2015 di Ruang Rapat Brawijaya, Gedung Karsa Lantai VI, Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat;
- c) Sosialisasi Pendataan Ulang PUPNS, Pedoman Penilaian Karya Tulis Ilmiah, dan Hukum Kontrak Konstruksi pada tanggal 5 Oktober 2015 di Ruang Rapat Mataram, Gedung Karya Lantai I, Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat.

Selain seminar tersebut di atas, Inspektorat Jenderal sebagai APIP yang memiliki peranan sebagai konsultan juga melaksanakan seminar dan *workshop* yang diperuntukkan untuk Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Seminar yang dilaksanakan meliputi :

- a) *Workshop* Percepatan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 kepada Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan pada tanggal 7 s.d. 9 Oktober 2015 di Hotel Merlynn Park Jakarta. *Workshop* dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan anggaran tahun 2016 yang cepat, tepat, taat, dan bermanfaat;
- b) Seminar Peran APIP dalam Pengendalian Kecurangan pada tanggal 2 Nopember 2015 di Ruang Mataram Gedung Karya Lat. I Kementerian Perhubungan. Seminar ini merupakan salah satu cara meningkatkan kinerja organisasi dengan mengendalikan berbagai peluang kecurangan. Dalam acara seminar ini juga diluncurkan buku “Sikencur (Sistem Pengendalian Kecurangan) Menata Birokrasi Bebas Korupsi”.



Gambar 3.40 Seminar Peran APIP dalam pengendalian kecurangan

- 8) ISO 9001 : 2008 Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan telah mendapatkan ISO 9001:2008 dari TUV NORD, Jerman pada tanggal 24 Juni 2015, ISO ini terdiri atas Kebijakan Mutu, 5 (lima) Sasaran Mutu, dan 26 (dua puluh enam) Pedoman Mutu.



Gambar 3.41 Sertifikasi ISO 9001 : 2008 Itjen Kemenhub

- 9) Peningkatan Kapabilitas Tata Kelola APIP

Internal Audit Capability Model (IACM) merupakan instrumen untuk mengukur sejauh mana kapabilitas yang dimiliki oleh Unit internal auditor. Saat ini Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menduduki level 3 IACM dengan catatan. Dari 6 (enam) elemen, terdapat 3 (tiga) elemen yang belum terpenuhi seluruhnya, yakni Elemen peran dan layanan, Elemen manajemen sumber daya manusia, dan Elemen praktif profesional. Sebagian bagian dari Kementerian Perhubungan yang mempunyai fungsi sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Jenderal perlu meningkatkan kapabilitas menuju level 3 tanpa catatan guna melaksanakan perannya tidak hanya sebagai penjamin mutu, tetapi juga sebagai konsulting.

- 10) Sistem Manajemen Pengaduan (SIMADU)



Pada tahun 2015, dalam rangka lebih mengoptimalkan sistem pengaduan (*whistleblowing system*), Inspektorat Jenderal menyiapkan aplikasi pengaduan yang diberi nama “SIMADU” atau **Sistem MANajemen PengaDUan**. SIMADU adalah aplikasi yang disediakan dalam rangka mendorong peran serta pejabat/pegawai/masyarakat dalam pencegahan pelanggaran dan penyimpangan serta pemberantasan tindak pidana

korupsi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Aplikasi SIMADU merupakan adopsi dari aplikasi wise Kementerian Keuangan. Aplikasi dapat diakses melalui <http://simadu.dephub.go.id>

Saat ini sedang dilakukan penyempurnaan SOP dan SK Pokja Pelaksana SIMADU, serta sosialisasi baik internal di lingkungan Inspektorat Jenderal ataupun eksternal di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain, melakukan sosialisasi ke UPT di lingkungan

Kementerian Perhubungan, TOT Aplikasi SIMADU di lingkungan Inspektorat Jenderal, serta ikut serta sebagai narasumber dalam kegiatan Bimbingan dan Bantuan Teknis Aplikasi WISE oleh Pusdatin.

BAB IV
PENINGKATAN KAPASITAS TRANSPORTASI

1. Kapasitas Transportasi

a. Peningkatan Kapasitas Transportasi Darat

1) Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana

Dalam periode Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2015 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan program peningkatan kapasitas sebagai berikut :

Tabel 4.1. Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat Tahun 2012 sd. 2015

NO.	KEGIATAN	2012	2013	2014	2015
1	Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan	169 trayek angkutan di 25 Provinsi	188 trayek di 25 Provinsi	208 trayek di 28 Provinsi	217 trayek di 30 Provinsi
2	Pengadaan Bus Perintis	65 Unit	60 Unit	45 Unit	75 Unit
3	Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Penyeberangan	135 Lintasan	169 Lintasan	181 Lintasan	210 Lintasan
4	Pengembangan Angkutan Umum Massal (Sistem Transit/ BRT)	-	a. Bus besar BRT EURO II 2 pintu = 10 unit bus b. Bus sedang BRT = 20 Unit Bus	a. Bus besar BRT euro II 2 pintu = 15 unit bus b. Bus sedang BRT = 15 Unit Bus	a. Bus besar BRT EURO II 2 pintu = 1.025 unit bus b. Bus sedang BRT = 25 Unit Bus
5	Implementasi Tracking System Pelayanan Angkutan Jalan	-	a. Pengadaan dan Pemasangan penggunaan <i>tracking</i> angkutan pemadu moda b. Pemeliharaan <i>tracking</i> sistem angkutan AKAP	a. Pengadaan dan Pemasangan penggunaan <i>tracking</i> angkutan AKAP b. Pemeliharaan <i>tracking</i> sistem angkutan AKAP	a. <i>Tracking</i> Pengoperasian Angkutan Jalan b. Rehabilitasi <i>tracking</i> sistem angkutan AKAP

NO.	KEGIATAN	2012	2013	2014	2015
6	Pembangunan Terminal Transportasi Jalan	Pemb: 21 Lokasi Rehab: 9 Lokasi	Pemb: 15 Lokasi Rehab: 12 Lokasi	Pemb: 12 Lokasi Rehab: 8 Lokasi	Pemb: 11 Lokasi Rehab: 7 Lokasi
7	Pembangunan Fasilitas Keselamatan	33 provinsi	32 provinsi	33 provinsi	33 provinsi
8	Pembangunan Pengujian Kend. Bermotor	5 provinsi	-	-	-
9	Rehabilitasi Jembatan Timbang	2 Unit	1 Unit	2 unit	2 unit
10	Pengadaan Bus Perintis	65 unit	60 unit	45 unit	75 unit
11	Pembangunan Dermaga Sungai & Danau (termasuk Tahap I, Lanjutan dan Selesai)	• <u>Tahap I</u> Sungai : 9 lokasi Danau : - lokasi	• <u>Tahap I</u> Sungai : 7 lokasi Danau : 3 lokasi	• <u>Tahap I</u> Sungai : 7 lokasi Danau : 2 lokasi	• <u>Tahap I</u> Sungai : 9 lokasi Danau : 0 lokasi
		• <u>Lanjutan</u> Sungai : 9 lokasi Danau : 3 lokasi	• <u>Lanjutan</u> Sungai : 16 lokasi Danau : 2 lokasi	• <u>Lanjutan</u> Sungai : 13 lokasi Danau : - lokasi	• <u>Lanjutan</u> Sungai : 5 lokasi Danau : 3 lokasi
		• Rehabilitasi/ Peningkatan Sungai : 10 lokasi Danau : 5 lokasi	• Rehabilitasi/ Peningkatan Sungai : 6 lokasi Danau : 4 lokasi	• Rehabilitasi/ Peningkatan Sungai : 11 lokasi Danau : 6 lokasi	• Rehabilitasi/ Peningkatan Sungai : 16 lokasi Danau : 9 lokasi
12	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	• Tahap I : 40 lokasi • Lanjutan : 19 lokasi • Rehabilitasi/ Peningkatan 15 lokasi	• Tahap I : 11 lokasi • Lanjutan : 38 lokasi • Rehabilitasi/ Peningkatan 22 lokasi	• Tahap I : 10 lokasi • Lanjutan : 50 lokasi • Rehabilitasi/ Peningkatan 25 lokasi	• Tahap I : 10 lokasi • Lanjutan : 35 lokasi • Rehabilitasi/ Peningkatan 40 lokasi
13	Pengadaan bus air	4 Unit	6 Unit	3 Unit	6 Unit
14	Pengadaan Kapal Penyeberangan	Lanjutan 17 unit, Baru 8 unit, Selesai 17 unit	Lanjutan 8 unit, Baru 6 unit, Selesai 4 unit	Lanjutan 9 unit, Baru 6 unit, Selesai 9 unit	Lanjutan 6 unit, Baru 10 unit, Selesai 6 unit
15	Penerapan ATCS	a. Kota Medan b. Kota Bandung c. Yogyakarta	a. Kota Medan b. Kota Bandung c. Yogyakarta d. Samarinda e. Padang f. Sarbagita	a. Kota Medan b. Kota Batam c. Kota Padang d. Lampung e. Kota Bandung f. Pekalongan	a. Kota Batam b. Lampung c. Kota Medan d. Kota Padang e. Kota Bandung f. Pekalongan

NO.	KEGIATAN	2012	2013	2014	2015
				g. Yogyakarta	g. Yogyakarta h. Bangka Belitung i. Sidoarjo j. Palu k. Kediri l. Palu
16	Fasilitas Pejalan Kaki	a. Kota Bogor b. Kota Palembang c. Kota Surakarta	a. Kota Bogor b. Kota Palembang	-	-

Sumber : Bagian Perencanaan, Setditjen - Ditjen Hubdat, 2015

2) Alokasi Bantuan *Bus Rapid Transit* (BRT) TA. 2015

Dalam periode Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2015, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan program peningkatan kapasitas sebagai berikut :

Tabel 4.2 Alokasi Bus Sedang - BRT Tahun Anggaran 2015

Penerima Bus Sedang BRT	Lokasi Kota/ Kawasan Perkotaan/ Provinsi	Jumlah Bus
Pemerintah D.I. Yogyakarta	Kota Yogyakarta dan sekitarnya Provinsi D.I Yogyakarta	25

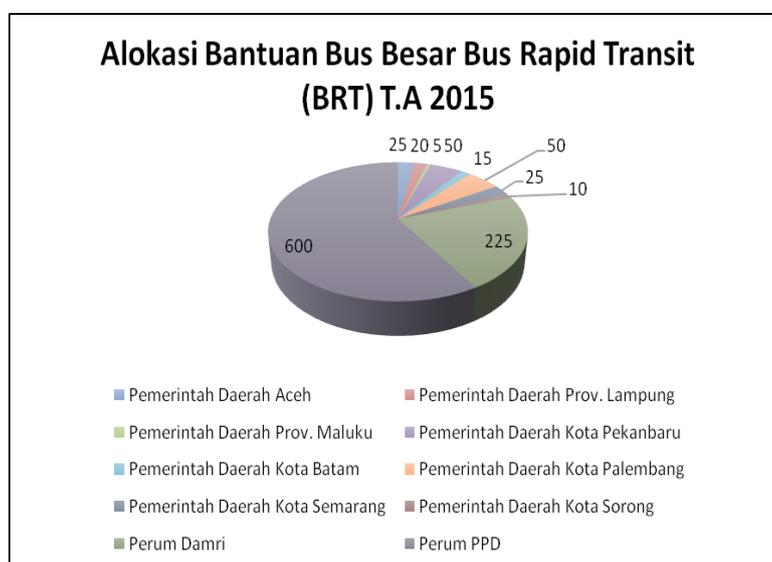
Sumber : Bagian Perencanaan, Setditjen - Ditjen Hubdat, 2015

Tabel 4.3 Alokasi Bus Besar - BRT Tahun Anggaran 2015

Penerima Bus Besar BRT	Lokasi Kota/ Kawasan Perkotaan/ Provinsi	Jumlah Bus
Pemerintah Daerah Aceh	Kota Banda Aceh dan sekitarnya Provinsi Aceh	25
Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung dan sekitarnya Provinsi Lampung	20
Pemerintah Daerah Provinsi Maluku	Kota Ambon dan sekitarnya Provinsi Maluku	5
Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru dan sekitarnya Provinsi Riau	50
Pemerintah Daerah Kota Batam	Kota Batam dan sekitarnya Provinsi Kepulauan Riau	15

Penerima Bus Besar BRT	Lokasi Kota/ Kawasan Perkotaan/ Provinsi	Jumlah Bus
Pemerintah Daerah Kota Palembang	Kota Palembang dan sekitarnya Provinsi Sumatera Selatan	50
Pemerintah Daerah Kota Semarang	Kota Semarang dan sekitarnya Provinsi Jawa Tengah	25
Pemerintah Daerah Kota Sorong	Kota Sorong dan sekitarnya Provinsi Papua Barat	10
Perum Damri	a. Kota Padang dan sekitarnya Provinsi Sumatera Barat	10
	b. Kota Bandung dan sekitarnya Provinsi Jawa Barat	165
	c. Kota Surakarta dan sekitarnya Provinsi Jawa Tengah	20
	d. Kota Yogyakarta dan sekitarnya Provinsi D.I. Yogyakarta	5
	e. Kota Mataram dan sekitarnya Provinsi Nusa Tenggara Barat	25
Perum PPD	Kawasan Perkotaan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten	600
Total		1.025

Sumber : Bagian Perencanaan, Setditjen - Ditjen Hubdat, 2015



Grafik 4.1. Alokasi Bus Besar – BRT Tahun Anggaran 2015



Gambar 4.2. Bus Rapid Transit

b. Peningkatan Kapasitas Transportasi Laut

1) Meningkatkan Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi dan Keterpaduan Sistem Transportasi Antarmoda dan Multimoda

a) Peningkatan Kapasitas Prasarana

Jumlah Rute Angkutan Laut Tetap dan Teratur dalam Mendukung Tol Laut

Dalam rangka menjamin ketersediaan barang dan untuk mengurangi disparitas harga bagi masyarakat serta menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan barang ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan melalui pelaksanaan Tol Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan SK Dirjen Hubla Nomor AL.108/6/2DJPL-15 tanggal 26 Oktober 2015 tentang Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang. Dalam rangka Pelaksanaan Tol Laut Tahun Anggaran 2015, telah ditetapkan 3 (tiga) trayek tol laut sebagai berikut:

- (1) Kode Trayek T-1 : Tg. Perak – Tual - Fak-fak – Kaimana – Timika – Kaimana – Fak-fak – Tual – Tg. Perak (dioperasikan oleh KM Caraka Jaya Niaga III-32)
- (2) Kode Trayek T-4: Tg. Priok – Biak – Serui – Nabire – Wasior – Manokwari – Wasior – Nabire – Serui – Biak – Tg. Priok (dioperasikan oleh KM Caraka Jaya Niaga III-22)

- (3) Kode Trayek T-6 : Tg. Priok – Kijang – Natuna – Kijang Tg. Priok
(dioperasikan oleh KM Caraka Jaya Niaga III-4)

Trayek Liner Non Komersial tersebut ditugaskan kepada PT. Pelni (Persero) untuk melayari dengan diberikan penugasan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dalam rangka Pelaksanaan Tol Laut.

Selain PT. Pelni (Persero), terdapat juga pelayaran swasta yang berpartisipasi mendukung program tol laut yaitu PT. Altos Sea Shipping yang berdomisili di Lampung mengoperasikan 2 (dua) kapal perdana program tol laut dengan trayek :

- (1) Panjang – Tg. Perak PP
- (2) Tg. Priok – Tg. Perak PP



Gambar 4.3. Trayek Tol Laut

b) Peningkatan Kapasitas Sarana

- (1) Pembangunan Baru Armada Kapal Negara Angkutan Laut Perintis
(Kontrak *Multiyears*)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan keperintisan maka pada tahun 2015 pemerintah membangun 100 kapal dengan berbagai bobot dan jenis. Pembangunan baru kapal negara angkutan laut perintis sebanyak 100 (seratus) kapal, meliputi :

- (a) 6 kapal 750 DWT dengan anggaran APBN
- (b) 2 kapal 500 DWT dengan anggaran APBN
- (c) 2 kapal 200 DWT dengan anggaran APBN
- (d) 20 kapal GT. 1200 dengan anggaran APBN-P
- (e) 25 kapal GT. 2000 dengan anggaran APBN-P
- (f) 5 kapal 750 DWT dengan anggaran APBN-P
- (g) 15 kapal kontainer 100 Teus dengan anggaran APBN-P
- (h) 20 kapal rede dengan anggaran APBN-P
- (i) 5 kapal ternak dengan anggaran APBN-P.

Perkembangan fisik pembangunan 100 (seratus) kapal tersebut belum nampak karena kontrak seluruhnya dilaksanakan bulan November 2015, sehingga baru dalam tahap pembayaran uang muka.

(2) Penyelesaian Kapal Negara Angkutan Laut Perintis

Pada bulan Oktober tahun 2015, pemerintah juga telah menyelesaikan pembangunan kapal negara angkutan laut perintis sebanyak 3 kapal, meliputi :

(a) 2 unit kapal perintis 750 DWT

Kedua kapal ini diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden dalam rangka mendukung program tol laut, dan kedua kapal ini bisa menampung 265 penumpang dan 400 ton barang, dengan spesifikasi teknis: Panjang : 12 meter, Tinggi : 4,5 meter, Kecepatan : Max.12 knots.

i. KM Sabuk Nusantara 55

KM Sabuk Nusantara 55 dibuat oleh PT Dok Bahari Nusantara. Trayek yang dilalui KM Sabuk Nusantara 55 adalah Kota Baru – Batulicin–Marabatuan–Maradapan–Matasiri–Maradapan–Marabatuan–Batulicin–Kotabaru–Majene–Kotabaru.

ii. KM Sabuk Nusantara 56

KM Sabuk Nusantara 56 dibuat oleh PT Adiluhung Saranasegara Indonesia sejak 13 Juni 2014 dan selesai pada 13 Oktober 2015. Trayek KM Sabuk Nusantara 56 adalah Tanjung Perak – Masalembo – Keramaian – Masalembo – Kalianget – Sapudi – Kangean – Pagerungan Besar – Sapeken - Tanjung Wangi –Sapeken – Pagerungan Besar – Kangean – Sapudi – Kalianget – Masalembo – Keramaian – Masalembo – Surabaya.



Gambar 4.4 Kapal perintis KM Sabuk Nusantara 55 dan 56 sebagai sarana untuk mendukung Program Tol Laut

(b) 1 (satu) Unit Kapal Ternak.

c) Terselenggaranya Proses Kerjasama Pemerintah Swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi

Beberapa lokasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan laut yang dibangun melalui skema pembiayaan proses kerjasama

pemerintah swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi laut, antara lain meliputi :

- (1) Rencana Pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung, dengan progres sebagai berikut:
 - (a) Januari 2015 penandatanganan perjanjian konsesi Kuala Tanjung antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kuala Tanjung dengan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero).
 - (b) Maret 2015 - Usulan adendum perjanjian konsesi Kuala Tanjung
- (2) Rencana Terminal Peti Kemas *Makassar New Port* (MNP)
 - (a) 19 Mei 2015 penandatanganan konsesi Makassar New Port (MNP) antara kantor OP Makassar dengan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero);
 - (b) November 2015 melaksanakan pembangunan MNP tahap I.

- 2) Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil dan khususnya wilayah timur Indonesia

Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi laut ke daerah-daerah terpencil, sampai dengan tahun 2015 angkutan laut perintis masih menjadi andalan dalam penyediaan transportasi di daerah terpencil, belum berkembang, kepulauan serta perbatasan. Pada tahun 2015 pemerintah menyediakan anggaran subsidi operasi angkutan perintis sebesar Rp 580.000.000.000,00 digunakan untuk mensubsidi 84 (delapan puluh empat) kapal perintis yang beroperasi pada 84 trayek yang melayani 526 pelabuhan singgah perintis. Adapun rincian realisasi angkutan tersebut sebagai berikut :

Tabel 4.4 Realisasi Angkutan perintis di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil, khususnya wilayah timur Indonesia

NO	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Angkutan penumpang	Jumlah angkutan penumpang mengalami peningkatan sebanyak 5.553 penumpang atau 1,04 %. Meningkatnya pelayanan perintis karena dibangunnya kapal-kapal baru dan pelaksanaan pemeliharaan kapal secara teratur.
2.	Angkutan Barang	Jumlah angkutan barang mengalami penurunan sebesar 132.323 ton/m3 atau 50,89 %, beralihnya angkutan dari kapal perintis ke kapal barang yang juga mendapat subsidi PSO.



Gambar 4.5 Angkutan perintis yang menjadi andalan dalam penyediaan transportasi di daerah terpencil

c. Peningkatan Kapasitas Transportasi Udara

1) Perpanjangan Landas Pacu

Tabel 4.5 Perpanjangan Landas Pacu

No.	Bandar Udara	No.	Bandar Udara
1.	Rembele	11	Senggeh
2.	Muara Bungo	12	Obano
3.	Palu	13	Inawatan
4.	Luwuk	14	Banyuwangi
5.	Buol	15	Gewayantana
6.	Kufar	16	Komodo
7.	Moa	17	Nop Goliat
8.	Mindiptana	18	Okaba
9.	Kimam	19	Maratua (Kalimarau)
10.	Kepi		

2) Pelebaran Landas Pacu di Bandar Udara Nangapinoh, Maumere, Bajo, Wamena, Dumatubun.

3) Peningkatan Daya Dukung

Tabel 4.6 Peningkatan Daya Dukung

No.	Bandara	No.	Bandara	No.	Bandara
1.	Malang	13.	Bima	25.	Seibati
2.	Nias	14.	Waingapu	26.	Rendani
3.	Tebelian	15.	Ende	27.	Deo
4.	Sampit	16.	Rote	28.	Mamuju
5.	Kota Baru	17.	Wonopito	29.	Tarakan
6.	Kalimarau	18.	Dekai	30.	Radin Inten Lampung
7.	Palu	19.	Senggo	31.	Komodo

No.	Bandara	No.	Bandara	No.	Bandara
8.	Poso	20.	Ilaga	32.	Dc Saudale
9.	Kendari	21.	Ternate		
10.	Kolaka	22.	Kuabang		
11.	Wakatobi	23.	Curug		
12.	Dobo	24.	Gorontalo		

4) Pelapisan Sisi Udara

Tabel 4.7 Pelapisan Sisi Udara

No.	Bandar Udara	No.	Bandar Udara	No.	Bandar Udara
1	Dewadaru	14	Selayar	27.	Muko Muko
2	Cut Nyak Dien	15	Bua	28.	Buli
3	Sabang	16	Atambua	29.	Ayawasi
4	Lasondre	17	Sabu	30.	Long Apung
5	Pasir	18	Wamena	31.	Banyuwangi
6	Pangsuma	19	Sarmi	32.	Rembele
7	Buntok	20	Mindiptana	33.	Silampari
8	Melak	21	Kamur	34.	Dumatubun
9	Dawai	22	Bomakia	35.	Tambolaka
10	Naha	23	Bokondini		
11	Melong	24	Numfor		
12	Tolitoli	25	Karubaga		
13	Rampi	26	Ilaga		

5) Perluasan Apron

Tabel 4.8 Perluasan Apron

No.	Bandar Udara	No.	Bandar Udara
1	Dewadaru	11	Serui
2	Malang	12	Timika
3	Lampung	13	Batom
4	Sampit	14	Rendani
5	Kota Baru	15	Deo
6	Kalimarau	16	Torea
7	Luwuk	17	Long Apung
8	Tual	18	Nop Goliat
9	Bajawa	19	Utarom
10	Rote	20	Dumatubun

6) Penambahan dan pelebaran *taxiway*; Malang, Banyuwangi, Ende, Labuan Bajo, Bua.

7) Pekerjaan Strip

Tabel 4.9 Pekerjaan Strip

No	Bandar Udara	No.	Bandar Udara
1	Tolitoli	11	Aroepala Selayar
2	Buton	12	Wamena
3	Kufar	13	Frans Seda Maumere
4	Bomakia	14	Mopah
5	Kepi	15	Djalaludin Gorontalo
6	Ewer	16	Binaka
7	Kuabang	17	Beto Ambari
8	Hanandjoedin	18	Sangia Nibandera Kolaka
9	Kambuaya	19	Tambolaka
10	No Goliat	20	Mutiara

d. Peningkatan Kapasitas Transportasi Perkeretaapian

1) Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Perkeretaapian

Dalam rangka mencapai sasaran mewujudkan peningkatan Kapasitas, Aksesibilitas dan Keterpaduan dalam penyediaan prasarana perkeretaapian nasional, pada tahun 2015 Ditjen Perkeretaapian melakukan kegiatan Pembangunan Jalur KA sepanjang 179,33 Km. Berikut ini merupakan kegiatan strategis hasil pembangunan jalur KA pada tahun 2015, antara lain :

- a) Pembangunan Jalur KA Menuju Bandara Internasional Minangkabau
 Pembangunan jalur KA dari Stasiun Duku menuju Bandara Internasional Minangkabau merupakan program Pemerintah, dalam hal ini Ditjen Perkeretaapian, guna mewujudkan keterpaduan moda transportasi serta dalam rangka peningkatan pelayanan dan keselamatan bagi masyarakat pengguna transportasi. Pada tahun 2015 Ditjen Perkeretaapian melaksanakan pembangunan Badan Jalan dan Pemasangan *Track* Jalan KA antara Duku-BIM, sepanjang 3,9 Km serta Pembangunan Stasiun Duku dan Stasiun BIM tahap I.



Gambar 4.6 Pembangunan Badan Jalan KA



Gambar 4.7 Pelaksanaan konstruksi pemasangan Rel R.54 dan Wesel R.54



Gambar 4.8. Pemasangan Rel.R.54 pada Jembatan KA bentang 164,4 M (26,8x2+35.8x2 M)



Gambar 4.9. Pembangunan Stasiun BIM Tahap I



Gambar 4.10 Pembangunan Stasiun Duku

b) Pembangunan jalur kereta api antara Makassar-Pare-Pare

Rencana pembangunan jalur Kereta Api Trans Sulawesi merupakan upaya Pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan serta peningkatan keselamatan dan pelayanan transportasi. Pada Tahap I (2015-2019) rencana pembangunan jalur KA Trans Sulawesi terdapat 6 jalur prioritas yaitu :

- (1) Jalur Makassar-Pare-Pare sepanjang 145 Km;
- (2) Jalur Manado-Bitung sepanjang 48 Km;
- (3) Jalur Bitung-Gorontalo-Isimu sepanjang 340 Km;
- (4) Jalur Pare-Pare –Mamuju sepanjang 225 Km;
- (5) Jalur Mamuju-Palu sepanjang 295 Km;
- (6) Jalur Palu - Isimu sepanjang 460 Km.



Gambar 4.11 Rencana Pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi Tahap 1 Tahun 2015-2019

Pada tahun 2015, Kementerian Perhubungan melaksanakan pembangunan jalur kereta api Tahap I antara Makassar-Pare-pare dengan panjang *track* 16,1 Km'sp.



Gambar 4.12 Pembangunan jalur kereta api Tahap I antara Makassar-Pare-Pare dengan panjang *track* 16,1 Km'sp.

2) Lintasan/ Rute Angkutan Perintis

Penyelenggaraan Angkutan Kereta Api Perintis bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap moda transportasi kereta api. Dengan adanya Kereta Api Perintis diharapkan dapat mendorong percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya mahasiswa di lingkungan Universitas Sriwijaya Palembang, masyarakat di lingkungan wilayah Mojokerto-Tarik-Tulangan-Sidoarjo dan masyarakat di wilayah Purwosari-Wonogori agar dapat menggunakan jasa layanan angkutan KA dengan nyaman, aman, dan tarif yang terjangkau.

Selain itu, keberadaan Kereta Api Perintis ini juga berguna untuk fungsionalisasi aset yang telah ada, guna mempertahankan kondisi sarana dan prasarana yang dilalui Kereta Api Perintis tersebut. Penyelenggaraan angkutan Kereta Api Perintis dilaksanakan untuk menghubungkan masyarakat yang berdomisili di daerah yang lokasinya jauh dari lokasi rutinitas aktivitasnya, ataupun pusat kota dan lokasi yang minim angkutan transportasi, sehingga sangat membantu perpindahan orang dari satu tempat ke tempat yang lain, salah satunya yaitu Kereta Api Perintis Kertalaya, Kereta Api Jenggala dan Kereta Api Bathara Kresna.

Dasar pelaksanaan Angkutan Perintis Kereta Api adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53/2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian milik Negara serta Pengoperasian dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian milik Negara.

Realisasi penumpang angkutan kereta api keperintisan pada tahun 2015 sebanyak 540.392 penumpang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.10 Realisasi penumpang angkutan kereta api keperintisan

No	Uraian	Volume Penumpang
1	KA Bathara Kresna (Purwosari-Wonogiri)	103.882
2	KA Jenggala (Mojokerto-Tarik-Tulangan-Sidoarjo)	418.831
3	KA Kertalaya (Kertapati-Inderalaya)	17.679
Total		540.392



Gambar 4.13 Menteri Perhubungan RI dalam rangka peresmian Kereta Api Perintis Bathara Kresna relasi Purwosari-Wonogiri



Gambar 4.14 Menteri Perhubungan RI mencoba Kereta Api Perintis Bathara Kresna setelah dilakukan peresmian



Gambar 4.15 Menteri Perhubungan Republik Indonesia melakukan foto bersama dengan jajaran Pemkot Solo usai peresmian Kereta Api Perintis Bathara Kresna



Gambar 4.16 Peninjauan lapangan dalam rangka verifikasi Kereta Api Perintis Bathara Kresna



Gambar 4.17 Pemeriksaan sarana KA Perintis Jengjala dalam rangka verifikasi pelaksanaan program keperintisan



Gambar 4.18 Monitoring Penyelenggaraan KA Perintis Kertalaya lintas (Kertapati-Inderalaya)



Gambar 4.19 Monitoring Penyelenggaraan KA Perintis Kertalaya lintas (Mojokerto-Tarik-Tulangan-Sidoarjo)



Gambar 4.20 Monitoring Penyelenggaraan KA Perintis Kertalaya lintas (Kertapati-Inderalaya)

e. Studi Peningkatan Kapasitas Transportasi

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan, Badan Litbang Perhubungan telah melakukan Studi Kajian terkait dengan peningkatan Kapasitas Transportasi sebanyak ±65 studi, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.11. Studi Peningkatan Kapasitas Transportasi Badan Litbang Perhubungan sepanjang tahun 2015

STUDI	JUDUL STUDI
Peningkatan Kapasitas Transportasi	1. Kajian <i>Updating</i> Data dan Informasi Alur Sungai di Kota Palembang
	2. Studi Penyelenggaraan Angkutan Massal Wilayah Aglomerasi Mataram dan Sekitarnya
	3. Studi Prediksi Potensi <i>Demand</i> Kereta Api, Jalan Tol, dan Angkutan Laut di Sumatera
	4. Penilaian Kinerja Lalu-Lintas Pada Jalan Nasional di Kota-Kota Metropolitan
	5. Studi Pemodelan Transportasi Untuk Jawa dan Jabodetabek

STUDI	JUDUL STUDI
6.	Pengembangan Sistem Transportasi di Kabupaten Sumedang Terkait adanya Rencana Pembukaan Jalan Tembus Sukasari - Lembang
7.	Kajian Pengembangan Sistem Transportasi Dengan Adanya Rencana Pembukaan Akses Jalur Lingkar Selatan di Sumedang
8.	Reaktifasi Jalur Kereta Api Lintas Rangkasbitung - Pandeglang - Labuhan
9.	Pengukuran Kinerja Lalu-Lintas Sebagai Akibat Pembatasan Sepeda Motor Pada Kawasan Koridor Jalan Utama DKI Jakarta
10.	Studi Pengaruh Pembatasan Kendaraan Sepeda Motor di Kawasan Koridor Jalan Utama DKI Jakarta
11.	Studi Manajemen dan Rekayasa lalu-Lintas di Kota Boroko Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
12.	Studi Manajemen dan Rekayasa Lalu-Lintas Kawasan CBD (<i>Central Business District</i>) Kota Grogot Kabupaten Passer
13.	Kajian Pengembangan Manajemen Rekayasa Lalu-Lintas 3 (tiga) Jalur Kota Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi
14.	Kajian Optimalisasi Kereta Api Komuter Mebidang (Medan, Binjai, Deli Serdang) Dalam Mendukung Mobilitas Orang di Kawasan Aglomerasi Mebidang
15.	Pengaruh Pengoperasian Tol Cikapali Terhadap Jalur Pantura pada Angkutan Lebaran 2015
16.	Kajian Penataan Pasar Tumpah Guna Meningkatkan Kelancaran Lalu-Lintas di Jalur Pantai Utara Jawa Barat
17.	Pengembangan Trayek di Kota BanjarBaru
18.	Kajian <i>Supply Demand</i> BRT pada Rencana Koridor I Mataram
19.	Kajian <i>Supply Demand</i> BRT pada Rencana Koridor II Mataram
20.	Manajemen Rekayasa Lalu-Lintas Pada Simpang Empat Mall Ska Pekanbaru
21.	Revitalisasi Sungai Kandilo sebagai Lalu-Lintas Angkutan Air di Tanah Grogot Kabupaten Passer Provinsi Kalimantan Timur
22.	Analisis Kebutuhan Terminal Angkutan Barang di Kabupaten Bandung
23.	Analisis Penataan Lalu-Lintas di Jalan (Kopo) - Soreang di Kabupaten Bandung.
24.	Kajian Pengaruh Penerapan Lajur Khusus Bus Terhadap Kinerja Ruas Jalan (Rencana Penerapan Lajur Khusus Bus Trans Metro Bandung)
25.	Kajian Pengaruh Pembangunan Jalan Lingkar Tanjung Duri Terhadap Nilai Waktu dan Biaya Perjalanan di Kota Batam
26.	Analisis Dampak Lalu-Lintas Pembangunan Apartment Bliss park di Kota Batam
27.	Studi Manajemen Rekayasa Lalu-Lintas (SSA) di Kabupaten Sukabumi
28.	Studi Masterplan Pelabuhan Laut Larat dan Taniwel.
29.	Studi <i>Masterplan</i> Pelabuhan Laut Tifure dan Mangga Dua
30.	Studi <i>Masterplan</i> Pelabuhan Laut Loleojaya dan Jailolo.
31.	Studi <i>Masterplan</i> Pelabuhan Laut Dama dan Darume
32.	Studi <i>Masterplan</i> Pelabuhan Laut Bicoli dan Tapaleo
33.	Studi <i>Masterplan</i> Pelabuhan Laut Galela dan Bisui.
34.	Pengembangan Kawasan Pelabuhan Container Matui di Kabupaten Halmahera Barat
35.	Kajian Pengembangan Pelabuhan Tilamuta di Teluk Tomini Kabupaten Boalemo, Gorontalo Utara
36.	Kajian Evaluasi Pembangunan Pelabuhan Laut Tiram, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat
37.	Kajian Evaluasi Pembangunan Dermaga Pelayaran Rakyat Pelabuhan Kalianget
38.	Kajian Kelayakan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Uf Mar dan Pelabuhan Laut Weduar
39.	Usulan Pembangunan Dermaga di Karimun Jawa

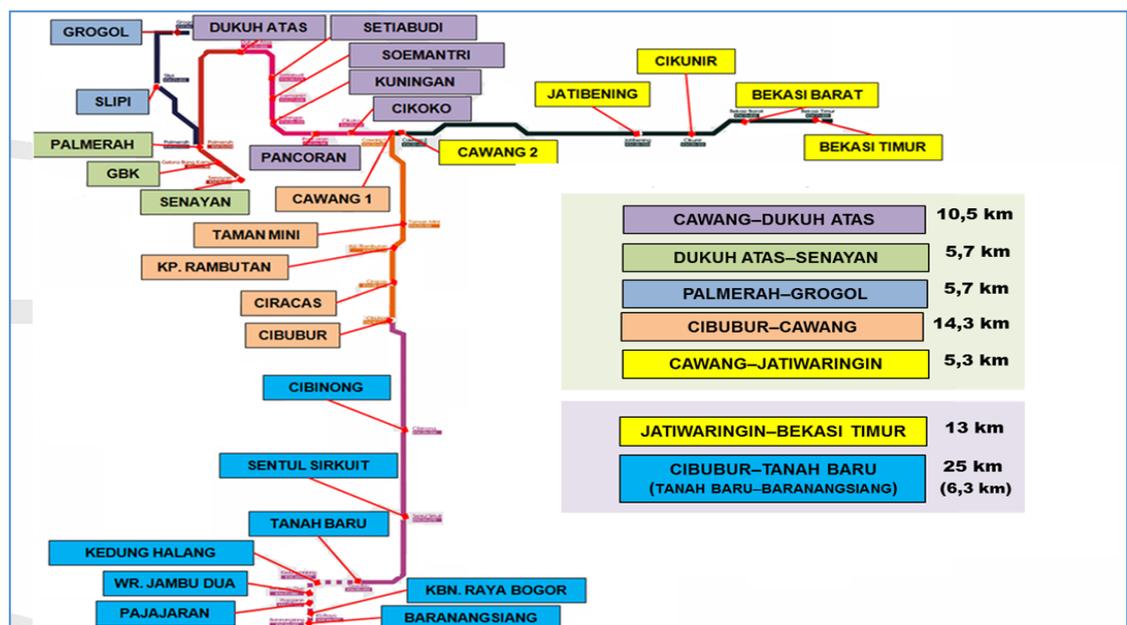
STUDI	JUDUL STUDI
40.	Kajian Peningkatan Dermaga/ Pelabuhan di Kabupaten Buton Tengah
41.	Kajian Peningkatan Pembangunan Pelabuhan Penumpang <i>Speed Boat</i> Malinau Kota, Kalimantan Utara
42.	Kajian Pembangunan Dermaga Pelabuhan Waiwadan, Nusa Tenggara Timur.
43.	Kajian Pembangunan Dermaga Kapal Cepat Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang
44.	Kajian Pembangunan Fasilitas Sarana Prasarana Terminal Penyeberangan di Kota Tual
45.	Studi Pengelolaan Lalu-Lintas Penerbangan dan Penataan Rute Penerbangan di Indonesia (Kontraktual)
46.	Penelitian <i>Supply Chain</i> dan Metoda <i>Manufacture</i> Bahan <i>Composite</i> untuk Sektor Transportasi Udara (Swakelola)
47.	Studi Pengembangan Bandar Udara Aerotropolis di Indonesia (Swakelola)
48.	Studi Evaluasi Kinerja dan Penataan Rute Angkutan Udara Perintis di Kawasan Timur (Swakelola)
49.	Studi Potensi Peningkatan Pemanfaatan Komponen Dalam Negeri (<i>Local Content</i>) Dalam Rancang Bangun Pesawat Produk Indonesia (Swakelola)
50.	Pengkajian Pengembangan dan Pembangunan Bandara UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Raden Inten II Bandar Lampung
51.	Pengkajian Rencana Pembangunan, Pengembangan dan Peningkatan Bandara Malikussalaeh Kabupaten Aceh Utara
52.	Pengkajian Revitalisasi Bandara Banding Agung di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Sumatera Selatan
53.	Pengkajian Pengembangan dan Pembangunan Bandar Udara Alas Leuser – Aceh
54.	Pengkajian Evaluasi Kebutuhan Fasilitas Terminal Kargo Bandar Udara Juwata-Tarakan
55.	Kajian Pengembangan Bandar Udara Blimbingsari Dalam Mengantisipasi Perkembangan Penumpang 5 (lima) Tahun Kedepan
56.	Kajian Pengembangan Jaringan Rute Penerbangan Bandar Udara Juwata Tarakan untuk Mendukung MP3EI
57.	Kajian Pengembangan Bandar Udara Paloh Sambas Kalimantan Barat
58.	Kajian Alih Status Sumber Daya Manusia (SDM) Pada Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) di Kelola Pihak Swasta
59.	Kajian Pengembangan Bandar Udara Pusako Anak Nagari
60.	Kajian Ketersediaan SDM dan Peralatan Navigasi Penerbangan di AirNav Gorontalo
61.	Kajian Pengembangan Bandar Udara Sampit
62.	Kajian Pembangunan Bandar Udara Maratua di Berau Kalimantan
63.	Kajian Pembangunan Terminal Baru Bandara H. AS. Hanandjoeddin
64.	Kajian Analisa Kebutuhan Area Parkir Kendaraan Bermotor di Bandar Udara Blimbingsari-Banyuwangi
65.	Pengembangan Aksesibilitas Pelabuhan Kuala Tanjung dalam Mendukung Kelancaran Arus Barang di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke Sumatera Utara;
66.	Kesiapan Transportasi Multimoda Dalam Mendukung <i>Short Sea Shipping</i> di Pulau Jawa
67.	Pengembangan Terminal Multimoda Berbasis Angkutan Kereta Api untuk Mendukung Optimalisasi Angkutan Barang di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
68.	Integrasi Pelayanan Penumpang di Simpul Transportasi Merak
69.	Pengembangan Angkutan Pemandu Moda Terminal Dhaksinarga Wonosari-Bandara Adi Sutjipto-Stasiun Tugu
70.	Pengembangan <i>Shuttle Bus</i> Destinasi Pariwisata

2. Angkutan Umum Massal Perkotaan Transportasi Perkeretaapian

Dalam meningkatkan Peran Kereta Api dalam Penyelenggaraan Angkutan Massal Perkotaan berbasis rel maka pemerintah menetapkan 5 (lima) lokasi wilayah perkotaan, di antaranya :

1) LRT Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (JBDB)

Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/ *light rail transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi. Dalam mempercepat penyelenggaraan kereta api ringan dimaksud, pemerintah menugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dengan lingkup untuk membangun prasarana perkeretaapian LRT terintegrasi dimaksud meliputi : jalur termasuk konstruksi jalur layang, stasiun dan fasilitas operasi. Dalam rangka pelaksanaan penugasan kepada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. tersebut, Menteri Perhubungan membentuk Komite Pengawas (*Oversight Committee*) yang terdiri dari unsur kementerian/ lembaga dan profesional. Ini dimaksudkan bahwa Komite Pengawas tersebut bertugas untuk membantu Menteri Perhubungan dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan penugasan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. untuk membangun prasarana LRT terintegrasi. Dengan rincian trase sebagaimana gambar dibawah ini :

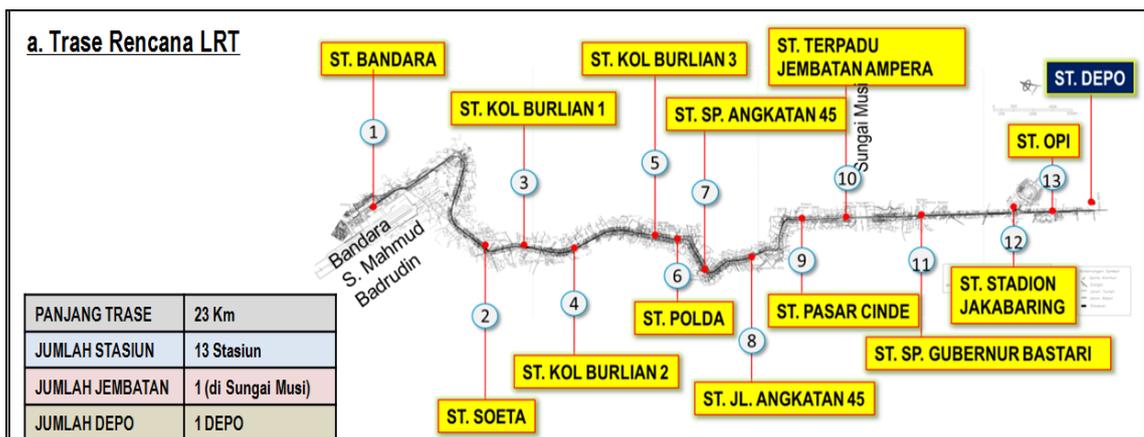


Gambar 4.21 Pembangunan Trase LRT Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (JBDB)

2) LRT Provinsi Sumatera Selatan

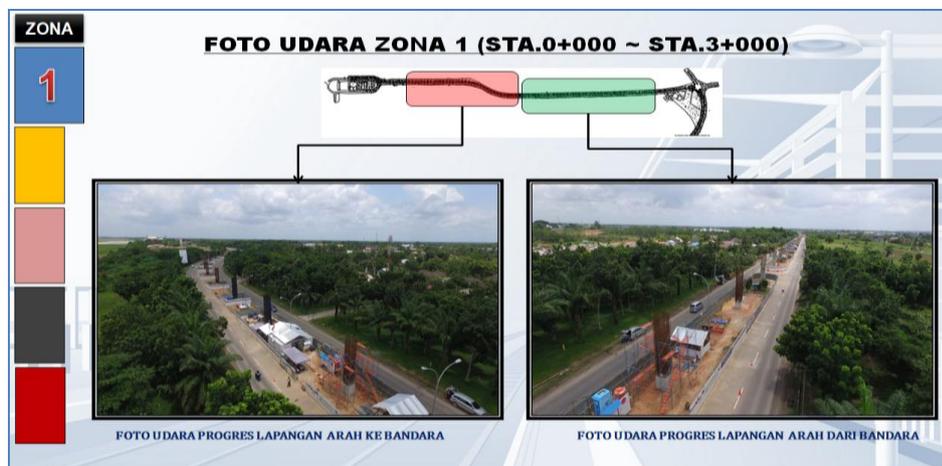
Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ *Light Rail Transit* Terintegrasi di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam mempercepat

penyelenggaraan kereta api ringan dimaksud pemerintah menugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk dengan lingkup untuk membangun prasarana perkeretaapian LRT terintegrasi dimaksud meliputi : jalur termasuk konstruksi jalur layang, stasiun dan fasilitas operasi. Selanjutnya untuk pengoperasian LRT tersebut pemerintah menugaskan kepada PT. KAI (Persero). Dalam rangka pelaksanaan penugasan kepada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. tersebut, Menteri Perhubungan membentuk Komite Pengawas (*Oversight Committee*) yang terdiri dari unsur kementerian/ lembaga dan profesional. Ini dimaksudkan bahwa Komite Pengawas tersebut bertugas untuk membantu Menteri Perhubungan dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan penugasan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. untuk membangun prasarana LRT terintegrasi. Dengan rincian trase sebagaimana gambar dibawah ini :



Gambar 4.22 Trase Rencana LRT Provinsi Sumatera Selatan

Dokumentasi progres pembangunan LRT Palembang Zona 1 s.d Zona 5 sebagaimana foto di bawah ini :



ZONA

2

FOTO UDARA ZONA 2 (STA.3+000 ~ STA.9+000)

FOTO UDARA PROGRES LAPANGAN ARAH KE SP. TJ. SI API - API

FOTO UDARA PROGRES LAPANGAN PEKERJAAN PRE BORING, PEMANCANGAN, GALIAN PILE CAP, CUTTING PILE, PENGEORAN PILE CAP

FOTO UDARA PROGRES LAPANGAN ARAH KE SIMPANG TJ. SI API - API

PROSES BOR PILE

ZONA

3

FOTO UDARA ZONA 3 (STA.9+000 ~ STA.15+000)

AREA PUNTI KAYU

AREA PALEMBANG SQUARE

PROSES PENGEORAN BORED PILE

FOTO UDARA PROGRES LAPANGAN AREA PUNTI KAYU ARAH SIMPANG POLDA

FOTO UDARA PROGRES LAPANGAN AREA KANTOR DISHUB KOMINFO ARAH SIMPANG CHARITAS

ZONA

4

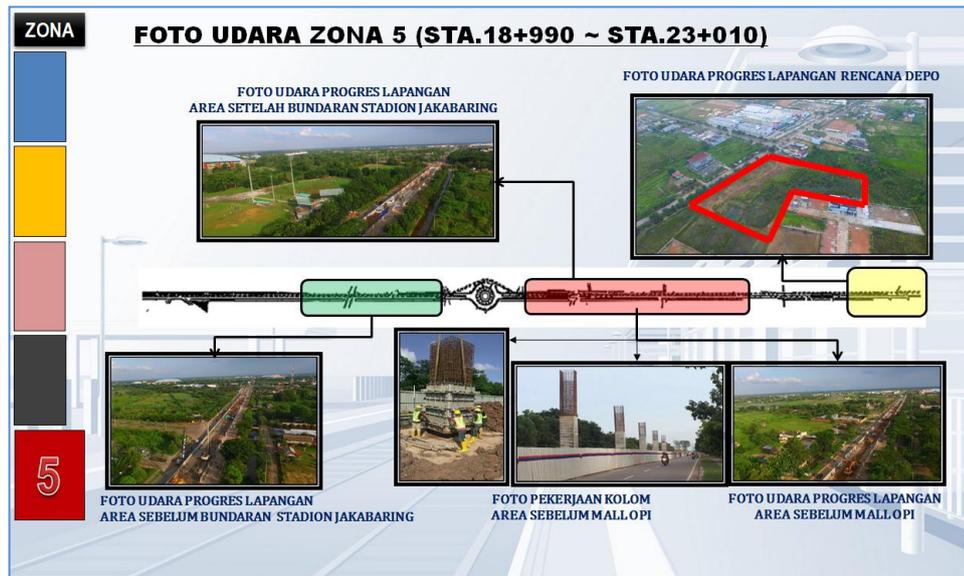
FOTO UDARA ZONA 4 (STA.15+000 ~ STA.18+990)

FOTO UDARA PROGRES LAPANGAN AREA PASAR CINDE ARAH JEMBATAN AMPERA

FOTO UDARA PROGRES LAPANGAN AREA SUNGAI MUSI

FOTO UDARA PROGRES LAPANGAN AREA PASAR CINDE ARAH JEMBATAN AMPERA

FOTO UDARA PROGRES LAPANGAN AREA POLRESTA ARAH STADION JAKABARING



Gambar 4.23 Foto udara perkembangan pembangunan LRT Palembang Zona 1 s.d Zona 5

3) KA Perkotaan Surabaya

Dalam mewujudkan proyek pembangunan KA Perkotaan Pemerintah Kota Surabaya telah dilakukan sebagai berikut:

- a) Pada tahun 2015 telah dilakukan MOU antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Walikota Surabaya untuk pembangunan Kereta Api Perkotaan Surabaya oleh Kementerian Perhubungan dengan menggunakan dana APBN,
- b) Untuk pengoperasian Kereta Api Perkotaan Surabaya direncanakan penunjukan penugasan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
- c) Tindak lanjut dari MOU Kereta Api Perkotaan Surabaya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan melakukan penyusunan Desain Kriteria Spesifikasi Tram.

BAB V

PENUTUP

Pada tahun 2015 Kementerian Perhubungan menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini juga ditunjukkan dengan berbagai prestasi yang diraih oleh Sekretariat Jenderal, beberapa diantaranya yaitu terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2014 telah dilaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Perhubungan Tahun 2014 oleh Tim Assesor Kementerian Perhubungan dan telah selesai *submit* pada tanggal 13 Juli 2015 dengan nilai indeks RB 88,17 interpretasi "Sangat Baik" dengan Pencapaian Reformasi Birokrasi dari 60,02 % menjadi 70,34 %, mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan dan hasil evaluasi SAKIP Kemenhub yang terus meningkat. Selain itu, beberapa prestasi seperti dalam bidang keterbukaan informasi publik dimana Kementerian Perhubungan memperoleh peringkat ketiga diantara Kementerian/Lembaga Negara lainnya. Terkait peningkatan performa informasi publik bagi masyarakat yaitu dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui *Contact Center* 151 atau melalui email info151@dephub.go.id. Di bidang sistem informasi, Kementerian Perhubungan juga memperoleh penghargaan atas pelaksanaan aplikasi *e-procurement* oleh LKPP terkait proses pengadaan barang/jasa dan *National Procurement Award* Tahun 2015 Kategori Komitmen Pencapaian Inpres No. 7 Tahun 2015 pada "Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015".

Masing-masing unit organisasi Kementerian Perhubungan memberikan kinerja yang baik sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja antar unit organisasi lain juga Kementerian Perhubungan secara keseluruhan. Sekretariat Jenderal yang telah memberikan dukungan administrasi, sementara Inspektorat Jenderal yang terus bekerja dengan paradigma baru dalam sistem pengawasan internal. Sehingga capaian kinerja Kementerian Perhubungan dalam periode RPJMN 2015-2019 dapat memenuhi sebagian besar target yang ditetapkan.

Kedepan, di tahun 2016, Kementerian Perhubungan perlu terus meningkatkan kinerjanya dimana pada tahun 2016 banyak hal yang perlu disiapkan, seperti Rencana Strategis Kementerian Perhubungan periode tahun 2015-2019, dimana perlu ditetapkan target pencapaian pembangunan sektor transportasi dalam mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dalam peningkatan sektor perhubungan di bidang layanan, keselamatan serta infrastruktur sarana dan prasarana; penataan organisasi Kementerian Perhubungan yang mengakomodir kebutuhan perkembangan organisasi sektor perhubungan; mempertahankan kinerja Laporan Keuangan; menyelesaikan produk hukum sektor transportasi yang belum terselesaikan; serta pemberian layanan sarana dan prasarana sektor perhubungan dalam meningkatkan kinerja layanan jasa transportasi. Dalam visi dan misinya Presiden Joko Widodo menitik beratkan pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung pencapaian Indonesia sebagai

poros maritim dunia. Selain subsektor perhubungan laut, di sini subsektor perhubungan lain juga berperan dalam pencapaian tujuan dimana sistem transportasi nasional sangat saling berkaitan satu sama lain. Hal ini juga akan semakin jelas apabila melihat transportasi sebagai satu sistem yang mendukung logistik nasional. Peningkatan kinerja subsektor perhubungan juga harus didukung dengan peningkatan unit organisasi penunjang terkait kelancaran administrasi dan birokrasi, peningkatan Sumber Daya Manusia Perhubungan, peningkatan penelitian dan pengembangan sistem transportasi, serta peningkatan kinerja pengawasan.

Semangat perubahan yang lebih menitikberatkan pada semangat bekerja untuk bangsa, diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan transportasi nasional. Sehingga diharapkan akan segera tercapai pemenuhan Layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan mampu mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta 10110

Telp: (021) 381 1308 - 350 5006 Fax. (021) 352 2338

Call Centre: 151 - www.dephub.go.id

